



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 453/vii / 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bapperida menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

- KEDUA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan kesatu Tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah;
 - d. penutup.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 JULI 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Tembusan:

1. Para Asisten dan Kabag Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.



Tahun 2025

RENJA-P

**Rencana Kerja Perubahan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan kinerja dan penganggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada tahun berjalan, meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan pengelolaan kebudayaan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Analisis terhadap program tahun berjalan menunjukkan bahwa pendekatan yang saat ini digunakan belum cukup efektif dalam mencapai target yang diinginkan. Perubahan kebijakan nasional, perkembangan teknologi pendidikan, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan yang lebih baik mendorong perlunya rencana kerja perubahan. Dengan perubahan ini, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja serta kualitas pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, penutup. Sehingga melalui Rencana Kerja perubahan ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

H. SIRAJUDDIN A. SP., M.Si

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19681231 200801 1 046



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025.....	ii
SK PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan	6
2.1. Evaluasi Renja PD Sampai Triwulan I Tahun 2025	6
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	16
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	18
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 1 SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025	
Lampiran 2 SK Penetapan Renja SKPD	
Lampiran 3 SK Pengesahan Rencana Kerja SKPD	



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)	8
Tabel III.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang	19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan menyesuaikan dengan rancangan RPJMD 2025-2029 dan astacita. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan pada tahun 2025, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan adanya pergeseran anggaran Tahun 2025 yang tentunya berdampak pada pencapaian target kinerja, sehingga dengan perubahan rencana kerja diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dalam rangka pencapaian indikator-indikator kinerja Pendidikan dan Kebudayaan demi meningkatkan kualitas dan akses layanan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 dengan menyesuaikan rancangan RPJMD 2025-2029 dan memperhatikan program prioritas astacita yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra).



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);



17. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun berjalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Untuk menyesuaikan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025.
2. Menyesuaikan pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target



kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, meliputi:

BAB I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Perubahan.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memuat Urusan/bidang, urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah.



BAB II

EVALUASI RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampai Triwulan I Tahun 2025

Setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a) Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, yang memenuhi target kinerja dan melampaui target kinerja yang direncanakan.
- b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, penyebab tercapainya dan melebihi target kinerja yang direncanakan.
- c) Implikasi/dampak yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- d) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan Perubahan Renja tahun 2025;
- b) Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.



- c) Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- d) Tujuan yang dikehendaki;
- e) Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- f) Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel II. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100%	100	%	14,71	14,71%	14,71	14,71
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100%	100	%	36	36,36%	36,36	36,36
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	2	2	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	1	1	Dokumen	1	100,00%	1	33,33
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	1	1	Dokumen	1	100,00%	1	33,33
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	1	1	Laporan	1	100,00%	1	33,33
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	4	4	Laporan	1	25,00%	1	8,33
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100,00%	100	%	20,30%	0,20%	0,203	0,203



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113400	Orang/Bulan	37600	37800	Orang/bulan	98	0,26%	98	0,09
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	Dokumen	12	12	Dokumen	3	25,00%	3	8,33
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	1	1	Laporan	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	2	2	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100%	100	%	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	20	20	Paket	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	30	30	Laporan	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100%	100	%	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	0	1	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	1	1	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	6	20	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100%	100	%	51,67	51,67%	51,67	51,67
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600	Laporan	1180	1200	Laporan	20	1,67%	20	0,56
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	12	12	Laporan	3	25,00%	3	8,33
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	12	12	Laporan	3	25,00%	3	8,33
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100%	100	%	0	0,00%	0	0,00



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135	Unit	18	45	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34	Unit	17	17	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	100	%	67,28%	100	%	0%	0,00%	0	0,00
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	100	%	96,30%	100	%	0%	0,00%	0	0,00
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	100	%	86,70%	100	%	0%	0,00%	0	0,00
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100	%	75,61%	100	%	0%	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD	0,05	%	0,9%	0,1	%	0	0,00%	0	0,00
		Angka Kelulusan SD	100	%	99,26%	100	%	0%	0,00%	0	0,00
		Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik	75	%	60,27%	75	%	0%	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12	ruang	3	4	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	21	Ruang	0	7	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	312	Unit	75	104	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	42	Paket	14	14	Paket	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30.000	Peserta Didik	10000	10000	Peserta Didik	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	198	Peserta Didik	66	66	Peserta Didik	39	59,09%	39	19,70
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	705	Satuan Pendidikan	235	235	Satuan Pendidikan	236	100,43%	236	33,48
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	705	Orang	235	235	Orang	0	0,00%	0	0,00



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	16900	Paket	5300	5600	Paket	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	76	Ruang	3	25	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	705	Satuan Pendidikan	235	235	Satuan Pendidikan	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	36	Ruang	42	12	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP	0,25	%	0,53%	0,3	%	0	0,00%	0	0,00
		Persentase Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik	80	%	63,04%	80	%	0%	0,00%	0	0,00
		Angka Kelulusan SMP	100	%	100%	100	%	0%	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9	Ruang	0	3	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15	Ruang	0	5	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6	Ruang	0	2	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	Ruang	5	4	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	6	Unit	0	2	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48	Unit	22	16	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34	ruang	25	10	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3	Ruang	0	1	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3	Paket	1	1	Paket	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9	Paket	3	3	Paket	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10.500	Peserta Didik	3500	3500	Peserta Didik	0	0,00%	0	0,00



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	297	Peserta Didik	99	99	Peserta Didik	42	42,42%	42	14,14
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	147	Satuan Pendidikan	49	49	Satuan Pendidikan	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	147	Orang	49	49	Orang	49	100,00%	49	33,33
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	147	Orang	49	49	Orang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	147	Satuan Pendidikan	49	49	Satuan Pendidikan	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	Ruang	0	2	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11100	Paket	3500	3700	Paket	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Ruang	0	3	Ruang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola	235	Unit	226	235	Unit	26	11,06%	26	11,06
		Persentase PAUD Terakreditasi	67,23	%	78,03%	62,97	%	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	96	Unit	32	32	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34	Unit	14	10	Unit	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	12	paket	4	4	Paket	0	0,00%	0	0,00



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	32875	Peserta Didik	10875	11000	Peserta Didik	5438	49,44%	5438	16,54
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	705	Satuan Pendidikan	235	235	Satuan Pendidikan	118	50,21%	118	16,74
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	705	Satuan Pendidikan	235	235	Satuan Pendidikan	223	94,89%	223	31,63
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	705	Orang	235	235	Orang	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dibina	6	Lembaga	6	6	Lembaga	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18	Satuan Pendidikan	6	6	Satuan Pendidikan	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18	Satuan Pendidikan	6	6	Satuan Pendidikan	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	6000	Peserta Didik	2000	2000	Peserta Didik	0	0,00%	0	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	98	%	88,26%	97	%	0	0,00%	0	0,00



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4850	Orang	4850	4750	Orang	0	0,00%	0	0,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	Dokumen	1	1	Dokumen	0	0,00%	0	0,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150	Laporan	50	50	Laporan	0	0,00%	0	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	100	%	100%	100	%	125	125,00%	125	125,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan	4	Komunitas	4	4	Komunitas	4	100,00%	4	100,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12	Objek	4	4	Objek	6	150,00%	6	50,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	22,5	%	18%	20	%	100	500,00%	100	444,44
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang Didata	3	Laporan/Dokumen	3	3	Laporan / Dokumen	3	100,00%	3	100,00
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	6	Dokumen	3	2	Dokumen	2	100,00%	2	33,33
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	45	%	40%	42,5	%	0	0,00%	0	0,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	45	cagar Budaya	25	35	Cagar Budaya	0	0,00%	0	0,00
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30	Objek	10	10	Objek	0	0,00%	0	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola	31	Cagar Budaya	27	29	Cagar Budaya	0	0,00%	0	0,00



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6	Objek	2	2	Objek	0	0,00%	0	0,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	99	%	100%	100	%	0,15	0,15%	0,15	0,15
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten	800	Orang	200	400	Orang	60	15,00%	60	7,50
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	4230	Unit	1400	1410	Unit	200	14,18%	200	4,73
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	3	Unit	1	1	Unit	0	0,00%	0	0,00



Melihat dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, masih banyak kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasinya masih rendah hal ini yang perlu mendapat perhatian dan strategi pelaksanaan yang tepat sasaran.

Dari 7 Program, 16 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan yang direncanakan, yang mencapai tingkat realisasi minimal 25% sampai akhir Triwulan I (Maret 2025) adalah 16 Sub kegiatan, selebihnya belum terealisasi dan juga terealisasi di bawah 25%. Ada pula kegiatan yang memang belum terlaksana karena jadwal pelaksanaanya di Triwulan II, III dan IV. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait, dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung realisasi sejumlah kegiatan tersebut. Untuk sejumlah target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tingkat pencapaiannya belum mencapai minimal 25% pada triwulan I tahun 2025, dilakukan rasionalisasi sebagaimana telah dilakukan *refocusing* anggaran. Serta masih diperlukan upaya yang lebih keras, fokus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan pada tahun 2025.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1). SPM pendidikan di kab. Sidenreng Rappang belum terpenuhi. Termasuk belum tersedianya data pemenuhan SPM yang *valid* dan *reliable*.
- 2). Masih rendahnya angka rata - rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang. 8,21 tahun pada tahun 2024. Artinya secara rata-rata penduduk Kab. Sidenreng Rappang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,21 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.
- 3). Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 13,03 tahun pada tahun 2024. Artinya penduduk Kab. Sidenreng Rappang diharapkan menamatkan pendidikan sampai jenjang SMA dan kuliah sampai semester 3.



- 4). Masih terdapat guru yang belum berijazah S1/D4 dan masih banyak guru yang belum memenuhi Standar Kompetensi.
- 5). Secara umum masih terjadi kekurangan Guru PNS pada sekolah-sekolah 3T. dan juga kurangnya Tenaga Pengawas Sekolah.
- 6). Perlu kerja sama berkelanjutan antara Stakeholder untuk menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang layak.
- 7). Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Masyarakat butuh langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan budaya lokal sehingga Program Wajib Belajar 12 tahun bisa terlaksana secara maksimal.
- 8). Masih ada cagar budaya yang tidak terdata dan tidak terpelihara dengan baik.
- 9). Masih belum tersedia data ATS yang valid dan reliabel.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Perubahan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Bab ini memuat tentang Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, adalah :



Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					398.660.056.000				381.722.006.000	
1	Urusan Pemerintah yang Wajib dan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				396.971.256.000				379.735.376.600	
1.01	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan				396.971.256.000				379.735.376.600	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene sidenreng	100%	302.465.880.705		Pangkajene sidenreng	100%	302.796.763.500	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene sidenreng	100%	46.000.000		Pangkajene sidenreng	100%	30.506.700	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene sidenreng	2 Dokumen	3.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	2 Dokumen	2.950.200	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	2.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	1.996.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	2.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	1.961.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	3.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	2.954.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	3.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	2.997.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	31.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	15.715.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene sidenreng	4 Dokumen	2.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	4 Dokumen	1.933.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene sidenreng	100%	301.579.307.705		Pangkajene sidenreng	100%	301.576.316.300	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene sidenreng	37800 Orang/bulan	301.556.307.705	ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	37800 Orang/bulan	301.556.308.000	ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pangkajene sidenreng	12 Dokumen	19.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	12 Dokumen	16.063.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Laporan	2.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Laporan	1.995.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	2.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	1.950.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene sidenreng	100%	252.862.000		Pangkajene sidenreng	100%	130.486.500	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	20 Paket	3.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	20 Paket	3.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene sidenreng	30 Laporan	249.862.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	30 Laporan	127.486.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pangkajene sidenreng	100%	29.654.000		Pangkajene sidenreng	100%	237.681.000	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	-	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Unit	48.720.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	20 Unit	29.654.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	20 Unit	188.961.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene sidenreng	100%	486.063.000		Pangkajene sidenreng	100%	710.364.000	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene sidenreng	1200 Laporan	1.515.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1200 Laporan	1.515.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	105.048.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	110.448.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	379.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	598.401.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pangkajene sidenreng	100%	71.994.000		Pangkajene sidenreng	100%	111.409.000	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkajene sidenreng	45 Unit	71.994.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	45 Unit	71.994.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangkajene sidenreng	-	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	17 Unit	39.415.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	Tersebar	100%	86.041.925.295		Tersebar	100%	68.708.104.500	
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD		100%				100%		
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP		100%				100%		
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan		100%				100%		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD	Tersebar	0,10%	49.759.945.700		Tersebar	0,10%	36.117.795.500	
		Angka Kelulusan SD		100%				100%		
		Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik		75%				75%		
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Tersebar	104 Unit	9.597.601.200	Sekolah	Tersebar	104 Unit	7.417.200.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Tersebar	14 Paket	277.711.000	Sekolah	Tersebar	14 Paket	277.711.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Tersebar	10000 Peserta Didik	25.542.500	Sekolah	Tersebar	10000 Peserta Didik	12.576.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tersebar	66 Peserta Didik	318.881.000	Pesrta Didik	Tersebar	66 Peserta Didik	230.751.500	Pesrta Didik
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	28.158.400.000	Sekolah	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	28.158.400.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersebar	235 Orang	29.100.000	Sekolah	Tersebar	235 Orang	8.928.000	Sekolah



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tersebar	1 Dokumen	11.300.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Dokumen	684.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	52.710.000	Pesrta Didik	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	11.545.000	Pesrta Didik
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP	Tersebar	0,30%	20.929.722.300		Tersebar	0,30%	16.821.905.900	
		Persentase Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik		80,0%				80,0%		
		Angka Kelulusan SMP		100%				100%		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Tersebar	16 Unit	8.649.846.800	Sekolah	Tersebar	16 Unit	4.694.216.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Tersebar	3500 Peserta Didik	14.350.000	Sekolah	Tersebar	3500 Peserta Didik	4.978.800	Sekolah
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tersebar	99 Peserta Didik	322.054.500	Pesrta Didik	Tersebar	99 Peserta Didik	212.258.700	Pesrta Didik
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	11.895.000.000	Sekolah	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	11.895.000.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersebar	49 Orang	24.000.000	Sekolah	Tersebar	49 Orang	6.564.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	24.471.000	Sekolah	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	8.888.400	Sekolah
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola	Tersebar	235 Unit	13.400.257.295		Tersebar	235 Unit	10.978.403.800	
		Persentase PAUD Terakreditasi		62,97%				62,97%		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Tersebar	32 Unit	6.769.103.295	Sekolah	Tersebar	32 Unit	4.287.908.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Tersebar	4 Paket	312.054.000	Sekolah	Tersebar	4 Paket	312.054.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	337.900.000	Sekolah	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	415.300.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	5.926.800.000	Sekolah	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	5.926.800.000	Sekolah



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tersebar	1 dokumen	16.100.000	Sekolah	Tersebar	1 dokumen	8.410.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Tersebar	1 Dokumen	38.300.000	Sekolah	Tersebar	1 Dokumen	27.931.800	Sekolah
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dibina	Tersebar	6 Lembaga	1.952.000.000		Tersebar	6 Lembaga	4.789.999.300	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	140.000.000	Lembaga/PKBM/LKP	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	2.407.999.300	Lembaga/PKBM/LKP
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	1.812.000.000	Lembaga/PKBM/LKP	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	1.812.000.000	Lembaga/PKBM/LKP
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Tersebar	-	-	Lembaga/PKBM/LKP	Tersebar	1 Dokumen	570.000.000	Lembaga/PKBM/LKP
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Tersebar	97%	8.463.450.000		Tersebar	97%	8.230.508.600	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersebar	4750 Orang	8.463.450.000		Tersebar	4750 Orang	8.230.508.600	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersebar	50 Laporan	8.463.450.000	PTK	Tersebar	50 Laporan	8.230.508.600	PTK
2	Urusan Pemerintah yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				1.688.800.000				1.986.629.400	
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				1.688.800.000				1.986.629.400	



RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Tersebar	100%	516.920.000		Tersebar	100%	797.608.500	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan	Tersebar	4 Komunitas	516.920.000		Tersebar	4 Komunitas	797.608.500	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Tersebar	4 objek	516.920.000	Pelaku Seni	Tersebar	4 objek	797.608.500	Pelaku Seni
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	Tersebar	20,0%	56.080.000		Tersebar	20,0%	146.575.900	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang Didata	Tersebar	3 Dokumen/Laporan	56.080.000		Tersebar	3 Dokumen/Laporan	146.575.900	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersebar	2 Dokumen	56.080.000	Masyarakat	Tersebar	2 Dokumen	146.575.900	Masyarakat
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Tersebar	42,5%	754.300.000		Tersebar	42,5%	724.869.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Tersebar	35 Cagar Budaya	42.300.000		Tersebar	35 Cagar Budaya	15.554.000	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Tersebar	10 Objek	42.300.000	Pemda SIDRAP	Tersebar	10 Objek	15.554.000	Pemda SIDRAP
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola	Tersebar	29 Cagar Budaya	712.000.000		Tersebar	29 Cagar Budaya	709.315.000	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Tersebar	2 Objek	712.000.000	Pemda SIDRAP	Tersebar	2 Objek	709.315.000	Pemda SIDRAP
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	Pangkajenne sidenreng	100%	361.500.000		Pangkajenne sidenreng	100%	317.576.000	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten	Pangkajenne sidenreng	400 Orang	361.500.000		Pangkajenne sidenreng	400 Orang	317.576.000	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pangkajenne sidenreng	1410 Unit	130.500.000	Pemda SIDRAP	Pangkajenne sidenreng	1410 Unit	100.895.000	Pemda SIDRAP
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Pangkajenne sidenreng	1 Unit	231.000.000	Pemda SIDRAP	Pangkajenne sidenreng	1 Unit	216.681.000	Pemda SIDRAP



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang urusan Pendidikan Dan Kebudayaan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 tersebut dan menyesuaikan dengan rancangan RPJMD 2025-2029 dan program prioritas dalam asta cita. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih sering belum sepahaman.
4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.



5. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten, RKPD-Perubahan dan Renstra Dinas).
6. Renja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 bisa menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang urusan Pendidikan dan kebudayaan dalam rangka ***Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kualitas Budaya Lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang.***

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

H. SIRAJUDDIN A. SP., M.Si

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19681231 200801 1 046



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

**PEMERIKSAAN
KESEHATAN
GRATIS**



**UNTUK
SELURUH ANGGOTA KELUARGA**

**DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

HALAMAN VERIFIKASI

Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025

Catatan :

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Perubahan Renja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2026, dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Sidenreng Rappang, 7 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidenreng Rappang,



ABDULLAH, S.Si, M. Si., A.Pt

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19760824 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN,

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 80/ 78 /DINKES/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan maksud dan tujuan menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Sidenreng Rappang Tahun 2025-2026 terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan ke dalam Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2025;
- b. bahwa Perubahan Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja RKA/DPA dan sebagai penuntun pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya selama tahun lima tahun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, tentang Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
17. Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang

Pada Tanggal, 3 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidenreng Rappang,



M. MUDDIN, S.Si, M. Si., A.Pt

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19760824 200901 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Judul	I
Halaman Verifikasi.....	II
Kata Pengantar.....	III
Keputauas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor / /V/2025/DINKESTentang Perubahan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng rappang tahun 2025.....	IV
Daftar Isi	IX
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang,	1
1.2. Landasan Hukum,	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1. Evaluasi Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	11
2.2. Isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	66
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	69
BAB IV. PENUTUP.	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan Renja Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada dinas kesehatan, Rumah sakit dan puskesmas.

Dokumen Perubahan Renja selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yaitu **“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, proses Perubahan Renja Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dilakukan dengan mendasarkan pada:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 meliputi:

- a) Penyusunan rancangan Perubahan Renja;
- b) Perumusan rancangan akhir perubahan Renja; dan
- c) Penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025

selanjutnya menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi POKIR DPRD.

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kewajiban menyusun dokumen Perubahan Renja. Dokumen Perubahan Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Sidenreng Rappang dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 86);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
 24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan maksud:

- 1) Sebagai bahan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah:

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah. dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1. 2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

1. 3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

1. 4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

2. 1 Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

2. 2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan dengan format table.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel T-C.2.9 berikut ini.

Table T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
	DINAS KESEHATAN								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	1 Laporan	25%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25%	4 Laporan	25%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	648 Orang/ bulan	648 Orang/ bulan	648 Orang/ bulan	648 Orang/ bulan	25%	648 Orang/ bulan	25%
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	1 Laporan	25%
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	1 Laporan	25%
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	-	0%	-	0%
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	0%	-	0%
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	-	0%	-	0%
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	0%	-	0%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	0%	-	0%
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1 Paket	25%	1 Paket	25%
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	0%	-	0%
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	0%	-	0%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25%	1 Paket	25%
1.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	1 Laporan	25%
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25%	1 Unit	25%
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25%	1 Unit	25%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	1 Laporan	25%
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	1 Laporan	25%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	245 Unit	245 Unit	245 Unit	65 Unit	25%	65 Unit	25%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345 Unit	345 Unit	345 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1 Unit	25%	1 Unit	25%
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25%	1 Unit	25%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	25%	1 Unit	25%
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	25%	1 Unit	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10=(9/4*100)
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2 Unit	25%	2 Unit	25%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 Unit	14 Unit	14 Unit	4 Unit	25%	14 Unit	25%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25%	1 Paket	25%
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	230 Keluarga	230 Keluarga	230 Keluarga	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25%	1 Paket	25%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.008 Orang	6.008 Orang	6.008 Orang	1.502 Orang	25%	1.502 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.720 Orang	6.720 Orang	6.720 Orang	1.680 Orang	25%	1.680 Orang	25%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	5.551	5.551	5.551	1.387	25%	1.387	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
	Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.050 Orang	25.050 Orang	25.050 Orang	6.262 Orang	25%	6.262 Orang	25%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.784 Orang	54.784 Orang	54.784 Orang	13.696 Orang	25%	13.696 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	194.991 Orang	194.991 Orang	194.991 Orang	4.874 Orang	25%	4.874 Orang	25%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.102 Orang	21.102 Orang	21.102 Orang	5.275 Orang	25%	5.275 Orang	25%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.860 Orang	17.860 Orang	17.860 Orang	4.465 Orang	25%	4.465 Orang	25%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.799 Orang	2.799 Orang	2.799 Orang	699 Orang	25%	699 Orang	25%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	545 Orang	545 Orang	545 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.877 Orang	5.877 Orang	5.877 Orang	1.469 Orang	25%	1.469 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.600 Orang	7.600 Orang	7.600 Orang	1.900 Orang	25%	1.900 Orang	25%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	4 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	231 Orang	231 Orang	231 Orang	231 Orang	25%	231 Orang	25%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1.550 Orang	1.550 Orang	1.550 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	4 Paket	25%	4 Paket	25%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	870 Orang	870 Orang	870 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	350 Orang	350 Orang	350 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	990 Orang	990 Orang	990 Orang	990 Orang	25%	990 Orang	25%
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan	4 Tatanan	4 Tatanan	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	4 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terbit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	19 Unit	19 Unit	19 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	14 Unit	14 Unit	14 Unit	4 Unit	25%	4 Unit	25%
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	85 %	85 %	85 %	25%	25%	25%	25%
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki STR di Fasilitas Mendapatkan SIP	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150 Orang	150 Orang	150 Orang	-	0%	-	0%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Yang Mendapat Sertifikat	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Pengawasan Dan Sertifikt Produksi Pangan, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) Yang Mendapat Pengawasan Dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	105 Unit	105 Unit	105 Unit	-	0%	-	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas Yang Melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga Yang Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat Di Masyarakat	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	106 Keluarga	106 Keluarga	106 Keluarga	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
	RSUD ARIFIN NU'MANG								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 0	0 0	0 0	-	0%	-	0%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
	RSUD NENE MALLOMO								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %			100 %	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	-	0%	-	0%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	43 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	85 %	85 %	85 %	0%	0%	0%	0%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	0%	-	0%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	627 Orang	627 Orang	627 Orang	-	0%	-	0%
	UPT PUSKESMAS BELAWAE								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90 Orang	90 Orang	90 Orang	25 Orang	25%	25 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86 Orang	86 Orang	86 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82 Orang	82 Orang	82 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 Orang	382 Orang	382 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang	732 Orang	732 Orang	133 Orang	25%	133 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3097 Orang	3097 Orang	3097 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	684 Orang	684 Orang	684 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1284 Orang	1284 Orang	1284 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44 Orang	44 Orang	44 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang	11 Orang	3 Orang	25%	3 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	92 Orang	92 Orang	92 Orang	23 Orang	25%	23 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	107 Orang	107 Orang	107 Orang	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	16 Orang	25%	16 Orang	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1 Orang	25%	1 Orang	25%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
	UPT PUSKESMAS KULO								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	12 Unit	12 Unit	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	270 Orang	271 Orang	81 Orang	25%	81 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	216 Orang	216 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	250 Orang	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	960 Orang	960 Orang	960 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2200 Orang	2200 Orang	2200 Orang	735 Orang	25%	735 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9195 Orang	9195 Orang	9195 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2031 Orang	2031 Orang	2031 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3817 Orang	3817 Orang	3817 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	140 Orang	140 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	13 Orang	13 Orang	4 Orang	25%	4 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	192 Orang	192 Orang	192 Orang	48 Orang	25%	48 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	204 Orang	204 Orang	204 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14375 Orang	14375 Orang	14375 Orang	3600 Orang	25%	1 Unit Kerja	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	140 Orang	140 Orang	140 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	12 Orang	12 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	1 Unit Kerja	3 Dokumen
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100%	100%	100%	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1038 Orang	1038 Orang	1038 Orang	355 Orang	25%	355 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	991 Orang	991 Orang	991 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	944 Orang	944 Orang	944 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4377 Orang	4377 Orang	4377 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3144 Orang	3144 Orang	832 Orang	3145 Orang	25%	3145 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35080 Orang	35080 Orang	35080 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5724 Orang	5724 Orang	5724 Orang	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3440 Orang	3440 Orang	3440 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	520 Orang	520 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang	126 Orang	126 Orang	39 Orang	25%	39 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	155 Orang	155 Orang	155 Orang	36 Orang	25%	36 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1550 Orang	1550 Orang	1550 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	128 Orang	128 Orang	128 Orang	31 Orang	25%	31 Orang	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Orang	50 Orang	50 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56 Orang	56 Orang	56 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	118 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS LAWAWOI								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	745 Orang	745 Orang	187 Orang	25%	187 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	745 Orang	745 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	576 Orang	576 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2320 Orang	2320 Orang	2320 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5568 Orang	5568 Orang	5568 Orang	1399 Orang	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25232 Orang	25232 Orang	25232 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5231 Orang	5231 Orang	5231 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2323 Orang	2323 Orang	2323 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	367 Orang	367 Orang	367 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	65 Orang	18 Orang	25%	18 Orang	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	673 Orang	673 Orang	673 Orang	190 Orang	25%	190 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	962 Orang	962 Orang	962 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	309 Orang	25%	309 Orang	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	53 Orang	53 Orang	53 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 Orang	75 Orang	75 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS MANISA								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0%	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	366 Orang	367 Orang	90 Orang	0.25	90 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6750 Orang	6750 Orang	6750 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3612 Orang	3612 Orang	3612 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25100 Orang	25100 Orang	25100 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54992 Orang	54992 Orang	54992 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	195092 Orang	195092 Orang	195092 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	0%	-	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17895 Orang	17895 Orang	17895 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2876 Orang	2876 Orang	2876 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	540 Orang	540 Orang	540 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5999 Orang	5999 Orang	5999 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7400 Orang	7400 Orang	7400 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0 Orang			0 Orang	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen			0 Dokumen	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	20 Orang	25%	20 Orang	25%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang			0 Orang	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS BILOKKA								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	210 Orang	210 Orang	210 Orang	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	2604 Dokumen	2604 Dokumen	2604 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	526 Dokumen	526 Dokumen	526 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS LANCIRANG								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	4 Orang	25%	4 Orang	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
	UPT PUSKESMAS BARANTI								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	300 Orang	80 Orang	25%	80 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	300 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	100 Orang	30 Orang	25%	30 Orang	25%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	100 Orang	30 Orang	25%	30 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	100 Orang	30 Orang	25%	30 Orang	25%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	3 Orang	25%	3 Orang	25%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	0%	0%	0%	0%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
	UPT PUSKESMAS BARUKKU								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6065 Orang	6065 Orang	6065 Orang	150 Orang	25%	150 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6750 Orang	6750 Orang	6750 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5612 Orang	5612 Orang	5612 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25100 Orang	25100 Orang	25100 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54992 Orang	54992 Orang	54992 Orang	1532 Orang	25%	1532 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	195092 Orang	195092 Orang	195092 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17895 Orang	17895 Orang	17895 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2876 Orang	2876 Orang	2876 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	540 Orang	540 Orang	540 Orang	60 Orang	25%	60 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5999 Orang	5999 Orang	5999 Orang	1580 Orang	25%	1580 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7400 Orang	7400 Orang	7400 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	3 Orang	25%	3 Orang	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	252 Orang	252 Orang	252 Orang	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1532 Orang	25%	1532 Orang	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1532 Orang	25%	1532 Orang	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	850 Orang	850 Orang	850 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS DONGI								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	20 Unit	20 Unit	20 Unit	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	263 Orang	263 Orang	263 Orang	67 Orang	25%	67 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	251 Orang	251 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	239 Orang	239 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1221 Orang	1221 Orang	1221 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2148 Orang	2148 Orang	2148 Orang	679 Orang	25%	679 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8976 Orang	8976 Orang	8976 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1982 Orang	1982 Orang	1982 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3726 Orang	3726 Orang	3726 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131 Orang	131 Orang	131 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	30 Orang	679 Orang	25%	679 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang	254 Orang	254 Orang	679 Orang	25%	679 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	340 Orang	340 Orang	340 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25%	25%	25%	25%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5958 Orang	5958 Orang	5958 Orang	67 Orang	25%	67 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6700 Orang	6700 Orang	6700 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5414 Orang	5414 Orang	5414 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2495 Orang	2495 Orang	2495 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54670 Orang	54670 Orang	54670 Orang	67 Orang	25%	67 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	194892 Orang	194892 Orang	194892 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20907 Orang	20907 Orang	20907 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17810 Orang	17810 Orang	17810 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2768 Orang	2768 Orang	2768 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang	600 Orang	67 Orang	25%	67 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5839 Orang	5839 Orang	5839 Orang	67 Orang	25%	67 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7663 Orang	7663 Orang	7663 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS EMPAGAE								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	405 Orang	405 Orang	107 Orang	25%	107 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	375 Orang	375 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 Orang	352 Orang	352 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1630 Orang	1630 Orang	1630 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3166 Orang	3166 Orang	3166 Orang	107 Orang	25%	107 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13234 Orang	13234 Orang	13234 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2922 Orang	2922 Orang	2922 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5492 Orang	5492 Orang	5492 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193 Orang	193 Orang	193 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang	47 Orang	47 Orang	107 Orang	25%	107 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	389 Orang	389 Orang	389 Orang	107 Orang	25%	107 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	493 Orang	493 Orang	493 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	107 Dokumen	107 Dokumen	107 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	24 Dokumen	25%	24 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	64 Dokumen	64 Dokumen	64 Dokumen	17 Dokumen	25%	17 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	22 Dokumen	25%	22 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	48 Orang	48 Orang	24 Orang	25%	24 Orang	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	47 Orang	47 Orang	47 Orang	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22 Dokumen	25%	22 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang	4 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan usia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
	UPT PUSKESMAS RAPPANG								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25%	25%	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	608 Orang	608 Orang	608 Orang	153 Orang	25%	153 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	581 Orang	581 Orang	581 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205 Orang	205 Orang	205 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205 Orang	205 Orang	205 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340 Orang	340 Orang	340 Orang	87 Orang	25%	87 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	302 Orang	302 Orang	302 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203 Orang	203 Orang	203 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	304 Orang	304 Orang	304 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	530 Orang	530 Orang	530 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	43 Orang	43 Orang	13 Orang	25%	13 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	23 Orang	23 Orang	7 Orang	25%	7 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54 Orang	54 Orang	54 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	0%	Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	2234 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	345 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	213 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	0%	Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	564 Orang	564 Orang	564 Orang	132 Orang	25%	132 Orang	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	564 Orang	564 Orang	564 Orang	Dokumen	0%	Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32 Orang	32 Orang	32 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32 Orang	32 Orang	32 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
	UPT PUSKESMAS AMPARITA								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25%	1 Unit Kerja	25%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	0.14 100 Rasio %	0.14 100 Rasio %	0.14 100 Rasio %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	25%	0 Orang	25%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	3 Orang	25%	3 Orang	25%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) S/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2025	
					Target Renja Dinkes	Realisasi Renja Dinkes	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	10= (9/4*100)
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	25%	0 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75 %	75 %	75 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	25%

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai akhir Triwulan satu tahun 2025, semua program/kegiatan/Subkegiatan sudah dilaksanakan secara fisik berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan, yang harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penentuan strategis dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan isu – isu di bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia
2. Peningkatan program pengendalian masalah kesehatan ibu, anak dan remaja
3. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
4. Peningkatan kemitraan swasta, peran lintas sektor dan pelayanan gizi masyarakat (posyandu, poskestren, poskesdes, dll)
5. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
6. Peningkatan penanganan dan pengendalian bencana dan kejadian luar biasa (KLB)
7. Peningkatan akses air minum dan sanitasi berkualitas dan memenuhi syarat
8. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) melalui penerapan 5 pilar
9. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber binatang
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan imunisasi
11. Peningkatan pengawasan dan pembinaan TTU/TPM
12. Peningkatan ketersediaan, pemerataan keterjangkauan obat dan alkes

13. Peningkatan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien termasuk penggunaan obat yang rasional
14. Peningkatan pengawasan obat, alkes, PKRT, obat tradisional, kosmetik dan makanan yang beredar termasuk pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
15. Peningkatan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia
16. Peningkatan Capaian PHBS , Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan
17. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor
18. Pengembangan JKN melalui :
 - a. Peningkatan Fasyankes.
 - b. Pemenuhan SDM kesehatan baik kualitas maupun kuantitas dan distribusinya.
19. Perbaikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan
20. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rujukan
21. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan merata
22. Peningkatan manajemen dan system informasi kesehatan
23. Peningkatan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
24. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan jiwa
25. Penurunan jumlah rata – rata anak perkeluarga menjadi 2 orang
26. Mengatur jarak kelahiran pada masyarakat
27. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur

Berdasarkan isu – isu tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor dalam pelayanan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta peningkatan capaian PHBS.
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan Bencana/KLB, Kesehatan Matra dan Surveilans epidemiologi dan Kualitas air minum.
3. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan pembinaan / pengawasan TTU/TPM
4. Peningkatan ketersediaan obat, alkes dan pengawasan sediaan farmasi, alkes, PKRT, dan makanan, serta upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia

5. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur
6. Pengembangan JKN melalui :
 - a. Peningkatan fasilitas yankes dan kualitas pelayanan yang menyeluruh
 - b. Peningkatan SDM Kesehatan yang berkualitas dan merata
 - c. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan secara menyeluruh
7. Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan serta sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang kesehatan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
2. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program, 18 kegiatan dan 113 Sub kegiatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebesar Rp. 333.753.627.000,00,- yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana termuat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Table T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Dina Kesehatan Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KESEHATAN				120,064,500,234				137,915,530,758	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				120,064,500,234				137,915,530,758	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				120,064,500,234				137,915,530,758	
36893	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	120,064,500,234			100 %	137,915,530,758	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	58,776,000			100 %	100,743,800	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Watang Pulu, Batu Lappa	4 Dokumen	21,281,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	4 Dokumen	22,120,500	ASN Dinkes
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	5,067,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	18,538,500	ASN Dinkes
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	5,067,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	7,746,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	5,067,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	6,515,800	ASN Dinkes
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	5,067,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	5,188,000	ASN Dinkes

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	5,067,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	16,085,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Watang Pulu, Batu Lappa	4 Laporan	12,160,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	4 Laporan	24,550,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	111,762,416,234			100 %	132,838,996,200	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Watang Pulu, Batu Lappa	648 Orang/ bulan	111,661,077,234	ASN Dinkes, RS dan Puskesmas	Watang Pulu, Batu Lappa	648 Orang/ bulan	132,773,637,000	ASN Dinkes, RS dan Puskesmas
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	15,201,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	10,531,300	ASN Dinkes
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	7,600,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	15,201,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	17,983,800	ASN Dinkes
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	7,600,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	40,536,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	36,844,100	ASN Dinkes
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	98,806,000			100 %	-	
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	7,600,000	ASN Dinkes	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan		100 %	36,480,000					
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	9,120,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	9,120,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	9,120,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	9,120,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	203,366,000			100 %	9,460,000	
1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	30,000,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	30,000,000	ASN Dinkes	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	30,000,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	25,335,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	9,460,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Watang Pulu, Batu Lappa	5 Orang	25,335,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Watang Pulu, Batu Lappa	200 Orang	10,000,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Watang Pulu, Batu Lappa	10 Orang	52,696,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	400,699,000			100 %	194,689,000	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Paket	30,000,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	4 Paket	30,000,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	4 Paket	35,736,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Paket	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Paket	15,201,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Paket	29,895,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Paket	8,953,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	25,335,000	Tamu Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	250,000,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	150,000,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Dokumen	5,067,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	530,938,000			100 %	3,359,238,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	230,000,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	230,000,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	1,135,826,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	20,268,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	25,335,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	25,335,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	2,223,412,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	6,571,500,000			100 %	1,073,741,758	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	620,000,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	282,341,758	ASN Dinkes
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	15,000,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	5,936,500,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Laporan	791,400,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	401,519,000			100 %	338,662,000	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Watang Pulu, Batu Lappa	245 Unit	150,000,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	245 Unit	270,112,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Watang Pulu, Batu Lappa	345 Unit	65,112,000	ASN Dinkes	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	5,067,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Watang Pulu, Batu Lappa	5 Unit	30,000,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	5 Unit	13,550,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	50,000,000	ASN Dinkes	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	55,000,000	ASN Dinkes
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	50,670,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Watang Pulu, Batu Lappa	1 Unit	50,670,000	ASN Dinkes	-	-	-	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-	38,476,973,350			-	54,833,617,942	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	16,914,835,350			100 %	9,363,729,800	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi	1 Unit	10,094,835,350	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Unit	500,000,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	350,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2,262,903,500	Masyarakat
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	150,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi	1 Unit	150,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi	1 Unit	100,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	150,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	150,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150,000,000	ASN	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	6 Unit	1,000,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	6 Unit	50,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	50,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	77,728,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1 Paket	4,000,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1 Paket	6,830,338,300	Masyarakat
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	230 Keluarga	100,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	24 Layanan	50,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	42,760,000	Masyarakat
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	20,862,138,000			100 %	45,339,211,200	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.008 Orang	480,938,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.008 Orang	10,535,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.720 Orang	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.720 Orang	43,683,500	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.551 Orang	265,886,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.551 Orang	6,597,600	Masyarakat
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.050 Orang	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.050 Orang	5,144,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.784 Orang	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.784 Orang	15,308,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.991 Orang	400,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.991 Orang	23,120,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.102 Orang	293,248,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.102 Orang	13,359,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.860 Orang	246,148,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.860 Orang	22,447,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.799 Orang	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.799 Orang	18,041,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545 Orang	200,000,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.877 Orang	354,413,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.877 Orang	33,251,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600 Orang	458,407,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600 Orang	30,770,900	Masyarakat
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	202,680,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	700,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	686,065,200	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	68,563,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	50,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	163,408,500	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	191,024,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27,427,600	Masyarakat
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	386,308,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	61,258,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	50,670,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231 Orang	604,331,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231 Orang	14,246,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	900,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	337,039,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11,000,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	41,533,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550 Orang	182,412,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	141,876,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	113,510,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	227,010,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30,021,900	Masyarakat
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	100,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	959,084,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	290,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	358,354,300	Masyarakat
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	1 Unit	200,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	211,800,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	126,675,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	870 Orang	101,340,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang	101,340,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990 Orang	176,407,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990 Orang	170,020,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Tatanan	101,340,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	101,340,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	101,340,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	101,340,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	403,932,200	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	202,680,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	182,209,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	200,000,000			100 %	24,160,142	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	24,160,142	Masyarakat
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terbit		100 %	500,000,000			100 %	106,516,800	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	200,000,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	50,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	50,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	95,706,600	Masyarakat
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10,810,200	Masyarakat
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan		85 %	408,098,000			85 %	844,832,300	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki STR di Fasilitas Mendapatkan SIP		100 %	25,000,000			100 %	1,350,000	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,350,000	Masyarakat
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100 %	233,098,000			100 %	99,348,000	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	37,495,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4,825,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	45,603,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	94,523,000	Masyarakat
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	150,000,000			100 %	744,134,300	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	150,000,000	ASN Dinkes	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	744,134,300	ASN Dinkes
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin		100 %	857,010,000			100 %	374,619,000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin		100 %	135,929,000			100 %	107,309,000	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	135,929,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	107,309,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Yang Mendapat Sertifikat Rumah Tangga	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Yang Mendapat Sertifikat		100 %	376,525,000				-	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	376,525,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Pengawasan Dan Sertifikat Produksi Pangan, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga		100 %	182,412,000			100 %	267,310,000	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	182,412,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	267,310,000	Masyarakat
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) Yang Mendapat Pengawasan Dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi		100 %	111,474,000				-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	111,474,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan		100 %	50,670,000				-	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 Unit	50,670,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	1,350,954,000			75 %	30,650,000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas Yang Melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat		100 %	144,178,000			100 %	-	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	144,178,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga Yang Menyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat Di Masyarakat		100 %	193,376,000			100 %	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	168,041,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106 Keluarga	25,335,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	1,013,400,000			100 %	30,650,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,013,400,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30,650,000	Masyarakat
	RSUD ARIFIN NU'MANG				36,129,800,000				34,879,800,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				36,129,800,000				34,879,800,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				36,129,800,000				34,879,800,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	36,129,800,000			100 %	34,879,800,000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	300,000,000				-	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	0 0	300,000,000	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2,904,800,000				-	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	12 Laporan	650,000,000	ASN Dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	12 Laporan	2,254,800,000	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	-				-	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	12 Unit	-	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	5 Unit	-	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	32,925,000,000			100 %	34,879,800,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	1 Unit Kerja	32,925,000,000	ASN Dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	1 Unit Kerja	34,879,800,000	ASN Dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-	-			-	-	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	-				-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	2 Unit	-	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	1 Unit	-	ASN Dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	3 Unit	-	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	1 Unit	-	ASN Dan Masyarakat	-	-	-	-
	RSUD NENE MALLOMO				68,473,800,000				69,460,301,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				68,473,800,000				69,460,301,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				68,473,800,000				69,460,301,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	63,873,800,000			100 %	64,000,000,000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	148,000,000				-	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	20 Laporan	148,000,000	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	12 Dokumen	-	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2,673,200,000				-	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	12 Laporan	1,100,000,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	12 Laporan	1,573,200,000	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	2,000,000				-	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	25 Unit	-	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	9 Unit	2,000,000	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	61,050,600,000			100 %	64,000,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	1 Unit Kerja	61,050,600,000	ASN dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	1 Unit Kerja	64,000,000,000	ASN dan Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-	4,300,000,000			-	5,460,301,000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	4,100,000,000			100 %	5,460,301,000	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1,000,000,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	25 Unit	2,000,000,000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	25 Unit	4,187,801,000	Masyarakat
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	1 Unit	1,100,000,000	ASN dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	1 Unit	1,272,500,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	200,000,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	43 Dokumen	200,000,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan		85 %	300,000,000			85 %	-	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100 %	-			100 %	-	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Sidenreng RappangMariten gngae, Rijang Pitu	0 Orang	-	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	300,000,000			100 %	-	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	627 Orang	300,000,000	ASN Rumah Sakit	-	-	-	-
	UPT PUSKESMAS BELAWAE				2,366,473,760				1,488,081,600	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,366,473,760				1,488,081,600	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,366,473,760				1,488,081,600	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,602,000,000			100 %	740,700,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,602,000,000			100 %	740,700,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,602,000,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	740,700,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-	764,473,760			-	743,620,200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	764,473,760			100 %	743,620,200	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	90 Orang	77,112,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	90 Orang	18,180,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	86 Orang	20,610,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	82 Orang	1,520,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	382 Orang	44,217,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	732 Orang	9,117,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	732 Orang	21,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	3097 Orang	14,587,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	684 Orang	33,368,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	1284 Orang	760	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	44 Orang	71,746,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	11 Orang	5,470,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	11 Orang	18,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	92 Orang	12,764,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	92 Orang	23,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	107 Orang	9,117,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	4,407,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	219,813,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	116,250,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	33,366,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	13,500,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	13,220,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	14,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	10,872,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	7,749,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	18,900,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pitu Raise, Belawae	50 Orang	-	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	50 Orang	6,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pitu Raise, Belawae	0 Orang	6,078,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Orang	6,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	4,559,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	74,067,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	1 Dokumen	100,000,000	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	1 Dokumen	59,497,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	44,572,000	ASN Puskesmas	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	314,526,200	ASN Puskesmas

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pitu Raise, Belawae	0 Laporan	20,209,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	1,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	0 Dokumen	1,350,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	10,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	25,950,000	Masyarakat
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-			-	3,761,400	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-			-	3,761,400	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Raise, Belawae	12 Dokumen	3,761,400	Masyarakat
	UPT PUSKESMAS KULO				1,802,713,896				2,414,069,500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,802,713,896				2,414,069,500	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,802,713,896				2,414,069,500	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,033,077,660			100 %	1,600,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,033,077,660			100 %	1,600,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kulo, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,033,077,660	ASN dan Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,600,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-	769,636,236			-	807,357,500	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	11,075,433			100 %	-	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Unit	11,075,433	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	758,060,803			100 %	807,357,500	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	270 Orang	83,258,470	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	270 Orang	50,100,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	216 Orang	8,742,190	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	250 Orang	4,052,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	960 Orang	104,176,920	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	2200 Orang	4,558,500	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	2200 Orang	42,000,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	9195 Orang	24,204,622	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	2031 Orang	39,000,500	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	3817 Orang	8,124,260	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	140 Orang	54,600,700	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	13 Orang	15,397,600	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	13 Orang	30,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	192 Orang	12,156,000	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	192 Orang	20,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	204 Orang	6,078,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4,862,400	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	174,521,666	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	298,904,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	28,617,250	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8,100,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19,247,000	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	54,119,525	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	14,080,700	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21,600,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kulo, Semua Kel/Desa	14375 Orang	-	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	14375 Orang	18,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kulo, Semua Kel/Desa	140 Orang	18,234,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12,156,000	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	80,972,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	44,572,000	ASN Dan Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	165,328,000	ASN Dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	23,299,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Orang	500	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	500	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	500	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3,153,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	14,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	36,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	500,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kulo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-			-	6,712,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-			-	6,712,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kulo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	Masyarakat	Kulo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6,712,000	Masyarakat
	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE				3,585,033,000				4,544,768,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,585,033,000				4,544,768,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,585,033,000				4,544,768,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3,567,033,000			100 %	3,354,423,539	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	3,567,033,000			100 %	3,354,423,539	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	3,567,033,000	ASN Puskesmas Dan Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	3,354,423,539	ASN Puskesmas Dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-	16,000,000			-	1,186,743,461	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	16,000,000			100 %	-	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	16,000,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1,185,044,661			100 %	1,186,743,461	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	1038 Orang	96,992,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	1038 Orang	59,472,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	991 Orang	19,200,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	944 Orang	1,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	4377 Orang	87,448,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	3144 Orang	60,000,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	3144 Orang	47,500,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	35080 Orang	6,600,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	5724 Orang	5,500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	3440 Orang	6,600,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	520 Orang	87,200,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	126 Orang	12,600,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	126 Orang	12,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	155 Orang	30,000,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	155 Orang	6,600,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	1550 Orang	15,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5,200,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	472,815,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	261,872,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	65,396,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	20,500,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50,193,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5,000,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	23,910,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	128 Orang	-	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	128 Orang	34,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	3 Orang	2,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	34,000,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	120,582,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	345,576,461	Masyarakat
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	48,000,000	ASN dan Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	172,362,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Maritengngae, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	661	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10,777,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	24,500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	50 Orang	9,300,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Maritengngae, Semua Kel/Desa	56 Orang	5,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5,000,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,892,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10,000,000	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	44,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	3,000,000				-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3,000,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	2,000,000			75 %	3,601,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	2,000,000			100 %	3,601,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,000,000	ASN dan Masyarakat	Maritengngae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3,601,000	ASN dan Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UPT PUSKESMAS LAWAWOI				2,764,131,500				3,393,526,500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,764,131,500				3,393,526,500	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,764,131,500				3,393,526,500	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,786,297,000			100 %	2,600,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,786,297,000			100 %	2,600,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	1,786,297,000	ASN dan Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	2,600,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	977,834,500			0.14 100 Rasio %	789,619,500	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	977,834,500			100 %	789,619,500	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	745 Orang	47,671,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	745 Orang	35,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	745 Orang	2,026,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	576 Orang	10,130,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	2320 Orang	75,063,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	5568 Orang	53,182,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	5568 Orang	43,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	25232 Orang	21,880,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	5231 Orang	20,665,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	2323 Orang	3,039,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	367 Orang	83,147,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	65 Orang	9,724,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	65 Orang	48,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	673 Orang	16,410,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	673 Orang	14,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	962 Orang	20,260,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15,195,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	339,591,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	257,917,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19,500,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20,563,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	26,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20,057,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1200 Orang	-	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1200 Orang	10,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	53 Orang	7,597,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	67,060,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75,437,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	44,572,000	ASN Dan Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	167,165,000	ASN Dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	500	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	75 Orang	500	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	24,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	38,400,000	Masyarakat
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-			-	3,907,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-			-	3,907,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	ASN Dan Masyarakat	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3,907,000	ASN Dan Masyarakat
	UPT PUSKESMAS MANISA				2,096,319,000				1,689,608,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,096,319,000				1,689,608,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,096,319,000				1,689,608,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,468,500,000			100 %	1,000,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,468,500,000			100 %	1,000,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	1,468,500,000	ASN Dan Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	1,000,000,000	ASN Dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	614,628,400			0.14 100 Rasio %	674,596,000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	2,500,000			100 %	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Unit	2,500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	612,128,400			100 %	674,596,000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	20,418,750	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	18,232,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	22,539,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	38,000,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	40,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	-	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	36,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	11,800,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	6,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	1,320,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	124,025,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	149,415,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	52,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	7,200,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	18,600,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	45,870,200	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	33,300,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	7,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	-	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	109,300,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	101,525,450	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	44,000,000	ASN Dan Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	227,111,000	ASN Dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	6,000,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	2,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Orang	2,400,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	3,600,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	1,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	74,130,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	206,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	7,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	29,200,000	Masyarakat
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	13,190,600			75 %	15,012,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	13,190,600			100 %	15,012,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	13,190,600	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	15,012,000	Masyarakat
	UPT PUSKESMAS BILOKKA				2,773,049,000				2,661,651,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,773,049,000				2,661,651,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,773,049,000				2,661,651,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,676,515,000			100 %	1,800,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,676,515,000			100 %	1,800,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	12 Bulan Unit Kerja	1,676,515,000	ASN dan Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	12 Bulan Unit Kerja	1,800,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	1,083,174,000			0.14 100 Rasio %	857,724,000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	10,000,000			100 %	-	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Unit	10,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1,039,324,000			100 %	857,724,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	60,198,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	45,444,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	5,389,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	8,033,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	54,525,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	15,043,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	57,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	28,835,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	53,182,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	2,026,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	24,132,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	53,486,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	21,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	19,100,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	26,940,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	8,104,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	21,273,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	238,167,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	293,046,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	14,587,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	17,100,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	6,382,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	23,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	20,868,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	23,689,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	26,700,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	210 Orang	-	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	210 Orang	33,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	7,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	28,658,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	92,706,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	184,303,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	44,572,000	ASN dan Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	161,688,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	22,572,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	6,800,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Orang	2,400,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	12,600,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	4,200,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	73,400,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	1,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	2604 Dokumen	-	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	2604 Dokumen	23,100,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	526 Dokumen	-	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	526 Dokumen	29,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	33,850,000				-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	33,850,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	13,360,000			75 %	3,927,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	13,360,000			100 %	3,927,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	13,360,000	Masyarakat	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	3,927,000	Masyarakat
	UPT PUSKESMAS LANCIRANG				2,327,975,000				1,739,298,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,327,975,000				1,739,298,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,327,975,000				1,739,298,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,564,278,000			100 %	1,100,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,564,278,000			100 %	1,100,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,564,278,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,100,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	763,197,000			0.14 100 Rasio %	639,298,000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	1,000,000			100 %	-	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Unit	1,000,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	761,697,000			100 %	639,298,000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	97,765,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	40,755,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	4,255,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	2,026,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	39,203,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	18,234,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	66,500,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	13,372,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	18,234,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	4,320,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	49,589,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	16,208,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	12,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	19,432,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	16,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	4,052,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	14,587,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	221,598,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	189,826,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	19,916,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	10,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	15,195,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	12,015,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	5,077,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	12,663,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	18,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	12 Orang	-	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	12 Orang	10,400,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	8,104,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	30,795,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	66,185,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	44,572,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	139,508,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Orang	500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 0	500,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 0	9,609,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	500,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	1,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	33,700,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	500,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	500,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	500,000	Masyarakat		75 %	-	Masyarakat
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	500,000			100 %	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	500,000	Masyarakat	-	-	-	-
	UPT PUSKESMAS BARANTI				2,393,484,500				2,168,871,500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,393,484,500				2,168,871,500	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,393,484,500				2,168,871,500	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,548,500,000			100 %	1,400,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,548,500,000			100 %	1,400,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Baranti, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,548,500,000	ASN dan Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,400,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	838,454,500			0.14 100 Rasio %	768,871,500	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	836,909,500			100 %	768,871,500	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	300 orang Orang	32,940,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	300 orang Orang	34,320,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	300 orang Orang	8,090,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	39,000,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	56,200,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	48,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	14,400,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	18,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masy.	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	213,967,500	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	277,494,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5,400,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	27,498,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	26,430,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Orang	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Orang	4,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	148,000,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	65,520,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100,000,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	134,874,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	160,875,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2,400,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	12,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Baranti, Semua Kel/Desa	100 Orang	8,800,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,432,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	89,540,000	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1,200,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	44,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	1,545,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Bulan Dokumen	1,545,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	6,530,000			75 %	-	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	6,530,000			100 %	-	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6,530,000	ASN dan Masyarakat	Baranti, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	-
	UPT PUSKESMAS BARUKKU				2,844,065,000				2,177,680,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,844,065,000				2,177,680,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,844,065,000				2,177,680,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,498,537,000			100 %	1,200,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,498,537,000			100 %	1,200,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,498,537,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1,200,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	1,269,654,000			0.14 100 Rasio %	972,579,000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	20,000,000			100 %	-	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	0 Unit	20,000,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1,237,498,000			100 %	972,579,000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	6065 Orang	129,583,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	6065 Orang	42,504,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	6750 Orang	24,264,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	5612 Orang	2,026,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	25100 Orang	94,462,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	54992 Orang	33,733,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	54992 Orang	46,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	195092 Orang	24,008,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	0 Orang	27,351,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	17895 Orang	11,183,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	2876 Orang	48,208,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	540 Orang	6,078,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	540 Orang	60,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	5999 Orang	35,618,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	5999 Orang	24,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	7400 Orang	6,078,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	18,740,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	246,910,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	347,899,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10,130,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31,504,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35,911,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	23,603,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,605,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	12 Orang	-	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	12 Orang	4,200,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	252 Orang	13,068,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	8,104,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	91,396,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	155,357,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	64,832,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	206,874,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	2 Laporan	12,764,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	850 Orang	9,877,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3,373,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	160,733,000	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	23,100,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	51,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	12,156,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	12,156,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	75,874,000			75 %	5,101,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	75,874,000			100 %	5,101,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75,874,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5,101,000	ASN dan Masyarakat
	UPT PUSKESMAS DONGI				2,414,819,000				1,893,758,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,414,819,000				1,893,758,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,414,819,000				1,893,758,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,509,274,000			100 %	1,262,412,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,509,274,000			100 %	1,262,412,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pitu Riawa, Dongi	1 Unit Kerja	1,509,274,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Unit Kerja	1,262,412,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	899,693,000			0.14 100 Rasio %	628,609,000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	10,000,000			100 %	-	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Pitu Riawa, Dongi	20 Unit	10,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	871,996,000			100 %	628,609,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	263 Orang	94,406,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	263 Orang	44,085,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	251 Orang	21,839,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	239 Orang	2,128,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	1221 Orang	56,948,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	2148 Orang	15,049,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	2148 Orang	33,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	8976 Orang	25,984,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	1982 Orang	24,359,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	3726 Orang	28,781,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	131 Orang	35,990,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	30 Orang	6,080,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	30 Orang	34,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	254 Orang	22,940,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	254 Orang	18,700,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	340 Orang	13,174,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	11,097,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	200,280,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	156,309,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	12,868,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	14,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	34,805,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	13,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pitu Riawa, Dongi	0 0	3,503,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	20,000,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	24,500,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pitu Riawa, Dongi	30 Orang	4,256,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	17,633,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	43,941,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	100,000,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	37,588,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	44,590,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	134,682,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pitu Riawa, Dongi	1 Laporan	44,286,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	1,000,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	2,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	30,000,000	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	1,004,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Pitu Riawa, Dongi	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	12 Dokumen	15,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pitu Riawa, Dongi	12 Dokumen	-	Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	12 Dokumen	53,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	17,697,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	17,697,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	5,852,000			75 %	2,737,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	5,852,000			100 %	2,737,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	5,852,000	ASN dan Masyarakat	Pitu Riawa, Dongi	1 Dokumen	2,737,000	ASN dan Masyarakat
	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG				3,367,389,000				3,330,187,900	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,367,389,000				3,330,187,900	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,367,389,000				3,330,187,900	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2,532,500,000			100 %	2,500,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	2,532,500,000			100 %	2,500,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	50 Unit Kerja	2,532,500,000	ASN dan Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	50 Unit Kerja	2,500,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	834,889,000			0.14 100 Rasio %	826,566,500	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	834,889,000			100 %	826,566,500	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	5958 Orang	96,387,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	5958 Orang	73,232,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	6700 Orang	12,105,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	5414 Orang	6,150,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	2495 Orang	80,027,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	54670 Orang	55,310,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	54670 Orang	34,100,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	194892 Orang	26,743,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	20907 Orang	24,920,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	17810 Orang	15,702,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	2768 Orang	10,525,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	600 Orang	12,156,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	600 Orang	49,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	5839 Orang	39,710,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	5839 Orang	14,800,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	7663 Orang	25,933,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	16,208,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	215,594,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	258,472,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	72,784,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	13,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	27,756,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	7,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8,485,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	16,208,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	36,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	200 Orang	-	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	200 Orang	10,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	200 Orang	6,078,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21,536,000	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	68,548,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	44,572,000	ASN dan Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	173,314,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	24,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	600 Dokumen	-	Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	600 Dokumen	59,300,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-			-	3,621,400	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-			-	3,621,400	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	ASN dan Masyarakat	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3,621,400	ASN dan Masyarakat
	UPT PUSKESMAS EMPAGAE				3,255,766,000				2,261,681,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,255,766,000				2,261,681,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,255,766,000				2,261,681,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,568,500,000			100 %	1,500,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,568,500,000			100 %	1,500,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	1,568,500,000	ASN dan Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	1,500,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	1,676,063,000			0.14 100 Rasio %	758,697,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1,675,413,000			100 %	758,697,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	405 Orang	65,072,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	405 Orang	50,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	375 Orang	8,708,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	352 Orang	2,026,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	1630 Orang	83,761,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	3166 Orang	34,036,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	3166 Orang	42,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	13234 Orang	25,122,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	2922 Orang	20,487,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	5492 Orang	17,909,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	193 Orang	29,797,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	47 Orang	16,208,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	47 Orang	14,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	389 Orang	30,795,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	389 Orang	14,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	493 Orang	4,052,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	107 Dokumen	10,130,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	96 Dokumen	239,409,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	96 Dokumen	276,136,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	64 Dokumen	17,828,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	64 Dokumen	10,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	84 Dokumen	31,605,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	84 Dokumen	9,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	5,513,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	39,709,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	20,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	48 Orang	-	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	48 Orang	8,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	47 Orang	12,966,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15,600,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	78,985,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	778,294,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	44,572,000	ASN dan Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	159,976,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8,914,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	4 Orang	7,200,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	14,400,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	111,300,000	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	400,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	47,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	650,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	650,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	11,203,000			75 %	2,984,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	11,203,000			100 %	2,984,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	11,203,000	ASN dan Masyarakat	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,984,000	ASN dan Masyarakat
	UPT PUSKESMAS RAPPANG				2,215,969,000				2,730,802,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,215,969,000				2,730,802,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,215,969,000				2,730,802,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,559,489,000			100 %	2,000,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,559,489,000			100 %	2,000,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	334 Unit Kerja	1,559,489,000	ASN dan Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	334 Unit Kerja	2,000,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	655,980,000			0.14 100 Rasio %	727,507,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	655,480,000			100 %	727,507,000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	608 Orang	70,910,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	608 Orang	47,630,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	581 Orang	1,013,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	205 Orang	2,562,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	205 Orang	5,065,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	340 Orang	12,966,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	340 Orang	57,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	302 Orang	29,275,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	203 Orang	25,527,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	304 Orang	15,721,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	530 Orang	49,756,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	43 Orang	20,665,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	43 Orang	12,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	23 Orang	14,587,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	23 Orang	9,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	54 Orang	4,052,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	456 Dokumen	36,873,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	2234 Dokumen	162,558,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	2234 Dokumen	246,978,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	345 Dokumen	23,096,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	345 Dokumen	10,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	213 Dokumen	24,312,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	213 Dokumen	15,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	543 Dokumen	17,086,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	342 Dokumen	16,815,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	342 Dokumen	17,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	564 Orang	-	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	564 Orang	10,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	564 Orang	10,940,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	43 Dokumen	9,117,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	43 Dokumen	83,524,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	655 Dokumen	44,572,000	ASN dan Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	655 Dokumen	151,747,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	65 Dokumen	500,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	65 Dokumen	4,428,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	34 Laporan	55,512,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	32 Orang	500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	32 Orang	500,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	65 Dokumen	500,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	65 Dokumen	3,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	34 Dokumen	500,000	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	34 Dokumen	600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	203 Dokumen	19,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	205 Dokumen	39,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	500,000			100 %	-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	43 Dokumen	500,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	500,000			75 %	3,295,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	500,000			100 %	3,295,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	56 Dokumen	500,000	ASN dan Masyarakat	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	56 Dokumen	3,295,000	ASN dan Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UPT PUSKESMAS AMPARITA				2,694,355,000				2,920,293,000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,694,355,000				2,920,293,000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,694,355,000				2,920,293,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,538,499,000			100 %	1,953,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100 %	1,538,499,000			100 %	1,953,000,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	1,538,499,000	ASN dan Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Unit Kerja	1,953,000,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		0.14 100 Rasio %	1,147,078,000	Masyarakat		0.14 100 Rasio %	963,692,000	Masyarakat
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia		100 %	4,000,000			100 %	-	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	5 Unit	4,000,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1,142,429,000			100 %	963,692,000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	166,421,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	46,155,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	22,345,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	2,026,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	50,592,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	24,312,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	58,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	13,271,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	9,725,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	13,169,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	16,208,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	18,842,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	26,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	36,468,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	28,400,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	6,078,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	32,822,000	Masyarakat	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	309,061,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	374,190,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	4,863,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	34,800,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	34,442,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	22,200,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	65,238,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	45,585,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	56,985,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Orang	-	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Orang	7,600,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	7,000,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	30,289,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	55,902,500	Masyarakat
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	44,572,000	ASN dan Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	191,887,000	ASN dan Masyarakat
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Laporan	10,130,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	30,390,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Orang	1,216,000	Masyarakat	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	5,471,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	16,572,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	141,893,000	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	17,600,000	Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	24,000,000	Masyarakat
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100 %	649,000				-	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	649,000	ASN dan Masyarakat	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		75 %	8,778,000			75 %	3,601,000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 %	8,778,000			100 %	3,601,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8,778,000	ASN dan Masyarakat	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3,601,000	ASN dan Masyarakat
					303,906,747,980				333,753,627,000	

BAB V.

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Draft Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Perubahan Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan kesehatan dan pengendalian penduduk tahun 2025.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan serta sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kesehatan Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maupun

APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Perubahan Renja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di bidang kesehatan di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

[illegible]

[illegible]



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air
Kab. Sidenreng
Rappang
Tahun 2025



RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	6
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	40
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	21
BAB V Penutup	25
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 1 SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026	

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah Dokumen yang berisi tentang perubahan rencana kerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tahun 2025. Perubahan rencana kerja dapat dilakukan pada Program, kegiatan, Sub Kegiatan, nilai Anggaran, jenis rekening belanja maupun target kinerjanya.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mengsinergi, mensinkronkan dan mengintegrasikan program Pembangunan nasional dengan pembangunan.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) perubahan Tahun 2025 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program/kegiatan yang tetap

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada terlaksananya Daya Dukung Sumber Daya Air untuk mendukung Produktivitas Pertanian dalam mendukung Swasembada Pangan. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan daerah terakumulasi dan berpedoman pada tema RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 70);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas.
- b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas.
- c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

- a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang selaras dan terpadu, komprehensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- c. Tersedianya Rencana Kerja Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan dan Rujukan dalam menetapkan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024 sampai dengan 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renja OPD, landasan hukum;
- Bab II: Hasil Capaian Program/Kegiatan sampai Triwulan II Tahun berjalan berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025;
- Bab III: Perbandingan Program/Kegiatan sebelum dan setelah Perubahan Tahun 2025;
- Bab IV: Penutup

BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 Program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar **Rp. 15.662.182.000,-** dan setelah perubahan anggaran belanja berkurang menjadi sebesar **Rp. 11.852.659.000,-** dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 11.852.659.000,-** dan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar **Rp. 4.512.497.591,-** atau **(38,07%)** dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar **Rp. 2.849.199.000,-** dan realisasi **Rp. 0 ,-** atau **(0%)**.

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/ KEUANGAN							
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2025							
KEADAAN SAMPAI 1 JANUARI SAMPAI 30 JUNI 2025							
SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB SIDENRENG RAPPANG							
Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Niai DPPA (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	6	8
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang	11,852,659,000	4,512,497,591	38.07	4,512,497,591	38.07	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,003,460,000	4,512,497,591	50.12	4,512,497,591	50.12	
1.03.01.2.01	perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,200,000	-	0.00		-	
1.03.01.2..01.01	penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,600,000		0.00		-	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,600,000		0.00		-	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,430,668,000	4,378,990,774.00	51.94	4,378,990,774.00	51.94	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,419,468,000	4,378,990,774.00	52.01	4,378,990,774.00	52.01	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,600,000		0.00		-	
1.03.01.2.02.07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	5,600,000		0.00		-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78,633,000	37,062,176.00	47.13	37,062,176.00	47.13	
1.03.01.2.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2,000,000	1,000,000	50.00	1,000,000	50.00	
1.03.01.2.06..05	penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,600,000		0.00		-	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75,033,000	36,062,176	48.06	36,062,176	48.06	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337,554,000	76,615,718	22.70	76,615,718	22.70	
1.03.01.2.08.02	penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik	55,000,000	15,296,718	27.81	15,296,718	27.81	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,424,000		0.00		-	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274,130,000	61,319,000	22.37	61,319,000	22.37	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,405,000	19,828,923	13.64	19,828,923	13.64	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan	145,405,000	19,828,923	13.64	19,828,923	13.64	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

1.03.02	Program pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	2,849,199,000	-	-	-	-
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,689,887,500	-	-	-	-
1.03.02.2.01.75	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	25,141,500		0.00	-	-
1.03.02.2.01.93	Normalisasi/ Restorasi Sungai	1,232,357,000		0.00	-	-
1.03.02.2.01.114	Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya	32,389,000		0.00	-	-
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bangunan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	400,000,000		0.00	-	-
1.03.02.2.02	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,159,311,500	-	-	-	-
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	232,916,500		0.00	-	-
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18,087,500		0.00	-	-
1.03.02.2.02.21	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	908,307,500		0.00	-	-
	JUMLAH TOTAL	11,852,659,000	4,512,497,591	38.07	4,512,497,591	38.07

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2025 terdiri :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan

- 1) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 3 Dokumen dengan anggaran Rp. 7.000.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 2) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dengan target 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 7.000.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 3) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan target 1 Laporan dengan anggaran Rp. 7.000.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 4) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan target 18 Laporan dengan anggaran Rp. 7.000.000,- yang terealisasi belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 5) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan daerah kabupaten/Kota dengan target 20 Unit dengan anggaran Rp. 145.000.000,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

- dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 30 Kelompok dengan anggaran Rp. 25.141.500,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Normalisasi / Restorasi Sungai dengan target 5 Km dengan anggaran Rp. 2.327.517.000,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 8) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya dengan target 1 Unit dengan anggaran Rp. 13.960.500,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 9) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan target 2 Km dengan anggaran Rp. 2.293.151.000,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan target 2 Km dengan anggaran Rp. 1.374.596.000,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 11) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Operasi dan

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan target 2 Km dengan anggaran Rp. 585.266.000,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:

Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I belum ada.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

- 1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatanannya.
- 2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
- 3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
- 4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2025 yaitu :

- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

- c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:

- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
- b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
- c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
- d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.a dan II.1.b :

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

TABEL II.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																						
KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM(outcome) /KEGIATAN(output)					TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) S.D TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN	
																		TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2					3					4	5	6	7	8= (7/6)	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1						Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	03					Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah											
1	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100	100	100	100	100%	50	50%
1	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					6	2	2	1	50%	3	50%
1	03	01	2	01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					3	1	1	-	0%	3	100%
1	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah					100	100	100	100	57	50	42,5%
1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN					Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan					6300	1260	1260	450	36%	1710	27%
1	03	01	2	02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun					3	1	1	-	0%	1	33%
1	03	01	2	02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun					54	18	18	4	22%	22	41%

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

1	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	55,4%	50	61,4%
1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	12	12	-	0%	12	33%
1	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	36	12	-	-	0%	12	33%
1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	36	12	12	-	0%	12	33%
1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	210	55	60	10	17%	65	31%
1	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	50%	50	50%
1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36	12	12	4	33%	16	44%
1	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36	12	12	-	0%	12	33%
1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	12	12	4	33%	16	44%
1	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	50%	50	50%
1	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas atau lapangan	35	10	10	-	0%	10	29%

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

1	03	02				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik							
1	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal Pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan SDA Pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kabupaten/ Kota							
1	03	02	2	01	01	Penyusuna Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung lainnya	Jumlah rencana teknis dan dokumen yang disusun	9	3	-	-	0%	3	33%
1	03	02	2	01	21	Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	10	3	1	-	0%	3	30%
1	03	02	2	01	46	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi	30	10	5	-	0%	10	33%
1	03	02	2	01	61	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok P3A yang dibina dan diperdayaan	90	30	30	-	0%	30	33%
1	03	02	2	01	62	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomtek yang diterbitkan	15	5	-	-	0%	5	33%
1	03	02	2	02		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder							
1	03	02	2	02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	10	3	1	-	0%	3	30%
1	03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	15	4	1	-	0%	4	27%
1	03	02	2	02	21	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	25	10	25	-	0%	10	40%
1	03	02	2	02	28	Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi yang dilaksanakan	10	2	-	-	0%	2	20%

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah :

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek antara lain :

PENCAPAIAN KINERJA TERKAIT PELAYANAN DINAS PSDA KAB.SIDRAP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG														
NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	Rasio Jaringan Irigasi		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		75%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11%	68,55%	
3	Cakupan Luas Areal yang terlayani		11.299 Ha	6214.45	6779.40	7344.35	7909.30	8474.25	6083.38	6689.01	7143.23	7356.78	7745.46	
4	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar		9,98%	14%	13%	12%	12%	12%	12%	11%	10%	10%	10%	

TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2020-2024														
No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Ket	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3						4	5	6	7	8	10	
1	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	60,00	50,45	51,90	53,02	55,61	58,52		
2	Predikat Nilai Sakip	Angka	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	56,00	57,68	60,95	62,00	63,00		
3	Persentase Luas Areal Persawahan yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55		
4	Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00		

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

DATA REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (PERMENDAGRI 18)													
DINAS PSDA KAB. SIDRAP TAHUN 2020 - 2024													
No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Target pertahun					Realisasi pertahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Outcome	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%	60,00	65,00	70,00	72,00	75,00	57,58	64,00	67,00	70,00	73,00	
1.5	Rencana Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	3	3	2	1	
1.6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	10	10	8	5	5	10	8	6	5	2	
1.7	Data Prasarana Dan Sarana Pengaman Pantai Dan Sungai Milik Pemerintah Kab/Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
outcome	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	55,00	60,00	65,00	68,00	70,00	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55	
3.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	%	60.00	65	70	72	75.00	57.9	60.15	65.07	68.07	71.20	
3.2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik	%	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	37.8	39.1	42.81	48.81	54.9	
3.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier Dalam Kondisi Baik	%	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	12.80	12.80	12.80	12.80	16.41	

Dalam bab ini diuraikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain :

1. Kerusakan bangunan irigasi yang masih tinggi

Kerusakan bangunan irigasi yang masih tinggi, baik yang disebabkan oleh usia teknis bangunan dan jaringan irigasi yang relative sudah tua juga karena akibat bencana alam serta ulah/perbuatan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan operasi jaringan irigasi tidak dapat berjalan sesuai dengan standar norma dan etika operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan ketentuan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksplotasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang pada gilirannya menghambat suplay air irigasi sampai ke petak-petak sawah.

2. Deforestasi pada bagian hulu

Deforestasi pada bagian hulu atau semakin berkurangnya ketertutupan hutan di sekitar wilayah tangkapan hujan sungai dan bending, telah menimbulkan tingkat sedimentasi pada bending dan saluran pembawa di setiap musim hujan sehingga menyebabkan berkurangnya daya tampung bending dan saluran pembawa secara signifikan pada semua level kewenangan Daerah Irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah/Pusat, Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi dan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang) menyebabkan ketersediaan air dibendung tidak Berkorelasi dengan luas areal layanan/persawahan.

3. Explorasi Air Tanah

Explorasi air tanah belum dapat dimaksimalkan untuk menopang air untuk usaha pertanian khususnya bagi areal persawahan tadah hujan yang tidak dapat terjangkau layanan daerah irigasi permukaan, mengingat keberadaan hamparan persawahan pada umumnya berada pada wilayah ketinggian yang secara geologis posisinya berada pada wilayah yang tingkat kesulitan eksplorasi air bawah tanahnya (elevasi) sangat tinggi.

4. Partisipatif Masyarakat

Partisipatif masyarakat petani yang tergabung dalam kelembagaan/keompok, Gabungan dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) masih sangat rendah, oleh karena itu masih sangat diperlukan upaya peningkatan partisipatif kelompok P3A/GP3A/IP3A sesuai level kewenangannya masing-masing, yakni kelompok P3A pada jaringan irigasi tersier, GP3A pada jaringan Irigasi sekunder dan IP3A pada jaringan irigasi primer.

5. Peningkatan Koordinasi

Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sikronisasi, Simplifikasi (KISS) antar lembaga pengelola irigasi, baik yang mewadai keterwakilan masyarakat, Gabungan Kelompok dan Induk P3A Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Komisi Irigasi

Kabupaten, Dinas PU-PR Provinsi dan Kementerian PU-PR yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang serta Satker TP-OP, masih sangat diperlukan khususnya terkait dengan Konservasi Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan serta Pengamanan dan Pengendalian daya rusak air di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

6. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan pertanian beririgasi yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan usaha perekonomian masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian bangunan dan jaringan khususnya konservasi sumber daya air pada umumnya, mengingat tidak sedikit simpul-simpul dalam siklus jaringan dan bangunan irigasi yang harus terputus sebagai dampak adanya alih fungsi lahan beririgasi, selain berkurangnya lahan pertanian produktif, yang pada gilirannya menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas hasil pertanian khususnya komoditas pada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

7. Penyediaan Data Informasi Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air

Penyediaan data informasi sistem pengelolaan sumber daya air sangat perlu untuk diseragamkan khususnya terkait dengan potensi dan pemanfaatan sumber daya air, hal ini dimungkinkan mengingat data dan informasi yang berbeda-beda dikalangan pemangku kepentingan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang.

8. Peningkatan Pengarusutamaan Gender

Keterlibatan kaum perempuan dalam tata kelola sumber daya air secara nasional khususnya pada manajemen Komisi Irigasi Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, telah menjadi Variable penting dalam penilaian kinerja Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Provinsi, oleh Pemerintah Pusat dimana dalam penilaian kinerja Komisi Irigasi diharuskan untuk mengakomodir 20% kepengurusan Komisi Irigasi dari kalangan Perempuan.

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

Data realisasi Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam bab ini diuraikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dilihat pada table dibawah ini :

DATA REALISASI SUSTANABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)									
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 2020-2024									
No	PILAR SOSIAL (Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)		satuan	Realisasi Per Tahun					narasi kenaikan/penurunan
	No.Indi	INDIKATOR		2020	2021	2022	2023	2024	
1	6.1.1.(b)	Jumlah Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta penyediaan air baku untuk pulau - pulau	M3/Detik	64,00 m3/detik	64,00 m3/detik	64,00 m3/detik	64,00 m3/detik	64,00 m3/detik	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta penyediaan air baku untuk pulau - pulau tidak terjadi kenaikan/penurunan karena tidak pernah dianggarkan
2	6.5.1.(a)	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Dokumen	Internalisasi 38 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 38 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 38 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 38 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 38 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidak terjadi kenaikan/penurunan karena datanya masih sama
3	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Dokumen	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 1 Wilayah Sungai.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 1 Wilayah Sungai.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 1 Wilayah Sungai.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 1 Wilayah Sungai.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 1 Wilayah Sungai.	Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk tidak terjadi kenaikan/penurunan karena datanya masih sama tahun lalu
4	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipatif masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Kelompok	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	Wilayah sungai yang memiliki partisipatif masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau tidak mengalami kenaikan/penurunan karena datanya masih sama
5	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kegiatan	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air tidak mengalami kenaikan/penurunan karena datanya masih sama

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

FORMULASI ISU-ISU PENTING

Dalam bab ini diuraikan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dapat dilihat pada table dibawah ini :

FORMULASI ISU - ISU PENTING DINAS PSDA KAB. SIDRAP							
No.	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLs yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	Daerah Irigasi Kewenangan Pusat terdapat 3 Di yang melayani 29.208 Ha, Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi terdapat 3 Di yang melayani 4.258 Ha dan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten terdapat 94 Di yang melayani 12.868 Ha	Menurunnya kinerja dan efektivitas infrastruktur jaringan irigasi karna umur bangunan yang sudah tua	Penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah dan hutan sebagai kekegiatan secara bijaksana dan tidak melebihi batas kemampuan lingkungan untuk pulih. Ini termasuk mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi daya alam	Banyak wilayah di dunia mengalami kekurangan air bersih, baik karena faktor alam seperti kekeringan maupun karena eksploitasi berlebihan oleh manusia	Krisis air bersih terjadi di berbagai daerah, terutama perkotaan dan wilayah pesisir akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan dampak perubahan iklim	Kerja sama antar negara dalam pengelolaan air untuk mencegah konflik dan membangun stabilitas regional Work Water Week akan membahas isu ini dengan tema "Menjebatani Batas : Air untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan"	Banyaknya Infrastruktur Jaringan Irigasi yang lebih 15 Tahun tidak pernah di Rehabilitasi dan tidak adanya pemeliharaan rutin dan berkala
		Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir		Pencemaran air oleh limbah industri, pertanian dan rumah tangga menyebabkan penurunan kualitas air dan ancaman kesehatan manusia serta ekosistem	Dampak perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan kekeringan dan banjir serta mempengaruhi ketersediaan air	Forum air sedunia di Bali menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan air termasuk pemanfaatan teknologi baru dan pendekatan berbasis data	Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir sehingga menyebabkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air kurang maksimal
		Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak		Perubahan iklim memperburuk krisis air dengan menyebabkan pola cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang lebih sering dan intens	Ketidakmerataan akses sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air bersih, terutama di daerah terpencil dan miskin	Pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga perlu mempertimbangkan pendekatan lain seperti pemanfaatan sumber air non-konvensional, pelestarian praktik tradisional dan pertanian yang efisien	Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak
		Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor akibat daya rusak air		Pertambahan penduduk dunia meningkatkan permintaan air, memperparah tekanan pada sumber daya air yang terbatas	Limbah industri dan rumah tangga mencemari sungai dan sumber air lainnya sehingga mengakibatkan kurangnya ketersediaan air	Kesuksesan pengelolaan air membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan akademisi	Sering terjadi banjir sehingga bantaran dan tanggul sungai mengalami kerusakan/longsor sehingga sangat dibutuhkan penguatan talud dan pembangunan bronjong untuk menahan arus air
	Luas Areal Persawahan Irigasi Teknis 36.578 Ha, Areal Persawahan Tadah Hujan 11.810 Ha dan Areal Persawahan Rawa Lebak 1.889 Ha	Tingginya Sedimentasi pada sungai yang menyebabkan pendangkalan		Banyak negara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya air mereka termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, alokasi air yang tidak efisien dan kurangnya investasi dalam teknologi hemat air	Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa	Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air dan resiko bencana terkait air menjadi perhatian utama termasuk peningkatan intensitas cuaca ekstrem dan perubahan pola curah hujan	Sering terjadi banjir sehingga sedimentasi pada sungai meningkat dan menyebabkan fungsi sungai berkurang karena terjadinya pendangkalan
		Masih banyaknya daerah irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana			Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya investasi dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan memperburuk masalah air		Kurangnya anggaran pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sehingga masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana
		Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat			Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanaman pada kawasan yang terkena banjir, sedimen/lahar gunung berapi dan abrasi pantai		Tidak adanya anggaran operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga pemeliharaan rutin dan berkala kurang maksimal untuk dilaksanakan
		Kurangnya petugas penjaga bendung dan pengatur pintu air pada daerah irigasi kewenangan kabupaten sehingga banyak bangunan yang tidak berfungsi dengan baik			Pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA		Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten sebanyak 94 Di dan yang mempunyai petugas penjaga bendung dan petugas pengatur pintu air hanya 30 Di sehingga banyak bangunan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik
		Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi					Kelompok P3A dan GP3A kurang dalam partisipasi terhadap pengelolaan irigasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2025

Program berdasarkan RPJMD tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel III.I :

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN TAHUN 2025

Tabel III.1.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidrap

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1 03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Dinas PSDA	100%	15,662,182,000	ASN lingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	11,852,659,000	ASN lingkup Dinas PSDA
1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah	Dinas PSDA	100%	9,042,550,000	ASN lingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	9,003,460,000	ASN lingkup Dinas PSDA
1 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PSDA	100%	14,000,000	ASN lingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	11,200,000	ASN lingkup Dinas PSDA
1 03 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinas PSDA	3 laporan	7,000,000		Dinas PSDA	3 laporan	5,600,000	
1 03 01 2 01 06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dinas PSDA	3 laporan	7,000,000		Dinas PSDA	3 laporan	5,600,000	
1 03 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas PSDA	100%	8,433,468,000	ASN lingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	8,430,668,000	ASN lingkup Dinas PSDA
1 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN					Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Dinas PSDA	1,260 org/bulan	8,419,468,000		Dinas PSDA	##### org/bulan	8,419,468,000	
1 03 01 2 02 05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dinas PSDA	1 laporan	7,000,000		Dinas PSDA	1 laporan	5,600,000.0	
1 03 01 2 02 07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Dinas PSDA	1 laporan	7,000,000		Dinas PSDA	1 laporan	5,600,000.0	
1 03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Dinas PSDA	100%	154,377,000	ASN lingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	78,633,000	ASN lingkup Dinas PSDA
1 03 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PSDA	12 bulan	2,000,000		Dinas PSDA	12 bulan	2,000,000	
1 03 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas PSDA	12 bulan	-		Dinas PSDA	12 bulan	-	
1 03 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dinas PSDA	12 bulan	2,000,000		Dinas PSDA	12 bulan	1,600,000	
1 03 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PSDA	75 kali	150,377,000		Dinas PSDA	75 kali	75,033,000	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

1	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PSDA	100%	295,289,000	ASN Iingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	337,554,000	ASN Iingkup Dinas PSDA
1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas PSDA	12 bulan	55,000,000		Dinas PSDA	12 bulan	55,000,000	
1	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PSDA	12 bulan	2,374,000		Dinas PSDA	12 bulan	8,424,000	
1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas PSDA	12 bulan	237,915,000		Dinas PSDA	12 bulan	274,130,000	
1	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PSDA	100%	145,416,000	ASN Iingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	145,405,000	ASN Iingkup Dinas PSDA
1	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas atau lapangan	Dinas PSDA	25 unit	145,416,000		Dinas PSDA	25 unit	145,405,000	
1	03	02				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Dinas PSDA	100%	6,619,632,000	ASN Iingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	2,849,199,000	ASN Iingkup Dinas PSDA
1	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal Pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan SDA Pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PSDA	100%	2,366,619,000	ASN Iingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	1,689,887,500	ASN Iingkup Dinas PSDA
1	03	02	2	01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung lainnya yang disusun	sidrap	1 dok	-		sidrap	1 dok	400,000,000	
1	03	02	2	01	21	Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	sidrap	10 unit	13,960,500		sidrap	1 unit	32,389,000	
1	03	02	2	01	46	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi	sidrap	7 km	2,327,517,000		sidrap	5 km	1,232,357,000	
1	03	02	2	01	61	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok P3A yang dibina dan diperdayaan	sidrap	30 kelompok	25,141,500		sidrap	30 kelompok	25,141,500	
1	03	02	2	01	62	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomtek yang diterbitkan	sidrap	15 dokumen	-		sidrap	20 dokumen	-	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

1	03	02	2	02		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder	Dinas PSDA	100%	4,253,013,000	ASN lingkup Dinas PSDA	Dinas PSDA	100%	1,159,311,500	ASN lingkup Dinas PSDA
1	03	02	2	02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	sidrap	4 km	2,293,151,000		sidrap	2 km	232,916,500	
1	03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	sidrap	2 km	1,374,596,000		sidrap	3 km	18,087,500	
1	03	02	2	02	21	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	sidrap	2 km	585,266,000		sidrap	25 km	908,307,500	
1	03	02	2	02	28	Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi yang dilaksanakan	sidrap	7 DI	-		sidrap	7 DI	-	
						JUMLAH PAGU				15,662,182,000				11,852,659,000	

BAB IV. PENUTUP

IV.I CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi
2. Banyaknya insfrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir
3. Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak
4. Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor akibat daya rusak air
5. Tingginya sedimentasi pada sungai yang menyebabkan pendangkalan
6. Masih banyaknya daerah irigasi yang masih bersifat semi teknis
7. Kurang operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat
8. Kurangnya petugas penjaga bending dan pengatur pintu air pada daerah irigasi kewenangan kabupaten sehingga banyak bangunan yang tidak berfungsi dengan baik
9. Rendahnya partisipasi Lembaga pengelolaan irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi

IV. II KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk pencapaian visi dan misi tersebut diatas sangat ditentukan oleh factor keberhasilan sebagai berikut :

1. Kerja sama yang baik oleh petugas pelayanan public, petani dan pelaku usaha
2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, terutama ditingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Kesigapan tenaga teknis di Unit Pelaksana Teknis untuk pengelolaan sumber daya air
4. Tersedianya sarana pendukung dan alat-alat kantor yang memadai untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

IV. III RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan tindak lanjut atas segala catatan penting diatas, antara lain :

1. Seluruh jajaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengimplementasikan Renja ini dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
2. Keberhasilan sector Sumber Daya Air harus didukung oleh sector-sektor lain yang terkait dan didukung oleh pendanaan yang memadai
3. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal dalam peningkatan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Perlu disadari bahwa keberhasilan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air tergantung dari partisipasi seluruh masyarakat
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan difokuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam OPD, sebagai sasaran program pada akhir tahun perlu dilakukan evaluasi dan analisis tentang apa yang telah dicapai maupun yang belum tercapai sebagai bahan untuk menyusun program berikutnya.

Pangkajene Sidenreng, 02 Juni 2025



**RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA,
TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



**PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) ini dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan kewajiban Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat serta Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhitungkan berbagai faktor yang berpengaruh pada upaya pencapaian kinerja seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada dilingkungan eksternal dan internal organisasi.

Disadari bahwa penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga sangat diharapkan adanya koreksi, masukan dari berbagai pihak di dalam penyempurnaannya, namun diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sebagai panduan untuk menyusun program Tahunan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan dan Perumahan Rakyat



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

NIP. 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	9
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	29
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2025, mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng

Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dilakukan sebagai upaya pelaksanaan RPJMD tahun 2025 - 2029. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2025 merupakan momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tahun pertama implementasi visi, misi kepala daerah terpilih periode 2025-2030. Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang diarahkan untuk mewujudkan Tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu **"Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia"**. Tema tersebut mencerminkan upaya penguatan sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup hidup masyarakat melalui pengembang SDM yang berkualitas. Melalui tema ini, Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen untuk menjadikan tahun 2025 sebagai tahun percepatan transformasi ekonomi daerah yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri unggulan;

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas;
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim;
5. Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religious;
6. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan;
7. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

program dan kegiatan dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran dan adanya bergeseran belanja pada beberapa kegiatan dan renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan renja OPD
- b. Tahap penyajian rancangan renja OPD

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
2. Mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program / kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor – Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Millenium Development Goalds);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan / bidang urusan / program / kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2025.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2025 anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 53.214.236.000,00 (Sebelum Perubahan) dan Rp. 39.912.206.000,00 (Setelah Perubahan).

Terdapat 12 program, 17 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan serta realisasi sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 realisasi belanja Rp. 5.010.839.839,00 (9,42 %) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2025, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya

pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Tahun 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1.b (RENSTRA PERUBAHAN 2024 - 2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah		: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat									
Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tri Wulan I SKPD Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 10÷(9,4*100)
			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9-7	
1 03 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Calupan Penunjang Urusan Pemerintahan	300 Persen	100	100	25	0,25	50	50
1 03 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	300 Persen	100	100	25	0,25	50	50
1 03 01 2.01 0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	12 Dok	4	4	2	0,5	2	16,67
1 03 01 2.01 0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok	1	1	1	1	1	33,33
1 03 01 2.01 0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3 Dok	1	1	1	1	1	33,33

1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3	Dok	1	1	1	1	2	66,67
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3	Dok	1	1	1	1	2	66,67
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15	Lap	5	5	3	0,6	8	53,33
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Lap	3	3	1	0,33	4	44,44
1	03	01	2.02	Administ	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	300	Persen	100	100	25	0,25	50	16,67
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186	Orang/Bulan	62	62	62	1	124	66,67

1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54	Laporan	18	18	9	0,5	27	50,00
1	03	01	2.06	Administ	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	300	Persen	100	100	25	0,25	125	41,67
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Paket	1	1	0,5	0,5	0,5	16,67
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390	Laporan	130	130	60	0,46	60	15,38
1	03	01	2.08	Penyediaan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	300	Persen	100	100	25	0,25	50	16,67

1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	300	Laporan	100	100	25	0,25	25	8,33
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	36	Laporan	12	12	3	0,25	3	8,33
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan	12	12	3	0,25	3	8,33
1	03	01	2.09		Penyelenggaraan Barung Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah pemungutan urusan pemerintahan	300	Persen	100	100	25	0,25	50	16,67
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	45	Unit	15	15	4	0,27	4	8,89
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	36	Unit	12	12	3	0,25	3	8,33
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	64	Persen	60,81%	62	61,5	0,99	61,5	96,09
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	64	Persen						
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	47	Km	10	30	4	0,13	4	40,00
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi	29	Km	9	20	3	0,15	3	25,00
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	45	Km	20	20	7	0,35	7	25,00
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	114	M	20	30	3	0,10	3	8,00
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	204	M	0	0	0	0,00	0	0,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	300	Persen	100	100	50	0,50	50	16,67
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih	300	Persen	100	100,00	50,00	0,50	50,00	16,67

1	03	11	2.01	00016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan	150	Orang	50	50,00	0,00	0,00	0		0,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	98,5	Persen	97,89	98	97,5	0,99	97,3		98,78
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	98,5	Persen	97,89	98	97,5	0,99	97,3		98,78
1	03	03	2.01	00026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3	Liter/Detik	1	1	0,5	0,5	1		33,33
1	03	03	2.01	00028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3	Liter/Detik	1	1	0,5	0,5	1		33,33
1	03	03	2.01	00032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	120	SR	40,00	0	0	0,00	0		0,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	97	Persen	95	96	95,5	0,99	94,5		97,42
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersantitas	97	Persen	95	96	95,5	0,99	94,5		97,42
1	03	05	2.01	00025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Tepusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Tepusat Skala Perkotaan yang dibangun	636	M3/hari		0	0	0	0		0

1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1515	Rumah tangga	500	505	150	0,297029703	150	9,90
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah penyediaan armada/pengangkutan lumpur tinja	3	Unit	1	1	0	0	0	0
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	63,5	Persen	62,7	63	63	1,00	62,3	98,11
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi baik	63,5	Persen	62,7	63	63	1,00	62,3	98,11
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran Drainase perkotaan yang dibangun	12000	Sistem Drainase Perkotaan	5000	3000	1000	0,33	1000	8,33
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan	300	Persen	100	100	25	0,25	50	50

1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB	300	Persen	100	100	25	0,25	50	50
					Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penerbitan persyaratan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3	Dok	1	1	0,5	0,5	16,67	

1	03	08	2.01	0021	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6	Dok	2	2	1	0,5	1	16,67
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata	300	Pesen	100	100	25	0,25	50	16,67
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang tertata	300	Pesen	100	100	25	0,25	50	16,67
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	12	Kawasan	4	4	1	0,25	1	8,33
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	100	Pesen	100	100	25	0,25	50	50,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	100	Pesen	100	100	25	0,25	50	50,00
1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	1	Dok	1	1	0,5	0,50	0,5	50,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	300	Pesen	100	100	25	0,25	50	16,67
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni	300	Pesen	100	100	25	0,25	50	16,67

1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi mwan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten / Kota	1	Dok	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	50,00
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana Kabupaten / Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	1	Dok	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	50,00
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten / Kota yang diverifikasi	1	Dok	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	50,00
1	04	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98	Persen	97	97.5	97	0.995	0.995	96.75	50
1	04	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Menurunnya luas permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha	98	Persen	97	97.5	97	0.995	0.995	96.75	50
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	60	Unit Rumah	20	20	0	0	0	0	0,00
1	04	05	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	78.5	Persen	76.5	77.8	77.3	0.994	0.994	76.25	76.25
1	04	05	2.01		Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan	78.5	Persen	76.5	77.8	77.3	0.994	0.994	76.25	76.25

1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3	Lokasi	1	1	1	1,000	1	33,33
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	300	Persen	100	100	25	0,25	50	16,67
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan	300	Persen	100	100	25	0,25	50	16,67
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3	Dok	1	1	0,5	0,5	0,5	16,67

Pungkajene Sidenreng, Juli 2025

Kepala Dinas,

 Drs. ABDUL RASYID, M.Si

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Kebutuhan prasarana jalan yang berbasiskan pada tata ruang dan memenuhi standar keselamatan jalan dan jembatan serta berwawasan lingkungan.
- 2). Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.
- 3). Belum optimalnya kondisi infrastruktur perdesaan di kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah.
- 4). Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- 5) Adanya kerusakan jalan akibat muatan berlebih (over loading)
- 6) Masih belum terpenuhinya sarana air minum terhadap seluruh masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang.
- 7) Belum optimalnya bangunan drainase sehingga masih sering terjadi genangan air pada saat musim penghujan.
- 8) Belum tercapainya Sanitasi masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang 100 %.
- 9) Masih ada beberapa wilayah yang masuk wilayah kumuh.
- 10) Ada beberapa masalah pertanahan yang menyangkut asset yang tanahnya belum dibebaskan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai pelaksana setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum DAU Tahun 2025, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Sejalan dengan tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 - 2029 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 terdiri dari :

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun
	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi
	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dikerjakan
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

	dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana pengangkutan
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi baik
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terbangun
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen tersusun
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan	Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun

	Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang tertata
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun

	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
10.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Menurunnya luas permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
11.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang dibangun
12.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian kasus tanah Negara

	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang dibebaskan / diganti rugi

Tabel III.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat		TAHUN ANGGARAN 2025									
		SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
Kode	Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	BKCIPTAPERAB	100 Persen	6.936.100.657		BKCIPTAPERAB	100 Persen	6.859.424.747		
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan-penganggaran dan		100 Persen	149.545.000			100 Persen	87.074.000		
1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun		4 Dok	8.000.000			4 Dok	8.000.000		
1 03 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.000.000		
1 03 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		1 Dok	5.000.000			1 Dok	4.935.000		

1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	5.000.000	1	Dok	5.000.000	
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pembahasan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	5.000.000	1	Dok	6.094.000	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5	Lap	116.545.000	5	Lap	53.045.000	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Lap	5.000.000	3	Lap	5.000.000	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	5.628.804.157	100	Persen	5.674.734.747	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	Orang/Bulan	5.573.680.157	62	Orang/Bulan	5.635.660.747	
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	55.124.000	18	Laporan	39.074.000	

1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	274.196.500	100	Persen	143.621.000	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	25.000.000	1	Paket	19.766.000	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Laporan	249.196.500	130	Laporan	123.855.000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	466.325.000	100	Persen	536.765.000	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	750	Laporan	7.500.000	650	Laporan	7.500.000	

1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan		12	Laporan	226.020.000		12	Laporan	226.020.000		
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	Laporan	232.805.000		12	Laporan	303.245.000		
1	03	01	2.09		Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan burung milik daerah penunjang urusan pemerintahan	BICIPTAPER	100	Persen	417.230.000		100	Persen	417.230.000		
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		15	Unit	244.430.000		15	Unit	244.430.000		
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya		12	Unit	172.800.000		12	Unit	172.800.000		
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	Kab. Sidrap	98	Persen	175.000.000		97,89	Persen	-		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	Kab. Sidrap	98	Persen	175.000.000		97,89	Persen	-		
1	03	03	2.01	0026	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah diperluas		1	Liter/Detik	175.000.000		0	Liter/Detik	-		
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan	Kab. Sidrap	96	Persen	4.101.498.500		96	Persen	3.579.437.500		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Kab. Sidrap	96	Persen	4.101.498.500		96	Persen	3.579.437.500		
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah penyediaan armada/pengangkutan lumpur tinja		1	Unit	249.998.500		0	Unit	-		
1	03	05	2.01	0039	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik		505	Rumah tangga	3.851.500.000		505	Rumah tangga	3.579.437.500		
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat	Kab. Sidrap	63	Persen	-		63	Persen	77.500.000		

1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi baik	Kab. Sidrap	63	Persen	-	Kab. Sidrap	63	Persen	77.500.000	
1	03	06	2.01	0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran Drainase perkotaan yang dibangun		0	Sisten Drainase	-		5000	Sisten Drainase	77.500.000	

1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Kab. Sidrap	100	Persen	6.374.571.500	Kab. Sidrap	100	Persen	5.214.850.000	
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten / Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB	Kab. Sidrap	100	Persen	6.374.571.500	Kab. Sidrap	100	Persen	5.214.850.000	
1	03	08	2.01	0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		2	Dok	6.274.571.500		2	Dok	5.085.415.000	
1	03	08	2.01	0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penerbitan persyaratan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		1	Dok	100.000.000		1	Dok	129.435.000	
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata	Kab. Sidrap	100	Pesen	400.000.000	Kab. Sidrap	100	Pesen	3.017.500.000	
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang tertata	Kab. Sidrap	100	Pesen	400.000.000	Kab. Sidrap	100	Pesen	3.017.500.000	

1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah supervisi penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	4	Kawasan	400.000.000			4	Kawasan	3.017.500.000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	63	Persen	33.297.065.343			63	Persen	19.600.453.853	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	63	Persen	33.297.065.343		Kab. Sidrap	63	Persen	19.600.453.853	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	30	Km	11.499.135.129			30	Km	10.655.889.389	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi	20	Km	11.567.787.214			20	Km	4.870.746.664	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	20	Km	8.700.642.000			20	Km	2.470.367.500	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	10	M	1.529.501.000			10	M	1.603.450.300	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	100	Persen	250.000.000			100	Persen	216.266.500	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih	100	Persen	250.000.000		BICIPTAPER	100	Persen	216.266.500	

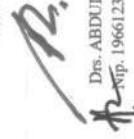
1	03	11	2.01	0016	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analis yang mengikuti pelatihan	50	Orang	250.000.000			50	Orang	216.266.500	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	100	Persen	1.040.000.000		Kab. Sidrap	100	Persen	983.187.700	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	100	Persen	1.040.000.000		Kab. Sidrap	100	Persen	983.187.700	

1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten / Kota				1	Dok	1.040.000.000						1	Dok	983.187.700	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni	Kab. Sidrap	100	Persen	100	Persen	120.000.000						100	Persen	105.475.700	
1	04	02			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana Kabupaten / Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah		1	Dok	1	Dok	40.000.000						1	Dok	39.478.200	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten / Kota		1	Dok	1	Dok	40.000.000						1	Dok	39.473.000	
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten / Kota yang terverifikasi														26.524.500	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Kab. Sidrap	97,50	Persen	97,50	Persen	200.000.000						97,50	Persen	199.030.000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Memerunya luas permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Sidrap	97,50	Persen	97,50	Persen	200.000.000						97,50	Persen	199.030.000	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki		20	Unit Rumah	20	Unit Rumah	200.000.000						20	Unit Rumah	199.030.000	

1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	Kab. Sidrap	77,8	Persen	20.000.000		Kab. Sidrap	77,8	Persen	14.080.000	
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan	Kab. Sidrap	77,8	Persen	20.000.000		Kab. Sidrap	77,8	Persen	14.080.000	
1	04	05	2.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		1	Lokasi	20.000.000			1	Lokasi	14.080.000	
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Kab. Sidrap	100	Persen	300.000.000		Kab. Sidrap	100	Persen	45.000.000	
2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan		100	Persen	300.000.000			100	Persen	45.000.000	
2	10	05	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		1	Dok	300.000.000			1	Dok	45.000.000	
				JUMLAH					53.214.236.000					39.912.206.000	

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

Kepala Dinas,



Dr. ABDUL RASYID, M.Si
Ntp. 196612301986111001

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Program Tahunan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng,

Juli 2025

Kepala Dinas,



Drs. ABDUL RASYID. M.Si

Nip. 196612301986111001



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jln Harapan Baru, Kompleks SKPD Blok B, No. 12 Pangkajene, Sidenreng

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan kewajiban sebagai bagian dari perencanaan suatu SKPD, untuk selanjutnya dijalankan melalui program dan kegiatan sesuai pula merupakan Rangkaian Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun, demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Pangkajene, 07 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

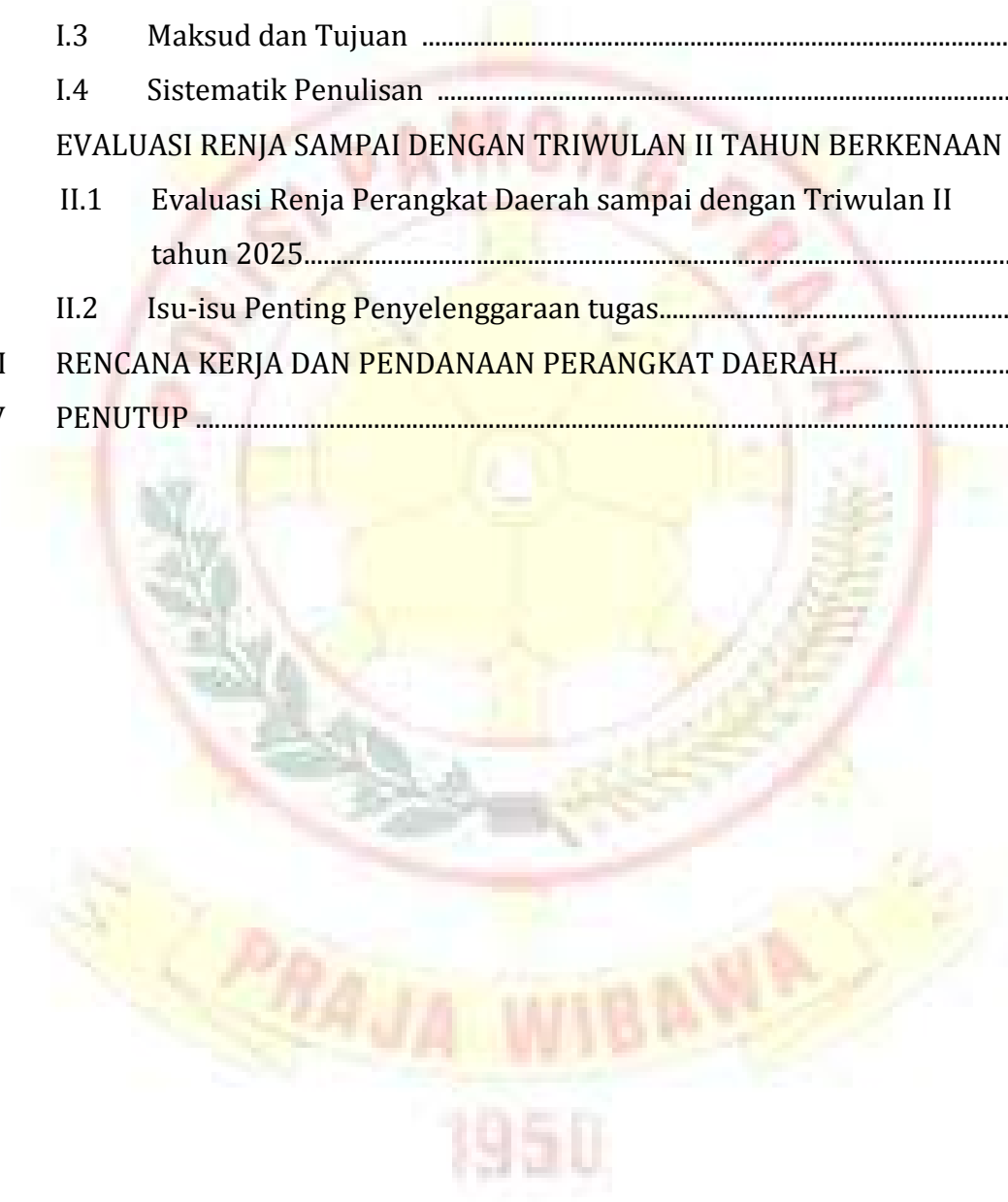
Kabupaten Sidenreng Rappang



USMAN DEMANA, S.Sos

NIP. 19631231 198611 1 045

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1 Latar Belakang	4
I.2 Landasan Hukum	6
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.4 Sistematik Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.....	9
II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas.....	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	26
BAB IV PENUTUP	42



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan RENJA mempunyai tugas penting dalam sistim perencanaan daerah. Karena Perubahan RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama-sama DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga menetapkan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Namun, seiring dengan dinamika masyarakat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Maka, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Sehingga, titik berat tugas Satuan Polisi Pamong

Praja, lebih diarahkan kepada Penegak Peraturan Daerah dan ditambahkan dengan tugas Perlindungan Masyarakat.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan implementasi Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas. Maka, perlu kiranya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 1 tahun. RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 17 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi sulawesi selatan tahun 2025 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten sidenreng Rappang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Sidenreng
9. Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2021 Nomor 1);

10. Pereraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 (Lemaran daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 30)
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2023 Nomor 30)

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai pedoman dan arah bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2025 dan merupakan panduan, pengevaluasian pelaksanaan program/kegiatan dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029.

I.4. Sistematika Penulisan.

Sistematik penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang Tahun 2024, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Landasan Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Bab ini memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Pokok –pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah;dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan polisi pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan adalah untuk Mengetahui sejauh mana Kemampuan Dinas Melaksanakan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang di hadapi Satpol PP dan Damkar dapat di lihat dari hasil realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sebagai berikut.

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD,
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan. penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan,
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jasa,
- penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,
- Kegiatan pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

❖ Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan,
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Tidak Memenuhi Target Kinerja
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

Adapun faktor yang menyebabkan realisasi kegiatan tidak memenuhi Target antara lain :

- ◆ Fakfor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran Jadwal tidak dapat ditentukan
- ◆ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Restra SKPD : tidak tercapainya target Kinerja Program
- ◆ Kebijakan/tindakan perencanaan dan penggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : Anggaran dan target Kinerja disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Pada Triwulan I tahun anggaran berjalan, pelaksanaan kegiatan dalam seluruh program kerja satuan Polisi Pamong Prajan dan Pemadam Kebakaran menunjukan bahwa belum ada satu pun Kegiatan yang mencapai target sesuai rencana kerja.

Adapun faktor utamayang menyebabkan capaian belum terpenuhi.

1. Keterlambatan Proses Administrasi dan Penggaran
2. Pengaruh perubahan kebijakan dan penyesuaian Internal

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

❖ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- ◆ Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Adapun faktor yang menyebabkan realisasi kegiatan melebihi target yaitu.

1. Target awal mungkin terlalu rendah sehingga realisasi normal terlihat melampaui target
2. Terjadi pengurangan pagu disaat sudah terealisasi kegiatan tersebut.

TABEL II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I tahun 2025 (tahun berjalan)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat at Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d triwulan I tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025+2029)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
						WAJIB								
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	5	2				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA	100%						
1	5	2	2	1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%						
1	5	2	2	1	1	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</i>	164	61 Laporan	4 Laporan	27 Laporan	6,75	80 Laporan	0,43
1	5	2	2	1	4	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Personil Perlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan</i>	38	14 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25	14 Laporan	36,8

[illegible]

1	5	4				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN	100%	259				259	259
1	5	4	2	1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	36				36	260
1	5	4	2	1	1	<i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani</i>	36	12 Dokumrn	12 Dokumrn	4 dokumen	0,3	36 Dokumen	1
1	5	4	2	1	6	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	<i>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan</i>	5	0	4 unit	0	0	5 unit	1
1	5	4	2	1	7	<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i>	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih</i>	1	0	0	0	0	1 orang	1
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100				100	38121
1	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100				100	265
1	2	1	2	1	1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	5	0	0	0	0	5 dokumen	1
1	2	1	2	1	2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana</i>	18	0	9 dokumen	3	0,3	9 dokumen	4,38
1	2	1	2	1	3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana</i>	18	0	9 dokumen	0	0	9 dokumen	4,38
1	2	1	2	1	4	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD</i>	9	0	0	0	0	9 laporan	1
1	2	1	2	1	5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana</i>	9	0	0	0	0	9 Dokumen	1
1	2	1	2	1	6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian</i>	9	0	0	0	0	9 dokumen	1

						Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215	100	65	29	0,44	65	0,302
1	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215	60 Orang/bulan	65 Orang/bulan	21	0,32	60 .Orang/bulan	1
1	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana	12	0	0	0	0	12 dokumen	1
1	2	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana	12	0	0	0	0	12 dokumen	1
1	2	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Terlaksana	18	0	0	0	0	18 laoran	1
1	2	1	2	3		XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1	0	0	0	1	1
1	2	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun	1	0	0	0	0	1 dokumen	1
1	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana	1	0	0	0	0	1 laporan	1
1	2	1	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun	1	0	0	0	0	1 dokumen	1
1	2	1	2	5		XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	0	0	0	0	0
1	2	1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan	1	0 0	0	0	0	1 laoran	1
1	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan	2	1 paket	0	0	0	2 paket	1
1	2	1	2	5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana	1	0	0	0	0	1 laporan	1
1	2	1	2	6		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	12	12	4		285	285

1	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan	5	0	0	0	0	5 paket	1
1	2	1	2	6	2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	12	12	4	0,3	36	1
1	2	1	2	6	3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1 paket	1 paket	0		173	1,384
1	2	1	2	6	5	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1 paket	1 paket			1 paket	1
1	2	1	2	6	6	XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	4 dokumen	4 dokumen	1	0,25	12 dokumen	1
1	2	1	2	6	9	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	35 laporan	35 laporan	11	0,31	35 laporan	0,33
1	2	1	2	7		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	0	0	0	0	0
1	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang Diadakan	5	0	0	0	0	0	5
1	2	1	2	7	6	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	0	0	0		2	1
1	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1	0	0	0	0	2	1
1	2	1	2	8		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	39 laporan	39 laporan	3	0,0769	39	0,39
1	2	1	2	8	1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45	15 laporan	15 laporan	0	0	15	0,33
1	2	1	2	8	2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	12 laporan	12 laporan	3	1,91	12 Laporan	0,33
1	2	1	2	8	3	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	0	0	0	0	0	0
1	2	1	2	8	4	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	12 laporan	12 laporan	4	0,33	12	0,33
1	2	1	2	9		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	21 unit	21 unit	5,5	0,26	21	0,21

1	2	1	2	9	1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	54	18 unit	18 unit	4,5	0,25	18	0,33
1	2	1	2	9	2	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	9	3 unit	3 unit	1	0,33	0,33	0,036
1	2	1	2	9	9	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	0	0	0	0	0	1



2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah Berisikan Uraian mengenai :

Isu-isu Penting dalam pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangat dipengaruhi oleh luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 11 Kecamatan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan kantrantibmas dan kebakaran termasuk kebakaran hutan saat musim kemarau. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pada pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat

- Masih perlunya kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
- Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
- Masih perlunya penambahan anggaran.
- Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang terutama Misi ke 7. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan

peningkatan kapasitas aparat Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

4. Adapun Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

- Terbatasnya sumber daya manusia.
- Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi resiko umum pada setiap pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum (Perda dan Perbub).
- Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

- a. Koordinasi yang baik antar instansi di mana dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi.
Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kerjasama dengan pihak luar
Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

5. Rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

- Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008.
- Aspek kebutuhan personil, perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk unit Satpol PP Kecamatan yang secara ex-officio dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil kecamatan. Disamping itu untuk Penegakan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada.
- Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patrol sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patrol 3 kali dalam sehari.
- Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab III fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terdapat 3 (Tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Adapun Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.151.962.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.952.868.000	
1	5	2	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.151.962.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.952.868.000	
1	5		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.562.357.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.522.337.800	

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3. Dokum en			Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3. Dokumen	0	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokum en "			Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	0	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokum en "	2.416.500		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	1.949.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokum en "	2.323,500		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	1.858.500	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokum en	0		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	0	

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	2.416.500		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	1.949.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	2.323,500		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	1.858.500	
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.224.028.000,		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.224.028.800	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660. Orang/ bulan	5.224.028.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660. Orang/ bulan	5.224.028.800	

					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0	

				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Dokumen		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Dokumen	0	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Dokumen	0	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		0	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan,	1.00 Paket	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua	1.00 Paket	0	

						Semua Kel/Desa				Kecamatan, Semua kel/Desa				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokum en	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Dokumen	0	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		151.561.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		89.737.000	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	0	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	9.000.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	9.000.000	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	2.329.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	2.329.000	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan,	1.00 Paket	10.060.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua	1.00 Paket	8.048.000	

						Semua Kel/Desa				Kecamatan, Semua kel/Desa			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Dokumen	2.000.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	4.00 Dokumen	2.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.00 Lapora n	137.172.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	35.00 Laporan	68.360.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		0
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan,	1.00 Unit	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua	1.00 Unit	0

						Semua Kel/Desa			Kecamatan, Semua kel/Desa			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	280	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.Unit	0	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.Unit	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		101.396.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		99.132.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15. Lapora n	900.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	15. Laporan	900.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan,	12. Lapora n	48.600.000	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua	12. Laporan	48.600.000

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kel/Desa				Kecamatan, Semua kel/Desa				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Laporan	1.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Laporan	0	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12. Laporan	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12. Laporan	0	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		80.632.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		105.632.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18. Unit	65.632.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18. Unit	65.632.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	15.000.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	15.000.000	

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	25.000.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	25.000.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.817.704.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		1.726.383.200	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.717.704.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		1.657.763.000	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.00 Dokumen	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	15.00 Dokumen	0	

					Kabupaten/Kota								
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Dokumen	128.000.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12.00 Dokumen	123.013.500
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.00 Orang	49.000.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	35.00 Orang	0
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Dokumen	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	4.00 Dokumen	0
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Dokumen	0

				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.00 laporan	1.514.140.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	80.00 laporan	1.508.749.500	
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yangdilakukan Penindakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.00 Laporan	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	55.00 Laporan	0	
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.00 Laporan	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	10.00 Laporan	0	

					Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Unit	26.000.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	4.00 Unit	26.000.000
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		68.620.200
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Laporan	0	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	2.00 Laporan	0
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.00 Laporan	100.000.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	84.00 Laporan	68.620.200
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua	5.00 Laporan	0	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang,	5.00 Laporan	0

					yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa				Semua Kecamatan, Semua kel/Desa			
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		0	
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	0	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Laporan	0	
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.714.901.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		2.656.147.000	
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.714.901.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		2.656.147.000	
					Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulanga	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua	12.00 Dokumen	2.714.901.000	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang,	12.00 Dokumen	2.656.147.000	

						n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota Setiap Tahunnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa				Semua Kecamatan, Semua kel/Desa			
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Lapora n	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12.00 Laporan	0	
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulanga n Kebakaran dan Non Kebakaran	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Dokum en	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12.00 Dokumen	0	
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Orang	0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	2.00 Orang	0	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0
--	--	---	---	--	-----------	---	--	-----------	---

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 ini merupakan Perubahan Rencana Kerja yang disusun dalam rangka menunjang Rencana Strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) pemerintah daerah Sidrap tahun 2025.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bahan dalam penyusunan usulan penilaian program dan kegiatan dengan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD T.A 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun lalu sehingga pelaksanaannya dapat lebih berkualitas.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025. Maka, penetapan prioritas pembangunan yang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Sidrap maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Dokumen ini telah menyusun dengan mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Satpol PP,serta memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti RPJMD dan RKPD tahun 2025, Penyusunan Renja perubahan ini juga mempertimbangkan hasil Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

Demikian halnya Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan perbandingan dalam pencapaian kinerja organisasi ke depan, terutama di dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Panglajene, 07 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran



USMAN DEMMA, S.Sos

NIP. 19651231 198611 1 045





RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TA. 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng,

KEPALA PELAKSANA BPBD,



H. SUDARMIN, SE., M. Si
NIP. 196705021995031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	5
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	5
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2025	13
BAB IV : PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Triwulan I Tahun 2025	6
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2025	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2023 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan penyesuain target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.
- b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :
 - 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,
 - 2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
 - 3) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN
	Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	Bab ini memuat renca kerja perubahan dan pendanaan Badan Penanggulangan bencana Daerah
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2025 adalah :

1. Proses pelaksanaan dan realisasi kegiatan yang cukup lambat karena penggunaan aplikasi barang dan jasa yang tergolong baru memerlukan waktu lebih lama terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Perencanaan yang ada fokus pada tindakan dan belum fokus pada apa yang akan dicapai.
3. Masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh kurangnya data yang valid.

Berdasarkan kendala yang dihadapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi barang dan jasa dan penyediaan SDM yang kompeten dalam pengoperasiannya.
2. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Mengupayakan pengumpulan data lapangan yang valid melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dapat dilihat pada *Tabel 2.1 berikut* :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = (9/4*100)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)								
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	98,70 Persen	100 Persen	17,88 Persen	17,88	116,58	116,58
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	4	33,33
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	4	33,33
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0	12	33,33



						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	3 Laporan	16,66	21	38,88	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60/36 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	25	15	25	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	0	0	18	33,33	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25	15	41,66	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0	0	10	33,33	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	3 Laporan	7,50	43	35,83	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	10 Unit	2 Unit	3 Unit	0	0	2	20	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	3 Unit	0	0	2	25	
1			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25	15	41,66	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	0	0	18	33,33	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25	15	41,66	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25	15	41,66	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan	43 Unit	12 Unit	12 Unit	0	0	12	27,90	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	10 Unit	12 Unit	0	0	10	27,77	

1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	1	25
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen	937 Persen	100 Persen	0	0	937	937
						Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 Persen	1.087 Persen	100 Persen	0	0	1.087	1.087
						Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	100	100
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	173.799 Orang	937 Orang	57.933 Orang	0	0	937	53,91
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang	80 Orang	100 Orang	0	0	80	26,66
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	173.799 Orang	150 Orang	57.933 Orang	0	0	150	8,63
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	27 Unit	0	25 Unit	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	360 Orang	0	360 Orang	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	0	10 Keluarga	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	0	2 Kawasan	0	0	0	0

1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	6 Orang	0	4 Orang	1 Orang	25	1	16,66
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	12 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	0	0	4	33,33
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.060 Orang	1.369 Orang	1.000 Orang	0	0	1.369	44,73
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	3 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0	0
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	0	0	2	66,66
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	21 Orang	7 Orang	7 Orang	0	0	7	33,33
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.060	1.369 Orang	1.000 Orang	0	0	1.369	44,73
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	1	33,33
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	0	0	2	16,66

1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1	50
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	1	33,33
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0

Kepala Pelaksana BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Nip. 19670502 199503 1 003

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumberdaya yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak lanjut yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Permasalahan	Hambatan
Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki Peta rawan bencana	Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana
Masih adanya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan	Penegakan hukum dibidang tata ruang masih perlu ditingkatkan
Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan serta penanganan bencana	

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Peluang dan tantangan yang dihadapi

Peluang	Tantangan
Berkembangnya teknologi di bidang kebencanaan	Peningkatan tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan
Peningkatan kecepatan akses informasi	
Tingginya perhatian Dunia Usaha, LSM, Lembaga Pendidikan dan Ormas dalam bidang Penanggulangan Bencana	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas penanggulangan bencana.
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2025

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Perubahan BPBD Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub. Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 3.754.283.000,- Sumber Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
- 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 7) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
- 8) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 9) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- 2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

4. Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana

- 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

Kabupaten/Kota

- 3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 5) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- 6) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)									
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	2.723.469.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	2.636.617.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	10.000.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	8.000.000	Aparatur
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	4 Dokumen	7.000.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	4 Dokumen	5.550.000	Aparatur

1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	3.000.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12 Laporan	2.450.000	Aparatur
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kab. Sidenreng Rappang	18 Laporan	2.214.454.500	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	18 Laporan	2.212.454.500	Aparatur
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	20/12 Orang/Bulan	2.204.454.500	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	20/12 Orang/Bulan	2.204.454.500	Aparatur
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Makassar, Jakarta, Bandung	18 Laporan	10.000.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang, Makassar, Jakarta, Bandung	18 Laporan	8.000.000	Aparatur
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Kab. Sidenreng Rappang	12	166.707.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	12	86.353.500	Aparatur dan Masyarakat

1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	10 Laporan	6.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	10 Laporan	6.000.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	40 Laporan	160.707.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	40 Laporan	80.353.500	Aparatur
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Sidenreng Rappang	10 Unit	26.303.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	10 Unit	26.303.000	Aparatur
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappa	3 Unit	26.303.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappa	3 Unit	26.303.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	129.901.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	127.402.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	18 Laporan	14.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	18 Laporan	11.501.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	31.901.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	31.901.000	Aparatur dan Masyarakat

1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	84.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	84.000.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan	Kab. Sidenreng Rappang	13 Unit	176.104.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	13 Unit	176.104.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	12 Unit	56.104.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	12 Unit	56.104.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	120.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	120.000.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 Persen				100 Persen		

					Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	1.199.617.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	1.117.666.000	Aparatur dan Masyarakat
						Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 Persen				100 Persen		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Sidenreng Rappang	57.933 Orang	4.311.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	57.933 Orang	2.783.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai	Kab. Sidenreng Rappang	100 Orang	4.311.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100 Orang	2.783.000	Aparatur dan Masyarakat

						jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Sidenreng Rappang	57.933 Orang	815.160.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	57.933 Orang	792.260.400	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Kegiatan	3.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Kegiatan	2.411.100	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kab. Sidenreng Rappang	25 Unit	2.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	25 Unit	1.695.000	Aparatur dan Masyarakat

						sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya								
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Sidenreng Rappang	360 Orang	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	360 Orang	8.986.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Sidenreng Rappang	10 Keluarga	3.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	10 Keluarga	2.748.000	Masyarakat
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	2 Kawasan	3.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	2 Kawasan	2.862.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Sidenreng Rappang	4 Orang	210.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	4 Orang	207.073.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	512.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	511.501.000	Aparatur dan Masyarakat

1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	2.160.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.662.500	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Sidenreng Rappang	240 Kawasan	70.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	4 Kawasan	53.321.800	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Sidenreng Rappang	1.000 Orang	66.157.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1.000 Orang	38.672.600	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.457.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	212.000	Aparatur dan Masyarakat

						Prioritas								
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.283.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	7 Orang	15.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	7 Orang	106.000	Masyarakat
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	1.000 Orang	19.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1.000 Orang	37.005.600	Masyarakat
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	66.000	Aparatur dan Masyarakat

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulan n Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	313.988.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	283.950.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.000.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	823.500	Aparatur
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	800.000	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	6.537.500	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	653.500	Aparatur dan Masyarakat

1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Kegiatan	299.988.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Kegiatan	274.301.500	Aparatur dan Masyarakat
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.000.000	Aparatur	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	834.000	Aparatur

Kepala Pelaksana BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Nip. 19670502 199503 1 003

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan visi dan misi daerah serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- i. Sekretariat, bidang dan seluruh staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- ii. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) implementasi dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pangkajene Sidenreng,

KEPALA PELAKSANA BPBD,



H. SUDARMIN, SE., M. Si
NIP. 196705021995031003



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2025**





KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan kinerja dan penganggaran perangkat daerah untuk tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial. Melalui Perubahan Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025
Kepala Dinas Sosial,


WAHIDAH ALWI, S.P., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 7

2.1. Evaluasi Renja PD Sampai Triwulan II Tahun 2025..... 7

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD..... 13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 16

BAB IV PENUTUP 21



DAFTAR TABEL

Tabel II.1. : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian
Renstra PD s/d Tahun Triwulan II Tahun 2025 9

Tabel III.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2025 17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, maka setiap perangkat daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Sosial berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2025 dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tentunya berdampak pada pencapaian target kinerja, sehingga dengan perubahan rencana kerja diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dalam rangka pencapaian indikator-indikator kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 berdasar pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 serta Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025 dan RKPD-Perubahan Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan



terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RKPD) dan Renstra 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan



Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan



PERUBAHAN RENJA 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada sisa tahun berjalan di Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah:

- 1) Untuk menyesuaikan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,



PERUBAHAN RENJA 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah bidang sosial Tahun 2025.

- 2) Menyesuaikan pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a) Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, yang memenuhi target kinerja dan melampaui target kinerja yang direncanakan.
- b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, penyebab tercapainya dan melebihi target kinerja yang direncanakan.
- c) Implikasi/dampak yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Dinas Sosial.
- d) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan Perubahan Renja Tahun 2025;
- b) Memperhatikan keberlanjutan dalam menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.



PERUBAHAN RENJA 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- c) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- d) Tujuan yang dikehendaki;
- e) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- f) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
	URUSAN SOSIAL								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	100	100	100	0	0%	0	0%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	100	100	100	0	0%	0	0%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	6	6	0	0%	0	0%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	0	0%	0	0%
		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	0	0%	0	0%
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	0	0%	0	0%
		Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100	100	100	0	0%	0	0%

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100	100	100	0	0%	0	0%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45	33	15	0	0%	0	0%
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	6510	2170	2170	0	0%	0	0%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	0	10	0	0%	0	0%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	98	98	98	0	0%	0	0%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	98	98	98	0	0%	0	0%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	28853	12951	12951	0	0%	0	0%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	165	55	55	0	0%	0	0%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	100	43	43%	43	14%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100	100	100	43	43%	43	14%
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900	300	300	129	43%	129	14%

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100	100	100	0	0%	0	0%
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	111	37	37	0	0%	0	0%
	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100	100	100	0	0%	0	0%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	0	0%	0	0%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	9	1	3	0	0%	0	0%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100		0%	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	33	33%	11	11%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	6	6	2	33%	2	11%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	25	25%	16	16%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900	300	300	75	25%	75	8%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	12	12	3	25%	3	8%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	1	1%	0	0%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12	12	0	0%	0	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630	210	210	2	1%	2	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	200	200%



PERUBAHAN RENJA 2025 DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500	1500	1500	0	0%	0	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	0	0%	12	33%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	1	8%	13	108%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	0	0%	100	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	13	13	0	0%	13	33%



Melihat hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tingkat capaian masih banyak kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasinya masih rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi misalnya sumber daya kurang memadai, ada pula kegiatan yang jadwal pelaksanaannya di triwulan II, III dan IV serta kondisi eksternal lainnya.

Dari 6 Program dan 11 kegiatan yang direncanakan, belum ada kegiatan yang mencapai tingkat realisasi minimal 50% sampai akhir Triwulan I (Maret 2025), selebihnya belum terealisasi. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait, dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras stakeholder dalam mendukung realisasi sejumlah kegiatan tersebut. Serta diperlukan upaya yang lebih keras, fokus, dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan pada Tahun 2025.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial bisa dilihat dari sejauh mana mereka berhasil menjalankan fungsi pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Tingkat kinerja Dinas Sosial di banyak daerah cukup berjalan, terutama dalam penyaluran bansos dan layanan darurat. Namun, aspek kualitas pelayanan dan pemberdayaan sosial masih perlu ditingkatkan, terutama pada ketepatan data, responsif terhadap kasus sosial, peningkatan kapasitas SDM dan inovasi layanan digital.



2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Renja 2025 Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah belum maksimalnya data real bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kurang memiliki keterampilan, serta sarana dan prasarana lingkungan yang sangat minim.
3. Hal ini berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dapat menyebabkan gagalnya penurunan angka kemiskinan dan penguatan inklusi sosial, yang biasanya menjadi prioritas dalam RPJMD kepala daerah. Dampak pada capaian program nasional dan internasional, seperti SPM kegagalan memenuhi SPM dapat memengaruhi evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pusat, serta berpotensi pengurangan anggaran transfer pusat (DAK/DID). Dan dampak pada SDG's terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, inklusi sosial, dan pengurangan ketimpangan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial yaitu keterbatasan anggaran, kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai, data sosial tidak akurat, koordinasi antar instansi belum sinergis, tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi, stigma terhadap PPKS. Adapun yang menjadi peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial yaitu pemanfaatan teknologi informasi, dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi, Kemitraan dengan Lembaga Sosial dan Swasta, kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh, program inovatif daerah.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan yaitu melakukan verifikasi dan validasi (verivali) DTSEN secara berkala, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang atau



coaching clinic, dan mengusulkan peningkatan anggaran. Adapun catatan strategis tindak lanjut perlu dukungan komitmen lintas sektor serta dukungan dari kepala daerah dan DPRD, program prioritas harus selaras dengan RPJMD, Renstra Dinsos, dan target SDGs serta SPM Sosial, diperlukan monitoring dan evaluasi partisipatif melibatkan masyarakat sipil dan lembaga kontrol sosial.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan kegiatan dan kerangka pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan Perubahan Renja Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Pembangunan diarahkan untuk mencapai visi dan misi program prioritas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 khususnya triwulan I terdapat hal-hal mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Sosial tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026, sebagai berikut:

TABEL III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN SOSIAL									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Sidrap	100 Persen	992,588,000	Lembaga	Kab. Sidrap	100 Persen	238,121,300	Lembaga
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	Kab. Sidrap	100 Persen	992,588,000	Lembaga	Kab. Sidrap	100 Persen	238,121,300	Lembaga
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	6 Lembaga	992,588,000	Lembaga	Kab. Sidrap	6 Lembaga	238,121,300	Lembaga
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidrap	100 Persen	314,439,000	Disabilitas	Kab. Sidrap	100 Persen	257,322,000	Disabilitas
		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidrap	100 Persen		Anak Terlantar	Kab. Sidrap	100 Persen		Anak Terlantar
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidrap	100 Persen		Lanjut Usia	Kab. Sidrap	100 Persen		Lanjut Usia
		Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Kab. Sidrap	100 Persen		Gepeng	Kab. Sidrap	100 Persen		Gepeng

				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	Kab. Sidrap	100 Persen	314,439,000	Disabilitas AT Lanjut Usia Gepeng	Kab. Sidrap	100 Persen	257,322,000	Disabilitas AT Lanjut Usia Gepeng
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	15 Orang	160,019,000	Disabilitas AT Lanjut Usia	Kab. Sidrap	15 Orang	147,598,300	Disabilitas AT Lanjut Usia
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	2170 Orang	154,420,000	Gelandangan Pengemis	Kab. Sidrap	2170 Orang	109,723,700	Gelandangan Pengemis
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	10 Orang	0	Masyarakat	Kab. Sidrap	10 Orang	0	Masyarakat
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Kab. Sidrap	100 Persen	221,482,100	Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	1,013,349,700	Masyarakat
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	Kab. Sidrap	100 Persen	221,482,100	Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	1,013,349,700	Masyarakat
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	12951 Keluarga	103,405,000	Masyarakat Miskin	Kab. Sidrap	12951 Keluarga	834,533,000	Masyarakat Miskin
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	55 Keluarga	118,077,100	Masyarakat	Kab. Sidrap	55 Keluarga	178,816,700	Masyarakat
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Sidrap	100 Persen	103,483,500	Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	80,742,900	Masyarakat

				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	Kab. Sidrap	100	Persen	98,445,500	Masyarakat	Kab. Sidrap	100	Persen	78,062,900	Masyarakat
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	300	Orang	98,445,500	Masyarakat	Kab. Sidrap	300	Orang	78,062,900	Masyarakat
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Kab. Sidrap	100	Persen	5,038,000	TAGANA	Kab. Sidrap	100	Persen	2,680,000	TAGANA
				Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	37	Orang	5,038,000	TAGANA	Kab. Sidrap	37	Orang	2,680,000	TAGANA
				PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Kab. Sidrap	100	Persen	22,755,400	TMP	Kab. Sidrap	100	Persen	18,940,400	TMP
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Sidrap	100	Persen	22,755,400	TMP	Kab. Sidrap	100	Persen	18,940,400	TMP
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	3	Makam	22,755,400	TMP	Kab. Sidrap	3	Makam	18,940,400	TMP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	100	Persen	2,400,587,000		Kab. Sidrap	100	Persen	2,376,278,700	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100	Persen	76,187,500	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	100	Persen	74,832,600	Dinas Sosial
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	6	Dokumen	76,187,500	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	6	Dokumen	74,832,600	Dinas Sosial
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100	Persen	1,931,568,600	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	100	Persen	1,929,871,600	Dinas Sosial
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	300	Org/Blh	1,923,083,100	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	300	Org/Blh	1,923,083,100	Dinas Sosial

PERUBAHAN RENJA 2025 DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidrap	12	Dokumen	8,485,500	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Dokumen	6,788,500	Dinas Sosial
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100	Persen	153,128,500	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	100	Persen	78,039,000	Dinas Sosial
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Paket	3,069,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Paket	3,069,000	Dinas Sosial
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	210	Laporan	150,059,500	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	210	Laporan	74,970,000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	100	Persen	185,410,400	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	100	Persen	239,243,500	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidrap	1500	Laporan	1,050,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	1500	Laporan	1,050,000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Laporan	30,000,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Laporan	30,000,000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Laporan	154,360,400	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Laporan	208,193,500	Dinas Sosial
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	100	Persen	54,292,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	100	Persen	54,292,000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidrap	13	Unit	54,292,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	13	Unit	54,292,000	Dinas Sosial
									4,055,335,000					3,984,755,000	



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang sosial.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2024-2026 di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025, dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Perubahan Rencana Kerja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.



**PERUBAHAN RENJA 2025 DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang sosial.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

Kepala Dinas Sosial,



WAHIDAH ALWI, S.P., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP: 19710315 199803 2 003

PERUBAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dapat terselesaikan.

Terbitnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan dan langkah awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta sumbangsihnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini.

Pangkajene Sidenreng, 15 Juli 2025

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19710318 199101 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2021.....	4
2.1. Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	4
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
BAB IV P E N U T U P.....	24

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Triwulan II Tahun 2021	5
Tabel II.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2021.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan Renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2025 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis serta visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan. Sedangkan tujuannya adalah untuk merumuskan capaian kinerja perangkat daerah yang disesuaikan dengan keadaan terkini dan diikuti penganggarannya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I P E N D A H U L U A N

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 dan capaian tahun berjalan (2025) sampai triwulan II sebagai bahan acuan untuk perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Dari hasil tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah mencapai target dan program kegiatan yang belum mencapai target.

Secara umum program kegiatan yang dilaksanakan beberapa telah mencapai target yang ditentukan, namun sebagian belum mencapai target. Hal ini disebabkan terjadinya pertanggungjawaban keuangan SKPD yang terlambat, dengan demikian akan mempengaruhi pelaksanaan renja sebagaimana telah ditetapkan pada awal perencanaan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan. Sebab lain adalah keuangan daerah yang terbatas sehingga program yang telah ditetapkan tidak dapat dianggarkan, demikian pulan program yang telah mendapat anggaran tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tersedianya dana.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2025 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian persentase pelaksanaan Renja SKPD pada tahun 2025. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 1 a

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERENGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II 2025
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) s.d. Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d. triwulan II tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. tahun berjalan 2024 - 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	7,50	7,00	7,30	7,00	95,9%	7,00	93,33%
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	40,00	37,00	38,00	37,00	97,4%	37,00	92,50%

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	20,00	25,00	20,00	80,0%	20,00	66,67%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	10,67	10,65	10,66	10,65	99,9%	10,65	99,81%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6,90	6,00	6,80	6,00	88,2%	6,00	86,96%
	Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanSub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25,00	15,00	20,00	15,00	75,0%	15,00	60,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	60,00	50,00	55,00	50,00	90,9%	50,00	83,33%
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,25	1,20	1,25	1,20	96,0%	1,20	96,00%

	Kepentingan								
	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	25,00	10,00	25,00	10,00	40,0%	10,00	40,00%
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100,00	250,00	100,00	250,00	250,0%	250,00	250,00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	3,50	2,50	3,00	2,50	83,3%	2,50	71,43%
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	1,40	1,40	1,40	1,40	100,0%	1,40	100,00%
	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	100,00%

	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	30,00	28,00	29,00	28,00	96,6%	28,00	93,33%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	16,00	30,00	16,00	30,00	187,5%	30,00	187,50%
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	330,00	630,00	330,00	630,00	190,9%	630,00	190,91%
	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%
	Kegiatan Pemnbinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,20	10,20	10,20	10,20	100,0%	10,20	100,00%
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	100,00%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,60	4,50	4,55	4,50	98,9%	4,50	97,83%

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,50	0,43	0,45	0,43	95,6%	0,43	86,00%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30,00	10,00	20,00	10,00	50,0%	10,00	33,33%
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	28,50	28,00	28,20	28,00	99,3%	28,00	98,25%
	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.199,00	7.199,00	7.199,00	7.199,00	100,0%	7.199,00	100,00%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	20,00	15,00	20,00	15,00	75,0%	15,00	75,00%

	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	20,00	30,00	20,00	30,00	150,0%	30,00	150,00%
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15,00	40,00	15,00	40,00	266,7%	40,00	266,67%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	4,00	100,00%
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10,00	20,00	10,00	20,00	200,0%	20,00	200,00%
	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00	100,00%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,00	200,00	230,00	200,00	87,0%	200,00	86,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	100,00%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00	100,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00	100,00%
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	100,00%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%	200,00	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,00	15,00	60,00	15,00	25,0%	15,00	23,08%
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	1,00	4,00	1,00	25,0%	1,00	25,00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	1,00	3,00	1,00	33,3%	1,00	33,33%

	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	12,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	12,00	100,00%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	12,00	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,00	15,00	18,00	15,00	83,3%	15,00	83,33%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%

Hingga triwulan II tahun 2025 umumnya sub kegiatan teknis belum memenuhi target, sedangkan kegiatan penunjang sudah sesuai target. Tidak terpenuhinya target capaian sub kegiatan teknis disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan untuk tahun anggaran 2025, sehingga sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan rencana semula, diperlukan penyesuaian sub kegiatan agar dapat terlaksanakan sesuai anggaran yang tersedia.

- Implikasi yang timbul terhadap terget capaian program renstra PD

Target capaian program yang telah ditetapkan dalam renstra merupakan ukuran kesuksesan pembangunan yang direncanakan. Capaian target yang kurang mengakibatkan sektor tersebut kurang berkembang sesuai harapan dan perlu upaya selanjutnya untuk pencapaiannya atau diperlukan program yang lain untuk mengatasi capaian yang rendah.

Sedangkan target yang tercapai atau bahkan melampaui memberikan implikasi yang positif bagi keberhasilan program bersangkutan. Namun bukan berarti program tersebut patut dihentikan, masih perlu dilihat tantangan ke depan apakah program yang mencapai target masih diperlukan atau diganti dengan program yang lain.

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kegagalan pencapaian target umumnya diakibatkan ketersediaan anggaran yang kurang. Oleh sebab itu perencanaan selanjutnya perlu dilakukan dengan arif. Pemilihan program dan penetapan target perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Berikut kami sajikan indikator target yang harus dicapai pada tahun 2025

NO	Indikator Permendagri No 86	Satuan	Taget 2025
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	97
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	97.00

3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.90
4	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	50
5	Laju Pertumbuhan Pdb Per Tenaga Kerja	%	7.00
6	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	60
7	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	50.00
8	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	%	0.0071
Aspek Pelayanan Umum (Layanan Urusan Wajib Non Dasar)			
9	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	per 1000	0
10	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0
11	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	6.00
12	Keselamatan Dan Perlindungan	%	15.00
13	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	20.00
14	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	-
15	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	20
16	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0
17	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	5
18	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100.00
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100
20	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	4
21	Persentase Koperasi Aktif	%	70
22	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	99
23	Persentase BPR/LKM Aktif	%	70
24	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	93.5
Layanan Urusan Pilihan			
25	Persentase Transmigran Swakarsa	%	1,5
	Indikator SDG's		

26	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	73
27	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	7
28	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	36.00
29	Persentase tenaga kerja formal.	%	35.00
30	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	36
31	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	5.00
32	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	19000
33	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	2.0 0.04
34	Tingkat setengah pengangguran.	%	12.00
35	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	10
36	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	orang	1250
37	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	20.00
38	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	%	30.00
39	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	20
40	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rp jt	10
Indikator IUP RPJPD			
41	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	97
42	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	20.00
43	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	
44	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	%	1.1
45	Persentase koperasi sehat di kab/kota	%	63
46	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.90
47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	95
48	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	97

	I K U		
49	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	97
50	Tingkat produktivitas tenaga kerja	persen	7,3
51	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	persen	1
52	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3222
53	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	persen	7
54	nilai saki PD	Kategori	B
	I K K		
55	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	persen	0
56	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	670
57	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	persen	16.4
58	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	persen	4.7
59	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	persen	20
60	Persentase koperasi yang diawasi	persen	75
61	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	persen	73.68
62	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	persen	17
63	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit	20
64	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	persen	0
65	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	KK	0

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Saat ini kondisi perekonomian global dilanda ketidakpastian, hal mempengaruhi kondisi negara kita. Geopolitik menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi makro suatu negara, termasuk Indonesia. Kondisi atau kejadian yang dialami suatu negara akan mempengaruhi negara yang lainnya

melalui transmisi kegiatan ekspor dan impor. Dampak terhadap tekanan harga yang lebih tidak terduga adalah jika teori ekspektasi rasional terjadi dalam kasus perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah. Teori tersebut menjelaskan jika para pelaku ekonomi atau seluruh masyarakat mengetahui dampak yang akan timbul dari suatu kebijakan atau peristiwa yang sedang terjadi, mereka akan memberikan respon masif yang tidak dapat terkendali.

Strategi pertama yang diambil adalah penanganan residu pandemi dengan cermat. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditinggalkan. Kedua, pemerintah menyalurkan bantuan sosial dengan efisien untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan, dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi. Ketiga, pemerintah menjaga peran dari sektor koperasi, UMKM, dan korporasi dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada dari entitas bisnis ini yang gagal karena krisis.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi rencana kerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dirumuskan rencana kerja dan pendanaan yang akan dituangkan dalam rencana kerja perupahan anggaran yang selanjutnya dijadikan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun anggaran 2025.

Rencana kerja ini memuat 9 program, 17 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 17.470.496.000.

Tabel III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				6.096.627.727				17.470.496.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Kab Sidrap	7,00	20.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	9,00	119.000.000	Anggota koperasi
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Kab Sidrap	37,00	20.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	39,00	119.000.000	Anggota koperasi
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Kab Sidrap	20,00	20.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	30,00	119.000.000	Anggota koperasi

		Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Kab Sidrap	10,65	15.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	10,65	15.000.000	Anggota koperasi
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Kab Sidrap	6,00	15.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	6,00	15.000.000	Anggota koperasi
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab Sidrap	15,00	15.000.000,00	Anggota koperasi	Kab Sidrap	20,00	15.000.000	Anggota koperasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab Sidrap	50,00	305.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	50,00	1.320.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Kab Sidrap	1,20	305.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	1,20	1.320.000.000	Usaha mikro dan kecil

	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab Sidrap	10,00	55.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	30,00	1.270.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab Sidrap	250,00	250.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	100,00	50.000.000	Usaha mikro dan kecil
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Kab Sidrap	2,50	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	2,51	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Kab Sidrap	1,40	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	1,41	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Sidrap	19,00	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	20,00	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kab Sidrap	28,00	1.004.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	29,00	10.220.512.000	Pencari kerja

	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Kab Sidrap	30,00	604.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	40,00	10.220.512.000	Pencari kerja
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab Sidrap	630,00	554.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	859,00	10.000.000.000	Pencari kerja
	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Sidrap	1,00	50.000.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	55,00	220.512.000	Pencari kerja
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,20	400.000.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	-	-	Pekerja/ buruh
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,00	400.000.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	-	-	Pekerja/ buruh
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Kab Sidrap	4,50	1.259.453.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	4,52	1.703.200.000	Pekerja/ buruh
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Besaran pemeriksaan perusahaan	Kab Sidrap	0,43	10.000.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	0,40	3.200.000	Pekerja/ buruh

	Kabupaten/Kota									
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Sidrap	10,00	10.000.000,00	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	1,00	3.200.000	Pekerja/ buruh
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Kab Sidrap	28,00	1.249.453.000	Transmigran	Kab Sidrap	30,00	1.700.000.000	Transmigran
	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab Sidrap	7.199	1.249.453.000	Transmigran	Kab Sidrap	9.381	1.700.000.000	Transmigran
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASANTRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Kab Sidrap	100,00	80.000.000	Transmigran	Kab Sidrap	100,00	31.000.000	Transmigran
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman	Kab Sidrap	15,00	80.000.000	Transmigran	Kab Sidrap	5,00	31.000.000	Transmigran

	Kabupaten/Kota	transmigrasi								
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Kab Sidrap	1,00		Transmigran	Kab Sidrap	-		Transmigran
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab Sidrap	50,00	30.000.000	Transmigran	Kab Sidrap	50,00	15.500.000	Transmigran
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab Sidrap	50,00	50.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	50,00	15.500.000	Diskopnakertrans
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Kab Sidrap	100,00	30.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	-	117.000.000	Diskopnakertrans
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Kab Sidrap	4,00	30.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	-	117.000.000	Diskopnakertrans
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab Sidrap	20,00	20.000.000,00	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	-	-	Diskopnakertrans
	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab Sidrap	1,00	10.000.000,00	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	1,00	117.000.000	Diskopnakertrans

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidra p	100,00	3.007.405.727	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	100,00	3.563.784.000	Diskopnaker rans
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidra p	100,00	8.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	100,00	11.200.000	Diskopnaker rans
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Sidra p	3,00	5.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	3,00	5.800.000	Diskopnaker rans
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidra p	3,00	3.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	3,00	5.400.000	Diskopnaker rans
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sidra p	100,00	2.726.835.727	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	100,00	2.964.084.000	Diskopnaker rans
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Sidra p	400,00	2.718.835.727	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	420,00	2.955.224.000	Diskopnaker rans
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Sidra p	200,00	5.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	230,00	5.660.000	Diskopnaker rans
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kab Sidra p	17,00	3.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	17,00	3.200.000	Diskopnaker rans

		Semesteran SKPD								
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Sidra p	100,00	7.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	100,00	4.800.000	Diskopnaker rans
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Sidra p	33,00	4.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	28,00	2.400.000	Diskopnaker rans
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Sidra p	33,00	3.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	28,00	2.400.000	Diskopnaker rans
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Sidra p	100,00	32.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	100,00	206.500.000	Diskopnaker rans
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Sidra p	10,00	1.500.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	10,00	1.500.000	Diskopnaker rans
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Sidra p	200,00	4.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p dan luar Sidra p	350,00	5.000.000	Diskopnaker rans
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Sidra p	15,00	26.500.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	80,00	200.000.000	Diskopnaker rans
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab Sidra p	100,00	10.000.000	Diskopnaker rans	Kab Sidra p	100,00	39.000.000	Diskopnaker rans

		Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Sidrap	1,00	5.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	3,00	31.000.000	Diskopnakertrans
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Sidrap	1,00	5.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	2,00	8.000.000	Diskopnakertrans
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Sidrap	100,00	137.400.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	100,00	204.000.000	Diskopnakertrans
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Sidrap	12,00	45.400.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	36,00	101.000.000	Diskopnakertrans
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Sidrap	12,00	92.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	12,00	103.000.000	Diskopnakertrans
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	100,00	86.170.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	100,00	134.200.000	Diskopnakertrans
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Sidrap	12,00	66.170.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	12,00	69.200.000	Diskopnakertrans
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Sidrap	15,00	10.000.000	Diskopnakertrans	Kab Sidrap	11,00	5.000.000	Diskopnakertrans

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Sidrap	1,00	10.000.000	Diskopnakers	Kab Sidrap	1,00	60.000.000	Diskopnakers
--	--	--	------------	------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta memperhatikan kondisi terakhir yang dihadapi OPD.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19710318 199101 1 003



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur perangkat daerah, lembaga legislatif, maupun masyarakat. Harapan kami, dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP
NIP. 196512311987111013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	5
TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai	5
Triwulan II Tahun 2025	
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
Perangkat Daerah	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV PENUTUP	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, yang selaras dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam dinamika pembangunan, perubahan terhadap dokumen Renja perlu dilakukan apabila terdapat penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas desa, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, turut melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja Tahun 2025. Perubahan Renja ini disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari **visi kepala daerah terpilih, yaitu "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"** serta delapan prioritas dalam **Program Asta Cita**.

Selain sebagai tindak lanjut terhadap ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025, penyusunan perubahan Renja ini juga merupakan respons terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan I Tahun 2025, perkembangan isu-isu strategis, serta realokasi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi Dinas PMDPPA dalam mendukung target pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Lebih lanjut, perubahan Renja ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang lebih relevan dan tepat sasaran, sesuai dengan



kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah yang baru. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen pengintegrasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas PMDPPA dalam kerangka pembangunan daerah tahun 2025 yang bersifat adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renjana Kerja (Renca) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappangmengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6), yang mengatur bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2045;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan rencana program dan kegiatan tahunan dengan **arah kebijakan pembangunan daerah terbaru** sebagaimana tertuang dalam **Perubahan RKPD Tahun 2025** dan **RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029**, guna mendukung pencapaian visi daerah “*Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera*”, serta mewujudkan prioritas pembangunan melalui **Program Asta Cita Kepala Daerah Terpilih**.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas PMDPPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



1. Menyesuaikan program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang baru, berdasarkan RPJMD 2025–2029;
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, termasuk penyesuaian target kinerja dan penggunaan anggaran sesuai dengan capaian dan kebutuhan aktual;
3. Menjamin konsistensi dan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien;
4. Mengakomodasi hasil musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, serta kebijakan nasional dan provinsi yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
5. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMDPPA tahun 2025 dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penyajian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 menguraikan pokok bahasan Program/Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 dan garis besar isi dokumen perubahan rencana kerja, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari;

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja awal yang relatif moderat, meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis maupun administratif. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung target tahunan, serta menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 yang terdiri dari program, kegiatan dan subkegiatan. Program tersebut terdiri dari 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan yang terurai ke dalam 27 (dua puluh tujuh) Subkegiatan. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, dan melebihi target kinerja yang direncanakan.
3. Implikasi/dampak yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.
4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PERAMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja APBD	100	100	100	66%	66%	50%	50%
2.08.02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender</i>	30,00	30,00	30,00	25%	25%	25%	25%
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	8	2	3	2	66%	4	50%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegitan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	100	100	100	37%	37%	45,97%	45,97%
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	100	100	100	37%	37%	45,97%	45,97%
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	87	29	29	11	37%	40	45,97%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100	100	100	75%	75%	50%	50%
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	100	100	100	75%	75%	50%	50%
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	12	3	4	3	75%	6	50%
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kawasan Perdesaan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	33	33%	30	30%
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Kawasan Perdesaan (%)	100	100	100	33	33%	30	30%
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10	2	3	1	33%	3	30%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu (%)	100	100	100	40,10%	40,1%	40,10	40,10%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	40,10%	40,1%	40,10	40,10%
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	204	68	68	34	50%	102	50%
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	204	68	68	25	36%	93	45,58%
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	68	23	23	16	69%	39	5,35%
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68	23	23	0	0%	23	33,82%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15	0	5	0	0%	0	0%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan	50	17	17	5	29%	22	44%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32	12	10	7	70%	19	59,37%
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	49	20	10	10	100%	50102	102%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60	20	20	10	50%	30	50%
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	39	13	13	7	53%	20	51,28%
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318	106	106	53	50%	159	50%
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100	100	100	100	166	122%	122%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah (%)							
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	3	3	2	66%	5	55,55%
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	2	2	2	100%	4	66,66%
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	79,37%	79,37%	77,31%	77,31%
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.380	420	480	141	29,37%	561	40,65%
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	180	60	12	6	50%	66	36,66%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
		Triwulanan/ Semesteran SKPD							
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	18%	18%	38,65%	38,65%
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445	145	150	27	18%	172	38,65%
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	0%	0%	0%	0%
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	0	5	0	0%	0	0%
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	199	50%	50%	100%
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	6	50%	18	50%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	6	50%	18	50%
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	100	100	25%	46,23%	46,23%
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	10	16	4	25%	14	29,16%
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	3	5	0	0%	3	23,07%
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	1	0	0%	0	0%



Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan administrasi dan pelaksanaan awal. Dari total 7 program, 12 kegiatan, dan 27 subkegiatan, capaian kinerja secara umum masih berada di bawah 50% dari target tahunan, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan.

Beberapa kegiatan yang telah menunjukkan kemajuan antara lain kegiatan fasilitasi kelembagaan masyarakat desa, perencanaan perangkat daerah, serta kegiatan operasional penunjang seperti layanan administrasi dan pelaporan. Namun demikian, sejumlah kegiatan teknis strategis seperti fasilitasi penetapan batas desa, pengelolaan aset desa, serta pelaksanaan layanan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender masih belum terealisasi secara optimal.

Situasi ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025. Penyesuaian perlu dilakukan baik dari sisi target kinerja, prioritas pelaksanaan, maupun strategi percepatan kegiatan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan desa, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak tetap dapat tercapai secara optimal.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan sejumlah isu penting yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Isu-isu tersebut muncul sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian Renstra, dan dinamika pembangunan terkini yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Meskipun terdapat peningkatan jumlah desa mandiri, namun masih terdapat desa dengan status berkembang dan tertinggal. Ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa sebagai pondasi pembangunan berbasis lokal.
2. Lembaga seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan lembaga adat belum seluruhnya berjalan efektif, padahal berperan penting dalam pembangunan berbasis partisipasi dan sosial budaya.

3. Masih terdapat desa yang belum mampu memanfaatkan aplikasi tata Kelola pemerintahan, penganggaran, dan pelayanan Masyarakat secara digital.
4. Perlunya dibentuk UPTD PPA dan Forum-forum anak/Masyarakat agar semua korban kekerasan dapat terjangkau dan terlayani.
5. Minimnya data yang lengkap dan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan yang inklusif.
6. Masih terdapat BUMDes yang tidak aktif atau tidak berkembang akibat minimnya manajemen usaha dan inovasi, serta kurangnya pendampingan.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat rencana kerja yang telah disesuaikan berdasarkan evaluasi kinerja ampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Dinas Pemberdayaa, Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tetap relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029.

Rencana kerja dalam bab ini mencakup daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan sasaran, indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan. Penyusunan rencana kerja ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya, dan capaian Renstra, serta kondisi fiskal daerah.

Sementara itu, rencana pendanaan disusun berdasarkan pagu indikatif perubahan tahun 2025, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta kemampuan riil keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah secara lebih optimal.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PERAMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja APBD	Kab. Sidrap	100 Persen	500.000.000	Lembaga Perempuan	Kab. Sidrap	100 Persen	322.243.000	Lembaga Perempuan
2.08.02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender</i>	Kab. Sidrap	30.00 Persen	500.000.000	Lembaga Perempuan	Kab. Sidrap	30.00 Persen	322.243.000	Lembaga Perempuan
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Sidrap	3 Dokume	500.000.000	Lembaga Perempuan	Kab. Sidrap	3 Dokumen	322.243.000	Lembaga Perempuan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	Kab. Sidrap	100 Persen	80.000.000	Keluarga, Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	47.844.000	Keluarga, Anak
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	80.000.000	Keluarga, Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	47.844.000	Keluarga, Anak
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	80.000.000	Keluarga, Anak	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	47.844.000	Keluarga, Anak



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Kab. Sidrap	100 Persen	105.000.000	Organisasi, Lembaga, Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	73.341.500	Organisasi, Lembaga, Anak
2.08.06.2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak</i>	Kab. Sidrap	100 Persen	105.000.000	Organisasi, Lembaga, Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	73.341.500	Organisasi, Lembaga, Anak
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Sidrap	4 Organisasi	105.000.000	Orgaanisasi, Lembaga, Anak	Kab. Sidrap	4 Organisasi	73.341.500	Orgaanisasi, Lembaga, Anak
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kawasan Perdesaan yang Difasilitasi (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	12.500.000	Kecamatan, Desa	Kab. Sidrap	100 Persen	6.705.400	Kecamatan, Desa



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Kawasan Perdesaan (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	12.500.000	Kecamatan, Desa	Kab. Sidrap	100 Persen	6.705.400	Kecamatan, Desa
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sidrap	3 Dokumen	12.500.000	Kecamatan, Desa	Kab. Sidrap	3 Dokumen	6.705.400	Kecamatan, Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	137.265.000	Lembaga, Aparat Desa, Pengelola BUMDes	Kab. Sidrap	100 Persen	88.792.500	Lembaga, Aparat Desa, Pengelola BUMDes
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	137.265.000	Lembaga, Aparat Desa, Pengelola BUMDes	Kab. Sidrap	100 Persen	88.792.500	Lembaga, Aparat Desa, Pengelola BUMDes
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	29.765.000	Aparat Desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	17.989.500	Aparat Desa
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM	Kab. Sidrap	68 Dokume	67.500.000	Desa, Pengelola BUMDes	Kab. Sidrap	68 Dokumen	45.429.000	Desa, Pengelola BUMDes



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Sidrap	68 Dokume	10.000.000	Desa, Aparat Desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	6.521.000	Desa, Aparat Desa
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sidrap	23 Dokumen	20.000.000	Pemerintah Desa	Kab. Sidrap	23 Dokumen	12.406.500	Pemerintah Desa
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sidrap	68 Desa	10.000.000	Pemerintah Desa	Kab. Sidrap	68 Desa	6.446.500	Pemerintah Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	620.312.000	Pemerintah Desa, Lembaga	Kab. Sidrap	100 Persen	555.332.000	Pemerintah Desa, Lembaga
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina (%)</i>	Kab. Sidrap	100 Persen	620.312.000	Pemerintah Desa, Lembaga	Kab. Sidrap	100 Persen	555.332.000	Pemerintah Desa, Lembaga



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>									
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	17 Dokumen	5.312.000	Desa/ Kelurahan	Kab. Sidrap	17 Dokumen	3.178.600	Desa/ Kelurahan
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kab. Sidrap	10 Lembaga	85.000.000	Desa/ Kelurahan (Lembaga)	Kab. Sidrap	10 Lembaga	60.866.200	Desa/ Kelurahan (Lembaga)



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya								
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	10 Unit	12.500.000	Desa/ Kelurahan	Kab. Sidrap	10 Unit	6.705.400	Desa/ Kelurahan
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sidrap	20 Laporan	12.500.000	Desa/ Kelurahan	Kab. Sidrap	20 Laporan	7.053.100	Desa/ kelurahan
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	Kab. Sidrap	13 Dokumen	5.000.000	Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Kab. Sidrap	13 Dokumen	2.929.000	Lembaga Kemasyara katan Desa/ Kelurahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan Perlindungan Masyarakat Desa								
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidrap	106 Dokumen	500.000.000	Pengurus PKK Desa/ Kelurahan	Kab. Sidrap	106 Dokumen	474.599.700	Pengurus PKK Desa/ Kelurahan
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	3.111.008.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	100 Persen	3.064.277.600	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	10.000.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	100 Persen	11.695.000	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	3 Dokumen	6.208.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	3 Dokumen	7.012.400	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Sidrap	2 Laporan	3.792.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	2 Laporan	4.682.600	Dinas Pemdes PPA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	2.613.720.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	100 Persen	2.614.238.800	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	40 Orang/Bulan	2.605.720.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	40 Orang/Bulan	2.605.720.000	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sidrap	12 Laporan	8.000.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	12 Laporan	8.518.800	Dinas Pemdes PPA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	130.952.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	100 Persen	65.515.500	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	150 Laporan	130.952.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	150 Laporan	65.515.500	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	50.688.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	100 Persen	56.288.000	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidrap	5 Unit	50.688.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	5 Unit	56.288.000	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	194.047.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	100 Persen	191.234.300	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kab. Sidrap	12 Laporan	42.000.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	12 Laporan	38.500.000	Dinas Pemdes PPA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12 Laporan	152.047.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	12 Laporan	138.929.300	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	Kab. Sidrap	100 Persen	111.601.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	100 Persen	142.111.000	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidrap	16 Unit	68.527.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	16 Unit	71.177.000	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidrap	5 Unit	3.074.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	5 Unit	5.934.000	Dinas Pemdes PPA
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sidrap	2 Unit	40.000.000	Dinas Pemdes PPA	Kab. Sidrap	2 Unit	65.000.000	Dinas Pemdes PPA



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan upaya penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan perkembangan dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 serta Program Asta Cita Kepala Daerah Terpilih. Dengan perencanaan yang terarah dan pendanaan yang tepat sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya masyarakat desa yang berdaya, pemerintahan desa yang efektif, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak yang semakin kuat.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih baik serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196512311987111013

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD, dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD harus berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD sehingga antara renja OPD dengan dokumen RKPD mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada pengarahannya potensi sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar

semua komponen dalam pembangunan pertanian terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9);

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas.
- b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas.
- c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Terakumulasinya usulan hasil musrenbang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.
- d. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
- e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

- f. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya;

Bab II: Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Urusan/bidang urusan/program/kegiatan beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi uraian berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Adapun total anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp 17.204.488.000,- yang bersumber dari APBD DAU dan DAK yang terdiri dari 8 program, 16 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan realisasi sampai pada triwulan I yaitu realisasi keuangan Rp 2.561.499.513,- (14,89%) dan realisasi fisik 20,75%. Hal ini disebabkan adanya usulan kegiatan tambahan yang berfokus stunting, Pokok Pikiran Anggota DPRD dan kegiatan belum terealisasi 100% sampai pada triwulan I tahun 2025 dikarenakan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terdiri :

1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 5,00% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 33,33% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 16,67% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2025.
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2025.
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 42,86% disebabkan proses administrasi.
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 39,28% disebabkan proses administrasi.

- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 33,33% disebabkan proses administrasi.
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 31,91% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 33,33% disebabkan proses administrasi.
- 11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 14,69% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 12) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 21,26% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 13) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 35,42% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 14) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 41,50% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 15) Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 11,17% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Berdasarkan rincian kegiatan diatas yang belum melebihi target kinerja secara umum dikarenakan sisa target yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2. Realisasi program yang melebihi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- 16) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 182,40% disebabkan lahan yang dikendalikan lebih luas dari target yang ditentukan.

Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk target kinerja capaian program tahun 2024-2026 secara keseluruhan belum mencapai target atau melebihi target kinerja dan akan dilaksanakan sisa target kinerja pada tahun selanjutnya.

3. Pada target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yang belum mencapai target yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 1.065,30% yang terealisasi 8,33% disebabkan ketersediaan pangan belum memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 20,00% belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2024 dan mulai dilaksanakan lagi pada tahun 2025.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 85,00% belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2024 dan mulai dilaksanakan lagi pada tahun 2025.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 100,00% dan terealisasi 32,57% disebabkan program tersebut masih berjalan sampai tahun 2026.

- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 628,33% dan terealisasi 536,43% disebabkan dampak dari kekeringan disertai cuaca yang tidak mendukung dan sarana pertanian pengendalian kekeringan dan banjir yg kurang sehingga proses produksi terhambat.
 - 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 100% dan terealisasi 95,24% disebabkan target yang ditentukan tidak dapat dimaksimalkan pada tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.
 - 7) Program Penyuluhan Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 7,39% dan terealisasi 2,89% disebabkan banyaknya penyuluh pertanian yang pensiun dan masih kurangnya SDM yang baru sedangkan kelompok tani tiap waktu bertambah.
4. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
- 1) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 100% dan terealisasi 182,40% disebabkan adanya fenomena yang terjadi pasca banjir akan terjadi peledakan OPT sehingga lahan yang dikendalikan lebih luas.
5. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
- a. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidereng Rappang.
 - d. Kurang maksimalnya kegiatan pembinaan akibat pembatasan gerak dan keterbatasan dana operasional.

- e. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.
 - f. Adanya perubahan anggaran untuk dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
6. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD
- Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2025 yaitu :
- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.
7. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu alokasi dana yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan agar target tercapai.
- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
 - c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
 - d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

- e. Untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian terutama yang sumber dananya dari APBN perlu disiapkan dana pendamping untuk desain, pengawasan dan operasional dalam rangka mendukung program prioritas kabinet kerja bidang pertanian.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja perubahan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) pada tabel II.1.

Tabel II. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Lembar : 1 dari 7 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	1.065,30	3,33	5,00	-	-	8,33	0,78
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	-	-	5,00	5,00
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	3	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	3	4	2	-	-	4	133,33
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	10	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	36	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	1	-	-	1	33,33
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	3	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	36	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	6	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	-	-	33,33	33,33
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	12,00	4,00	2,00	-	-	4,00	33,33
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%	100,00	88,41	100,00	-	-	16,67	16,67
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	6	1	1	-	-	1,00	16,67
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	20,00	-	16,67	-	-	-	-
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3,00	-	1	-	-	-	-
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	-	1	-	-	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Aman Dikomsumsi Sesuai Standar	%	85,00	-	100,00	-	-	-	-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	3	-	1	-	-	-	-
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	29,52	100,00	3,05	3,05	32,57	32,57
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	33,33	100,00	9,52	9,52	42,86	42,86
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	5	6	1	16,67	6,00	40,00
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	2	2	1	50,00	3,00	50,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	33,33	28,97	5,95	20,54	39,28	39,28
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4.452	1.484	1.288	264,00	20,50	1.748,00	39,26
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	12	12	3	25,00	15,00	41,67

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	33,33	33,33	-	-	33,33	33,33
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	-	-	1,00	33,33
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	1	1	-	-	1,00	33,33
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	31,91	193,62	-	-	31,91	31,91
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	37	8	81	-	-	8,00	21,62
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	7	10	-	-	7,00	70,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	33,33	33,33	-	-	33,33	33,33
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12	12	-	-	12	33,33
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100,00	11,86	46,89	2,82	6,02	14,69	14,69
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	93	18	49	5,00	10,20	23	24,73
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	81	2	33	-	-	2	2,47

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	%	628,33	536,43	596,06	-	-	536,43	85,37
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	100,00	27,78	27,78	-	-	84,95	84,95
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6	1	1	-	-	1	16,67
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	4	4	-	-	4	33,33
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	100,00	95,24	100,00	-	-	95,24	95,24
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100,00	29,17	33,33	6,25	18,75	35,42	35,42
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	36	12	14	3	21,43	15	41,67
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	6	2	2	-	-	2	33,33
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100,00	40,82	2,72	0,68	25,00	41,50	41,50

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	24	-	1	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	57	16	1	1	100,00	17	29,82
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	1	-	-	-	1	6,67
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	-	1	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	3	1	-	-	3	75,00
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	32	40	-	-	-	40	125,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100,00	68,42	100,00	97,39	97,39	182,40	182,40
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100,00	68,42	100,00	97,39	97,39	182,40	182,40
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1.500,00	1.129,00	10.000,00	1.607,00	16,07	2.736,00	182,40
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	150,00	-	-	-	-	-	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	7,39	2,89	2,46	-	-	2,89	39,11

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	100,00	11,17	51,27	-	-	11,17	11,17
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	33	11	11	-	-	11	33,33
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	75	-	75	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	11	5	11	-	-	5	45,45
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	9	4	3	-	-	4	44,44
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	60	-	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	3	-	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	3	1	-	-	-	1	33,33

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dalam struktur organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan subsektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang menangani sub sektor Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang menangani sub sektor Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan yang menangani sub sektor ketahanan pangan, Bidang Penyuluhan Pertanian yang menangani sub sektor penyuluhan Pertanian. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan; 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 3) ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi pertanian; 4) alih fungsi lahan serta status dan kepemilikan lahan; 5) lemahnya kapasitas

kelembagaan petani dan penyuluh pertanian; 6) akses petani terhadap permodalan; 7) perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus; 8) peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal; 9) peningkatan distribusi, harga dan akses pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; dan 11) dampak pandemic covid-19. Isu-isu strategis tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. *Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan*

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. *Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan*

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan

usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan *greennhouse* untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

- d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langkah pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. *Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan*

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat

dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan usahatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. *Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian*

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. *Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan*

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses

sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

7. *Perbaiki Citra Petani dan Pertanian Agar Kembali Diminati Generasi Penerus*

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depannya perlu upaya pemantapan pengembangan agroindustri di perdesaan. Selain itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

8. *Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal*

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah

ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

9. *Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan*

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomali iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara instansi terkait belum optimal.

10. Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan, permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

11. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

12. Dampak Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan *Covid-19*. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian. Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika

kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya *supply* komoditas pangan.

Perubahan dari sisi *supply* dan *demand* pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi *Covid-19* terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK dan lain-lain) yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Perumusan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 tersebut telah mempertimbangan beberapa faktor, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah, visi dan misi kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan tema pembangunan pada tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2025 jumlah anggaran dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang bersumber dari DAU. Rencana Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum mengalami perubahan sebesar Rp 23.104.605.160,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 16.702.303.000,-. Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dilihat Tabel III.1.

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Lembar : 1 dari 9 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)		769,10%	500.000.000			5,00%	149.563.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100%	140.000.000			100%	55.840.000	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Masyarakat	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	75.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	43.399.000	Masyarakat
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Masyarakat	-	-	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	35.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	12.441.000	Masyarakat
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		100%	320.000.000			100%	41.043.000	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	20 Ton	320.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	44 Ton	41.043.000	Masyarakat
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		100%	40.000.000			100%	52.680.000	

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	40.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	52.680.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		30,00%	50.000.000			16,67%	31.000.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten		100%	50.000.000			100%	31.000.000	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	23.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	40.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	7.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar		75%	18.650.000			100%	10.750.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten		100%	18.650.000			100%	10.750.000	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	8.650.000	Masyarakat	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	10.750.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	12.022.349.560			100%	12.203.661.000	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	40.000.000			100%	28.942.000	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	25.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	15.337.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	15.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	13.605.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	10.886.130.560			100%	9.765.332.000	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	105 Orang/Bulan	10.866.130.560	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1288 Orang/Bulan	9.747.591.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	17.741.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	202.850.000			100%	155.009.000	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.850.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.875.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	200.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	152.134.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	211.000.000			100 %	416.806.000	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	61 Unit	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	81 Unit	52.126.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	16 Unit	145.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	10 Unit	364.680.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	552.750.000			100 %	1.682.697.000	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	485.250.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.615.197.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	129.619.000			100 %	154.875.000	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	47 Unit	85.069.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	49 Unit	95.415.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	27 Unit	14.550.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	33 Unit	14.460.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	30.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	45.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun		611,85%	521.150.000	-		6,12%	932.959.000	-
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100 %	521.150.000	-		100 %	932.959.000	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	501.150.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	176.631.000	Kelompok Tani
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	4 Laporan	20.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	4 Laporan	756.328.000	Kelompok Tani
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian		100%	8.404.990.000			100%	849.680.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian		100 %	55.000.000			100 %	411.030.000	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	25.000.000	Petani	Kab. Sidenreng Rappang	14 Laporan	400.422.500	Petani
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	10.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	10.607.500	Kelompok Tani
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian		100 %	8.349.990.000			100 %	438.650.000	
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	6 Unit	600.000.000	Kelompok Tani	Kec. Wt. Sidenreng	1 Unit	200.000.000	Kelompok Tani
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	14 Unit	2.100.000.000	Kelompok Tani	Kec. Pitu Riase	1 Unit	200.000.000	Kelompok Tani

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	119.990.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	150.000.000	Penyuluh	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	1.500.000.000	Kelompok Tani	Kec. Pitu Riase	1 Unit	38.650.000	Kelompok Tani
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	28 Unit	3.880.000.000	-	-	-	-	-
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		100 %	250.000.000			100 %	1.451.632.500	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100 %	250.000.000			100 %	1.451.632.500	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Sidenreng Rappang	500 Ha	200.000.000	Petani	Kab. Sidenreng Rappang	10.000 Ha	1.431.837.500	Petani
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Sidenreng Rappang	50 Ha	50.000.000	Petani	Kab. Sidenreng Rappang	5 Ha	19.795.000	Petani
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani		2,49%	1.337.465.600			4,93%	1.073.057.500	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100 %	1.337.465.600			100 %	1.073.057.500	

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	82.500.000	Penyuluh	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	67.912.500	Penyuluh
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	25 Unit	100.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	75 Unit	145.796.000	Kelompok Tani
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	267.301.000	Penyuluh	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	250.370.000	Penyuluh
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	400.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	178.057.000	Kelompok Tani
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	20 Orang	15.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	60 Orang	342.000.000	Penyuluh
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	15.000.000	Penyuluh	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	88.922.000	Penyuluh
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	15.000.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	442.664.600	-	-	-	-	-
					23.104.605.160				16.702.303.000	

BAB IV. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

IV.1 Catatan Penting

Catatan penting dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Produksi dan Produktivitas pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diharapkan dapat terjaga dan meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pembangunan pangan dan pertanian perlu dipastikan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Ketahanan pangan perlu dipastikan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat.

IV.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya, sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Seluruh unsur di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun

2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya, melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Skala prioritas dalam rasionalisasi anggaran baik program/kegiatan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 selalu disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik rencana tahunan jangka menengah maupun jangka panjang.
4. Perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025 dapat dipastikan berjalan dengan baik.
5. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

IV.3 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, secara normatif telah diupayakan sedemikian rupa sehingga memuat program/kegiatan selama tahun 2025. Beberapa indikator keberhasilan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renja, tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras dedikasi,

Rencana Kerja Perubahan 2025

loyalitas dan integritas dari seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya pembangunan yang lebih maju.

Pangkajene Sidenreng, 4 Juli 2025

Kepala Dinas

Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang



Abrahim, SP

19720223 200003 1 002



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TA. 2025



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng,

2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sidenreng Rappang Government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG" at the top and "DINAS LINGKUNGAN HIDUP" at the bottom. In the center of the stamp is a shield emblem featuring a star and a crescent. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip. 198106112000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	 5
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	5
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 22
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2025	22
 BAB IV PENUTUP	 38

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah dokumen yang berisi tentang perubahan rencana kerja di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025. Perubahan rencana kerja dapat dilakukan pada program, kegiatan, sub kegiatan, nilai anggaran, jenis rekening belanja maupun target kinerjanya.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Perubahan yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mengsinergi, mensinkronkan dan mengintegrasikan program Pembangunan nasional dengan pembangunan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program/kegiatan yang tetap searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada terlaksananya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten serta Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan daerah terakumulasi dan berpedoman pada tema RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu

“Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. dengan salah satu Prioritas Pembangunan yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan.

I. 2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);

I. 3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Merupakan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar
- b. Penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tujuan :

- a. Tersedianya dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- b. Tercapainya konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 – 2026.
- c. Tersedianya Rencana Kerja Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan dan Rujukan dalam menetapkan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 - 2026.

I. 4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renja OPD, landasan hukum;
- Bab II: Hasil Capaian Program/Kegiatan sampai Triwulan I Tahun berjalan berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025;
- Bab III: Perbandingan Program/Kegiatan sebelum dan setelah Perubahan Tahun 2025;
- Bab IV: Penutup

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

II. 1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2025 terdiri dari 10 Program, 17 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 17.131.263.000,- dan setelah perubahan anggaran belanja bertambah menjadi sebesar Rp. 17.410.977.000,- Dengan Anggaran tersebut diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.. Pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terdiri :
 - 1). Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%.
 - b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%.
 - c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%.
 - d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%
 - e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%

- f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%
- g) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- h) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- i) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- j) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- k) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- l) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target 100% yang terealisasi 0%
- m) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- n) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- o) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 100% yang terealisasi 0%

- p) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
 - q) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
 - r) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan target 22% yang terealisasi 4%
- 2). Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:
Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.
- 3). Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.
- 4). Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
- a) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatanannya.
 - b) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
 - c) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
 - d) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.
- 5). Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD
Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu :
- a). Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b) Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

- c) Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 6). Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:
 - a). Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
 - b). Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
 - c). Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
 - d). Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan
Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = (9/4*100)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat Daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	4	4	2,00	0,50	6,00	50,00
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	1	1,00	1,00	2,00	66,67
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	2	2	2,00	1,00	4,00	66,67
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1	1	1,00	1,00	2,00	66,67
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	2	2	2,00	1,00	4,00	66,67
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	4	4	2,00	0,50	6,00	50,00

2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	560	560	25,00	0,04	585,00	1.392,86
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	1	1	0,00	0,00	1,00	33,33
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	12	25,00	2,08	37,00	61,67
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan pelayanan administrasi umum (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	185	4	65	0,00	0,00	4,00	2,16
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540	180	180	20,00	0,11	200,00	37,04

2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	2	23	0,00	0,00	2,00	6,67
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480	414	160	15,00	0,09	429,00	89,38
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	19,00	1,58	31,00	86,11
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	13,00	1,08	25,00	69,44
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	calupan ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	1	1	8,00	8,00	9,00	300,00

2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	231	18	55	10,00	0,18	28,00	12,12
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240	2	35	0,00	0,00	2,00	0,83
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	1	0,00	0,00	1,00	33,33
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	cakupan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanan RPPLH (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	6	1	0,00	0,00	0,00	1,00	16,67
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan KLHS (%)	100	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	3	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	2	2	0,00	0,00	2,00	33,33
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3	1	2	0,00	0,00	1,00	33,33
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	33	11	11	0,00	0,00	11,00	33,33
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	46	11	17	0,00	0,00	11,00	23,91
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	30	30	30	0,00	0,00	30,00	100,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase kawasan perkotaan (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	141	47	47	25,00	0,53	72,00	51,06
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	persentase jumlah usaha milik izin penyimpanan sementara limbah B3 (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	17	5	5	0,00	0,00	5,00	29,41
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Limbah B3 dalam satu Daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	16	5	5	0,00	0,00	5,00	31,25

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	100	95	100	0,00	0,00	95,00	95,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan (%)	100	85	100	0,00	0,00	85,00	85,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	37	7	12	0,00	0,00	7,00	18,92
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	106	35	35	0,00	0,00	35,00	33,02

2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	cakupan pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3	5	1	0,00	0,00	5,00	166,67
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15	5	5	0,00	0,00	5,00	33,33
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	100	95	100	0,00	0,00	95,00	95,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	cakupan penanganan aduan (%)	100	95	100	0,00	0,00	95,00	95,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40	8	10	0,00	0,00	8,00	20,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (%)	82	76	78	4,00	0,05	80,00	97,56

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	24	20	22	4,00	0,18	24,00	100,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3	3	5	0,00	0,00	3,00	100,00
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	69	22	22	13,00	0,59	35,00	50,72
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	30	9	9	16,00	1,78	25,00	83,33

II. 2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

- a. Meningkatnya volume sampah
Kenaikan jumlah sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri, menjadi masalah utama karena melebihi daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- b. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah
Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, seperti tempat pembuangan akhir, bank sampah, dan fasilitas daur ulang, memperparah masalah penanganan sampah.
- c. Dampak negatif pembuangan sampah ilegal
Praktik pembuangan sampah ilegal, baik di lahan kosong maupun saluran air, menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha
Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perizinan lingkungan usaha.
- e. Belum adanya regulasi yang jelas
Tidak adanya naskah akademik dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Sidrap menjadi kendala dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha yang berkelanjutan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil revidan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Renja Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebanyak 10 (Sepuluh) program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Subkegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 17.410.977.000,- sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 2) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
1. Penyimpanan sementara Limbah B3

- 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- VII. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- X. Program Pengelolaan Persampahan
 1. Pengelolaan Sampah
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SEBELUM PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	6.557.977.860,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	6.557.261.673	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	31.361.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	28.842.400	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	4	11.977.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	9.581.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.527.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.280.100	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2	1.794.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	3.422.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.711.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.369.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2	3.231.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	4.293.800	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	4	11.121.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	8.896.500	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.927.473.860,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.924.238.773	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	560	3.907.113.860,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	560	3.907.113.773	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	7.630.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	6.543.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	20	12.730.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	20	10.582.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan pelayanan administrasi umum (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	153.529.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	78.503.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	65	3.500.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	65	3.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	180	150.029.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	180	75.003.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	1.788.514.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	1.862.864.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	2	1.788.514.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	23	1.862.864.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	448.590.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	429.303.500	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	160	5.010.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	160	5.010.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	74.040.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	12	65.340.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	369.540.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	12	358.953.500	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	calupan ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	208.510.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	233.510.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	1	42.494.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	42.494.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	55	133.966.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	55	133.966.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	35	17.050.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	35	17.050.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1	15.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	40.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	300.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	300.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	cakupan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	0,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	0	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kab. Sidenreng Rappang	0	0,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan KLHS (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	300.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	300.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Sidenreng Rappang	2	300.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	300.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	53.807.500,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	11.94	43.786.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	41.567.500,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	36.442.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	2	26.567.500,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	23.089.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Sidenreng Rappang	2	15.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	13.353.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	12.240.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	7.344.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	11	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	11	3.876.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab. Sidenreng Rappang	17	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	17	3.468.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	30,00	2.072.362.400,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	30,00	2.151.257.027	Aparatur dan Masyarakat
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase kawasan perkotaan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	2.072.362.400,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	100	2.151.257.027	Aparatur dan Masyarakat
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	47	2.072.362.400,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	47	2.151.257.027	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	18.190.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	11.441.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	persentase jumlah usaha milik izin penyimpanan sementara limbah B3 (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	5.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.439.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Sidenreng Rappang	5	5.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	3.439.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Limbah B3 dalam satu Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	13.190.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.002.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Sidenreng Rappang	5	13.190.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	8.002.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	24.720.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	16.053.000	ASN Lingkup DLH
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	24.720.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	16.053.000	ASN Lingkup DLH
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Sidenreng Rappang	12	10.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	7	6.980.000	ASN Lingkup DLH

2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Sidenreng Rappang	35	14.720.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	25	9.073.000	ASN Lingkup DLH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	3.927.000	ASN Lingkup DLH
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	cakupan pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.927.000	ASN Lingkup DLH

2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	5	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	3.927.000	ASN Lingkup DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	37.745.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	26.056.000	ASN Lingkup DLH
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	37.745.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	26.056.000	ASN Lingkup DLH
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	5	37.745.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	5	26.056.000	ASN Lingkup DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	8.205.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	5.289.000	ASN Lingkup DLH

2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	cakupan penanganan aduan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.205.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	5.289.000	ASN Lingkup DLH
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Sidenreng Rappang	10	8205000	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	7	5.289.000	ASN Lingkup DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	47.67	8.052.135.240,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	77.90	8.295.906.300	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.052.135.240,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.295.906.300	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Sidenreng Rappang	5	1.770.559.440,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	5	1.865.313.000	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Kab. Sidenreng Rappang	4	375.000.000,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	4	375.000.000	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang

2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab. Sidenreng Rappang	22,000	4.094.116.800,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	22,000	4.393.707.400	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Sidenreng Rappang	9000,000	1.812.459.000,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	9,000	1.661.885.900	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang

BAB IV.

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan
2. Kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat
3. Tingkat kualitas udara menunjukkan penurunan, dan perlu diperhatikan lebih baik
4. Kemajuan transportasi dan industri yang tidak diringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif yang besar
5. Tingkat pencemaran air pada berbagai air baik air permukaan maupun air tanah juga menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan, yang dapat mengancam pemenuhan kebutuhan air bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat
6. Sungai-sungai kehilangan fungsi ekologisnya karena tercemar limbah industri dan rumah tangga
7. Kondisi tanah yang semakin tercemar oleh bahan kimia yang berasal dari sampah padat dan pupuk kimia
8. Hilangnya berbagai spesies keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu cerminan degradasi daya dukung lingkungan
9. Munculya berbagai penyakit endemik di masyarakat
10. Makin tingginya pemakaian bahan bakar fosil menyebabkan meningkatnya emisi gas-gas pencemar

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk pencapaian visi dan misi tersebut di atas sangat ditentukan oleh faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Kerjasama yang baik oleh sumber daya manusia, lingkungan, baik petugas pelayanan publik, masyarakat dan pelaku usaha
2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, terutama di tingkat lapangan
3. Kesigapan tenaga teknis di bidang lingkungan hidup untuk menangkal dampak kerusakan lingkungan hidup
4. Tersedianya sarana pendukung dan alat-alat kantor yang memadai

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan :

1. Seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengimplementasikan Renja ini dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Keberhasilan sektor lingkungan hidup harus didukung oleh sektor-sektor lain yang terkait dan didukung oleh pendanaan yang memadai.
3. Rencana kerja ini merupakan langkah awal dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Perlu didasari bahwa keberhasilan di bidang lingkungan hidup tergantung dari partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasi renja ini diharapkan partisipasi yang lebih aktif dan luas dari seluruh masyarakat.
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan difokuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam OPD, sebagai sasaran program pada akhir tahun perlu dilakukan evaluasi dan analisis tentang apa yang telah dicapai maupun yang belum tercapai sebagai bahan untuk menyusun program berikutnya.

Pangkajene Sidenreng,

2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sidenreng Rappang government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG" at the top and "DINAS LINGKUNGAN HIDUP" at the bottom. In the center of the stamp is a smaller emblem. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 198106112000031002

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perubahan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, dimaksudkan untuk melakukan perubahan terkait upaya-upaya maksimal yang akan dilakukan terkait efesiensi yang dilaksanakan, dan yang paling utama tetapn sebagai bahan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu-isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan visi, misi dan program kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2025
KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691220199009 1 002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	.i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN	12
 TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I	12
Tahun 2025	
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	21
Daerah	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program dan Kegiatan	31
3.2 Pendaan Perangkat Daerah.....	37
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2025	16
Tabel 30	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejalan dengan kondisi objektif saat ini serta antisipasi peluang dan tantangan dalam perspektif kedepan sesuai dengan tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu salah satu elemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan prioritas program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pembangunan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dan terencana, untuk itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan diharapkan dapat tersusun dengan baik dan bertahap sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Berdasarkan hal tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024–2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai upaya pencapaian pelaksanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait dengan fungsinya maka administrasi kependudukan mempunyai 3 (tiga) fungsi signifikan, yaitu **fungsi hukum** (Pengakuan Negara terhadap identitas seseorang atau anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran), **fungsi statistik** (menyediakan data penduduk yang meliputi jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah perpindahan penduduk di dalam dan luar kabupaten, jumlah pindah datang dari luar kabupaten, data penduduk berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, agama), **fungsi kerjasama kelembagaan** (menyediakan data-data penduduk bagi pihak-pihak atau institusi-institusi yang berkepentingan).

Tuntutan persaingan dan kualitas pelayanan sebagai bentuk tantangan di masa yang akan datang, merupakan bagian yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan perencanaan yang signifikan agar data base Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan akurasinya, peningkatan sistem pelayanan yang baik dan bermutu, sehingga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Admininstrasi Kependudukan merupakan bagian dari wujud komitmen Nasional dalam membangun peradaban baru tentang Administrasi Kependudukan, sebagai sistem yang komprehensif bagian dari tata pemerintahan, sehingga harus ditinggalkan pendapat konvensional bahwa Administrasi Kependudukan hanya berkaitan penerbitan administrasi semata berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab penuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pelaksanaan yang diberikan kewenangan desentralisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. **Tugas pokok** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksud adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah. Adapun **fungsi** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengolahan Data, Perpindahan Penduduk, Pendataan Kelahiran, Kematian serta Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Akta dan Pengangkatan Anak.

- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.
- d. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kepeendudukan (SIK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025
21. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
37. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah :

1. Melakukan penyesuaian- penyesuaian terkait program kegiatan dengan kondisi saat ini untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi serta Pusat.
3. Penjabaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai

Tujuan rencana kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang diharapkan adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 seperti uraian berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025**

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan
I Tahun 2025

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Penerapan Kebijakan penyelenggaraan dan Pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rencana kerja dan Rencana strategis. Kebijakan tahun lalu masih bersifat statis yang bertolak hanya pada konsep bagaimana memaksimalkan dan mengefektifkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan konsentrasi pada penerapan KTP Elektronik, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di tahun 2025 dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera. Adapun misi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Membangun struktur Perekonomian Daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis, menuju agroindustry pada sector Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif
- c. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.
- d. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- e. Mewujudkan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religious.

- f. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.
- g. Mengembangkan Infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Terkait dengan visi dan misi dimaksud maka point ke 6 atau point f merupakan misi yang harus diupayakan terkait dengan fungsi dan tugas yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah berupaya dan bekerja keras mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni :

- a. Terciptanya fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif.
- b. Terciptanya data base kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Terwujudnya monitoring dan evaluasi program kegiatan
- d. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana strategis telah diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penataan administrasi kependudukan secara Nasional, berupa:

- Pencapaian Pelayanan pendaftaran Penduduk melalui perekaman data penduduk untuk KTP-el dan pencatatan sipil sesuai pengembangan sistem administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.
- Pencapaian Pelayanan Pencatatan Sipil melalui pencetakan dokumen pencatatan sipil, penerbitan akta kelahiran, kematian, perceraian dan pernikahan dan sebagainya.
- Regulasi sistem pelayanan yang baik dan bermutu serta berpihak kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani pihak yang berkepentingan pada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan Data base yang sudah tersedia dan akan terus diupayakan untuk dikembangkan menjadi data yang berkelanjutan

yang dikelola berdasarkan keragaman dan kedinamisan penduduk secara Nasional.

- Mengupayakan sistem aplikasi untuk mendukung kinerja yang berkualitas, efisien dan efektif pada pelaksanaan tugas – tugas yang akan datang, maka perlu suatu upaya yang terencana agar dapat menghasilkan suatu hasil yang berkualitas dan memuaskan serta diharapkan akan mencapai prestasi yang dapat menjadi konsep percontohan bagi semua pihak.
- Peningkatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan Perubahan rencana kerja harus senantiasa memperhatikan capaian yang pernah didapatkan pada tahun – tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebagaimana telah datur dan diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Adapun evaluasi terhadap Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebesar 97,77 % dan perkiraan capaian target kinerja tahun 2024 sebesar 100%. Capaian kinerja ini agak rendah dibanding target yang telah ditetapkan karena adanya kendala waktu, dimana jadwal perubahan anggaran agak terlambat sehingga proses penyelesaian juga ikut terhambat di akhir tahun. Selain itu besaran anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan untuk pengadaan tinta, formulir dan blanko yang bersumber dari dana APBD 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang kadang menggunakan dana yang lumayan besar dalam satu tahunnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/ d triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table 2. (II.1) dengan format table dibawah :

Tabel II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TRIWULAN TAHUN 2025

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% 100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% 100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan 804	252	276	72	26,09	324	40,30

	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	27	9	9	2	22,22	11	40,74
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi perkantoran	%	100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	12	12	3	25,00	15	41,67
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	4	4	1	25,00	5	41,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	3	4	0	0,00	3	75,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	350	205	65	12	18,46	217	62,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	3	2	2	0	0,00	2	66,67
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	35	21	7	0	0,00	21	60,00
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	25	100,00	125	125,00

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	71	25	23	0	0,00	25	35,21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	37	13	12	0	0,00	13	35,14
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	25	100,00	125	125,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	3	25,00	15	41,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	36	12	12	3	25,00	15	41,67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	36	12	12	3	25,00	15	41,67
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	-	100	25	25,00	25	25,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	-	25	0	0,00	0	-
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%	100	100	99,50		0,00	100	100,00

	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk	%	100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	108	26	36	9	25,00	35	32,41
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	dokumen	84	24	24	6	25,00	30	35,71
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendafran Penduduk	laporan	84	24	24	6	25,00	30	35,71
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta Pencatatan Sipil	%	100	100	83,50	0	0,00	100	100,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	50	100	25	25,00	75	75,00
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	laporan	36	12	12	3	25,00	15	41,67
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dok	8100	2164	2.000	495	24,75	2659	32,83
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	layanan	18	6	6	2	33,33	8	44,44

4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</i>	%	48,48	100	60	-	0,00	100	206,27
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Base Kependudukan	%	100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	36	12	12	3	25,00	15	41,67
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	%	100	100	100	25	25,00	125	125,00
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	36	12	12	3	25,00	15	41,67
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	9	3	3	-	0,00	3	33,33

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.2.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan Sumber daya manusia menjadi modal utama Dalam rangka merealisasikan setiap program dan kegiatan SKPD, dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing SKPD. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan Pemerintah dalam bidang pelayanan publik, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia aparatur Pemerintah.

- Dari jumlah PNS yang ada masih sangat dibutuhkan tambahan PNS untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini tidak seimbang mengingat volume pekerjaan sangat besar dan kadang bertumpuk.
- Kebutuhan tenaga komputer PNS untuk tingkat Administrator data base dan pengelolaan keamanan data penduduk masih sangat dibutuhkan.
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari :

a. Kepala dinas

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil serta memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sekretaris

Sekretaris di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi dilingkungan dinas, membawahi:

- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub bagian Umum dan kepegawaian

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawahi beberapa pejabat fungsional yang menangani hal sebagai berikut:

- *Indetitas Penduduk* menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- *Pendataan Penduduk* yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan pendataan penduduk.
- *Pindah Datang Penduduk* yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang.

d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi beberapa pejabat fungsional, yang menangani beberapa hal, sebagai berikut:

- *Kelahiran* yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

- *Perkawinan dan Penceraian* yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
 - *Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian* yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengakatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.
- e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang membawahi beberapa pejabat fungsional dengan kewenangan dalam hal, sebagai berikut:
- *Pengolahan dan Penyajian Data* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaa dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - *Kerjasama dan Inovasi Pelayanan* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inonasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - *System Informasi Administrasi Kependudukan* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi srta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.

Sumber daya manusia tersebut diatas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh staf yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat. Jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, antara lain berupa penerbitan:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA)
 - d. Biodata Penduduk
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Akta kelahiran
 - b. Akta kematian
 - c. Akta perkawinan
 - d. Akta perceraian
 - e. Akta pengangkatan anak
 - f. Akta pengesahan anak
 - g. Dokumen pembatalan anak
 - h. Dokumen Pembetulan akta pencatatan Sipil
3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
 - a. Perjanjian Kerjasama (PKS)

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat kurang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dan masih sangat jauh dari kondisi yang diharapkan untuk mendukung program Nasional penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga pencapaian tujuan dan sasaran berjalan lambat. Sebagai instansi pelayanan yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan prima. Untuk mendukung system pelayanan yang cepat dan bermutu maka diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai dapat terpenuhi untuk merealisasikan hal tersebut.

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	1	-	2	3
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	10	1	2	13

Kendaraan operasional sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 3 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas, Sekretaris dan operasional perekaman. Kendaraan roda empat dalam kondisi baik 1 (satu) unit dan rusak berat 2 (dua) unit. Sedangkan kendaraan roda 2 ada 10 unit dimana 9 (Sembilan) kendaraan roda dua dalam kondisi baik dan 1 (satu) rusak berat.

Tabel 4. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1
Mesin antrian	1	-	-	1
Stabiliser/UPS	6	-	-	6
Pc/Komputer	31	-	-	31
Laptop	6	-	-	6
Note Book	7	-	-	7
Printer	36	-	-	36

Scanner	2	-	-	2
Irish mata	20	-	-	20
Server	2	-	-	2
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	6	-	-	6
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet PC	8	-	-	8
HP	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jumlah	141	-	-	141

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebanyak 141 unit. Dimana ada keseluruhan barang dimaksud dalam kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka pelayanan di Kantor dan di Kecamatan.

2.2.3 Dampaknya terhadap pencapaian

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengemban tugas sebagai instansi pelayanan yang berperan menata administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan bidang kependudukan, meningkatkan kebijakan positif bidang kependudukan dan meningkatkan pelayanan bidang catatan sipil. Tentu saja apabila dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dan akan direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, maka perlu perencanaan disusun dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kemudian untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Pusat tersebut. Program strategis ini dibuat dalam rangka pencapaian sasaran secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. Harapan yang sangat besar bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya di masing-masing Kabupaten / Kota adalah dengan menganggarkan program kegiatan pada tahun yang akan datang dimana di arahkan untuk mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan lancar seperti pengadaan sarana dan prasarana peralatan pencetakan KTP elektronik, mempersiapkan blanko, peningkatan SDM serta dana konsultasi/ kordinasi agar tetap berjalan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Adapun solusi dan masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2025 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan. Untuk itu diharapkan ditingkatkan anggaran dalam hal :

- a. Anggaran instruksional yakni untuk pengadaan sarana pendukung pencetakan print out KTP-el seperti : tinta, blanko, perangkat pencetakan, perangkat komputer bagi adm inistrasi data base dsb.
- b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pengatur suhu ruangan, meja kerja, note book yang memadai agar stabilitas pelayanan setiap hari dapat berjalan dengan semestinya.

- c. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat eselon yang ada, yang dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan.
- d. Pengadaan mobil unit pelayanan keliling, yang dapat menjangkau wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan wilayah terpencil dengan perangkat mobile dan anggaran pendukung aktifitas pelayanan.
- e. Perlunya peningkatan SDM (Sumber daya Manusia), baik sumber daya pengelola maupun sumber daya masyarakat. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat masyarakat terkait persyaratan.
- f. Pembangunan Zona Integritas, peningkatan komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan bebas korupsi dan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan public.
- g. Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- h. Pengadaan sarana dan prasarana alam rangka memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan di setiap kecamatan.

2.2.4 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan ditemui beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun kedepan dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengalami perubahan substansi yang mendasar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan yang

professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Hal ini sangat perlu disosialisasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh sehingga semua permasalahan dapat teratasi.

2. Kebutuhan pemanfaatan data yang semakin mendesak untuk kepentingan layanan public.
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat, efektif dan efisien.
4. Ketersediaan blangko KTP el masih sangat terbatas, karena pengadaan masih di pusat. Keterbatasan ini karena masih sangat bergantung pada Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelayanan. Dimana kebutuhan mendasar untuk mengefektifkan layanan masih sangat terbatas.

Selanjutnya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan tugas dan fungsi, kondisi wilayah dan perubahan iklim politik ditemukan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengembangan pelayanan antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, melalui pemberian layanan perekaman dan pencetakan pada 7 (Tujuh) Kecamatan. Dengan adanya efisiensi maka pelayanan di tingkat Kecamatan untuk tahun 2025 ditiadakan atau di non aktifkan.
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses bagi siapapun. Memberikan harapan untuk memberikan layanan online melalui aplikasi layanan online.
3. Terdapatnya aturan Lex specialis (aturan khusus) pada pasal 83.A Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan

administrasi kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Dimana diharapkan untuk tetap menjaga integritas dan komitmen penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk tetap pada peningkatan kualitas layanan.

2.2.5 Formulasi Isu-isu penting / rekomendasi untuk tindak lanjut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap mengimplementasikan program penataan administrasi kependudukan secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pelayanan serta mengembangkan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) yang berbasis elektronik dalam mendukung pembangunan dalam pelayanan dasar masyarakat sehingga mencapai RPD 2024–2026.

Program yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam menata administrasi kependudukan baik strategis maupun prioritas bagi SKPD adalah :

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terdiri dari (membangun informasi, updating dan pemeliharaan).
- Pengembangan tertib data base kependudukan.
- Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Koordinasi antar pelaksana kebijakan kependudukan.
- Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
- Makin intensnya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Pelaporan
- Monitoring dan Evaluasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Program kegiatan dalam Perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah sebagai berikut :

A. Program dan Urusan Dinas

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan: Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah penyusunan perencanaan perangkat daerah
- Sub. Kegiatan: koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Sub. Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Sub. Kegiatan: Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub. Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Cakupan Administrasi umum perangkat daerah
- Sub. Kegiatan: Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- Sub. Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediahkan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub. Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Sub. Kegiatan: pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Sub. Kegiatan: sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Sub. Kegiatan: bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah orang mengikuti bimbingan teknis implementasi

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
perundang-undangan	peraturan perundang-undangan
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan: pengadaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Sub. Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/	Jumlah gedung kantor dan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan jasa perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
Kegiatan : Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Dokumen Pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : Pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan
- Sub. Kegiatan : pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan : peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk
- Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk
- Kegiatan: penataan pendaftaran penduduk	Persentase penataan pendaftaran penduduk

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
- Sub Kegiatan : pengadaan Dokumen kependudukan selain belangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain belangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan
- Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/ kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang dimanfaatkan
- Sub Kegiatan: sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Sub. Kegiatan: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan
Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di	Jumlah Hasil Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam
- Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan timbal balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi yang menyelenggarakan urusan bidsang agama Kabupaten/Kota dalam pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan : sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil
- Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan fasilitasi pencatatan sipil
Kegiatan: Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya
- Sub. Kegiatan: Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Jumlah lap. Hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan
Kegiatan: Pengumpulan	Persentase database

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan	kependudukan sidrap
- Sub. Kegiatan: kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data
- Sub. Kegiatan: pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen dan kependudukan yang diolah dan disajikan
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan pelayan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabuapten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan: penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
- Sub. Kegiatan: sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi informasi administrasi kependudukan

3.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu sampai akhir tahun memuat berbagai rencana kerja program kegiatan. Rencana kerja perubahan ini merupakan acuan dalam menyempurnakan rencana kerja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang dalam penjabaran dan implementasi Perubahan rencana kerja mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) dan PAD yang berasal dari Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rencana kerja perubahan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan Rutin tahunan dan harus tetap dilaksanakan karena merupakan kegiatan wajib bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi skala prioritas di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dijelaskan lebih rinci pada Tabel III.1 Dibawah ini :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap

Kode						Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
								SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
								LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Kelompok Penerima Manfaat	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Kelompok Penerima Manfaat
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP										4.072.252.070				3.740.843.000	
2.	12.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	3.233.019.070	Pegawai Disdukcabil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	3.179.783.000	Pegawai Disdukcabil
2.	12.	01	.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	50.000.000	Pegawai Disdukcabil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	22.399.000	Pegawai Disdukcabil
2.	12.	01	.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	9 dokumen	50.000.000	Pegawai Disdukcabil	Kab. Sidenreng Rappang	9 dokumen	22.399.000	Pegawai Disdukcabil
						koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0 dokumen	-	Pegawai Disdukcabil	Kab. Sidenreng Rappang	0 dokumen	0	Pegawai Disdukcabil

						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	2.071.288.070	ASN DISDUKCAPIL	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	2.234.091.500	ASN DISDUKCAPIL
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	ASN DISDUKCAPIL	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	ASN DISDUKCAPIL
2.	12.	01	.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	252	Orang/ bulan	2.071.288.070	ASN DISDUKCAPIL	Kab. Sidenreng Rappang	252	Orang/ bulan	2.234.091.500	ASN DISDUKCAPIL
2.	12.	01	.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	294.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	102.340.000	Pegawai Disdukcapil
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Pegawai Disdukcapil

2.	12.	01	.2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	10.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	6.634.000	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	0	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4 Paket	6.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	4 Paket	2.495.000	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Paket	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4 Paket	8.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	4 Paket	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	220 Laporan	270.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Laporan	93.211.000	ASN DISDUKCAPIL
2.	12.	01	.2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	30.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	22.129.500	Pegawai Disdukcapil
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	24 dokumen	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 dokumen	0	Pegawai Disdukcapil

						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sidenreng Rappang	24 orang	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 orang	0	Pegawai Disdukcapil
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	0	Pegawai Disdukcapil
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	24 orang	30.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 orang	22.129.500	Pegawai Disdukcapil
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	0 orang	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 orang	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	243.927.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	152.422.000	Pegawai Disdukcapil
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Unit	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Unit	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	4.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	2 unit	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	7 unit	239.927.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	21 unit	152.422.000	Pegawai Disdukcapil
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	0	Pegawai Disdukcapil

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	-	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	0	Pegawai Disdukcapi
2.	12.	01	.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	416.620.000	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	453.818.000	Pegawai Disdukcapi
2.	12.	01	.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	50.980.000	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	70.980.000	Pegawai Disdukcapi
2.	12.	01	.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	323.640.000	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	369.786.000	Pegawai Disdukcapi
2.	12.	01	.2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	42.000.000	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	13.052.000	Pegawai Disdukcapi
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	-	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapi
2.	12.	01	.2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	127.184.000	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	192.583.000	Pegawai Disdukcapi
2.	12.	01	.2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	23 Unit	20.840.000	Pegawai Disdukcapi	Kab. Sidenreng Rappang	23 Unit	23.823.000	Pegawai Disdukcapi

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	50.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	83.816.000	Pegawai Disdukcapil
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	56.344.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	15 unit	84.944.000	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	0	Pegawai Disdukcapil
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Kab. Sidenreng Rappang	99,4 Persen	416.284.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	99,50 Persen	373.060.000	Masyarakat Kab Sidrap
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	416.284.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	373.060.000	Pegawai Disdukcapil
2	12	02	2	01	0006	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	72 laporan	22.954.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	24 laporan	44.000.000	Pegawai Disdukcapil

2	12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	24 Dokumen	375.623.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	24 Dokumen	59.785.000	Pegawai Disdukcapil
2	12	02	2	01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	36 Laporan	17.707.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	36 Laporan	269.275.000	Pegawai Disdukcapil
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0 Persen	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	0	Pegawai Disdukcapil
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendaftan Penduuduk	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Penataan Pendaftaran Penduduk	persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0 Persen	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	0	Pegawai Disdukcapil
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Dokumen	-	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0 Dokumen	0	Masyarakat Kab Sidrap
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	0	Pegawai Disdukcapil
						Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil

						Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	0	Pegawai Disdukcapil
						Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2	.12	.03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	95	Persen	284.949.000	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	83,50	Persen	68.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap
2	12	03	02	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	73.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	56.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap
2	12	03	02	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	2.700	dokumen	40.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	2.000	dokumen	40.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	-	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Masyarakat Kab. Sidrap
2	12	03	02	01	0006	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kab. Sidenreng Rappang	6	Layanan	33.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	6	Layanan	16.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap

						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	200.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	0	Pegawai Disdukcapil
						Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	200.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2	12	03	02	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	11.949.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	12.000.000	Pegawai Disdukcapil
2	12	03	02	02	0003	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	11.949.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	12.000.000	Pegawai Disdukcapil
						Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil

						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Dokumen	-	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0 Dokumen	0	Masyarakat Kab. Sidrap
						Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Masyarakat Kab. Sidrap
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	14,7 Persen	138.000.000	Masyarakat Kab Sidrap/opd	Kab. Sidenreng Rappang	60 Persen	120.000.000	Masyarakat Kab Sidrap/opd
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	0	Pegawai Disdukcapil
						Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2	12	04	02	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	52.670.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	21.000.000	Masyarakat Kab Sidrap/opd
						Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0 dokumen	-	Masyarakat Kab Sidrap/opd	Kab. Sidenreng Rappang	3 dokumen	0	Masyarakat Kab Sidrap/opd
2	12	04	02	01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Sidenreng Rappang	12 dokumen	52.670.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	12 dokumen	21.000.000	Masyarakat Kab Sidrap

2	12	04	02	01		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	85.330.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	99.000.000	Masyarakat Kab Sidrap
						Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2	12	04	02	01	0008	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	65.048.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	30.000.000	Masyarakat Kab Sidrap
2	12	04	02	01	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	3 Dokumen	20.282.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	3 Dokumen	69.000.000	Masyarakat Kab Sidrap
						Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	0	Masyarakat Kab Sidrap

BAB IV PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dalam rangka pencapaian dan peningkatan kualitas kinerja merencanakan akan melaksanakan 4 (Empat) program dan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam hal Penataan administrasi kependudukan dan Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta penerapan kepemilikan KTP-el. Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mengarahkan pada pencapaian visi dan misi Buapti selaku Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga untuk visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal pemenuhan pelayanan yang berbasis teknologi informasi digital. Penjabaran dari tugas dan fungsi dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan, untuk tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan proses penyesuaian terhadap program efisiensi Pemerintah Pusat dan ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota untuk program dan kegiatan yang akan dicapai satu tahun ke depan. Harapan pelaksanaan program kegiatan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi lebih efektif dan efisien. Sehingga upaya-upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital dapat

memberikan hasil yang optimal bagi “ Kabupaten Sidenreng Rappang yang Maju dan sejahtera”

Untuk mencapai keberhasilan terhadap capaian kinerja sebagaimana yang diharapkan, maka faktor yang memungkinkan sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

- Meningkatnya kemampuan aparat
- Meningkatnya tertib administrasi
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Munculnya respon positif dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
- Terpenuhinya alokasi anggaran, khususnya dalam memberikan pelayanan jemput bola dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat.
- Terpenuhinya hak kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas–tugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 2025

KEPALA DINAS



PATAHANGI NURDIN, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691220199009 1 002



RENJA PERUBAHAN

(RENCANA KERJA)

**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK & KB**

TAHUN 2025



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Renja Perubahan ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan kondisi aktual pembangunan daerah, baik yang bersumber dari perubahan arah kebijakan nasional dan daerah, perubahan alokasi anggaran, maupun tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara cepat. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 2025–2029 dan mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah dalam urusan wajib non-pelayanan dasar, DPPKB berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta penurunan angka stunting dan pernikahan usia anak.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur perangkat daerah, mitra kerja, maupun masyarakat. Harapan kami, Renja Perubahan ini dapat menjadi panduan yang operasional, efektif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan yang ada.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidenreng Rappang yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing melalui pembangunan keluarga yang tangguh dan mandiri.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

SYAHRUL MUBARAK, SKM, M.Amd.KP
Nip. 19810802 200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Maksud Dan Tujuan	3
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	6
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	6
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	7
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Tahun 2025 DPPKB Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tetap relevan, realistis, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, perubahan Renja menjadi instrumen penting dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perubahan pada RKPD yang menyangkut penyesuaian kebijakan pembangunan, prioritas sasaran daerah, serta alokasi anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen Renja agar tetap sinkron dan relevan.

Guna mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2025 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena PERUBAHAN RENJA

menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana dan program, PERUBAHAN RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat.

1.2 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah Terpilih Kab.Sidenreng Rappang Terkait Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi : Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahterah.

Misi : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul dan Kesehatan Untuk Semua.

Arah Kebijakan : Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Program Penguatan Ketahanan Keluarga

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Sedangkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**, mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- 1.2 Landasan Hukum**, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan**, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 antara lain: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV P E N U T U P,

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Dearah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegitan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Peragkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	300 Persen	46 Persen	100				
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	300 Persen	0	100	0			
2.14.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0	4	0	0		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	0	100				
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/Bulan	0	360 Orang/ Bulan	27	6,67	27	3,75
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Prangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	51 Persen	100				
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	26 Paket	1	13 Paket	1 paket	7,69	2	7,69

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	0	12 Laporan	3 Laporan	25	1	4,17
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	-	100	0	0		
2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	1 Unit	0	1 Unit	-	0	0	0
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100				
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	24 Laporan	0	12 Laporan	3 Laporan	25	3	12,50
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Umum pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	25 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25	4	16
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	-	100 Persen		50 Persen		
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	0	4 Unit	0	0	0	0
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	8 Unit	0	4 Unit	2 Unit	50	2	25
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas	2 Unit	0	1 Unit	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.01.2.09.0011	Pemerlihaaran/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas	1 unit	0	-	0	0	0	0
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun	100 Persen	85 Persen	21.3 Persen				
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan OPD Yang Terlibat Dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) (%)"	100 Persen	61 Persen	100 Persen				
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1	100
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)"	2 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	0	0	0	0,00
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	"Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)"	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	1	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten	100 Persen	94 Persen	100 Persen				
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA)	2 Laporan	-	1 Laporan	0	0	0	0
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1	33,33
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	25 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25,00	4	16,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia	25 Dokumen	1 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25,00	4	16,00
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)"	2 Unit/Rumah Data	0	1 Unit	0	0	0	0
2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ditingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)"	2 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0	0
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatandan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)"	22 Laporan	0	11 Laporan	2 Laporan	18,18	2	9,09

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)"	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1	33,33
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)	100 Persen	69 Persen	55.9 Persen				
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Loka	100 Persen	79 Persen	100 Persen				
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	23 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	3 Laporan	0,27	4	17,39
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan)	12 Laporan	0	6 Laporan	3 Laporan	0,50	3	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Peragkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1	33,33
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	23 Organisasi	1 Organisasi	11 Organisasi	0	0	1	4,35
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	318 Orang	106 Orang	106 Orang	26	0,25	132	41,51
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Yang Melaksanakan Pembinaan IMP Dan Program KKBPK (%)”	100 Persen	93 Persen	100 Persen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	25 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	0,17	3	12
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2703 Orang	45 Orang	1329	295 Orang	0,22	340	12,58
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Laporan	1 Laporan	11 Unit	0	0	1	50
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	13 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	0,33	3	23,08
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Cakupan Kader Yang Ikut Dalam Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan PelayananDan Pembinaan Kesertaan Berkb (%)	100 Persen	23 Persen	100 Persen				
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1	100
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	176 Unit/Kampung KB	50 Kampung KB	63 Unit	15 Unit	0,24	65	36,93

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Peragkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	100 Kampung/Desa	50 Kampung KB	25 Kampung	7 Kampung	0,28	57	57
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)	100 Persen	92 Persen	36.5 persen				
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (%)"	100 Persen	78 Persen	100 persen				
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	2 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1	1	50
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) (Laporan / Dokumen)	18 Laporan / Dokumen	0	9 Laporan/ Dokumen	1 Laporan/ Dokumen	0,11	1	5,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosidan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	212 Laporan	0	106 Laporan	1 Laporan	0,01	1	0,47
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	40 Unit	20 Unit	10 Unit	10 Unit	0,09	21	52,50
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2 Laporan	0	1 Laporan	0 Laporan	0,00	0	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan TingkatDaerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaanketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 Persen	96 Persen	100 Persen				
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)	2 Organisasi	0	1 Organisasi	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	31 Laporan	11 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	20,00	13	41,94
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Yang Mendapat Pendampingan	31 Laporan	11 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	20,00	13	41,94

Pangkajene Sidenreng, 16 April 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


SYAHRUL MUBARAK SKM, M.Adm.KP
Pangkat : IV/a
Nip : 19810802 200604 1 015

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan
1	Tingkat Kelahiran yang Masih Relatif Tinggi	Angka kelahiran di beberapa kecamatan belum terkendali akibat masih rendahnya kesadaran dan akses terhadap pelayanan KB.
2	Ketimpangan Akses Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Wilayah terpencil dan perdesaan masih memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga penyuluh KB, menyebabkan kesenjangan layanan.
3	Rendahnya Partisipasi Pria dalam Program KB	Budaya patriarki dan kurangnya edukasi menyebabkan rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB.
4	Rendahnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perencanaan	Masih terbatasnya integrasi data antara instansi dan belum optimalnya pemanfaatan data SIGA (Sistem Informasi Keluarga).
5	Perkawinan Usia Anak yang Masih Tinggi	Tingginya angka perkawinan usia anak berdampak pada kesehatan ibu dan anak serta menambah beban demografi.
6	Masih Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi	Terutama di wilayah tertentu yang kurang terjangkau pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai.
7	Belum Optimalnya Pemberdayaan Keluarga melalui BKB, BKR, BKL dan UPPKA	Kurangnya pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok serta minimnya partisipasi masyarakat.
8	Perubahan Struktur dan Bonus Demografi	Bonus demografi belum diimbangi dengan kualitas SDM yang siap kerja dan produktif, serta belum termanfaatkan secara optimal.
9	Masih Terbatasnya Anggaran dan Sumber Daya	Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program prioritas tidak dapat dijalankan secara maksimal.
10	Kurangnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Program DPPKB	Digitalisasi program masih minim, terutama dalam edukasi dan penyuluhan berbasis media sosial atau aplikasi digital.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp7.557.069.000,00				Rp 7.554.735.000,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp3.111.878.800,00		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp 2.756.476.300,00	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp38.300.000,00		Pangkajene Sidenreng	0 Persen	Rp -	
2.14.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	4 Dokumen	Rp38.300.000,00		Pangkajene Sidenreng	0	Rp -	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp2.216.157.100,00		Pangkajene Sidenreng		Rp 2.216.157.100,00	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	30 Orang/Bulan	Rp 2.216.157.100,00		Pangkajene Sidenreng	30 Orang/Bulan	Rp 2.216.157.100,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Prangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp513.076.700,00		Pangkajene Sidenreng		Rp 261.781.800,00	
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Pangkajene Sidenreng	2 Paket	Rp367.154.700,00		Pangkajene Sidenreng	13 Paket	Rp 211.812.800,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	1 Laporan	Rp145.922.000,00		Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	Rp 49.969.000,00	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp41.330.000,00		Pangkajene Sidenreng		Rp -	
2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	Pangkajene Sidenreng	1 Unit	Rp41.330.000,00		Pangkajene Sidenreng	0	Rp -	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp148.000.000,00		Pangkajene Sidenreng		Rp 148.000.000,00	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	Pangkajene Sidenreng	1 Laporan	Rp100.000.000,00		Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	Rp 100.000.000,00	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Umum pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	Rp48.000.000,00		Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	Rp 48.000.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemelihaaraan Barang Milik Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	Rp155.015.000,00		Pangkajene Sidenreng		Rp 130.537.400,00	
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pangkajene Sidenreng	-	Rp40.000.000,00		Pangkajene Sidenreng	4 Unit	Rp 54.430.400,00	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	Pangkajene Sidenreng	5 Unit	Rp15.015.000,00		Pangkajene Sidenreng	4 Unit	Rp 840.000,00	
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas	Pangkajene Sidenreng	-	Rp0,00		Pangkajene Sidenreng	1 Unit	Rp 75.267.000,00	
2.14.01.2.09.0011	Pemerliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas	Pangkajene Sidenreng	1 Unit	Rp100.000.000,00		Pangkajene Sidenreng	0	Rp -	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun	Kab. Sidrap	21,3	Rp337.177.000,00		Kab. Sidrap	21,3	Rp 337.256.800,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan OPD Yang Terlibat Dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) (%)	Kab. Sidrap		Rp40.640.500,00		Kab. Sidrap		Rp 42.706.100,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)"	Kab. Sidrap	1 Satuan Pendidikan	Rp12.115.500,00		Kab. Sidrap	1 Satuan Pendidikan	Rp 14.181.100,00	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	"Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)"	Kab. Sidrap	10 Kegiatan	Rp28.525.000,00		Kab. Sidrap	1 Kegiatan	Rp 28.525.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten	Kab. Sidrap		Rp296.536.500,00		Kab. Sidrap		Rp 294.550.700,00	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA)	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp62.022.000,00		Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp 62.022.000,00	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	Kab. Sidrap	-	Rp0,00		Kab. Sidrap	1 Dokumen	Rp 6.385.700,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp65.200.000,00		Kab. Sidrap	12 Laporan	Rp 65.200.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia	Kab. Sidrap	1 Dokumen	Rp132.000.000,00		Kab. Sidrap	12 Dokumen	Rp132.000.000,00	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)"	Kab. Sidrap	1 Unit	Rp1.170.000,00		Kab. Sidrap	1 Unit	Rp 3.870.000,00	
2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ditingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)"	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp16.782.000,00		Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp 3.870.000,00	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatandan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)"	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp19.362.500,00		Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp 14.100.000,00	
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)"	Kab. Sidrap	-	Rp0,00		Kab. Sidrap	1 Dokumen	Rp 7.103.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)	Kab. Sidrap	55,9	Rp2.197.233.000,00		Kab. Sidrap	55,9	Rp2.273.733.000,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Loka	Kab. Sidrap		Rp889.850.000,00		Kab. Sidrap		Rp889.850.000,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp537.900.000,00		Kab. Sidrap	11 Laporan	Rp537.900.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan)	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp132.000.000,00		Kab. Sidrap	6 Laporan	Rp132.000.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	Kab. Sidrap	1 Dokumen	Rp120.000.000,00		Kab. Sidrap	1 Dokumen	Rp120.000.000,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Kab. Sidrap	1 Organisasi	Rp99.950.000,00		Kab. Sidrap	11 Organisasi	Rp99.950.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK	Kab. Sidrap		Rp265.000.000,00		Kab. Sidrap		Rp265.000.000,00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	Kab. Sidrap	106 Desa/Orang	Rp265.000.000,00		Kab. Sidrap	106 Desa/Orang	Rp265.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Yang Melaksanakan Pembinaan IMP Dan Program KKBPK (%)	Kab. Sidrap		Rp550.758.000,00		Kab. Sidrap		Rp627.258.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp17.100.000,00		Kab. Sidrap	12 Laporan	Rp17.100.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Kab. Sidrap	1329 Orang	Rp511.608.000,00		Kab. Sidrap	1329 Orang	Rp511.608.000,00	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Sidrap	0 Unit	Rp.0		Kab. Sidrap	11 Unit	Rp76.500.000,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp22.050.000,00		Kab. Sidrap	6 Laporan	Rp22.050.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Cakupan Kader Yang Ikut Dalam Penguatan Peran Serta Organisasi Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan PelayananDan Pembinaan Kesertaan Berkb (%)"	Kab. Sidrap		Rp491.625.000,00		Kab. Sidrap		Rp 491.625.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	Kab. Sidrap	1 Unit	Rp346.500.000,00		Kab. Sidrap	63 Unit	Rp346.500.000,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	Kab. Sidrap	106 Kampung	Rp145.125.000,00		Kab. Sidrap	25 Kampung	Rp145.125.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)	Kab. Sidrap	36,5	Rp1.910.780.200,00		Kab. Sidrap	36,5	Rp 2.187.268.900,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (%)"	Kab. Sidrap		Rp249.907.900,00		Kab. Sidrap		Rp 531.568.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp11.303.900,00		Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp 21.510.500,00	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) (Laporan / Dokumen)	Kab. Sidrap	1 Laporan/Dokumen	Rp86.220.000,00		Kab. Sidrap	9 Laporan/Dokumen	Rp86.220.000,00	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosidan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp31.048.000,00		Kab. Sidrap	106 Laporan	Rp318.000.000,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Kab. Sidrap	1 Unit	Rp110.336.000,00		Kab. Sidrap	10 Unit	Rp 100.000.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	Kab. Sidrap	11 Laporan	Rp11.000.000,00		Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp 5.837.500,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaanketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Sidrap		Rp1.660.872.300,00		Kab. Sidrap		Rp 1.655.700.900,00	
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)	Kab. Sidrap	1 Organisasi	Rp30.672.300,00		Kab. Sidrap	1 Organisasi	Rp 25.500.900,00	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp741.000.000,00		Kab. Sidrap	10 Laporan	Rp 741.000.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Pemnerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Yang Mendapat Pendampingan	Kab. Sidrap	1 Laporan	Rp889.200.000,00		Kab. Sidrap	10 Laporan	Rp889.200.000,00	

Pangkajene Sidenreng, 16 April 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SYAHRUL MUBARAK SKM, M.Adm, KP

Pangkat: JY/a

Nip: 198108022006041015

BAB IV

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat menjadi arahan bagi seluruh jajaran Unit Kerja yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kinerja Dinas.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan, maka perlu dirumus kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.
2. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2025 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil (*outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 16 April 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAHRUL MUBARAK, SKM.M.Amd.KP

Pangkat : Pembina/IV.a

Nip : 19810802 200604 1 015



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

R e n c a n a K e r j a

PERUBAHAN

2025



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Renja Perubahan 2025 ini menggambarkan perumusan rancangan akhir untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

Harapan Kami semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkajene Sidenreng 02 Juni 2025


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
H. A. BAHARI PARAWANSA, S.IP
NIP. 19720605 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025..... 8

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

BAB IV PENUTUP..... 25

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Triwulan I tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang
TABEL III. 1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan Daerah. Rencana Kerja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis. Dengan demikian Rencana Strategis pada dasarnya merupakan penjabaran dari Dokumen Renstra dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan yang memuat analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD pada tahun berjalan. Adapun perubahan rancangan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan

anggaran pada Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu ;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (Lima Puluh Persen).

Dengan kata lain rencana kerja perubahan perangkat daerah tahun 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan dimulai dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Renja perubahan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan

prioritas pada perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Rencana Kerja Perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14)
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 09)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen rancangan perubahan RKPD tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I 1. Latar belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RANJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan pokok-pokok materi antara lain

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berisikan uraian mengenai:

- 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
- 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan/Bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk mendapatkan target sasaran yang direncanakan dalam tahun berjalan.

Jumlah program dan kegiatan dalam APBD Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 15.236.871.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I realisasi belanja Rp. 2.692.601.162 (17,67%) . Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
(tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal	90	20	5	0,25	0,05	20,25	22,5
	Penetapan Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan dokumen rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	0	0	1	0	0	0	0
	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	1	0	1	0	0	0	0
	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten	100	0	100	0	0	0	0
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	75	100	25	13	0,511	113	150,4
	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1.710	530	570	0	0,001	530	31,02

			Pengelolaan Terminal Type C	Presentase prasarana terminal penunjang tipe C sesusi SPM	80	0	4	0	0	0	0
			Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	8	0	4	0	0	0	0
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	93	97	92	0	0	97	104,02
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	3	1	1	0	0	1	33,33
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya	6	2	2	0	0	2	33,33
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.600	2.000	3.200	0	0	2000	23,26
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	27	9	9	0	0	9	33,33
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	0	100	0	0	0	0
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	37	10	12	0	0	10	27,03
			Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9	2	3	0	0	2	22,22

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	245	45	50	0	0,0008	45	18,38
		Pengadaan pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam manajemen rekayasa lalu lintas	0	0	0	0	0	0	0
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten Kota	Presentase Pengajuan Andalalin yang Disetujui	100	0	100	0	0	0	0
		Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	0	2	0	0	0	0
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase Kelaikan Aspek LLAJ yan di Audit	100	0	100	0	0	0	0
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	1	2	0	0	1	20
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12	0	6	0	0	0	0
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat	53	0	52	0	0	0	0
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	36	12	12	0	0,0025	12	33,42
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	0,0005	47,17	0,0007	0	0	47,17	9434000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	36	12	12	0	0	12	33,33
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0	100	20	0,2025	20	20,25
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	0	100	0	0	0	0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	8	8	0	0	8	61,54
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	6	4	4	0	0	4	66,67
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100	0	100	24	0,2357	24	23,57
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	66	46	143	24	0,16	70	105,41
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	100	0	0	0	0
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	0	24	0	0	0	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	100	0	100	0	0	0	0

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	4	4	0	0	4	20
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	18	17	18	0	0	17	94,44
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	157	180	180	15	0,081	195	123,96
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	100	0	0	0	0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	17	26	10	0	0	26	152,94
		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	20	20	0	0	20	500
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	100	0	0	0	0
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	485	414	414	0	0	414	85,36
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	20	1,643	32	88,11

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	13	1,118	25	70,58
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	100	0	0	0	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	15	15	0	0	15	500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	18	18	0	0,00	18	40,0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yng direhabilitasi dan dipelihara	2	0	1	0	100	0	0

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Tingkat Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang menjadi tujuannya yaitu Meningkatkan kinerja pelayanan Perhubungan. Untuk pencapaian ini telah dilaksanakan kegiatan Strategis untuk menindaklanjuti hal yang kritis dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan, kegiatan-kegiatan strategis diantaranya :

1. Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan, diantaranya persimpangan, pasar-pasar dan sekolah-sekolah.
2. Pemeliharaan perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum tersedianya Dokumen Teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi.
2. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan
3. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat/pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas.
4. Keterbatasan ruang parkir sehingga kendaraan menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan.
5. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ maupun perlengkapan jalan.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di Bidang Perhubungan yang masih terbatas.

Dalam menyikapi isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menempuh beberapa hal diantaranya meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat, membangun sarana dan prasarana angkutan darat, melakukan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perangkat daerah Dinas Perhubungan tentu tidak lepas dari tantangan dan peluang yang dihadapi. Keterbatasan data dan informasi karena sistem data lalu lintas, angkutan umum, dan infrastruktur transportasi yang belum optimal. Belum tersedia sistem digital atau database yang memuat informasi akurat terkait jumlah, lokasi, kondisi, dan jenis PJU. Hal ini menyulitkan perencanaan teknis dan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh. Masih terdapat pegawai dengan kemampuan teknis dan perencanaan yang belum optimal, kurangnya forum koordinasi efektif antara Dinas Perhubungan dan perangkat daerah lain menyebabkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian program. Serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan sektor transportasi, sehingga perencanaan kurang berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Adanya dukungan transformasi digital pemerintah dimana Pemerintah Pusat dan provinsi mendorong penggunaan aplikasi perencanaan (SIPD, e-Planning), yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas Renja. Penyusunan Renja dapat diarahkan untuk mendukung target RPJMD Kabupaten Sidrap, sehingga program Dinas Perhubungan dapat lebih relevan dan terarah. Peluang lainnya adalah adanya potensi bantuan teknis dan pendanaan dari kementerian atau provinsi untuk pengembangan transportasi (seperti DAK Bidang Transportasi).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, Pencapaian Renstra, dan visi misi Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPJMD.

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja perubahan ini adalah demi pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran awal Rp. 15.236.871.000,- dan pagu pendanaan perubahan Rp. 15.482.446.000. Sehingga pembagian pagu sesuai program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dialokasikan untuk urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 3.272.671.500,- , dan urusan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 12.209.794.500,-.

Pada tabel berikut menyajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 di Dinas Perhubungan yaitu :

TABEL III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
15				PERHUBUNGAN				15.236.871.000				15.482.466.000	
	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal	Kab. Sidenreng Rappang	25	11.900.320.500		Kab. Sidenreng Rappang	25	12.209.794.500	
		01		Penetapan Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan dokumen rencana induk jaringan LLAJ	Kab. Sidenreng Rappang	100	350.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	350.000.000	Dinas Perhubungan
			01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang tersusun	Kab. Sidenreng Rappang	1	350.000.000		Kab. Sidenreng Rappang	1	350.000.000	
		02		Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan	Kab. Sidenreng Rappang	100	11.224.148.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	11.486.377.200	Masyarakat
			02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	530	10.701.643.000		Kab. Sidenreng Rappang	530	10.909.153.000	
			03	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Kab. Sidenreng Rappang	25	522.505.000		Kab. Sidenreng Rappang	25	577.224.200	
		03		Pengelolaan Terminal Type C	Persentase pengelolaan Terminal Type C sesuai standar	Kab. Sidenreng Rappang	100	6.079.500	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	0	-	Masyarakat
			11	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	4	6.079.500		Kab. Sidenreng Rappang	0	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Kab. Sidenreng Rappang	100	96.938.600	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	186.734.800	Masyarakat
			01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1	12.872.500		Kab. Sidenreng Rappang	1	67.731.200	
			02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	2	15.112.500		Kab. Sidenreng Rappang	2	20.150.000	
			04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	3200	24.800.000		Kab. Sidenreng Rappang	2000	28.700.000	
			07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	Kab. Sidenreng Rappang	9	44.153.600		Kab. Sidenreng Rappang	10	70.153.600	
		06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	100	138.919.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	126.094.500	Masyarakat
			04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12	55.388.000		Kab. Sidenreng Rappang	12	48.866.500	
			15	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	3	1.575.000		Kab. Sidenreng Rappang	3	-	
			17	Penataan Manjemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	50	81.956.000		Kab. Sidenreng Rappang	50	77.228.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Presentase Pengajuan Andalalin yang Disetujui	Kab. Sidenreng Rappang	100	1.700.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	850.000	Masyarakat
			05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	2	1.700.000		Kab. Sidenreng Rappang	2	850.000	
		08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase Kelaikan Aspek LLAJ yang di Audit	Kab. Sidenreng Rappang	100	33.395.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	13.528.000	Masyarakat
			08	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	2	31.695.000		Kab. Sidenreng Rappang	2	12.678.000	
			09	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelakasanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelakasanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	6	1.700.000		Kab. Sidenreng Rappang	6	850.000	
		09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Layanan Angkutan Darat	Kab. Sidenreng Rappang	100	37.522.400	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	35.766.500	Masyarakat
			02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12	37.522.400		Kab. Sidenreng Rappang	12	35.766.500	
		14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum	Kab. Sidenreng Rappang	100	11.618.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	100	10.443.500	Masyarakat
			02	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan/pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasai dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12	11.618.000		Kab. Sidenreng Rappang	12	10.443.500	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.336.550.500	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.272.671.500	Dinas Perhubungan
	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	17.888.200	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	16.989.800	Dinas Perhubungan
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	4	13.473.200		Kab. Sidenreng Rappang	3	12.179.800	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2	4.415.000		Kab. Sidenreng Rappang	2	4.810.000	
	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Kab. Sidenreng Rappang	100	2.467.841.500	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	2.359.688.800	Dinas Perhubungan
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	25	2.467.841.500		Kab. Sidenreng Rappang	28	2.359.688.800	
	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	4.350.000	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	4.350.000	Dinas Perhubungan
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sidenreng Rappang	30	4.350.000		Kab. Sidenreng Rappang	30	4.350.000	
	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	100	159.968.000	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	137.348.500	Dinas Perhubungan
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	7	2.612.000		Kab. Sidenreng Rappang	7	2.612.000	
		0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	-		Kab. Sidenreng Rappang	0	-	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	6	4.485.500		Kab. Sidenreng Rappang	6	4.604.000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	52	152.870.500		Kab. Sidenreng Rappang	52	130.132.500	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025																																					
						SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN																																		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat																														
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11			
			07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	42.137.000	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	73.853.000	Dinas Perhubungan																													
			06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Sidenreng Rappang	1	32.710.000		Kab. Sidenreng Rappang	6	64.426.000																														
			05		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	5	9.427.000		Kab. Sidenreng Rappang	5	9.427.000																														
			08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	513.721.800	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	519.797.400	Dinas Perhubungan																													
			01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	160	1.500.000		Kab. Sidenreng Rappang	160	1.500.000																														
			02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	45.632.000		Kab. Sidenreng Rappang	12	50.255.000																														
			04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	466.589.800		Kab. Sidenreng Rappang	12	468.042.400																														
			09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	130.644.000	Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	100	160.644.000	Dinas Perhubungan																													
			01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibyarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	1	27.324.000		Kab. Sidenreng Rappang	1	27.324.000																														
			02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaka dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	15	73.320.000		Kab. Sidenreng Rappang	15	83.320.000																														
			09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yng direhabilitasi dan dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1	30.000.000		Kab. Sidenreng Rappang	1	50.000.000																														

BAB IV**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) dapat dilakukan perubahan ditahun berjalan berdasarkan ketentuan perubahan dokumen Renja yang telah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan Permendagri tersebut, maka perubahan Renja Tahun 2025 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, pedoman bagi perubahan perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta pedoman bagi stakeholder lainnya dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2025.

Berkaitan dengan hal diatas, serta menjamin terlaksananya program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu, Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan pedoman bagi perubahan perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta perencanaan yang baik dan dapat di jadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini di taati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konstensi yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutnya.

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



JL.HARAPAN BARU BLOK B NO. 15 KOMPLEKS SKPD SIDRAP

KATA PENGANTAR

Komunikasi informatika sebagai sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan komunikasi dan informatika tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Dalam Penyajian ini kami telah berupaya untuk dapat menyusunnya dengan baik dan semaksimal mungkin, namun segala keterbatasan yang dimiliki sehingga mungkin hasil yang dapat di capai belum seperti yang diharapkan.

Atas segala kekurangan tak lupa dimohon maaf dan semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

Kepala Dinas,


H. BACHTIAR, S.Hi.M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip. 19710122 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN

 I.1. Latar Belakang..... 1

 I.2. Landasan Hukum..... 2

 I.3. Maksud dan Tujuan 4

 I.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
 Komunikasi dan Informatik.....10

 II.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
 Informatik.....12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP 22

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu pesat dalam satu dasawarsa terakhir telah membawa implikasi kepada pesatnya pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata yang telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap wilayah sekitarnya. Perkembangan sektor-sektor tersebut merupakan faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang didukung oleh sektor komunikasi dan informatika yang handal.

Penyelenggaraan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu untuk melakukan pengaturan/ penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya dapat berjalan aman, lancar dan tertib, hal ini sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, penentu arah, sasaran dan tujuan agar pembangunan sektor komunikasi dan informatika dapat dilakukan dengan baik, kebijakan ini dapat diwujudkan dalam sebuah rencana kerja secara proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Renja yang disusun merupakan hasil analisis dan Evaluasi Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2023.

I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah beserta masyarakat. Pendelegasian suatu kewenangan penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah secara internal akan diikuti pengaturan dalam aspek pembiayaan yang diatur dalam penimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memegang peranan penting dan memiliki tugas serta fungsi yang penting pula dalam pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan taktis – strategis menyebarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan sektor komunikasi dan informatika secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Landasan hukum yang lain yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Permendagri No.86/2017 tentang pelaksanaan PP No.8 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13)

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Esensi dari sistem Perubahan Renja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2023 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Sebagai acuan Diskominfo dalam rangka untuk terlaksananya RKPD berkenaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Diskominfo Kab. Sidrap selama tahun 2025
3. Pedoman penyusunan RKA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika

I.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (***Performance Gap***) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Perubahan Renja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I 1. Latar belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dan proses penyusunan perubahan Renja.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD

I.4 Sistematika

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

3.1. Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Pokok –pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program / kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat urusan / bidang , urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan triwulan II tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai pada triwulan I tahun 2025 Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dari 2 laporan tidak memenuhi target kinerja

- Faktor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran Jadwal tidak dapat ditentukan
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD : tidak tercapaiannya target kinerja program
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan

Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan pemerintah desa dari target 10 dokumen tidak memenuhi target kinerja

- Faktor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran Jadwal tidak dapat ditentukan
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD : tidak tercapaiannya target kinerja program

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan

kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

- Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah daerah Kab / Kota dari target 40 Perangkat Daerah dan terealisasi 41 Perangkat Daerah atau 100%

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Ada Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah daerah Kab / Kota dari target 40 Perangkat Daerah dan terealisasi 41 Perangkat Daerah realisasi kinerja

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel II. 1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) S.D TAHUN 2024- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI. TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16		1		Program Komunikasi dan Informasi Publik	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	300					-	-

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	02	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelolah	300						-	-
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1440	610						
					Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1440	610	480	411	86%	1.021,00	70,90	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	75	21		2		23,00	30,67	
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	75	21	25		0%	21,00	28,00	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	9	3						

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

					Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	9	3	3	0,0	0%	3,00	33,33
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	300,00		100,00		0%	-	-
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	300		100	15,0	15%	15,00	5,00

PERUBAHAN RENJA DISKOMINFO 2025						PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30	10					
2	16	03	2.01	04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	30	10	10	-	0%	10,00	33,33
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	150	50	50	25	50%	75,00	50,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	300		100	80,0	80%	80,00	26,67

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	1						
					Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2	1	1		0%	1,00	50,00	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	3	1						
					Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2	1	1	0,0	0%	1,00	50,00	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasisi elektronik yang dikembangkan	5	5						

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

					Pembangunan dan / atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	15	5	5	0,0	0%	5,00	33,33
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	150	50					
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	80	50	40	41	103%	91,00	113,75
2	20	03	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	300,00		100,00	70,0	70%	70,00	23,33

PERUBAHAN
RENJA
DISKOMINFO
2025

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	20	02	2.01		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	persentase data statistik yang tersedia	300	100	100	70,0	70%	170,00	56,67
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia	15,00	5					
					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	15,00	5	5,00	0,0	0%	5,00	33,33
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	300,00		100,00		0%	-	-

PERUBAHAN RENJA DISKOMINFO 2025

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	300,0	100	100,0	40,0	40%	140,00	46,67
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	3	1	1	1,0	100%	2,00	66,67
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	6	2	2		0%	2,00	33,33
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	12	4	4		0%	4,00	33,33
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	87	29	29	18,0	62%	47,00	54,02

PERUBAHAN
RENJA
DISKOMINFO
2025

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	262,00	100	62,00	21,0	34%	121,00	46,18
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	87	29	29	18,0	62%	47,00	54,02
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300		100		0%	-	-
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	300,0	100	100,0		0%	100,00	33,33
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	4	4	1,0	25%	5,00	41,67
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	2	2	2,0	100%	4,00	66,67
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300,0	98,45	100,0		0%	98,45	32,82

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	966	317	322	105,0	33%	422,00	43,69
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	5	5	2,0	40%	7,00	46,67
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	300,0	98	100,0		0%	98,00	32,67
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	100	4		0%	100,00	833,33
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	4	4	2,00	50%	6,00	50,00
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	0	12	-	0%	-	-
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12	6,0	50%	18,00	50,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	300,0	98	100,0		0%	98,00	32,67

2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	100	4		0%	100,00	833,33
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300,00	100	100,00		0%	100,00	33,33
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4	4	1,0	25%	5,00	41,67
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	25%	15,00	41,67
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	2,0	17%	14,00	38,89
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,00	97	100,00		0%	97,00	32,33
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	13	15	9	60%	22,00	48,89
2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	9	10		0%	9,00	30,00

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pangkajene Sidenreng, 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. BACHTIAR, S.H., M.Si

Pangkat : pembina Tingkat I
NIP. 19710122 199203 1 003

2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng Rappang

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara umum kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kinerja pelayanan OPD yaitu :

- Kondisi topologi kab.sidrap
- Kurangnya SDM bidang TIK
- Anggaran pembangunan infrastruktur TIK sangat terbatas
- Belum terpenuhinya jumlah media cetak dan media online yang bekerjasama dengan Pemda
- Kurangnya SDM bidang pengelolaan data statistik sektoral
- Kurangnya infrastruktur pendukung dalam pengelolaan dan analisis data statistik sektoral

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah :

- Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi masih minim
- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
- Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum optimal
- Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi

3. Dampak isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-government maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat informasi indonesia.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Belum optimalnya kebijakan daerah dalam pedoman penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistic dan persandian.
2. Masih tumpang tindihnya sebagian tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik.
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistic dan persandian;.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
5. Pesatnya perkembangan TIK.
6. Kesenjangan informasi di masyarakat , sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dari tantangan tersebut adalah :

1. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
5. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

1. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dbaik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan tablel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAM SKPD :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

N O	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
								SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2					Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar									
	2	16	02			Program Komunikasi dan Informasi Publik	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pangkajene Sidenreng	100	827.026.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100	827.026.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	02	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	Pangkajene Sidenreng	100	827.026.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100	827.026.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	16	0 2	2.0 1	1 4	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Pangkajene Sidenreng	3 laporan	618.243.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	3 laporan	618.243.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 2	2.0 1	1 7	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pangkajene Sidenreng	25 dokumen	37.018.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	25 dokumen	37.018.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 2	2.0 1	2 3	Penyusun Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Pangkajene Sidenreng	480 konten	171.765.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	480 konten	171.765.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,00	1.403.778.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,00	1.403.778.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	16	0 3	2.0 1		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	Pangkajene Sidenreng	100	16.382.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100	16.382.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 3	2.0 1	0 2	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Domain Pemerintah Desa	Pangkajene Sidenreng	10 dokumen	16.382.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	10 dokumen	16.382.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 3	2.0 2		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	Pangkajene Sidenreng	100	1.387.396.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100	1.387.396.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 3	2.0 2	1 5	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pangkajene Sidenreng	1 laporan	7.518.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	1 laporan	7.518.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 3	2.0 2	1 6	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	96.292.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	96.292.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	16	0 3	2.0 2	2 0	Pembangunan dan atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan / atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	5 aplikasi	185.172.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	5 aplikasi	185.172.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 3	2.0 2	2 4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Pangkajene Sidenreng	40 perangkat daerah	1.098.414.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	40 perangkat daerah	1.098.414.500	perangkat daerah
	2	16	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100	2.839.270.000	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat	Pangkajene Sidenreng	100	2.839.270.000	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat
	2	16	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	Pangkajene Sidenreng	100,0	9.061.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,0	9.061.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	4 Dokumen	4.148.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4 Dokumen	4.148.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	16	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	2 Dokumen	4.913.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	2 Dokumen	4.913.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100,0	2.404.105.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,0	2.404.105.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	288 org/bln	2.399.112.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	288 org/bln	2.399.112.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
II	2	16	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	5 laporan	4.993.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	5 laporan	4.993.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Pangkajene Sidenreng	100,0	81.300.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,0	71.300.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	4 Paket	6.671.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4 Paket	6.671.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	74.629.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	64.629.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	16	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng		-	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,00	29.000.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pangkajene Sidenreng			ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	3 unit	29.000.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	100,00	195.290.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,00	178.934.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	4 laporan	2.490.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4 laporan	2.490.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 laporan	76.000.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	12 laporan	75.000.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 laporan	116.800.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	12 laporan	101.444.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100,00	149.514.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,00	146.870.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	16	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pangkajene Sidenreng	15 unit	114.790.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	15 unit	107.146.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 3	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangkajene Sidenreng	10 unit	34.724.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	10 unit	9.724.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	16	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi					Pangkajene Sidenreng	1 unit	30.000.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	20	0 3	2.0 1		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Pangkajene Sidenreng	100,00	15.854.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,00	15.854.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	20	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	persentase data statistik yang tersedia	Pangkajene Sidenreng	100	15.854.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100	15.854.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	20	0 2	2.0 1	0 1	Peningkatan peran statistik nasional	Persentase perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan , monitoring dan evaluasi pembangunan dan atau Penyusunan kebijakan	Pangkajene Sidenreng	100 persen	15.854.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100 persen	15.854.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	21	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	64,00	135.913.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	64,00	135.913.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	21	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	Pangkajene Sidenreng	100,0	25.112.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100,0	25.112.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	21	0 2	2.0 1	0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	2.073.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	2.073.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	21	0 2	2.0 1	0 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	Pangkajene Sidenreng	2 laporan	1.018.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	2 laporan	1.018.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	21	0 2	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	Pangkajene Sidenreng	4 laporan	1.831.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4 laporan	1.831.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	21	0 2	2.0 1	0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Pangkajene Sidenreng	29 perangkat Daerah	20.189.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	29 perangkat Daerah	20.189.500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	21	0 2	2.0 2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	Pangkajene Sidenreng	62,00	110.801.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	62,00	110.801.000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
I	2	21	0 2	2.0 2	0 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi		29 perangkat Daerah	110.801.000	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat	Pangkajene Sidenreng	29 perangkat Daerah	110.801.000	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat
Total										5.221.842.000				5.221.842.000	

PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Mengetahui
Kepala Dinas Kominfo

H. BACHTIAR, S.HI, M.Si
Pangkat Pembina Tingkat I
NIP. 19710122 199203 1 003

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKPA Tahun 2025, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

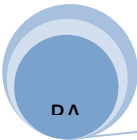
Rencana Kerja SKPD harus tetap dijaga konsistensinya sesuai Tupoksi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

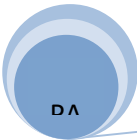
Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan SKPDnya yang akan dicapai dalam 3 Tahun ke depan sesuai waktu RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 - 2026. Dengan cara menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih.

Pangkajene Sidenreng, 2025

Kepala Dinas,

H. BACHTIAR, S.H., M.Si
Pangkat: Pembina Tk I
Nip. 19710122 199203 1 002







PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN **2025**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan bulan Maret 2025 atau di TW I. Rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.



Pangkajene Sidenreng, Agustus 2025

Kepala Dinas,

ANDI NIURWAN, ST, MM

NIP. 19750703 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	8
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	21
3.1 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Renja 2025 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP 2024-2026. Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mempedomani tema dan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu "Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia", dengan Prioritas Pembangunan: (1) Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, (3) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas, (4) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan, (5) Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius, (6) Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, (7) Pembangunan infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dimaksud;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2025 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 didasarkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel II-1 sebagai berikut :

TABEL II-1
Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti (%)	100	100 %	100	0	0	100	100
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	0	0	1	100
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3	1 Dokumen	1	0	0	1	33
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah (Dokumen)	12	12 Dokumen	12	0	0	12	\
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	0	1	0	0	0	0
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	36	12 Dokumen	1	0	0	12	33

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	100	85 %	100	0	0	85	85
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota (Kegiatan)	2	1 Kegiatan	2	0	0	1	50
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	0	1	0	0	0	0
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3	1 Dokuemn	0	0	0	1	33
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%)	95	68 %	95	0	0	68	72
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	255	170 Pelaku Usaha	255	0	0	170	67
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	18	6 Kegiatan Usaha	52	0	0	6	33

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	760	170	Pelaku Usaha	0	0	0	170	22
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	99	92	Kegiatan Usaha	30	0	0	92	93
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	90	79	%	85	0	0	79	88
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP (Izin)	5,100	4,755	Izin	5,200	347	0.07	5,102	100
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	0	Dokumen	1	0	0	0	0

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15,600	4,755	Pelaku Usaha	5,200	347	0	5,102	33
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	48	32	Pelaku Usaha	15	37	2	69	144
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	780	250	Kegiatan Usaha	260	0	0	250	32
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%)	100	100	%	100	0	0	100	100
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizina (Dokumen)	4	4	Dokumen	4	0	0	4	100
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	4	Dokumen	4	1	0	5	125

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100 %	100	0	0	100	100
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)	100	100 %	100	0	0	100	100
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1 Dokumen	3	1	0	2	67
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1 Dokumen	3	1	0	2	200
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1 Laporan	1	1	1	2	67
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	98 %	100	0	0	98	98
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	18 Orang/Bulan	19	18	1	36	63
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	1 Laporan	1	0	0	1	33

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	12	97 %	12	0	0	97	804
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	111	37 Paket	4	0	0	37	33
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78	26 Paket	0	0	0	26	33
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12 Paket	0	0	0	12	100
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	3 Laporan	2	0	0	3	60
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	10 Laporan	8	2	0	12	27
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	0 %	100	0	0	0	0
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	0 Unit	8	0	0	0	0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	96 %	12	0	0	96	797
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390	91 Laporan	130	154	1	245	63
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12 Laporan	12	3	0	15	42

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	4	Laporan	4	0	0	4	27
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	Laporan	12	3	0	15	42
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	%	100	0	0	100	100
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39	13	Unit	13	0	0	13	33
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	Unit	1	0	0	0	0

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan dengan tugas dan fungsi adalah :

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Renja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Dalam penyusunan Renja ini perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strengths and Weaknesses*) dan kondisi eksternal (*Opportunities and Threats*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/ pemohon izin.

1.2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;
- b. Koordinasi dengan investor belum optimal;
- c. Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal dan perizinan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

1.1 Kesempatan (Oppurtunities)

- a. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali
- b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan/usaha masyarakat
- c. Dukungan dari visi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern

1.2 Ancaman (Threats)

- a. Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- b. Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- c. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan
- d. Persaingan investasi dengan Kabupaten lain semakin ketat

Dengan mempergunakan analisis SWOT, maka strategi yang dapat dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan dengan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1) Peningkatan promosi

Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.

2) Penyempurnaan regulasi

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3) Peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis IT

Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

4) Peningkatan SDM pelayanan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;

5) Peningkatan sarana prasarana

Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.

6) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya stabilitas keamanan yang kondusif untuk meningkatkan minat investor dan pengusaha
- c. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait
- d. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan investasi.

4. Isu – isu Strategis

Terdapat isu-isu penting yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan;
- b. Masih minimnya sosialisasi dan informasi pelayanan perizinan;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;
- e. Anggapan bahwa pengurusan izin hanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan;
- f. Masyarakat yang tersebar jauh dari pusat pelayanan perizinan.

Dalam Pelayanan Perizinan, ada dua paradigma utama yang perlu dilakukan, yaitu :

- a. Reformasi regulasi perizinan, saat ini perizinan usaha sangat banyak dan tumpang tindih.
- b. Reformasi birokrasi perizinan, saat ini persyaratan pengurusan perizinan sangat banyak, tumpang tindih dan menyangkut banyak instansi teknis sehingga prosedur pelayanan tidak efisien.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk :

- a. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik lintas instansi maupun dalam instansi.
- b. Pemangkasan biaya, hal ini dapat dilakukan apabila prosedur juga dipangkas.
- c. Pengurangan jumlah persyaratan, jumlah persyaratan dapat dikurangi dan satu jenis persyaratan sudah dapat digunakan untuk berbagai izin yang diperlukan.
- d. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan
- e. Pengurangan waktu pemrosesan, dengan sistem dan prosedur yang disederhanakan sehingga pemangkasan waktu pemrosesan mendapat pertimbangan utama.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Renja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan usulan program/ kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - 1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - 1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 1.3 Pengawasan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2 Pengadaan Mebel
 - 1.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, Lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	153,787,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	153,089,500	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan (Dokumen)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	21	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	21	0	
2.18.02.2.01.00 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah (Dokumen)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	153,787,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	153,089,500	
2.18.02.2.02.00 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	150,787,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	150,629,000	
2.18.02.2.02.00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	2,460,500	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	25,354,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	12,882,000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota (Kegiatan)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	2	25,354,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	12,882,000	
2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	25,354,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	12,882,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.03.2.01.00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	95	21,403,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	95	13,187,500	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	255	21,403,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	255	13,187,500	
2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	52	10,410,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	52	4,241,000	
2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	255	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	10,993,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	30	8,946,500	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	227,389,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	198,861,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	227,389,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	198,861,000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP (Izin)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5,200	227,389,000.00		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5200	198,861,000.00	
2.18.04.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	10,195,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	7,033,000	
2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5,200	195,251,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5200	177,807,500	
2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	15	6,532,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	15	5,239,000	
2.18.04.2.01.00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	260	15,409,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	260	8,781,500	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	21,780,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	11,295,000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizina (Dokumen)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	21,780,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	11,295,000	
2.18.06.2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	21,780,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	11,295,000	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,601,232,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,569,303,000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	11,380,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	9,343,000	
2.18.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	2,297,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	1,942,000	
2.18.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	5,670,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	4,647,000	
2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,413,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	2	2,754,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,048,012,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,047,526,500	
2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	19	2,045,002,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	19	2,045,002,500	
2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,010,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	2,524,000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	132,712,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	71,969,500	
2.18.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	37	2,378,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	2,378,000	
2.18.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	26	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	26	0	
2.18.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	8,828,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	2	8,828,000	
2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	10	121,506,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	8	60,763,500	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	114,890,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	118,106,000	
2.18.01.2.07.006	Pengadaan Mebeliur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,216,000	
2.18.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	114,890,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	9	114,890,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	215,554,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	218,675,000	
2.18.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	130	1,500,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	130	1,500,000	
2.18.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	48,689,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	54,689,000	
2.18.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	10,530,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	10,530,000	
2.18.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	154,835,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	151,956,000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	78,683,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	103,683,000	
2.18.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	13	55,883,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	13	55,883,000	
2.18.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	22,800,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	47,800,000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan di tahun berikutnya, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan mengingat Renja ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun 2025.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sehingga visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah berhasil menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi pedoman arah pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam satu tahun ke depan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya, hal ini dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan terukur.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, mungkin masih ditemui data, informasi, dan cara penyajian yang belum optimal. Oleh karena itu, dokumen Perubahan RENJA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata masih memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk memperkaya kualitas dokumen ini.

Dengan adanya saran dan masukan tersebut, diharapkan dapat tercipta kebijakan, strategi, dan program yang lebih strategis dan efektif. Hal ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas kepemudaan, prestasi olahraga, dan pengembangan pariwisata di wilayah kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh warga.

Pangkajene Sidenreng, April 2025
Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata

PATRIADI, SE., M.Adm. Pemb
NIP. 197612122008011016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan.....	4
BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN.....	7
BAB III - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB IV - PENUTUP	71



**DINAS KEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah instrumen pembangunan yang sangat krusial. Di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta berbagai strategi yang dipilih untuk mencapainya. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan yang matang diharapkan akan diikuti oleh pelaksanaan pembangunan yang optimal, sehingga mampu memberikan manfaat dan dampak yang jauh lebih besar.

Sehubungan dengan hal itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memastikan proses perencanaan pembangunan di lingkup bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan dengan baik. Perencanaan ini harus tersusun secara sistematis, sinergis, dan komprehensif agar sepenuhnya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, secara fungsional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam Rencana Strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan rencana dengan

kebutuhan yang relevan dengan kondisi terkini. Dokumen ini menggambarkan tujuan, sasaran, dan metode pencapaiannya melalui kebijakan, program, serta kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Perencanaan kerja tahunan ini menjadi penentu arah organisasi selama satu tahun ke depan, termasuk cara pengarahan dan evaluasi keberhasilan maupun kegagalannya. Cakupan perencanaan kerja tahunan ini meliputi tujuan, sasaran, metodologi, analisis situasi, serta target kinerja.

Maka, proses penyusunan Perubahan Renja ini tentu saja memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis periode 2025-2029. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada awal tahun 2025, sehingga Rencana Strategis 2025-2029 menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) tahun 2025 ini, dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif yang melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan, serta mengintegrasikan komponen perencanaan teknokratik yaitu program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Selaras dengan itu, muatan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga mempertimbangkan arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif, yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, Nomor 9)

1.3. Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penetapan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1. Menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2025;
2. Mengidentifikasi prakiraan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) SKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja program kegiatan;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
3. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam memberikan yang terbaik dari Dinas Kepemudaan Olahrag dan Pariwisata;
4. Mewujudkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Pimpinan dan staf dengan baik dalam perumusan bersama Rencana Kerja yang akan dilaksanakan;
5. Mewujudkan dan meningkatkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Memuat Kajian tentang capaian Renja tahun berkenaan sampai pada triwulan II yang mengacu laporan kinerja atau realisasi APBD.

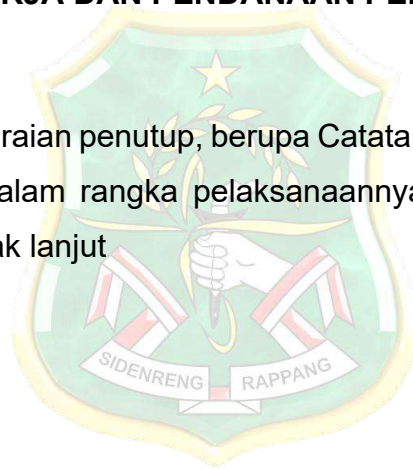
2.2 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Memuat permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut



**DINAS KEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025

Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam DPA SKPD keuangan pada triwulan I tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel berikut :



**DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra sampai dengan triwulan I tahun berjalan (Tahun 2025)

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			Presentase Pemuda yang Menjadi Pengurus Organisasi Kepemudaan atau Sosial Kemasyarakatan (%)	0	31.361 .535.0 00	0	0	0	24.403.9 53.720									
	2.1 9.0 2	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	0,14	9.847. 825.00 0	0,00	0	0,11	16.155.8 25.620			0,00	990,00 0,000					

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
1	3	4	5	6		7		8		I		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 2.2. 01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda (%)	90	3.030.100.000	0,00	0	90	15.202.547.120	0% %	0	0,00% %	990,000.000	0,00% %	990.000.000	0,00% %	32,67%	
	2.1 9.0 2.2. 01. 000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15	757.525.000	0	0	200	99.903.620	0	0	0	0	0	0	0,00% %	0,00%	Belum Tercaipai

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 2.2. 01. 000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kot a dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1.275	2.272.575.000	0	0	2	15.102.643.500	0	0	0	990.000.000	0	990.000.000	0,00%	43,56%	Belum Tercapai
	2.1 9.0 2.2. 02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaa n dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (%)	90	6.817.725.000	0,00	0	90	953.278.500	0% %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	0,00%	

No	Ko de	Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capai an Kinerj a Tahun Berjal an 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 2.2. 02. 000 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	66	6.817. 725.00 0	0	0	2	953.278. 500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 3	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Jumlah Prestasi Olahraga (%)	35,00	20.907 .690.0 00	0,00	0	30,00	8.198.12 8.100			0,00	75,738 ,250					
	2.1 9.0 3.2. 01	Pembinaan dan Pengemban gan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Pendidikan (%)	90	11.817 .390.0 00	0,00	0	90	6.588.12 3.700	0% %	0	0,00 %	16,738 ,250	0,00 %	16.738.2 50	0,00%	0,14%	

No	Ko de	Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capai an Kinerj a Tahun Berjal an 2025					
							I							13				
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 3.2. 01. 000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa n Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kot a yang Tersedia dan Termanfaatka n	53	11.817 .390.0 00	0	0	12	6.588.12 3.700	0	0	0	16.738 .250	0	16.738.2 50	0,00%	0,14%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 3.2. 02 000	Penyelengg araan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyelenggar aan Kejuaraan Tingkat Kabupaten (%)	90	1.515. 050.00 0	0,00	0	90	930.165. 400	0% %	0	0,00 %	50,000 ,000	0,00 %	50.000.0 00	0,00%	3,30%	
	2.1 9.0 3.2. 02. 000 2	Penyelengg araan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kot a	44	757.52 5.000	0	0	3	70.000.0 00	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 3.2. 02. 000 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	750	757.52 5.000	0	0	100	860.165. 400	0	0	0	50.000 .000	0	50.000.0 00	0,00%	6,60%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 3.2. 04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)	90	6.060. 200.00 0	0,00	0	90	600.000. 000	0% %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	0,00%	
	2.1 9.0 3.2. 04. 000 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12	6.060. 200.00 0	0	0	2	600.000. 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capai an Kinerj a Tahun Berjal an 2025					
							I											
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 3.2. 05	Pembinaan dan Pengemban gan Olahraga Rekreasi	Cakupan Penyelenggar aan Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi (%)	90	1.515. 050.00 0	0,00	0	90	79.839.0 00	0% %	0	0,00 %	9,000, 000	0,00 %	9.000.00 0	0,00%	0,59%	
	2.1 9.0 3.2. 05. 000 1	Penyelengg araan, Pengemban gan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan, Pengembang an dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	38	1.515. 050.00 0	0	0	2	79.839.0 00	0	0	0	9.000. 000	0	9.000.00 0	0,00%	0,59%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capai an Kinerj a Tahun Berjal an 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 4	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan yang Dilaksanakan Oleh Kwarcab (%)	100,00	606.02 0.000	0,00	0	100,00	50.000.0 00			0,00	0					
	2.1 9.0 4.2. 01	Pembinaan dan Pengemban gan Organisasi Kepramukaa n	Cakupan Penyelenggar aan Pembinaan dan Pengembanga n Organisasi Pramuka (%)	90	606.02 0.000	0,00	0	90	50.000.0 00	0% %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	0,00%	
	2.1 9.0 4.2. 01. 000 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaa n Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	606.02 0.000	0	0	1	50.000.0 00	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capai an Kinerj a Tahun Berjal an 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2			Persentase Kunjungan Wisata (%)	90	12.526 .038.2 00	80	0	85	221.021. 900									
	3.2 6.0 2	PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT A	Presentase Pengembang an Destinasi Wisata (%)	24,66	4.151. 199.20 2	0,00	0	24,66	121.021. 900			0,00	0					
	3.2 6.0 2.2. 03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyelenggar aan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a (%)	90	4.151. 199.20 2	0,00	0	90	121.021. 900	0% %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	0,00%	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.2 6.0 2.2. 03. 000 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3	2.100.599.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tidak Terlaksana
	3.2 6.0 2.2. 03. 000 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6	2.050.599.601	0	0	3	121.021.900	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.2 6.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	185.000,00	1.113.545.000	0,00	0	182.000,00	100.000.000			0,00	0					
	3.2 6.0 3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (%)	90	1.113.545.000	0,00	0	90	100.000.000	0% %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00% %	0,00% %	
	3.2 6.0 3.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9	784.030.000	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00% %	0,00% %	Belum Tercapai

No	Ko de	Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capai an Kinerj a Tahun Berjal an 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.2 6.0 3.2. 01. 000 7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6	329.51 5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tidak Terlak sana
	3.2 6.0 5	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISAT A DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat (%)	90,00	7.261. 293.99 8	0,00	0	85,00	0			0,00	0					
	3.2 6.0 5.2. 01	Pelaksanaa n Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Cakupan Penyelenggar aan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	90	7.261. 293.99 8	0,00	0	90	0	0% %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	0,00%	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kreatif Tingkat Dasar																
	3.2 6.0 5.2. 01. 000 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.000	7.261.293.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tidak Terlaksana
3			Predikat Nilai Sakip (Poin)	0	7.549.337.161	0	0	0	2.884.918.380									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	7.549.337.161	0,00	0	100,00	2.884.918.380			0,00	1.244.018,934					
	2.1 9.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	90	27.270.900	0,00	0	90	8.402.400	0% %	0	0,00 %	0	11,1 1%	0	12,35%	0,00%	
	2.1 9.0 1.2. 01. 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	27.270.900	0	0	3	8.402.400	1	0	1	0	1	0	11,11%	0,00%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025					
							I											
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	90	6.840.334.393	0,00	0	90	2.388.535.750	0% %	638,396,425	0,00 %	1,173,548,373	9,44 %	1.173.548.373	10,49%	17,16%	
	2.1 9.0 1.2. 02. 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	6.813.063.493	0	0	143	2.375.736.250	40	638.396.425	40	1.173.548.373	40	1.173.548.373	13,33%	17,22%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 02. 000 3	Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	27.270.900	0	0	12	12.799.500	2	0	2	0	2	0	5,56%	0,00%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	90	120.859.850	0,00	0	90	120.299.900	0% %	0	0,00 %	0	4,07 %	0	4,52%	0,00%	

No	Ko de	Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capai an Kinerj a Tahun Berjal an 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 1.2. 06. 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	18.230 .900	0	0	2	18.125.4 00	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 06. 000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	5.565. 250	0	0	2	14.330.0 00	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 06. 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42	30.341 .200	0	0	4	25.254.0 00	1	0	1	0	1	0	2,38%	0,00%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 06. 000 9	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	66.722 .500	0	0	25	62.590.5 00	5	0	5	0	5	0	13,89%	0,00%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025					
							I											
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 1.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	90	9.540.000	0,00	0	90	25.322.000	0% %	0	0,00 %	0	33,3 3%	0	37,04%	0,00%	
	2.1 9.0 1.2. 07. 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	9.540.000	0	0	7	25.322.000	1	0	1	0	1	0	33,33%	0,00%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	344.037.420	0,00	0	90	204.000.000	0% %	30,258 ,137	0,00 %	70,470 ,561	2,78 %	70.470.561	3,09%	20,48%	
	2.1 9.0 1.2. 08. 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	3.636.120	0	0	2	3.000.000	1	0	1	0	1	0	2,78%	0,00%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025					
							I											
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 1.2. 08. 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	135.80 4.500	0	0	12	45.000.0 00	1	7.758. 137	1	13.470 .561	1	13.470.5 61	2,78%	9,92%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 08. 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	6.060. 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tidak Terlak sana
	2.1 9.0 1.2. 08. 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	198.53 6.600	0	0	12	156.000. 000	2	22.500 .000	2	57.000 .000	2	57.000.0 00	5,56%	28,71%	Belum Terca pai

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja a Tahun Berjalan 2025
										I								
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.1 9.0 1.2. 09	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	90	207.29 4.598	0,00	0	90	138.358. 330	0% %	0	0,00 %	0	2,38 %	0	2,65%	0,00%	
	2.1 9.0 1.2. 09. 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	190.13 5.068	0	0	13	94.155.0 00	2	0	2	0	2	0	4,76%	0,00%	Belum Terca pai
	2.1 9.0 1.2. 09. 000 9	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	17.159 .530	0	0	1	44.203.3 30	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Terca pai

2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang sampai pada triwulan II tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh isu – isu yang terdapat pada wilayah kabupaten Sidenreng Rappang sehingga banyak Program dan Kegiatan yang belum dapat terlaksana sampai saat ini.

Isu – isu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan pada pembangunan daerah khususnya bidang kepemudaan dan olahraga serta kepariwisataan antara lain :

- **Infrastruktur yang kurang memadai:** Fasilitas atau Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang masih kurang memadai serta banyak yang membutuhkan perbaikan.
- **Kurangnya Sumber Daya Manusia :** Kurangnya tenaga ahli yang terkait dengan Kepemudaan dan Olahraga, masih rendahnya pembinaan Olahraga, rendahnya kompetensi Pelaku Olahraga serta menurunnya prestasi Olahraga.
- **Rendahnya minat Wisatawan untuk berkunjung lebih dari sehari :** Masih rendahnya wisatawan yang menginap.
- **Rendahnya Inovasi dan Kreasi produk wisata :** Pelaku usaha ekonomi kreatif kurang menghasilkan produk – produk baru yang dapat menjadi daya tarik wisata.
- **Rendahnya Promosi terkait Destinasi Wisata dan Produk:** ekonomi kreatif : Masih kurangnya kegiatan – kegiatan atau event – event promosi yang diselenggarakan baik di dalam atau di luar negeri.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dalam rangka mendukung visi, misi Bupati dalam pembangunan daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam merumuskan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berupa tujuh program dengan enam program yang berkaitan dengan urusan dan satu program penunjang non urusan yaitu :

a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini merupakan instrumen yang dirancang untuk mendukung dalam Pembangunan sumber daya manusia dan daya saing daerah, hal ini berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan inovatif dengan melaksanakan kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, dukungan terhadap wirausaha baik dalam bentuk bantuan keuangan ataupun barang dan jasa, dukungan terhadap organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan dan seleksi pemuda pelopor dan kepemimpinan.

b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Program ini dirancang menciptakan masyarakat yang sehat dan berbudaya olahraga, sekaligus meningkatkan prestasi atlet agar mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional. Program ini melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan, keikutsertaan pada even olahraga, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga baik milik pemerintah ataupun milik masyarakat serta pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan dan meningkatkan minat masyarakat dalam olahraga kemasyarakatan atau tradisional dan olahraga wisata.

c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Program kepramukaan ini secara spesifik bertujuan menghasilkan kader bangsa yang berjiwa patriotik, disiplin, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kesukarelawanan (kerelawanan). Program ini diwujudkan melalui pembinaan dan

pengembangan organisasi kepramukaan di tingkat Kwartir Cabang dan Gugus Depan.

d. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini adalah inti dari pembangunan fisik pariwisata yang bertujuan langsung mewujudkan Misi Bupati terkait pengembangan potensi daerah dan peningkatan daya saing wilayah. Tujuannya adalah memastikan setiap aset wisata (alam, budaya, buatan) memiliki standar kualitas, keamanan, dan fasilitas yang memadai. Implementasinya meliputi peningkatan, pemeliharaan, dan revitalisasi sarana prasarana (seperti akses jalan, toilet, dan pusat informasi), pengembangan atraksi wisata baru yang inovatif, serta pembinaan kelembagaan pengelola destinasi (misalnya, Pokdarwis). Dengan destinasi yang menarik dan berstandar, program dapat menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan pendorong peningkatan PAD.

e. Program pemasaran pariwisata

Program ini berperan sebagai mesin promosi dan peningkatan kunjungan wisata yang secara langsung menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah destinasi ditingkatkan daya tariknya, program ini memastikan target wisatawan domestik dan mancanegara tercapai. Kegiatan utamanya meliputi penguatan promosi melalui media digital dan sosial, fasilitasi dan penyelenggaraan event pariwisata regional.

f. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini merupakan investasi strategis pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan produk lokal untuk menjamin pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan fokus pada penguatan SDM yang kompeten dan berbasis ekonomi kerakyatan. Kegiatan dalam program ini mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha, pemandu, dan pengelola desa wisata; pendampingan kelompok usaha Ekonomi Kreatif untuk peningkatan kualitas produk dan akses pasar; serta fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan adanya SDM yang profesional dan produk Ekraf yang berdaya

saing, program ini secara langsung menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan wirausaha lokal, dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program wajib yang menjadi fondasi operasional dan administrasi bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan Visi dan Misi Bupati. Program ini tidak secara langsung mewujudkan janji pembangunan, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel terlaksana sebagai prasyarat bagi keberhasilan semua program sektoral lainnya.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan tentu membutuhkan pula dukungan dari segi keuangan dalam bentuk pendanaan sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:



**DINAS KEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

Tabel 3.1
Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian REN JA OPD Tahun 2023	Praktik Capaian Target REN JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN						14.000.408.170,00	13.530.777.000,00	27.509.894.000,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00						
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00						
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	19	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			90 %	90 %	40.198.000,00	10.104.400,00	10.104.400,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Perangkat Daerah												Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	40.198.000,00	10.104.400,00	8.402.400,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	2.604.500.170,00	2.395.365.350,00	2.395.365.350,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	19	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	2.561.326.170,00	2.375.735.350,00	2.375.736.250,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	19	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penqujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.174.000,00	19.630.000,00	12.799.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan ' Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	19	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	373.148.000,00	189.238.500,00	189.238.500,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	1	0	2	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.763.000,00	20.781.000,00	18.125.400,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	18.000.000,00	14.330.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan , Semu a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Kel/Desa			aya dan Aman	
	2					NON URUSAN						13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00						
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00						
2	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	19	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	373.148.000,00	189.238.500,00	189.238.500,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya	-

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			dan Aman		
	2	1	0	2	00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
	2	1	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
3	2	1	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	1	0	2	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	373.148.000,00	189.238.500,00	189.238.500,00			-	Peningkatan Aktivitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius.	-

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	4 Laporan	28.385.000,00	25.254.000,00	25.254.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	25 Laporan	0,00	125.203.500,00	62.590.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Semua Kel/Desa			akut yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2					NON URUSAN					13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00							
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00							
4	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	373.148.000,00	189.238.500,00	189.238.500,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius	-

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			s, Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
	2	1	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
5	2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	1	0	2	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			90 %	90 %	50.000.000,00	15.772.000,00	15.772.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius,	-

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	15.772.000,00	15.772.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Semua Kel/Desa			akut yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2					NON URUSAN					13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00							
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00							
6	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			90 %	90 %	50.000.000,00	15.772.000,00	15.772.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius	-

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			s, Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
	2	1	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
7	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00						
	2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			90 %	90 %	222.800.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius,	-	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							yang Disediakan										, Semua Kel/Desa			akat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat akat yang Religius, Berbudaya dan Aman		
	2	1	0	2	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			90 %	90 %	209.672.000,00	91.318.330,00	91.318.330,00			-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						han Daerah														
	2	19	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	0,00	62.565.000,00	94.155.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	
	2					NON URUSAN							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
8	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			90 %	90 %	209.672.000,00	91.318.330,00	91.318.330,00			-	-	-
	2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
9	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			90 %	90 %	209.672.000,00	91.318.330,00	91.318.330,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualit	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Pemerintahan Daerah													as Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit	10.500.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan Aman	
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							1 Unit	1 Unit	0,00	19.203.330,00	44.203.330,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2					NON URUSAN			13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.500.318.170,00	2.905.798.580,00	2.884.918.380,00					
	2	19	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			90 %	90 %	209.672.000,00	91.318.330,00	91.318.330,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-
	2	19	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00							
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					13.300.408.170,00	13.409.777.000,00	27.288.872.100,00							
11	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				0.11 %	0.11 %	6.250.000.000,00	7.497.099.420,00	16.155.825.620,00					
	2	19	02	201		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Cakupan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	-			90 %	90 %	5.246.679.200,00	6.542.099.420,00	6.542.099.420,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kader Kabupaten /Kota														
	2	1	0	2	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				200 Orang	200 Orang	2.160.815.000,00	6.430.000.000,00	15.102.643.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota													
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi				2 Orang	2 Orang	3.085.864.200,00	112.099.420,00	99.903.620,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan ,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda									Semua Kel/Desa				
	2	1	0	2	2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-		90 %	90 %	1.003.320.800,00	955.000.000,00	955.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-
	2	1	0	2	003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	1.003.320.800,00	955.000.000,00	953.278.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semuakemat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehid	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Semua Kel/Desa			upan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
12	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga				30 %	30 %	3.500.090.000,00	2.956.879.000,00	8.198.128.100,00					
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	-			90 %	90 %	1.499.090.000,00	1.628.529.000,00	1.628.529.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	-

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kabupaten /Kota													yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2	00	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					12 Unit	12 Unit	1.499.090.000,00	1.628.529.000,00	6.588.123.700,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2	00	06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				150 Dokumen	150 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan ' Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	
	2	19	03	2022		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten	-			90 %	90 %	763.300.000,00	644.200.000,00	644.200.000,00			-	-	-
	2	19	03	2022	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota														
							Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan				3 Kegiatan an	3 Kegiatan an	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Sidenreng Rapp	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota									ang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	H (PAD)			
	2	19	03	2022	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				100 Orang	100 Orang	763.300.000,00	574.200.000,00	860.165.400,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	-			90 %	90 %	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-
	2	1	0	2	00	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																a Kel/D esa			Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	19	03	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			90 %	90 %	1.000.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-
	2	19	03	204	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	19	03	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-			90 %	90 %	237.700.000,00	84.150.000,00	84.150.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2190320009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2190320010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Lembaga	2 Lembaga	237.700.000,00	84.150.000,00	79.839.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
13	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan yang Dilaksanakn Oleh Kwarcab				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pramuka	-			90 %	90 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-
	2	1	0	2	00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					1 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																	a Kel/Desa			Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah															
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00		Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							700.000.000,00	121.000.000,00	221.021.900,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	2	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					700.000.000,00	121.000.000,00	221.021.900,00							
14	3	2	6	0	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Pengembangan Destinasi Wisata				24.66 %	24.66 %	200.000.000,00	21.000.000,00	121.021.900,00					
	3	2	6	0	2	0	3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	-			90 %	90 %	200.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	2	0	2	00	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman		
	3	2	0	2	00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	0,00	21.000.000,00	121.021.900,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehid		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dan Terpelihara									Semua Kel/Desa			upan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
15	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata				182000 Orang	182000 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00					
	3	26	03	201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-			90 %	90 %	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius,	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			Berbudaya dan Aman	
	3	2	0	2	00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
16	3	2	0	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat				85 %	85 %	200.000.000,00	0,00	0,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
	3	2	0	2.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-			90 %	90 %	200.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-
	3	2	0	2.	00	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengemban				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semu a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualit	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							gan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									Kecamatan, Semua Kel/Desa			as Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	
											JUMLAH		14.000.408.170,00	13.530.777.000,00	27.509.894.000,00					

DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan strategis dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam proses penyusunannya, dokumen ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja hingga triwulan I tahun 2025, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, serta isu-isu strategis yang relevan dengan tantangan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi pedoman yang mampu mengarahkan kinerja organisasi agar lebih terukur, terencana, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasinya di masa mendatang.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat optimal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta menjadi pijakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, April 2025
Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata

PATRIADI,SE.,M.Adm.Pemb
NIP. 197612122008011016

Perubahan Rencana Kerja DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025



DINAS
PERPUSTAKAAN
& KEARSIPAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja berfungsi sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, yang kandungan pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

Kepala Dinas,



AHMAD, SP., M. Si

Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 197106041998031019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	36
3.1. Program dan Kegiatan	36
1 Program.....	36
2 Kegiatan	36
BAB. IV PENUTUP.....	49
4.1. Catatan Penting	49
4.2. Kaidah Pelaksanaan	49
4.3. Rencana Tindak Lanjut.	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen rencana kerja disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan dan perencanaan pembangunan.

Setiap perangkat Daerah berupaya menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yaitu penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan sebagai urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penyusunan Renja tahun 2025 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Perpustakaan RI dan ANRI tahun 2025 yang bersumber dari APBD kabupaten Sidenreng Rappang, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Perpustakaan RI dan ANRI.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang akuntabel maka perlu disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah jangka pendek 1 tahun. Hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah., tata cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Hal tersebut pulalah yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah, mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran Rencana Strategis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good government* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara dimata publik. Di sisi lain, terselenggaranya Kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga Pelaksanaan Program dan Kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha mengembangkan mekanisme penyusunan Rencana Kerja secara Proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja yang disusun merupakan hasil analisis dan evaluasi realisasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya. Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026. Rencana Kerja merupakan salah satu proses kegiatan perencanaan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025(Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 71);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan Arah dan pedoman bagi Dinas Perustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugasnya untuk

menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai;

2. Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan yang efektif dan efisien.

Sedangkan Tujuan khusus penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta mempertajam skala prioritas program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 dan landasan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024.
3. Agar seluruh urusan/program/sasaran kegiatan dapat sejalan dengan target kinerja Rencana Strategis 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
4. Rencana Kerja merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan yang berbasis pada Kepentingan Masyarakat.
5. Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat masing-masing bab sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang, Landasan Hukum, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU**, menjelaskan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang berbasis kepada masyarakat.
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) Tahun Periode Tahun 2025.
- BAB IV PENUTUP**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024.

2.1 Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2024, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan data antara target capaian kinerja Renstra sampai dengan periode akhir renstra, dibandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Adapun yang akan dikaji (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah Evaluasi Renstra Perubahan Tahun 2025-2030 dan Renstra RPD Tahun 2025-2030 dalam hal pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun juga ditujukan memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 1 (satu) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Renja dipandang sebagai berikut :

1. Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
3. Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Evaluasi Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (Kebijakan dan program).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, sebagian telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2030 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2030 dan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024, maka capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat dilihat pada Tabel II.1.a dan Tabel II.1.b berikut;

Tabel 2.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan
Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d. Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %					50%	50%
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %					50%	50%
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen					2 dokumen	33,33%
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	33,33%
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen					1 dokmen	33,33%
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	3 Dokumen					1 dokumen	33,33%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	33,33%
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan					1 laporan	33,33%
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan						
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %					100%	100%
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 org/bln					184	59,74
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan					3 laporan	100%
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100 %					100%	100%
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 dokumen	36 dokumen				36 dokumen	100%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%				100%	100%
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	18 paket				18 paket	100%
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	3 paket	-	-	-	3 paket	50%
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	9 paket				9 paket	100%
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan				12 laporan	100%
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 dokumen	100 dokumen	-	-	-	100 dokumen	100%
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100	-	-			
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%				100%	100%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%				100%	100%
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%				100%	100%
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	27 unit	27 unit				100%	100%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		dibayarkan Pajaknya							
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit				6 unit	100%
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit				12 unit	100%
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit				18 unit	100%
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	60,00%	37,07%				37,07%	61,37%
		Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	7,09%	%				%	%
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio					Rasio	%
		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio					Rasio	%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	60,00%					%	%
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan	3 layanan					3 layanan	100%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)							
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	30 perpus					30 perpus	100%
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 eks					eks	%
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	300 perpus					450 perpus	%
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 perpus					15 perpus	100%
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan	150 orang		-	-	-	Orang	%

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2.23.02.3.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 layanan		-	-	-	6 layanan	100%
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	9.000 eks					Eks	%
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	9.000 eks					Eks	%
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen		-	-	-	3 dokumen	100%
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	100%					100%	100%
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	33 lokus		-	-	-	33 lokus	100%
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	11 orang	-	-	-	-	-	-

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakaan	-					
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 orang	-					
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100					200	66,66
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	100					200	66,66
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20	-	20	10	50,00		
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	20	-	20	10	50,00	20	100,00
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	85,00	-	65,00	38,46	84,80	75,00	88,23

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Aktif dan In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100,00	-	100	75	75,00	100	58,33
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	90	-	20	20	100,00	45	50,00
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	90	-	20	20			
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik	100	-	-	-	-	33,33	33,33
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah dan Jenis Arsip Statis yang Diakuisisi, Diolah, Dipreservasi dan Diakses	195	-	-	-	-	150	76,92
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	-	100	100	100,00	66,66	66,66
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Sarana Layanan Informasi Kearsipan yang Diadakan	2	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek/Diklat Kearsipan	700	-	200	200	100,00	200	28,57
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	100	-	100	100	100,00	33,33	33,33

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat									
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Sesuai NSPK	100	-	100	100	100,00	33,33	33,33
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	180	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	180	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK	100	-	100	100			
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	180	-	-	-			
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	180	-	-	-			
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang	100,00	-	100	100	100,00	33,33	33,33

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK							
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK	100,00	-	100	100	100,00		
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	30	-	-	-	-		
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30	-	-	-	-		

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intermediate outcomes)/ Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK	100,00	-	100	100	100,00		
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	30	-	-	-	-		
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	30	-	-	-	-		
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	30	-	-	-	-		
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	90,00	-	-	-	-	-	-
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	100,00	-	-	-	-	-	-
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapan	4	-	-	-	-	-	-
2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	4	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Tabel II.1.a dan Tabel II.1.B di atas, untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan telah mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikator cukup jelas (SMART)

Adapun lebih rincinya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1.c
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja s.d Tahun 2025

Indikator Program, (outcome), (intermediate outcome) Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1. INDIKATOR PROGRAM:					
1.1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	35,00	26,44	75,54
1.2	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional	Persen	5,91	7,04	119,12
1.1 INDIKATOR KEGIATAN:					
1.1	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	35,00	25,44	75,54
1.1.1 INDIKATOR SUB KEGIATAN:					
1.1.1	Jumlah dan Jenis Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	Aplikasi	1	1	100,00
1.1.2	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan	Unit	2	2	100,00
1.1.3	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dibina	Unit	50	50	100,00
1.1.4	Jumlah dan Jenis Perpustakaan Khusus yang Dibina	Unit	22	22	100,00
1.1.5	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Dihibahkan	Eksamplar	1.000	1.000	100,00
1.1.6	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Diadakan dan Diolah	Eksamplar	2.000	2.000	100,00
1.2 INDIKATOR KEGIATAN:					
1.2	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	30,00	-	-
1.2.1 INDIKATOR SUB KEGIATAN:					
1.2.1	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Orang	200	-	-
2. INDIKATOR PROGRAM:					
2.1.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persen	100	100	100

Indikator Program, (outcome), (intermediate outcome) Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
	yang Dilestarikan				
2.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
2.1	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
2.1.1	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	28	28	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1.c
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja s.d Tahun 2025

Indikator Program, (outcome), (intermediate outcome) Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.	INDIKATOR PROGRAM:				
1.1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	35,00	26,44	75,54
1.2	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional	Persen	5,91	7,04	119,12
1.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
1.1	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	35,00	25,44	75,54
1.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
1.1.1	Jumlah dan Jenis Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	Aplikasi	1	1	100,00
1.1.2	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan	Unit	2	2	100,00
1.1.3	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dibina	Unit	50	50	100,00
1.1.4	Jumlah dan Jenis Perpustakaan Khusus yang Dibina	Unit	22	22	100,00
1.1.5	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Dihilahkan	Eksamplar	1.000	1.000	100,00
1.1.6	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Diadakan dan Diolah	Eksamplar	2.000	2.000	100,00
1.2	INDIKATOR KEGIATAN:				
1.2	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	30,00	-	-
1.2.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				

Indikator Program, (outcome), (intermediate outcome) Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.2.1	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Orang	200	-	-
2. INDIKATOR PROGRAM:					
2.1.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1 INDIKATOR KEGIATAN:					
2.1	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1.1 INDIKATOR SUB KEGIATAN:					
2.1.1	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	28	28	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1.c
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja s.d Tahun 2025

Indikator Program, (outcome), (intermediate outcome) Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1. INDIKATOR PROGRAM:					
1.1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	35,00	26,44	75,54
1.2	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional	Persen	5,91	7,04	119,12
1.1 INDIKATOR KEGIATAN:					
1.1	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	35,00	25,44	75,54
1.1.1 INDIKATOR SUB KEGIATAN:					
1.1.1	Jumlah dan Jenis Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	Aplikasi	1	1	100,00
1.1.2	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan	Unit	2	2	100,00
1.1.3	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dibina	Unit	50	50	100,00
1.1.4	Jumlah dan Jenis Perpustakaan Khusus yang Dibina	Unit	22	22	100,00
1.1.5	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Dihibahkan	Eksamplar	1.000	1.000	100,00
1.1.6	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Diadakan dan Diolah	Eksamplar	2.000	2.000	100,00

Indikator Program, (<i>outcome</i>), (<i>intermediate outcome</i>) Sub Kegiatan (<i>output</i>)		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.2	INDIKATOR KEGIATAN:				
1.2	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	30,00	-	-
1.2.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
1.2.1	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Orang	200	-	-
2.	INDIKATOR PROGRAM:				
2.1.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
2.1	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
2.1.1	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	28	28	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**
 Target tidak disesuaikan dengan jumlah anggaran
 Jadwal tidak dapat ditentukan
 Jumlah arsip yang diperkirakan terdapat perbedaan
 Perencanaan dan penganggaran yang bersinergi dan sinkron
5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
 Tidak tercapainya target kinerja program
 Kinerja dinas tidak sesuai dengan apa yang direncanakan
 Mempengaruhi nilai SAKIP Dinas
 Pencapaian program renstra maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan bertanggung, sehingga atat kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai
6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**
 Penganggaran disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan
 Anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan
 Anggaran disesuaikan dengan kapasitas sdm
 Perencanaan dan penganggaran di sesuaikan dan disinkronkan dengan target
 Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan, penganggaran dan bidang teknis

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun pada Tahun 2021 s.d. 2024 dalam hal capaian kinerja mengalami peningkatan. Perumusan Capaian kinerja tersebut dilakukan koordinasi dan sinergi dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Perpustakaan Republik Indonesia serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Proses Pencapaian Kinerja pembangunan daerah khususnya urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan aksesibilitas;
2. Peningkatan gemar membaca;
3. Penguatan tertib arsip;
4. Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan instansi pemerintah/daerah;
6. Pengembangan pendataan dan pengelolaan arsip;

Adapun pendekatan internal dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun pusat data perpustakaan dan kearsipan yang berisi jumlah lembaga dan sumber daya secara up to date sebagai bahan pembinaan;
2. Membangun sistem layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

2. Permasalahan dan hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sebelum menguraikan permasalahan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah akan diuraikan dulu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Peraturan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tugas Pokok dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan Uraian Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;

3. Memantau, membina dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
9. Menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
10. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
11. Merumuskan kebijakan bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
12. Merumuskan bidang pengelolaan kearsipan;
13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
16. Melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
18. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari:
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari:
5. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
6. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi obyektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka identifikasi permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Urusan Perpustakaan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan;
- b. Minimnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan
- c. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan
- d. Belum adanya Tenaga Fungsional Pustakawan
- e. Terbatasnya bahan pustaka dan kurang bervariasi

- f. Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi pengelola perpustakaan
- g. Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- h. Rendahnya Minat dan Budaya Baca di masyarakat.

Urusan Kearsipan

- a. Kurangnya Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
- b. Rendahnya Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip.
- c. Belum tertatanya arsip-arsip yang berada di OPD sesuai kaidah kearsipan.
- d. Belum terlaksananya sistem kearsipan di setiap OPD.
- e. Belum terwujudnya unit kearsipan di setiap SKPD, sesuai amanah UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- f. Image Penempatan pegawai pada kearsipan dipandang relatif rendah.
- g. Masih rendahnya Profesionalisme dan kompetensi pengelola kearsipan.
- h. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan kearsipan.
- i. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- j. Belum optimalnya Pembinaan kearsipan di SKPD yang disebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis).

3. Dampak Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pencapaian visi dan misi Bupati, NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Permasalahan dan hambatan tersebut di atas secara tidak langsung akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang khususnya Misi I yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Misi ini terkait dengan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat. Pencapaian

Misi I akan bermanfaat apabila minat dan budaya baca masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan berdampak ketika indeks atau nilai budaya baca meningkat. Pendekatan Kualitas hidup masyarakat perlu dikaji dalam berbagai aspek kehidupan baik dari segi ekonomi, politik, agama maupun hal lain yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Di samping itu akan berdampak pula pada pencapaian Program Perpustnas RI yaitu peningkatan minat dan budaya baca akan menurun yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pada semua aspek kehidupan dan Program ANRI yaitu pengelolaan Kearsipan tidak berjalan optimal yang ujung-ujungnya berdampak proses akuntabilitas pengelolaan kearsipan secara nasional.

4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisis terhadap Renja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dalam urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Lima Tahun mendatang.

Analisis atas kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Kekuatan (strengths)

- a. Bertambahnya Jumlah Perpustakaan pada perguruan Tinggi dan adanya beberapa penggiat literasi, perpustakaan Masjid serta Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berimplikasi pada meningkatnya pilihan tempat berkunjung bagi masyarakat. Asumsinya, semakin banyak pilihan

kunjungan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan dan minat baca masyarakat.

- b. Jumlah Khasanah arsip yang mendukung percepatan pembangunan disemua sektor.
- c. Tersebar nya perpustakaan di kecamatan, desa, kelurahan dan perpustakaan keliling.

Kelemahan (weaknesses)

- a. Belum adanya layanan perpustakaan yang berstandar Nasional
- b. Masih rendahnya minat baca kunjung masyarakat ke Perpustakaan
- c. Belum tercipta sinergitas antar pustakawan, penggiat literasi dan pemerhati minat baca
- d. Kurang SDM Kearsipan dari kuantitas dan kualitas
- e. Belum maksimalnya perhatian atas fungsi dan urgensi arsip
- f. Belum adanya Jaringan Informasi Sistem Kearsipan

Tantangan (threats)

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
- b. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyetuh kebutuhan dasar manusia.
- c. Keberadaan Lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan lembaga kearsipan belum dpandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan
- e. Profesionalisme tenaga perpustakaan dan kearsipan masih rendah.

Peluang (opportunities)

- a. Besarnya komitmen pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
- c. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan.
- d. Adanya Mobil Perpustakaan Keliling yang mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Desentralisasi dan otonomi daerah;
- f. Perkembangan teknologi;
- g. Keterbukaan informasi.

5. Formulasi/Penentuan Isu-Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang ada beberapa hal yang dijadikan acuan antara lain :

- a. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. Sebagai organisasi pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merasa puas atas pelayanan kepada pemustaka. Di dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan, namun berbagai upaya dilakukan dalam rangka pembenahan dan pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjadi sumber informasi, agen perubahan dan pusat peradaban.

- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga/OPD Provinsi.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, tentunya tidak lepas dari Renstra Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Renstra PNRI, ANRI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi acuan bagi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sesuai Uraian tersebut di atas maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan dalam periode Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemetaan kondisi perpustakaan lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mendapatkan prioritas agar dapat diketahui permasalahan dan solusi pengembangan perpustakaan tersebut.
- 2) Program budaya baca masyarakat Sidenreng Rappang. Rendahnya minat baca akibat dari persoalan literasi perlu segera dibangun melalui sinergi dengan institusi Pendidikan dan para penggiat literasi serta pemerhati pengembangan minat dan budaya baca
- 3) Peningkatan budaya gemar membaca melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
- 4) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi baik dari segi portal web, sistem layanan dan partisipasi dalam media sosial.
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Perpustakaan dan kearsipan
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pemustaka dan pengguna arsip.

- 7) Peningkatan penataan dan pengelolaan kearsipan secara professional.
- 8) Pembangunan Depo Arsip sesuai standar tipologi.
- 9) Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan lingkup Pemerintah daerah.

Di samping itu isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Arsip secara Baku bagi semua Instansi Pemerintah dan swasta perlu pengembangan.
2. Pengelola Arsip perlu peningkatan Sumber Daya dan Pemahaman yang lebih mendalam dalam proses Pengembangan Kearsipan.
3. Menjadikan Kantor Arsip sebagai pusat informasi yang handal dan berbasis teknologi
4. Peningkatan Minat Baca pada para Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya perlu penanganan yang lebih komprehensif.
5. Perlunya Pengembangan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan
6. Setiap Rumah Tangga selayaknya memiliki Perpustakaan keluarga
7. Peningkatan Minat Baca dalam keluarga perlu penanganan yang lebih komprehensif.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Program pada dasarnya merupakan upaya implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

Dalam rangka mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan serta mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan dan merumuskan Perubahan Rencana Kerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif) sebagai berikut:

4.1 Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan penjabaran kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Adapun program yang dirumuskan untuk mendukung kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pembinaan Perpustakaan
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- d. Program Pengelolaan Arsip
- e. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

2. Kegiatan

Kegiatan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menghasilkan keluaran (*ouput*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam rangka menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- j. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- k. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
- l. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- m. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- n. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- o. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- p. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- q. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
- r. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- s. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
- t. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

Adapun Tabel Perubahan Rencana Kerja (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				7.277.191.928				3.701.619.000	
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				7.177.191.928				3.688.724.500	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangsid	100%	2.653.012.820	ASN/ NON ASN	Pangsid	100%	2.655.265.500	ASN/ NON ASN
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pangsid	100%	14.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	3.702.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	1.181.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	526.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	987.500	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	1.007.500	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangsid	1 dokumen	2.000.0000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	0	ASN/NON ASN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 laporan	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 laporan	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Keuangan	Pangsid	100%	2.145.092..820	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	2.197.664.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangsid	308 org/bln	2.143.092.820	ASN/NON ASN	Pangsid	308 org/bln	2.197.664.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 laporan	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	Pangsid	100%	8.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	5.400.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pangsid	1 dokumen	5,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	3.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pangsid	1 dokuemn	3,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	2.400.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangsid	100%	176.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	65.981.500	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangsid	6 paket	5,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	6 paket	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang	Pangsid	6 paket	4,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	6 paket	0	ASN/NON ASN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Disediakan								
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pangsid	6 paket	3.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	6 paket	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	Pangsid	12 laporan	4.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 laporan	3.480.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangsid	24 laporan	150.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	24 laporan	62.501.500	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pangsid	1 dokumen	10.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pangsid	0 dokumen	0	ASN/NON ASN	Pangsid	0 dokumen	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik daerah	Pangsid	100%	30.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	11.657.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pangsid	6 unit	0	ASN/NON ASN	Pangsid	6 unit	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakam	Pangsid	4 unit	30.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	4 unit	11.657.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pangsid	6 unit	0	ASN/NON ASN	Pangsid	6 unit	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangsid	100%	178.500.000	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	226.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangsid	12 laporan	3.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 laporan	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangsid	12 laporan	95.500.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 lapora	100.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangsid	4 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	4 laporan	0	ASN/NON ASN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Pangsid	12 laporan	78.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 laporan	126.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Pangsid	100%	100.920.000	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	144.881.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pangsid	12 unit	60.920.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 unit	46.071.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangsid	2 unit	10.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	2 unit	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangsid	12 unit	5.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 unit	3.790.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangsid	2 unit	20.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	2 unit	95.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangsid	12 unit	5.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 unit	0	ASN/NON ASN
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Sidrap	55,76%	2.448.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	55,76%	981.283.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
		Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Sidrap	75,20%		MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	5,09%		MASYARAKAT SECARA UMUM
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Sidrap	Rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	Rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM
		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Sidrap	1,60 rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	1,70 rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Sidrap	1.60%	2.018.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	1.60%	681.623.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Sidrap	100 perpustakaan	510.000.000	PERPUSTAKAAN SD/MI, SMP/MTs	Sidrap	100 perpustakaan	.000	PERPUSTAKAAN SD/MI, SMP/MTs
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Sidrap	10 perpustakaan	288.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	10 perpustakaan	28.459000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Sidrap	1 layanan	60.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	1 layanan	0	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Sidrap	8 perpustakaan	400.000.000	PERPUSTAKAAN KHUSUS	Sidrap	8 perpustakaan	0	PERPUSTAKAAN KHUSUS
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100 orang	100.000.000	PUSTAKAWAN DAN TENAGA PERPUSTAKAAN	Sidrap	100 orang	0	PUSTAKAWAN DAN TENAGA PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100 dok.	100.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	2 dokumen	18.024.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk	Sidrap	1.000 eks.	500.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	1.000 eks.	0	PERPUSTAKAAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Sidrap	50 eksemplar	10.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	50 eksemplar	332160000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	Sidrap	1 Perpustakaan	50.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	1 Perpustakaan	29.480.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Sidrap	5.000 eks.	50.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	5.000 eks.	276.000.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	1 dok.	100.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	1 dokumen	18.063.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100,00	430.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	100,00	299.680.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Sidrap	11 org	55.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	11 orang	0	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Sidrap	4 perpustakaan	60.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	4 perpustakaan	0	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan GBGM Tingkat Kabupaten/Kota	Sidrap	11 org	35.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	11 orang	113.910.000	MASYARAKAT SECARA UMUM

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan serta Masyarakat	Sidrap	11 lokus	275.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	11 lokus	185.750.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Sidrap	100	52.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	100%	32.176.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Sidrap	100%	32.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	100%	32.176.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sidrap	4 orang	20.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	4 orang	32.176.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dkembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Sidrap	25 eksemplar	12.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	25 eksemplar	0	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Sidrap	87,32%	73.500.000	OPD	Sidrap	87,32%	21.071.500	OPD
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota	Peresentase Aktif dan In Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	Sidrap	100%	30.000.000	OPD	Sidrap	100%	21.071.500	OPD
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan Digunakan	Pangsid	100 berkas	10.000.000	OPD	Pangsid	100 berkas	0	OPD
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pangsid	100 berkas	18.000.000	OPD	Pangsid	100 berkas	10.965.000	OPD
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap	1 laporan	2.000.000	OPD	Sidrap	1 laporan	10.106.500	OPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	Sidrap	-	43.500.000	OPD	Sidrap	-	0	OPD
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Sidrap	0 Arsip-	14.500.000	OPD	Sidrap	0 Arsip-	0	OPD
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Sidrap	0 Arsip-	29.000.000	OPD	Sidrap	0 Arsip-	0	OPD
2.24.02.2.03	Pengelolaan Sampul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN								
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Sidrap	65%	51.000.000	OPD	Sidrap	65%	11.823.000	OPD
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	Sidrap	100%	38.000.000	OPD	Sidrap	100%	0	OPD
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Sidrap	100 berkas	18.000.000	OPD	Sidrap	100 berkas	0	OPD
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah	Sidrap	100 arsip	20.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 (Sepuluh) Tahun								
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Sidrap	100%	4.000.000	OPD	Sidrap	100%	11.823.000	OPD
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Sidrap	1 arsip	2.000.000	OPD	Sidrap	1 arsip	11.823.000	OPD
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Sidrap	1 arsip	2.000.000	OPD	Sidrap	1 arsip	0	OPD
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang di gabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan dengan NSPK	Sidrap	10%	3.000.000	OPD	Sidrap	10%	0	OPD
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100 daftar	2.000.000	OPD	Sidrap	100 daftar	0	OPD
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Media dengan NSPK	Sidrap	100%	3.000.000	OPD	Sidrap	100%	0	OPD
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan	Sidrap	100 arsip	2.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keabsahan Arsip	dltetapkan								
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tingkat kesesuaian kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK	Sidrap	100%	3.000.000	OPD	Sidrap	100%	0	OPD
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	Sidrap	100%	10.000.000	OPD	Sidrap	100%	0	OPD
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NPSK	Sidrap	100%	10.000.000	OPD	Sidrap	100%	0	OPD
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Sidrap	24 SOP	5.000.000	OPD	Sidrap	24 SOP	0	OPD
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan	Sidrap	12 arsip	5.000.000	OPD	Sidrap	12 arsip	0	OPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025

TAHUN ANGGARAN 2025										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bersifat Tertutup	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								

BAB IV P E N U T U P

Bab Penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan, Catatan Penting dan Rencana Tindak Lanjut.

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diisyaratkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Startegis (Renstra) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat Rancangan perubahan rencana kerja dan pedanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan publik/masyarakat.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan perangkat daerah yang merupakan tahun ke 1 (pertama) dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya Renja berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Renja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Renstra Perpustakaan RI dan ANRI 2020-2024, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun fungsi Renja lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RKA yang mana untuk memastikan DPA telah disusun berlandaskan Renja dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah,

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas , akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati

oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Renjana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparansi informasi publik, maka Renja agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing bidang teknis agar menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di Renja Tahun 2025 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil- hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Renstra serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan kesesuaian dengan target Renstra serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan

atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan publik/masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Semoga Penyusunan Perubahan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

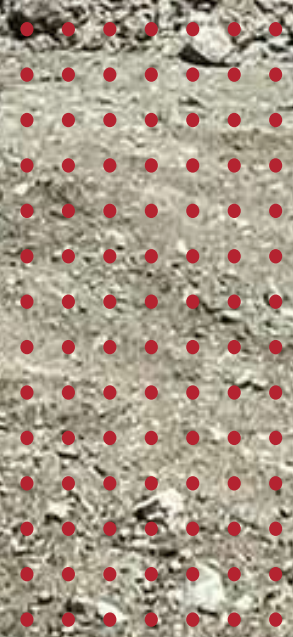
Kepala Dinas,



AHMAD, SP., M. Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 197106041998031019



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**TAHUN
2025**

(RENJA) PERUBAHAN



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya juaah maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan rencana yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2024- 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029. Rencana kerja memuat hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pada 1 (satu) tahun yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 16 Juni 2025

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sidenreng Rappang



SUHARYA ANGRIANI, S.S.P., M.Si
Pangkat, Pembina Utama Muda
Nip. 19781231 199711 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
2.2. Landasan Hukum	2
3.3. Maksud dan Tujuan	4
4.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN.	6
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	6
II.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
III.1. Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.....	22
BAB V. PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025	23

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD, dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD Perubahan menjadi RKPD Perubahan harus berdasarkan hasil verifikasi renja SKPD. Sehingga antara renja SKPD dengan dokumen RKPD Perubahan mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program/kegiatan yang searah dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Visi “ **Kabupaten Sidenreng Rappang yang Maju dan Sejahtera**” yang dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) Misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam misi 1 (satu) yaitu “**Membangun Struktur Perekonomian Daerah yang Kuat melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis menuju Agroindustri pada Sektor Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Perikanan**” . Dengan memperhatikan Visi dan Misi, maka dapat dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD.

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang senantiasa diletakkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan peternakan dan perikanan terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 61)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sampai dengan 2023.

18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas
 - b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas
2. Tujuan
 - a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang selaras dan terpadu, komprehensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
 - c. Tersedianya Rencana Kerja Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan dan Rujukan dalam menetapkan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 sampai dengan 2026.
 - d. Terakumulasinya usulan hasil musrembang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- II.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun berjalan dan capaian Renstra SKPD pada Dinas Peternakan dan Perikanan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berkenaan (2025).

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 terdiri :

1. Program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 6 Dokumen tapi yang realisasi baru 3 dokumen, sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 laporan tapi realisasi 1 laporan. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan dengan target 1.400 Orang/bulan dengan realisasi 368 orang/bulan. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target 12 Laporan realisasi 3 laporan. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Daerah, sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 50 paket dan belum ada realisasi, sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 5 paket tapi belum ada realisasi, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 200 laporan dengan realisasi 38 laporan. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**

Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 laporan, belum ada realisasi, sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan realisasi 3 laporan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 laporan realisasi 4 laporan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 laporan, realisasi belum ada.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 6 unit realisasi belum ada, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 1 unit belum ada realisasi, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 2 unit, realisasi belum ada.

- b. ***Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*** dengan **kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan target 410 unit belum ada realisasi.

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan target 40 Orang dan belum ada realisasi.

- c. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan**, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota dengan target 12 Unit, tapi belum ada realisasi. Sub Kegiatan Penjamin ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target 12 Unit, tapi belum ada realisasi.
- d. **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**, Kegiatan **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**, sub kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota dengan target 294 Pelaku Usaha, realisasi belum ada.
- e. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**, Kegiatan **Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**, sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan target 12 dokumen, realisasi 3 dokumen. Kegiatan **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan target 5000 dosis, belum ada realisasi.
- f. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**, **Kegiatan Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah kabupaten/Kota**, Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan target 12 Laporan, realisasi 11 laporan dengan realisasi 3 Laporan. **Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**, sub kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan dengan target 150 laporan, yang realisasi 1 laporan.

g. Program Perizinan Usaha Pertanian, Kegiatan **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan,** sub kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dengan target 150 dokumen, yang terealisasi 33 dokumen.

h. Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian,** sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan target 11 Unit yang terealisasi 3 Unit.

2. Program yang memenuhi target kinerja, yaitu

a. **Program Penyuluhan Pertanian,** Kegiatan **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** sub kegiatan Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, dengan target 921 Unit, realisasi 1.294 Unit.

3. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya dan Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

- Besaran persentase rencana penarikan pada Triwulan 1 s/d 2 sangat dibatasi dan persentase terbanyak berada di Triwulan 3 dan 4.
- Terdapat beberapa SPM yang diajukan untuk pencairan namun belum terbit SP2Dnya.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Bagi program yang tidak memenuhi target maka implikasi yang timbul adalah:

a. Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pada lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan sehingga mempengaruhi kinerja perangkat daerah

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pada pelaku usaha
- 5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dan mendukung pencapaian visi misi Bupati Sidenreng Rappang.
- 6. Tidak memenuhi target dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan masih berada di posisi Triwulan 1 sedangkan rencana pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 4 Triwulan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun berjalan) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.1

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4*100)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	-	50%	100	100
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan Waktu pelaporan Perencanaan, penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	-	50%	100	100
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	6	6	3	50 %	9	50
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5	5	1	20%	6	40

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10 =(9/4*100)
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah (%)	100	100	100	-	%	100	100
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.950	1.264	1.264	368	29%	1.632	55
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	12	12	3	25%	15	41
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	-	%	100	100
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150	37	150	-	%	37	24
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	4	2	-	0%	3	30
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	200	59	38	64 %	238	40
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	-	50%	150	150
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	12	33	-	%	12	33

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10 =(9/4*100)
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	50%	15	41
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	12	12		%	12	33
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	3	25%	15	42
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	-	%	100	100
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	6	5	-	%	6	33
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	1	-	0%	1	34
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	2	2	-	%	2	8
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.741,27	2.333,66	2.913,40	-	%	2.333,66	27

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10 =(9/4*100)
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	100,00	82	100	-	%	82	82
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.020	5	5	-	0%	5	1
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	100	-	100	-	0%	100	100
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120	90	30	-	0%	90	75
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.095	1.488,42	1.365	-	0%	1.488,42	37
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	100	100	100	-	0%	100	100
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39	3	3	-	0%	3	8
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36	2	12	-	0%	2	6

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10 =(9/4*100)
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	75	100	70	-	44%	106	141
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Orang)	294	325	294	-	44%	454	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12	4	4	-	0%	4	34
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Daging (Kilogram)	15.489.708	2.541.476	3.348.194	-	0%	2.541.476	17
		Jumlah Produksi Telur (Kilogram)	170.537.148	45.031.501	56.822.770	-	0%	45.031.501	27
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor yang Dilayani (%)	10	10	10	-	0%	10	100

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10 =(9/4*100)
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	36	12	12	3	50%	6	50
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ternak yang Disebar (%)	100	100	100	-	0%	100	100
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	12.500	2.000	5.000		0%	7.142	130
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	21	21	21		24%	26	124
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis (%)	20	20	20		25%	25	125
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	33	12	11		50%	17	155

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10 =(9/4*100)
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet (%)	75	75	75		0%	75	100
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	12	4	4	1	25%	5	42
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	100	100	100		0%	100	100
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin usaha bidang Peternakan (%)	100	100	100		0%	100	100
3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	450	168	150	33	22%	201	45

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10 =(9/4*100)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Penyuluh Peternakan terhadap pelaku utama peternakan/kelompok ternak (Rasio)	1:13	1:11	1;14	1:13	100%	1:13	100
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas penyuluh (%)	100	100	100		0%	100	100
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33	11	11	3	27 %	14	42
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.763	921	1.249	1.249	100%	2170	79

II.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang Peternakan dan Perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan, pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD, Dinas Peternakan dan Perikanan mendapatkan Isu Kebijakan Strategis yang tetap menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Peningkatan Produksi di sektor Peternakan dan Perikanan.

Sejalan dengan Isu Kebijakan tersebut maka Prioritas Program/Kegiatan, maka rancangan awal Rencana Kerja SKPD dalam mewujudkan Peningkatan Produksi di Sektor Peternakan (daging dan telur) serta Perikanan (Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap).

Namun banyak permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

1. Permasalahan

- a. Lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam kemandirian berwirausaha
- b. Rendahnya legalitas berusaha bagi pelaku usaha perikanan
- c. Kurangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan limbah ternak
- d. Jumlah akseptor IB masih rendah
- e. Ternak bibit sapi belum bersertifikat
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan
- g. Kurangnya tempat pemasaran hewan
- h. Perlunya penanggulangan penyakit ternak anthrax dan rabies

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

- i. Produktivitas dan daya saing peternakan dan perikanan masih rendah
- j. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan
- 2. Hambatan
 - a. Anomali cuaca yang dapat memicu munculnya wabah penyakit menular dan gangguan kesehatan pada ternak
 - b. Belum adanya standar harga minimal untuk sapronak dan hasil produksi peternakan sehingga harga tidak menentu
 - c. Masih terbatasnya investor yang bergerak di sektor peternakan khususnya sapi potong.
 - d. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah;
- 3. Tantangan
 - a. Ketersediaan bibit unggul bermutu belum cukup;
 - b. Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usaha peternakan dan perikanan;
 - c. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan peternak dan pembudidaya baik formal maupun informal;
 - d. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi peternakan dan perikanan.
 - e. Adanya potensi konflik pemanfaatan ruang sumberdaya perikanan
- 4. Peluang
 - a. Ketahanan perekonomian daerah yang baik;
 - b. Komitmen pemerintah kabupaten dalam pengembangan peternakan dan perikanan;
 - c. Adopsi teknologi peternakan oleh peternak semakin meningkat;
 - d. Masih terbuka peluang pasar produk peternakan dan perikanan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional;
 - e. Adanya kelembagaan peternakan dan perikanan baik formal maupun informal
 - f. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan HMT

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

- g. Semakin terbukanya peluang usaha di bidang perikanan
- h. Penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) pada BBI dan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) pada kelompok pembudidaya ikan
- i. Potensi SDA untuk pengembangan usaha perikanan

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan rencana kerja yang terukur, dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Perubahan rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahun yang diawali dengan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja yang mengacu pada Rancangan awal perubahan RKPD Tahun 2025.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini bersifat menyeluruh yang di danai oleh APBD perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Rumusan rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel III.1

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Tabel III.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					928.000.000				1.541.739.000	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	2.913,40	503.000.000	Kelompok Nelayan	Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	2.913,40	633.458.500	Kelompok Nelayan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	100	458.000.000		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	100	617.452.000	
3.25.03.2.01.03	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	410	458.000.000		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	2	617.452.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	100	45.000.000		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	100	16.006.500	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan (orang)		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	40	45.000.000		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	20	16.006.500	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)		11 Kecamatan	1.365	400.000.000	Kelompok Pembudidaya	11 Kecamatan	1.350	901.241.000	Kelompok Pembudidaya
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya(%)		11 Kecamatan	100	400.000.000		11 Kecamatan	100	901.241.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		11 Kecamatan	12	200.000.000		11 Kecamatan	3	489.326.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		11 Kecamatan	12	200.000.000		11 Kecamatan	22	411.915.000	
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan(%)		Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	75	25.000.000	Pelaku Usaha Perikanan	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	75	7.039.500	Pelaku Usaha Perikanan

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Org)		Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	294	25.000.000		Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	294	7.039.500	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kaupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	294	25.000.000		Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	294	7.039.500	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.895.500.000					
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging (Kg)		11 Kecamatan	3.348.198	1.455.500.000	Kelompok Ternak	11 Kecamatan	3.212.708	1.364.046.000	Kelompok Ternak
		Jumlah Produksi Telur (Kg)			54.822.770				54.997.045		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani(%)		11 Kecamatan	10	410.000.000		11 Kecamatan	10	43.000.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)		11 Kecamatan	12	410.000.000		11 Kecamatan	12	43.000.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar(%)		11 Kecamatan	100	1.045.500.000		11 Kecamatan	100	1.321.046.000	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)		11 Kecamatan	5.000	1.045.500.000		11 Kecamatan	2.000	1.321.046.000	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular(%)		11 Kecamatan	21	380.000.000	Peternak	11 Kecamatan	21	145.971.500	Peternak
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis(%)		11 Kecamatan	20	350.000.000		11 Kecamatan	20	133.041.500	
3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Laporan)		11 Kecamatan	11	350.000.000		11 Kecamatan	11	133.041.500	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet(%)		11 Kecamatan	75	30.000.000		11 Kecamatan	75	12.930.000	
3.27.04.2.04.01	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		11 Kecamatan	4	30.000.000		11 Kecamatan	4	12.930.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan(%)		Pangkajene Sidenreng	100	20.000.000		Pangkajene Sidenreng	100	7.907.000	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	20.000.000	Pengusaha Bidang Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	7.907.000	Pengusaha Bidang Peternakan
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)		Dinas Peternakan dan Perikanan	150	20.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	125	7.907.000	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Ketersediaan Penyuluh Peternakan dan Rumah Tangga Peternak		11 Kecamatan	01:14	40.000.000	Peternak dan Penyuluh Peternakan	11 Kecamatan	01:11	297.411.000	Peternak dan Penyuluh Peternakan
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh(%)		11 Kecamatan	100	40.000.000		11 Kecamatan	100	297.411.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		BPP	11	20.000.000		BPP	11	256.323.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		11 Kecamatan	921	20.000.000		11 Kecamatan	921	41.088.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC		BB				BB		
		Rata-rata capaian Kinerja	81		88				88		
		Persentase ASN dengan Nilai SAKIP Kategori Baik	98		99				99		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		Pangkajene Sidenreng	100	10.214.963.000	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pangkajene Sidenreng	100	9.633.174.500	Dinas Peternakan dan Perikanan
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah(%)		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	25.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	7.257.500	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(dokumen)		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	23.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	5.657.500	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)		Dinas Peternakan dan Perikanan	5	2.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	5	1.600.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	9.257.963.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	9.089.579.000	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Org)		Dinas Peternakan dan Perikanan	1.400	9.237.963.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	1.330	9.087.979.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(Laporan)		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	20.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	1.600.000	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	430.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	107.838.500	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(paket)		Dinas Peternakan dan Perikanan	50	10.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	50	1.000.000	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)		Dinas Peternakan dan Perikanan	5	20.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	1	58.078.500	
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)		Dinas Peternakan dan Perikanan	200	400.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	200	48.760.000	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	362.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	336.559.500	
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	6.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	495.000	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	96.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	78.148.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2025							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	10.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	1.000.000	
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	250.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	256.916.500	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	140.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	100	91.940.000	
1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(unit)		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	100.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	25.000.000	
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasia(unit)		Dinas Peternakan dan Perikanan	1	30.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	1	66.240.000	
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasia(unit)		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	10.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	2	700.000	
						13.038.463.000				12.990.249.000	

BAB V.

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang mengacu pada Renstra tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sangat ditentukan oleh alokasi pagu anggaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesamaan persepsi baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada SKPD pelaksana. Disamping itu, dalam pelaksanaan dokumen renja ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen Renja ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penyusunan Renja ini semoga dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pangkajene Sidenreng, 16 Juni 2025

Kepala Dinas
Peternakan dan Perikanan



SUHARYA ANGRIANI, S.STP., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19781231 199711 2 001

RENJA PERUBAHAN 2025

**DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT., Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dapat terselesaikan.

Terbitnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan dan langkah awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta sumbangsihnya dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini.

Pangkajene Sidenreng,

2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



MUHAMMAD FAJRI SALMAN, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina Tingkat. I

Nip : 19690930 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	6
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel II.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra 2025-2029)	10
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2023 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena PERUBAHAN RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana dan program, PERUBAHAN RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Sedangkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang,** mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2.Landasan Hukum,** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan,** memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4.Sistematika Penulisan,** menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1.Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 antara lain: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap

target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV P E N U T U P,

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdiri :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
 - c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- 4) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
- 5) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Untuk program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program dan kegiatan antara lain :

- a. Alokasi dana yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan agar target tercapai.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yaitu :

- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

5. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
- b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
- c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
- d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
- e. Pemulihan ekonomi usaha perdagangan
- f. Membuat kegiatan virtual dalam rangka pembinaan IKM
- g. Peningkatan kewaspadaan aparatur/ penggunaan APD dalam melaksanakan kegiatan tera/ tera ulang

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1. (RENSTRA 2025-2029)
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)**
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN											
BIDANG PERDAGANGAN											
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
3.30	01.2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
3.30	01.2.	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		-	3	33
3.30	01.2.	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1	33
3.30	01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25,00 Persen			
3.30	01.2.	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1188 Orang/ Bulan	348 Orang/ Bulan	396 Orang/ Bulan	87 Orang/ Bulan	22	435	37
3.30	01.2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Persen 8			
3.30	01.2.	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	4 Laporan	8,00	104	67
3.30	01.2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20 Persen			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	01.2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		-	1	33
3.30	01.2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25	15	42
3.30	01.2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	17	14	39
3.30	01.2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	16,67 Persen			
3.30	01.2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	1 unit	unit	-	1	33
3.30	01.2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 unit	18 Unit	19 unit	3 unit	16	21	39
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai	18,75 Persen	6,2 Persen	6,2 Persen				
3.30	03.2	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	18,75 Persen	6,2 Persen	6,2 Persen				
3.30	03.2.01	00 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1 Unit	1 Unit			1	33
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	300 Persen	100 Persen	100 Persen				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	04.2	01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	300 Persen	100 Persen	100 Persen				
3.30	04.2.01	00 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		-	1	33
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	100 Persen	154,72 Persen	85 Persen				
3.30	06.2	00 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	100 Persen	154,72 Persen	85 Persen				
3.30	06.2.01	00 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2.000 Alat UTTP	2129 Alat UTTP	1.692 Alat UTTP		-	2129	106
3.30	06.2.01	00 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	50 Orang	25 Orang		-	50	33
			BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	15,15 Persen	5,00 Persen	5,05 Persen				
3.31	02.2	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	15,15 Persen	5,00 Persen	5,05 Persen				
3.31	02.2.01	00 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1	33

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.31	02.2.01	00 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen		1 Dokumen			0	-
3.31	02.2.01	00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1	33

Pangkajene Sidenreng, 14 Juli 2025

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUHAMMAD BASRI R. S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tingkat.I / IV.b

Nip : 19690307 199703 1 004

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi memerlukan solusi penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terlihat dari pemetaan permasalahan seperti tabel dibawah ini:

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi
2. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan industri produk unggulan daerah
3. Banyak berdirinya toko-toko modern
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan
5. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah
6. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal
7. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar
8. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan
9. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industri dan perdagangan
10. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan
11. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025										
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN						
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat			
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									13.532.724.948						
BIDANG PERDAGANGAN									6.332.724.948						
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	3.217.624.948		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	3.687.941.300				
3.30	01.2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	5.050.000		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	5.974.900				
3.30	01.2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	3 Dokumen	3.030.000		Pangkajene Sidenreng	3 Dokumen	3.200.000				
3.30	01.2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	2.020.000		Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	2.774.900				
3.30	01.2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	2 Dokumen	0		Pangkajene Sidenreng	2 Dokumen	0				
3.30	01.2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	0		Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	0				
3.30	01.2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	2 Dokumen	0		Pangkajene Sidenreng	2 Dokumen	0				
3.30	01.2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene Sidenreng	4 Laporan	0		Pangkajene Sidenreng	4 Laporan	0				
3.30	01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	2.775.389.048		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	2.944.962.000				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.30	01.2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	33/12 Orang/ Bulan	2.775.389.048		Pangkajene Sidenreng	33/12 Orang/ Bulan	2.944.962.000	
3.30	01.2.06	0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	50.500.000		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	64.894.500	
3.30	01.2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	50 Kali	50.500.000		Pangkajene Sidenreng	50 Kali	64.894.500	
3.30	01.2.07	0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pangkajene Sidenreng	0 Persen	0		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	6.603.000	
3.30	01.2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	0 unit	0		Pangkajene Sidenreng	1 unit	1.000.000	
3.30	01.2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	0 unit	0		Pangkajene Sidenreng	10 unit	5.603.000	
3.30	01.2.08	0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	330.285.900		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	566.455.900	
3.30	01.2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	1 Laporan	2.000.000		Pangkajene Sidenreng	1 Laporan	900.000	
3.30	01.2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	56.760.000		Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	93.770.000	
3.30	01.2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	271.525.900		Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	471.785.900	
3.30	01.2.09	0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	56.400.000		Pangkajene Sidenreng	100 Persen	99.051.000	
3.30	01.2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pangkajene Sidenreng	1 unit	36.400.000		Pangkajene Sidenreng	1 unit	12.012.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.30	01.2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkajene Sidenreng	17 unit	20.000.000		Pangkajene Sidenreng	17 unit	46.753.000	
3.30	01.2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangkajene Sidenreng	0 unit	0		Pangkajene Sidenreng	10 unit	15.286.000	
3.30	01.2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pangkajene Sidenreng	0 unit	0		Pangkajene Sidenreng	1 unit	25.000.000	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	Kab. Sidrap	62,5 Persen	3.030.000.000		Kab. Sidrap	62,5 Persen	719.185.000	
3.30	03.2	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan	Kab. Sidrap	62,5 Persen	3.030.000.000		Kab. Sidrap	62,5 Persen	719.185.000	
3.30	03.2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sidrap	10 Unit	3.030.000.000		Kab. Sidrap	10 Unit	719.185.000	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	Kab. Sidrap	100 Persen	0		Kab. Sidrap	100 Persen	26.512.900	
3.30	04.2	01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	Kab. Sidrap	1 Laporan	0		Kab. Sidrap	1 Laporan	26.512.900	
3.30	04.2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sidrap	1 Laporan	50.500.000		Kab. Sidrap	12 Laporan	26.512.900	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	Kab. Sidrap	60,0 Persen	10.100.000		Kab. Sidrap	75,0 Persen	30.385.500	
3.30	06.2	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	Kab. Sidrap	60,0 Persen	10.100.000		Kab. Sidrap	75,0 Persen	30.385.500	
3.30	06.2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Sidrap	1.376 Alat UTTP	5.050.000		Kab. Sidrap	1.692 Alat UTTP	17.171.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.30	06.2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Sidrap	50 Orang	5.050.000		Kab. Sidrap	25 Orang	13.214.500	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Kab. Sidrap	22,22 Persen	75.000.000		Kab. Sidrap	- Persen	0	
3.30	07.2	01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Kab. Sidrap	22,22 Persen	75.000.000		Kab. Sidrap	- Persen	0	
3.30	07.2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Sidrap	20 Orang	75.000.000		Kab. Sidrap	0 Orang	0	
BIDANG PERINDUSTRIAN							7.200.000.000				429.741.300	
3.30	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	Kab. Sidrap	5,00 Persen	7.200.000.000		Kab. Sidrap	5,00 Persen	428.741.300	
3.31	02.2	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	Kab. Sidrap	5,00 Persen	7.200.000.000		Kab. Sidrap	5,00 Persen	428.741.300	
3.31	02.2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Sidrap	1 Dokumen	100.000.000		Kab. Sidrap	1 Dokumen	244.993.500	
3.31	02.2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sidrap	1 Dokumen	5.100.000.000		Kab. Sidrap	1 Dokumen	160.082.300	
3.31	02.2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.000.000.000		Kab. Sidrap	1 Dokumen	23.665.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan industri	Kab. Sidrap	- Persen	0		Kab. Sidrap	1,00 Persen	1.000.000	
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri	Kab. Sidrap	- Persen	0		Kab. Sidrap	1,00 Persen	1.000.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Sidrap	- Dokumen	0		Kab. Sidrap	1 Dokumen	1.000.000	

Pangkajene Sidenreng, 14 Juli 2025

Plt.KEPALA DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tingkat.I / IV.b

Nip : 19690307 199703 1 004

BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat menjadi arahan bagi seluruh jajaran Unit Kerja yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kinerja Dinas.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan, maka perlu dirumus kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.
2. Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2025 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil (*outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng,

2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


MUHAMMAD FAIRI SALMAN, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina Tingkat I

Nip : 19690930 199303 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH**



**PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Amin.

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap



ANDI RAHMAT SALEH, SE, M.Si
Nip. 197811182003121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN.....	7
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	7
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB IV PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang	10
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025,

sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada Renja tersebut. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini juga tidak terlepas dari adanya Evisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*Focus group discussion* serta mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah, dan beberapa pertimbangan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14)
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 09)

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai upaya untuk penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.1. Maksud:

Maksud dari penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi pencapaian hasil selama tahun berjalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
- b. Menjabarkan rencana program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

dalam bentuk rencana kerja perubahan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kerangka acuan dalam penyusunan RKAP-PD Tahun 2025;
- b. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan 2025;
- c. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
- d. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses penyusunan Perubahan renja Sekretariat Daerah,

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

1. Realisasi program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah berisikan uraian :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan format tabel 3.1.

Bab IV : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I untuk melihat sejauh mana realisasi program/kegiatan dalam pemenuhan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah tersebar pada 10 Bagian yang mengelola 3 Program dan 19 Kegiatan serta 66 sub kegiatan baik itu rutin dan kegiatan teknis. Dan untuk Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang merupakan program rutin dengan indikator cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah untuk Triwulan I Tahun 2025 program ini secara umum sudah teralisasi sebesar 15 % dan kegiatan yang belum memenuhi target adalah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah serta Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan dengan indikator Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh bagian Tata Pemerintahan dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiatan dengan capaian 15%, untuk Indikator Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang mengajukan proposal yang dilaksanakan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan dengan indikator Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal untuk triwulan I masih 10 %, untuk Indikator Jumlah produk hukum yang dihasilkan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum yang terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan mencapai 117 dokumen dan terakhir untuk indikator Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiatan diperoleh hasil sebesar 6 dokumen

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan perekonomian yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang terdiri atas dua kegiatan dan enam sub kegiatan dengan capaian 50% dan untuk indikator Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiatan diperoleh hasil 25 % dan untuk persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiatan diperoleh nilai 2,45 %.

Dengan Demikian Program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I pada Sekretariat Daerah belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tercapai atau tidaknya target kinerja yang direncanakan tidak terlepas dari berbagai faktor, untuk Sekretariat daerah ada beberapa

faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya capaian kinerja program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 antara lain :

- a. Terdapat beberapa Bagian yang masih kurang personil yang berstatus ASN.
- b. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
- c. Masih kurangnya Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis aparatur;

Dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah maka kebijakan yang diambil Untuk menumbuh kembangkan kegiatan Pelayanan pada Sekretariat Daerah yang selama ini berjalan yaitu dengan cara :

- a. Meningkatkan kedisiplinan aparatur dengan melakukan upaya pengawasan berjenjang dimana Fungsional Pelaksana dan Fungsional Ahli Muda diawasi oleh pejabat eselon III/Pejabat Administrator dan Pejabat eselon III diawasi oleh Pejabat eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama
- b. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengikutsertakan Bimtek maupun mendukung dalam melanjutkan Pendidikan ke tingkat lebih tinggi agar kompetensi mereka meningkat.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Jama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi Renstra SKPD tahun 2025
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5
2 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran</i>	100 Persen	100 Persen	100 Persen	40 Persen	36%	60 Persen
2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	2 dokumen
2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen
2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen
2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	2 dokumen
2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	66,67%
2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	3 laporan	50,00%
2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	30 Persen	21%	20 Persen	32%
2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4494 Orang/bulan	1498 Orang/bulan	1498 Orang/bulan	428 Orang/bulan	29%	1926 Orang/bulan	42,86%
2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1080 dokumen	330 dokumen	360 dokumen	116 dokumen	32%	446 dokumen	41,30%
2 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42 dokumen	4 dokumen	17 dokumen	4 dokumen	24%	8 dokumen	19,05%
2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	33,33%
2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 laporan	9 laporan	18 laporan	4 laporan	22%	13 laporan	24,07%
2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100 Persen	50 Persen	100 Persen	25 Persen	25%	17 Persen	42%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%
4 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Persen				0%		0%
4 2 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0,00%
4 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan h yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0,00%
4 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25 Persen	22%	40 Persen	36%
4 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	15 Paket	41,67%
4 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	15 Paket	41,67%
4 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0,00%
4 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	6 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	9 Paket	25,00%
4 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	25,00%
4 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	810 laporan	87 laporan	270 laporan	24 laporan	9%	111 laporan	13,70%
4 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	30 Persen	0%	30 Persen	26%
4 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	3 unit	3 unit	0 unit	0%	3 unit	12,00%
4 2 07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset lainnya yang diadakan	82 unit	20 unit	71 unit	12 unit	0%	32 unit	39,02%
4 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	50 Persen	100 Persen	30 Persen	25%	17 Persen	42%
4 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%
4 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%
4 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%
4 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	80 Persen	100 Persen	20 Persen	8%	35 Persen	34%
4 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	25 Unit	37 Unit	7 Unit	19%	32 Unit	28,83%
4 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	18 Unit	15 Unit	2 Unit	13%	20 Unit	51,28%
4 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	38 Unit	52 Unit	- Unit	0%	38 Unit	24,36%
4 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	7 Unit	7 Unit	- Unit	0%	7 Unit	33,33%
4 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	35 Persen	7%	25 Persen	11%
4 2 11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	84 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	7%	2 Orang/ Bulan	2,38%
4 2 11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	120 Paket	20 Paket	40 Paket	2 Paket	5%	22 Paket	18,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18 Orang	0 Orang	6 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0,00%
4 2 11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	4 Orang/ Bulan	17%	16 Orang/ Bulan	22,22%
4 2 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	33 Persen	11%	11 Persen	26%
4 2 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	2 Paket	17%	14 Paket	38,89%
4 2 12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	12 Paket	2 Paket	17%	2 Paket	5,56%
4 2 12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	0 Paket	0%	12 Paket	33,33%
4 2 13	Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	45%	45 Persen	42%
4 2 13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	5 dokumen	41,67%
4 2 13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	33,33%
4 2 13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	66,67%
4 2 14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang</i>	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20 Persen	11%	45 Persen	42%
4 2 14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	216 laporan	82 laporan	72 laporan	8 laporan	11%	90 laporan	41,67%
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah	100 Persen	25 Persen	100 Persen	25 Persen	25%	8 Persen	8,00%
		Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	100 Persen	18 Persen	90 Persen	20 Persen	18%	5 Persen	5,00%
		Jumlah produk hukum yang dihasilkan	2190 dokumen	73 dokumen	730 dokumen	117 dokumen	9%	73 dokumen	3,33%
		Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	105 dokumen	6 dokumen	35 dokumen	7 dokumen	17%	6 dokumen	5,71%
		<i>Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah</i>	100 Persen	100 Persen	100 Persen	40 Persen	36%	50 Persen	45%
4 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan								
4 2 01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	33,33%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33%	4 dokumen	44,44%
4	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75%	7 dokumen	58,33%
4	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 Persen	90 Persen	100 Persen	10 Persen	4%	5 Persen	12%
	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	288 dokumen	87 dokumen	96 dokumen	11 dokumen	11%	98	100 Persen
4	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	33 dokumen	3 dokumen	11 dokumen	0 dokumen	0%	3 dokumen	9,09%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	99 dokumen	27 dokumen	33 dokumen	0 dokumen	0%	27 dokumen	27,27%
4 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	30 Persen	12%	25 Persen	22%
4 2 03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2.190 dokumen	570 dokumen	730 dokumen	117 dokumen	16%	687 dokumen	31,37%
4 2 03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	78 Kasus	2 3	26 Kasus	1 Kasus	4%	3 Kasus	3,85%
4 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2.190 dokumen	570 dokumen	730 dokumen	117 dokumen	16%	687 dokumen	31,37%
4 2 04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25 Persen	21%	45 Persen	40%
4 2 04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	3 dokumen	15%	23 dokumen	38,33%
4 2 04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	45 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	4 dokumen	27%	19 dokumen	42,22%
4 2 04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	105 laporan	35 laporan	35 laporan	7 laporan	20%	42 laporan	40,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4				Program Perekonimian dan Pembangunan	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25 Persen	25%	8 Persen	8,00%
					Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100 Persen	50 Persen	100 Persen	50 Persen	17%	17 Persen	17,00%
					Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	2,45 Persen	2,45 Persen	2,45 Persen	2,45 Persen	30%	2 Persen	81,63%
4	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50%	60 Persen	56%
4	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	6 Dokumen	50,00%
4	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	4 Laporan	66,67%
4	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	6 Dokumen	50,00%
4	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data pembangunan yang dilaporkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25 Persen	25%	17 Persen	42%
4	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	25%	15 dokumen	41,67%
4	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	15 laporan	41,67%
4 2 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	67%	56 Persen	56%
4 2 03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	18 dokumen	50,00%
4 2 03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	18 dokumen	50,00%
4 2 03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	900 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	600 Orang	66,67%
4 2 04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25 Persen	22%	25 Persen	41%
4 2 04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	7 Laporan	44%	23 Laporan	47,92%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4 2 04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25 Persen	22%	25 Persen	41%
4 2 04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	48 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	7 Laporan	44%	23 Laporan	47,92%
4 2 04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 0	0%	1 Dokumen	33,33%

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ANDI RAHMAT SALEH, SE, M.Si
NIP. 197811162003121005

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, secara umum isu-isu penting yang dihadapi oleh sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni:

1. Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
2. Reformasi Birokrasi, dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah belum optimal;
3. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan Sumber Daya Aparatur yang baik.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perangkat daerah tentu tidak lepas dari tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam hal ini adalah tingginya ekspektasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik, apalagi di era serba teknologi seperti sekarang ini. Adapun peluang yang

bisa dimanfaatkan oleh Sekretariat Daerah adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja untuk selalu mendukung pelaksanaan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Disamping itu dengan adanya akses internet yang baik juga sangat membantu kegiatan pelayanan pada Sekretariat Daerah sehari-hari.

Dengan demikian maka untuk memaksimalkan pelayanan pada Sekretariat Daerah maka perlu adanya penambahan personil yang berstatus ASN dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas ASN lingkup Sekretariat Daerah, sehingga mampu untuk menjabarkan program-program dan kegiatan dengan baik, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada fungsional pelaksana harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, apalagi dengan ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan bagi ASN diharapkan juga menjadi motivasi dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja tahunan ini dapat berubah dengan pertimbangan berbagai faktor namun tetap tidak keluar dari koridor utama yaitu mendukung pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yaitu **"KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA"** dengan Misi yang terkait yaitu misi 6 ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital"***

Adapun perubahan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yang pembiayaannya bersumber dari dana DAU APBD Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada pada Sekretariat Daerah terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan dan 64 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota- yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas kunjungan tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan asset tetap lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi dengan Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian Umum dan Protokol, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

2. Program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi kegiatan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan :

- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Empat bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah, selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Program Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal, Untuk Bagian Hukum dengan indikator program Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan dihasilkan sedangkan Bagian Kerjasama dengan indikator Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan.

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari Tiga bagian yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Indikator program Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan untuk bagian Administrasi Pembangunan dengan indikator Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan indikator Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu.

Adapun rumusan rencana kerja dan Pendanaan perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 3. 1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SEKRETARIAT DAERAH									
4	2	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	42.003.478.000				40.766.361.000	
								29.315.623.800				27.923.278.300	
4	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	23.114.000			100 Persen	18.801.000	
4	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 dokumen	5.007.000		Pangkajene Sidenrang	2 dokumen	3.776.000	
4	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	2.586.000		Pangkajene Sidenrang	1 dokumen	1.736.000	
4	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	2.434.000		Pangkajene Sidenrang	1 dokumen	2.212.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	3.020.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	2.170.000	
4	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	3.437.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	2.587.000	
4	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 laporan	4.464.000		Pangkajene Sidenreng	2 laporan	4.464.000	
4	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 laporan	2.166.000		Pangkajene Sidenreng	2 laporan	1.856.000	
4	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	11.275.615.650		Pangkajene Sidenreng		11.236.679.050	
4	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1498 Orang/bulan	11.182.744.650		Pangkajene Sidenreng	1498 Orang/bulan	11.182.744.650	
4	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	360 dokumen	22.622.000		Pangkajene Sidenreng	360 dokumen	17.259.400	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	24 dokumen	65.433.000		Pangkajene Sidenreng	12 dokumen	32.136.000	
4	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 laporan	2.104.000		Pangkajene Sidenreng	1 laporan	1.827.000	
4	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	18 laporan	2.712.000		Pangkajene Sidenreng	18 laporan	2.712.000	
4	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	2.590.000			100 Persen	2.590.000	
4	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	2.590.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	2.590.000	
4	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	30.000.000					
4	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35 Unit	10.000.000		Pangkajene Sidenreng	0 Unit		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025																
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan												
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat							
1					3		4		5		6		7		8		9		10		11	
4	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan h yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	75	Paket	20000000			Pangkajene Sidenreng	0	Paket			-					
4	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	4.487.285.500			Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen			3.721.991.600					
4	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	127.971.000			Pangkajene Sidenreng	12	Paket			127.971.000					
4	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	542.207.000			Pangkajene Sidenreng	12	Paket			570.332.000					
4	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	1.915.474.000			Pangkajene Sidenreng	12	Paket			1.922.688.000					
4	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	352.339.500			Pangkajene Sidenreng	12	laporan			301.341.100					
4	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	20	laporan	50.000.000			Pangkajene Sidenreng	20	laporan			50.000.000					
4	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	270	laporan	1.499.294.000			Pangkajene Sidenreng	135	laporan			749.659.500					
4	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	2.243.371.650			Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen			2.342.284.650					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025											
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat		
1					3	4		5		6	7	8		9		10	11
4	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Kec. Maritenggae	3	Unit		3.981.000		Pangkajene Sidenreng	3	Unit		62.762.000	
4	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset lainnya yang diadakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	71	Unit		2.239.390.650		Pangkajene Sidenreng	71	Unit		2.279.522.650	
4	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen		3.751.865.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen		3.753.561.000	
4	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan		13.995.000		Pangkajene Sidenreng	12	laporan		13.995.000	
4	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan		1.130.070.000		Pangkajene Sidenreng	12	laporan		1.019.766.000	
4	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan		249.000.000		Pangkajene Sidenreng	12	laporan		249.000.000	
4	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan		2.358.800.000		Pangkajene Sidenreng	12	laporan		2.470.800.000	
4	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen		2.970.399.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen		3.423.562.000	
4	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35	Unit		450.640.000		Pangkajene Sidenreng	35	Unit		450.640.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	13 Unit	471.749.000		Pangkajene Sidenreng	13 Unit	471.749.000	
4	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	52 Unit	118.010.000		Pangkajene Sidenreng	52 Unit	118.010.000	
4	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	7 Unit	1.930.000.000		Pangkajene Sidenreng	7 Unit	2.383.163.000	
4	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	1.062.043.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	1.062.043.000	
4	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	28 Orang/Bulan	177.343.000		Pangkajene Sidenreng	28 Orang/Bulan	177.343.000	
4	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	54 Paket	244.700.000		Pangkajene Sidenreng	54 Paket	244.700.000	
4	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	6 Orang	40.000.000		Pangkajene Sidenreng	6 Orang	40.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025										
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	
1					3		4	5		6	7	8	9		10	11
4	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	24	Orang/ Bulan	600.000.000		Pangkajene Sidenreng	24	Orang/ Bulan	600.000.000		
4	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	1.560.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	1.357.500.000		
4	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	840.000.000		Pangkajene Sidenreng	12	Paket	770.000.000		
4	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	480.000.000		Pangkajene Sidenreng	0	Paket	400.000.000		
4	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	240.000.000		Pangkajene Sidenreng	12	Paket	187.500.000		
4	2	13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	409.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	254.026.000		
4	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4	dokumen	299.000.000		Pangkajene Sidenreng	4	dokumen	192.824.300		
4	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	30.000.000		Pangkajene Sidenreng	1	dokumen	16.488.700		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	42.000.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	23.547.000	
4	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 dokumen	38.000.000		Pangkajene Sidenreng	2 dokumen	21.166.000	
4	2	14		<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan</i>	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100% Persen	1.500.340.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100% Persen	750.240.000	
4	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	80 laporan	1.500.340.000		Pangkajene Sidenreng	40 laporan	750.240.000	
4				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100% Persen	240.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100% Persen	149.275.800	
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	90% Persen	11.154.533.700		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	90% Persen	11.603.207.800	
					Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730% dokumen	209.320.500		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730% dokumen	252.354.000	
					Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35 Dokumen	195.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35 Dokumen	104.703.400	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	240.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	149.275.800	
4	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	3 dokumen	60.406.500		Pangkajene Sidenreng	3 dokumen	36.082.000	
4	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	3 dokumen	78.211.500		Pangkajene Sidenreng	3 dokumen	47.090.600	
4	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4 dokumen	101.382.000		Pangkajene Sidenreng	4 dokumen	66.103.200	
4	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	11.154.533.700		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	11.603.207.800	
4	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	96 dokumen	11.125.172.800		Pangkajene Sidenreng	96 dokumen	11.596.271.300	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	11 dokumen	17.600.000		Pangkajene Sidenreng	11 dokumen	3.241.000	
4	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	33 dokumen	11.760.900		Pangkajene Sidenreng	33 dokumen	3.695.500	
4	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	209.320.500		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	252.354.000	
4	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730 dokumen	84.149.000		Pangkajene Sidenreng	730 dokumen	153.911.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025									
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat		
1					3	4	5		6	7	8	9		10	11
4	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	26	Kasus	82.005.000		Pangkajene Sidenreng	26	Kasus	69.028.500	
4	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730	dokumen	43.166.500		Pangkajene Sidenreng	730	dokumen	29.414.500	
4	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	195.000.000,000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	104.703.400,000	
4	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	20	dokumen	75.000.000		Pangkajene Sidenreng	20	MoU	39.526.600	
4	2	04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	15	dokumen	65.000.000		Pangkajene Sidenreng	15	MoU	35.974.600	
4	2	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35	laporan	55.000.000		Pangkajene Sidenreng	35	MoU	29.202.200	
4				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	385.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	345.916.500	
					Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	195.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	135.156.200	
					Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2,45 %	2,45%	309.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2,45 %	2,45%	252.469.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	247.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	203.707.500	
4	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4 Dokumen	175.000.000		Pangkajene Sidenreng	4 Dokumen	160.846.000	
4	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 Laporan	50.000.000		Pangkajene Sidenreng	2 Laporan	30.381.000	
4	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4 Dokumen	22.000.000		Pangkajene Sidenreng	4 Dokumen	12.480.500	
4	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data pembangunan yang dilaporkan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	195.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100 Persen	135.156.200	
4	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	50.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	33.847.000	
4	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	83.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	61.732.500	
4	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	62.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	39.576.700	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025									
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5		6	7	8	9		10	11
4	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	60%	Persen	309.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	60%	Persen	252.469.000	
4	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	dokumen	85.251.000		Pangkajene Sidenreng	12	dokumen	65.529.500	
4	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	dokumen	155.520.000		Pangkajene Sidenreng	12	dokumen	143.193.000	
4	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	300	Orang	68.229.000		Pangkajene Sidenreng	300	Orang	43.746.500	
4	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	138.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	142.209.000	
4	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	16	Laporan	121.500.000	Investor dan Penanaman Modal	Pangkajene Sidenreng	18	Laporan	132.826.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2025							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 Dokumen	16.500.000	Pembina, Penyuluh Pertanian	Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	9.383.000	

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



ANDI RAHMAT SALEH, SE, M.Si
NIP. 197811162003121005

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pada OPD untuk membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD).

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini dirumuskan berdasar hasil analisis kebutuhan dan evaluasi program dan kegiatan berjalan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu upaya penyesuaian program dan Kegiatan tahun 2025 yang masih rendah realisasinya baik itu realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2025

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap



ANDI RAHMAT SALEH, SE, M.Si

Nip. 197811162003121005

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan terkoordinasi secara sistematis dengan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan tahunan dengan arah strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, serta mendukung pencapaian kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Dalam proses penyusunannya, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya berpedoman pada visi, misi, serta program prioritas Kepala Daerah. Penyelarasan ini dimaksudkan agar fungsi-fungsi pendukung DPRD melalui Sekretariat DPRD dapat berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda strategis dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan dalam dokumen ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelayanan administratif dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, termasuk penyesuaian terhadap capaian indikator kinerja, sumber daya, serta kondisi aktual yang berkembang pada awal pelaksanaan periode perencanaan strategis.

Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahun berjalan, terjadinya perubahan asumsi dasar perencanaan, pergeseran prioritas pembangunan daerah, evaluasi terhadap capaian kinerja tahun berjalan, serta

adanya kebutuhan mendesak atau tidak terduga yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi dari pelaksanaan anggaran sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam penyesuaian rencana kerja, maka perlu disusun Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 dan juga merupakan acuan dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 58)

15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat DPRD disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan serta sebagai bentuk respon atas perubahan kebijakan, kebutuhan prioritas, maupun kondisi aktual di lingkungan Sekretariat DPRD. Penyusunan dokumen ini memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**

Renja-P Sekretariat DPRD mengacu pada arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman jangka menengah (5 tahunan). Setiap perubahan yang dilakukan dalam Renja-P tetap berada dalam koridor strategi yang ditetapkan dalam Renstra.

2. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan**

Renja-P ini disusun sebagai bagian integral dari penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja-P Sekretariat DPRD harus selaras dan mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKPD Perubahan.

3. **KUA dan PPAS Perubahan**

Rencana kerja ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Oleh karena itu, Renja-P harus disusun dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA serta sasaran prioritas dalam PPAS.

4. **Dokumen Penganggaran (R-APBD Perubahan)**

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja-P Sekretariat DPRD menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD-P). Dengan demikian, konsistensi substansi antara Renja-P dan R-APBD Perubahan harus dijaga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

5. Peraturan Perundang-undangan

Renja-P disusun dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Bappenas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Dan regulasi lain yang relevan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perubahan yang dilakukan dalam Renja tahun berjalan juga didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya (Renja Awal), agar tetap relevan dengan dinamika perkembangan kebijakan, kondisi aktual di lapangan, serta kebutuhan strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Dokumen ini menjadi landasan perencanaan operasional yang bersifat responsif terhadap perubahan asumsi, prioritas pembangunan, serta capaian kinerja tahun berjalan serta melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah:

1. Menyesuaikan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan kebijakan terbaru serta kondisi dan kebutuhan riil yang berkembang pada tahun berjalan.
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, Renstra, RKPD Perubahan, dan KUA-PPAS Perubahan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan, dengan menyesuaikan capaian target dan alokasi sumber daya berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan.

4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal, melalui penyediaan dukungan administratif dan fasilitasi yang tepat sasaran, adaptif, dan akuntabel.
5. Menjadi pedoman penyusunan RKA Perubahan, sebagai dasar perhitungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 .

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2025 -2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Sekretariat DPRD Tahun 2025 , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk penambahan program karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan I Tahun 2025 , meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 hingga Triwulan I menunjukkan progres pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan administratif yang mempengaruhi capaian kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah berjalan

sesuai rencana, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun berjalan.

Dari capaian kinerja Triwulan I Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dialokasikan pada triwulan I, pelaksanaannya tertunda pada triwulan III dan atau IV. Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap s/d Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN SIDENRENG TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025				
											I		II		III		IV								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi			
											9		10		11		12								13=9+10+11+12			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatkan fasilitas terhadap tugas dan fungsi DPRD			Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu (%)	100	27,983,024,091	100	0	100	7,111,123,600																		

		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Disahkan Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD (%)	100,00	27.983.024.091	0,00	0	100,00	7.111.123.600							0,00	4,399,412,561						
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya (%)	100	1.993.544.000	0,00	0	100	235.012.500	0 %	0					0,00 %	4,350,000	0,00 %	4.350.000	0,00 %	0,22 %	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01.00.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	313,930,000	0	0	1	24,885,500	0	0					0	4,350,000	0	4,350,000	0,00 %	1,39 %	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.00.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	249,408,000	0	0	1	59,900,500	0	0					0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

		4.02.02.2.01.00.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12	1,420,206,000	0	0	4	150,226,500	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.00.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	10,000,000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana (%)	100	651.000.000	0,00%	0	100	133.725.500	0%	0							0,00%	0	5,56%	0	5,56%	0,00%	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.00.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	58,500,000	0	0	1	15,588,500	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.00.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	58,500,000	0	0	1	15,546,000	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	139,500,000	0	0	1	29,139,500	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3	142,500,000	0	0	1	37,927,000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3	58,500,000	0	0	1	0	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	193,500,000	0	0	1	35,524,500	0	0						1	0	1	0	33,33%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	443.211.000	0,00%	0	100	127.496.600	0%	0						0,00%	40,550,000	4,17%	40.550.000	4,17%	9,15%	Sekretariat DPRD	

		4.02.02. 2.03.00 01	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Pemerintah an dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	50,127 ,000	0	0	1	58,825 ,100	1	0						1	2,250, 000	1	2,250, 000	33,3 3%	4,4 9%	Sekre tariat DPR D	Terc apai
		4.02.02. 2.03.00 02	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Infrastrukt ur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	32,625 ,000	0	0	1	8,700, 000	0	0						0	6,875, 000	0	6,875, 000	0,00 %	21, 07 %	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai
		4.02.02. 2.03.00 03	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Kesejahtera an Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	52,686 ,000	0	0	1	11,492 ,500	0	0						0	9,950, 000	0	9,950, 000	0,00 %	18, 89 %	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai
		4.02.02. 2.03.00 04	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Perekonomi an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	32,625 ,000	0	0	1	0	0	0						0	0	0	0	0,00 %	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Tida k Terl aksa na

		4.02.02. 2.03.00 05	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	32,400 ,000	0	0	1	0	0	0						0	0	0	0	0,00 %	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Tida k Terl aksa na
		4.02.02. 2.03.00 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3	30,000 ,000	0	0	1	7,935, 000	0	0						0	0	0	0	0,00 %	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai
		4.02.02. 2.03.00 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3	52,500 ,000	0	0	1	13,936 ,000	0	0						0	0	0	0	0,00 %	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai
		4.02.02. 2.03.00 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	3	160,24 8,000	0	0	1	26,608 ,000	0	0						0	21,475 ,000	0	21,47 5,000	0,00 %	13, 40 %	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai

		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya (%)	100	8.348.563,000	0,000	0	100	979.081.000	0% %	0						0,00%	249,500,000	10,00%	249.500.000	10,00%	2,99%	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.00.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	175,000,000	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
		4.02.02.2.04.00.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12	2,100,000,000	0	0	4	700,000,000	0	0						2	213,500,000	2	213,500,000	16,67%	10,17%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.04.00.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	21	378,000,000	0	0	7	126,000,000	0	0						7	36,000,000	7	36,000,000	33,33%	9,52%	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.04.00.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3	112,485,000	0	0	1	14,008,000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.04.00.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6	5,583,078,000	0	0	2	139,073,000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (%)	100	5.713.712.000	0,000	0	100	96.050.000	0% %	0						0,00%	1,500,000	2,78%	1.500.000	2,78%	0,03%	Sekretariat DPRD	

		4.02.02.2.05.00.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	36	941,894,000	0	0	12	96,050,000	0	0						3	1,500,000	3	1,500,000	8,33%	0,16%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.05.00.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	315	45,000,000	0	0	105	0	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
		4.02.02.2.05.00.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	9	4,726,818,000	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik yang difasilitasi (%)	100	10.000.000	0,00%	0	100	0	0%	0%						0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.06.00.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	10,000,000	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana (%)	100	10.822.994.091	0,00%	0	99	5.539.758.000	0%	2,320,967,170						0,00%	4,103,512,561	16,67%	4.103.512.561	16,84%	37,91%	Sekretariat DPRD	

		4.02.02.2.08.00.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36	10,822,994,091	0	0	12	5,539,758,000	3	2,320,967,170						6	4,103,512,561	6	4,103,512,561	16,67%	37,91%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
2	Meningkatkan Tata Kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai SAKIP (Predikat)	B B	59,055,748,894	C	0	B B	##### ##### ##															
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	59.055.748.894	0,00	0	100,00	24.045.150.400								0,00	10,309,357,718						
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	90.627.000	0,00	0	100	13.928.000	0% %	0						0,00% %	5,586,308	5,56%	5.586.308	5,56% %	6,16% %	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	18,000,000	0	0	1	2,307,000	0	0						0	1,962,500	0	1,962,500	0,00% %	10,90% %	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

		4.02.01. 2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	19,602 ,000	0	0	1	2,827, 000	0	0						0	0	0	0	0,00 %	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai
		4.02.01. 2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	19,500 ,000	0	0	1	2,734, 000	0	0						0	0	0	0	0,00 %	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai
		4.02.01. 2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	7,800, 000	0	0	1	1,600, 000	0	0						0	1,434, 000	0	1,434, 000	0,00 %	18, 38 %	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai

		4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	8,505,000	0	0	1	2,268,000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	17,220,000	0	0	1	2,192,000	1	0						1	2,189,808	1	2,189,808	33,33%	12,72%	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	8.489.083,894	0,00	0	100	2.394.197,900	0%	568,121,373						0,00%	1,180,074,141	53,57%	1.180.074.141	53,57%	13,90%	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	8,445,673,894	0	0	143	2,382,559,900	72	568,121,373						124	1,175,543,541	124	1,175,543,541	147,62%	13,92%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

		4.02.01. 2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	24,000 ,000	0	0	12	6,462, 000	3	0						6	4,530, 600	6	4,530, 600	16,6 7%	18, 88 %	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai
		4.02.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	6,000, 000	0	0	1	1,600, 000	1	0						1	0	1	0	33,3 3%	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Terc apai
		4.02.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semester an SKPD	36	13,410 ,000	0	0	12	3,576, 000	3	0						6	0	6	0	16,6 7%	0,0 0%	Sekre tariat DPR D	Belu m Terc apai

		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	450.000.000	0,000	0	99	80.000.000	0% %	0						0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	450,000.000	0	0	15	80,000.000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	1.627.056.000	0,000	0	100	336.324.000	0% %	0						0,00%	76,849.040	10,56%	76.849.040	10,56%	4,72%	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	171,162.000	0	0	12	38,874.000	3	0						6	8,518.140	6	8,518.140	16,67%	4,98%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	210,000.000	0	0	4	42,000.000	0	0						1	0	1	0	2,78%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	150,000.000	0	0	4	23,258.000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

		4.02.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	256,848,000	0	0	12	31,472,000	3	0						6	10,585,400	6	10,585,400	16,67%	4,12%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.06.00.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	839,046,000	0	0	12	200,720,000	3	0						6	57,745,500	6	57,745,500	16,67%	6,88%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (%)	100	45.000.000	0,000	0	100	0	0%	0%						0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	45,000,000	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	3.671.469.000	0,000	0	100	1.002.922.500	0%	139,037,630						0,00%	336,912,399	16,67%	336.912.399	16,67%	9,18%	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	60,000,000	0	0	12	10,005,000	3	5,000,000						6	6,000,000	6	6,000,000	16,67%	10,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

		4.02.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	1,133,439,000	0	0	36	461,320,000	9	77,637,630						18	191,124,399	18	191,124,399	16,67%	16,86%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	228,030,000	0	0	12	75,890,000	0	0						6	0	6	0	16,67%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	2,250,000,000	0	0	12	455,707,500	3	56,400,000						6	139,788,000	6	139,788,000	16,67%	6,21%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.614.756.000	0,00	0	100	1.190.326.000	0%	21,618,100						0,00%	49,747,360	11,54%	49.747.360	11,54%	3,08%	Sekretariat DPRD	

		4.02.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	136,980,000	0	0	26	8,844,000	0	0						12	2,049,434	12	2,049,434	15,38%	1,50%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	673,440,000	0	0	26	271,626,000	3	21,618,100						15	47,697,926	15	47,697,926	19,23%	7,08%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	12	804,336,000	0	0	4	909,856,000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	100	39.755.757.000	0,00	0	100	18.036.254.000	0%	4,100,149,855						0,00%	8,344,063,030	22,22%	8.344.063.030	22,22%	20,99%	Sekretariat DPRD	

		4.02.01.2.15.00.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	105	38,464,257,000	0	0	35	##### ##### ##	35	3,896,149,855						35	7,955,263,030	35	7,955,263,030	33,33%	20,68%	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.01.2.15.00.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	15	682,500,000	0	0	5	427,000,000	0	0						0	184,800,000	0	184,800,000	0,00%	27,08%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.15.00.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	105	609,000,000	0	0	35	210,000,000	35	204,000,000						35	204,000,000	35	204,000,000	33,33%	33,50%	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD (%)	100	3.312.000.000	0,00	0	100	991.198.000	0 % %	154,463,900						0,00 %	316,125,440	8,33%	316.125.440	8,33 %	9,54%	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.16.00.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36	450,000,000	0	0	12	61,198,000	3	0						3	8,203,140	3	8,203,140	8,33 %	1,82%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.16.00.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	108	2,862,000,000	0	0	36	930,000,000	9	154,463,900						9	307,922,300	9	307,922,300	8,33 %	10,76 %	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
Total Target (RP)									31,156,274,000			Total Realisasi (RP)							14,708,770,279						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		32,09	47,21						
Predikat kinerja																		S	SR						

	R		
--	---	--	--

II.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara umum, dari total program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2025, capaian pelaksanaan hingga akhir Maret (Triwulan I) adalah sebagai berikut:

- **Jumlah program:** 2 program
- **Jumlah kegiatan:** 15 kegiatan
- **Kegiatan yang telah berjalan:** 5 kegiatan (33,33%)
- **Kegiatan yang belum berjalan:** 10 kegiatan (66,67%)
- **Capaian realisasi keuangan:** ± 18% dari total pagu anggaran
- **Capaian realisasi fisik:** ± 22% dari total target fisik tahun 2025

2. Program Unggulan yang Telah Dilaksanakan

Program utama dalam sasaran ini adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diukur melalui persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu, dengan target Renstra OPD 2024-2026 sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp27.983.024.091. Realisasi anggaran pada Semester 1 2025 mencapai Rp4.399.412.561 dengan tingkat capaian kinerja bervariasi antar subkegiatan.

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD: Target kinerja 100% dengan anggaran Rp1.993.544.000. Realisasi kinerja pada triwulan I mencapai 100% untuk beberapa indikator, seperti penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah (1 dokumen dari target 3) dengan realisasi anggaran Rp4.350.000 (0,22%).
- Pembahasan Kebijakan Anggaran : Target kinerja 100% dengan anggaran Rp651.000.000. Realisasi anggaran Rp5.560.000 (0,85%) dengan capaian kinerja rendah, misalnya pembahasan KUA dan PPAS hanya mencapai 1 dokumen dari target 3 (0%).
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (4.02.02.2.03): Target kinerja 100% dengan anggaran Rp443.211.000. Realisasi anggaran Rp40.550.000 (9,15%), dengan capaian kinerja bervariasi, seperti pengawasan bidang pemerintahan dan hukum mencapai 33,33%, sementara bidang perekonomian dan sumber daya alam tidak terlaksana.

- Peningkatan Kapasitas DPRD (4.02.02.2.04): Realisasi anggaran Rp249.500.000 (2,99%) dari target Rp8.348.563.000. Subkegiatan penyediaan tenaga ahli fraksi mencapai 33,33% (7 tenaga ahli dari 21).
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (4.02.02.2.05): Realisasi anggaran Rp1.500.000 (0,03%) dari Rp5.713.712.000, dengan capaian kinerja 2,78%. Kunjungan kerja dalam daerah mencapai 8,33%, tetapi pelaksanaan reses tidak terlaksana.
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (4.02.02.2.06): Tidak ada realisasi anggaran maupun kinerja (0%) dari target Rp10.000.000.
- Fasilitasi Tugas DPRD (4.02.02.2.08): Realisasi anggaran Rp4.103.512.561 (37,91%) dari Rp10.822.994.091, dengan capaian kinerja 16,84%. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD mencapai 16,67% (6 dokumen dari 36).

3. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan I antara lain:

- Keterlambatan pencairan anggaran akibat revisi awal DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu agenda resmi DPRD.
- Penyesuaian kebutuhan kegiatan dengan kondisi aktual yang memerlukan revisi perencanaan.

4. Tindak Lanjut

- Koordinasi lebih intensif dengan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan agenda legislatif.

II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Program kegiatan yang memenuhi target kinerja di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD

II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2025 dan di akhir triwulan I tahun 2025 tidak ada yang melebihi target kinerja. Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah.

II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan I antara lain:

- Keterlambatan pencairan anggaran akibat revisi awal DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu agenda resmi DPRD.
- Penyesuaian kebutuhan kegiatan dengan kondisi aktual yang memerlukan revisi perencanaan.

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Terdapat kegiatan yang capaian kinerjanya nol dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
- b. Penyerapan anggaran tidak seoptimal capaian kinerja dikarenakan nilai realisasi belanja lebih kecil dari pagu anggaran dalam DPA (pelaksanaan kegiatan berdasarkan riil cost)

II.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

Sebagai bentuk respons terhadap hasil evaluasi, beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi:

- Penyesuaian jadwal dan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam Renja-P agar lebih realistis dan responsif.
- Percepatan proses administrasi pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pendukung DPRD.

II. 2 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

II.2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap memiliki fungsi utama dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kinerja pelayanan Sekretariat sangat menentukan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Analisa ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama periode tahun berjalan, khususnya hingga Triwulan I Tahun 2025, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari indikator kinerja;

- Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD

II.2.2 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Kab. Sidrap

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung kerja kelembagaan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program dan kegiatan. Isu-isu tersebut mencerminkan tantangan internal maupun eksternal yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pelayanan administrasi, teknis, dan operasional kepada DPRD.

1. Dinamika Agenda dan Fungsi Legislasi DPRD

Fungsi DPRD yang bersifat dinamis—terutama dalam aspek legislasi, penganggaran, dan pengawasan—membutuhkan dukungan Sekretariat yang fleksibel dan responsif. Ketidakterdugaan perubahan jadwal sidang, kunjungan kerja, dan kegiatan alat kelengkapan menuntut kesiapan operasional dan administratif yang tinggi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih terdapat kesenjangan kompetensi teknis dan administratif pada sebagian aparatur Sekretariat DPRD, khususnya dalam bidang perundang-undangan, kehumasan, pengelolaan informasi publik, dan pengelolaan sistem administrasi berbasis elektronik. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem informasi dan digitalisasi pelayanan seperti dokumentasi rapat, penyediaan informasi publik, dan manajemen data legislatif masih belum maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi penting untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan pelayanan kepada publik maupun anggota DPRD.

4. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan OPD lain, terutama dalam penyusunan produk hukum daerah (Ranperda) dan kegiatan pengawasan DPRD, belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses legislasi dan implementasi pengawasan kebijakan publik.

5. Kebutuhan Peningkatan Standar Pelayanan dan Tata Kelola

Standar pelayanan administrasi dan tata kelola kerja internal Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini meliputi penyusunan SOP yang lebih rinci, monitoring kinerja berkala, serta penguatan etika pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

6. Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Penunjang

Beberapa kegiatan penting yang bersifat penunjang, seperti pelatihan SDM, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kualitas fasilitas kelembagaan, sering kali terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran.

II.2.3. Dampak Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sekretariat DPRD berperan strategis sebagai fasilitator kelembagaan legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kelancaran tugas DPRD akan berdampak langsung terhadap:

- Kualitas regulasi daerah yang mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,
- Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah,
- Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam perwujudan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD yang disusun secara responsif terhadap dinamika dan kebutuhan DPRD berkontribusi terhadap:

- Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas dan tepat sasaran,
- Efektivitas fungsi pengawasan pelaksanaan APBD,
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan daerah,
- Percepatan pencapaian target kinerja strategis daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

II.2.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten Masih terbatasnya pegawai dengan keahlian teknis khusus, seperti di bidang legislasi, perundang-undangan, protokoler, dan kehumasan, berdampak pada efektivitas dukungan Sekretariat terhadap kegiatan DPRD.
2. Fleksibilitas Menyesuaikan Agenda DPRD yang Dinamis Agenda DPRD yang sering berubah secara mendadak (sidang, rapat internal, kunjungan kerja, dan reses) membutuhkan kesiapan layanan yang fleksibel dan cepat dari Sekretariat.
3. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah yang Belum Optimal Kurangnya keselarasan antara Sekretariat DPRD dan OPD teknis dalam penyusunan Ranperda, pembahasan anggaran, dan tindak lanjut pengawasan menyebabkan keterlambatan atau hambatan teknis dalam pelayanan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Maksimal Layanan berbasis digital, seperti sistem dokumentasi rapat, pelaporan kinerja, dan penyebaran informasi publik, masih berjalan secara manual dan belum terintegrasi optimal.
5. Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan Inovasi Layanan Kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas dan modernisasi layanan seringkali belum menjadi prioritas dalam penganggaran.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Adanya kebijakan reformasi birokrasi, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), serta penguatan peran legislatif menjadi dasar kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD.

2. Komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Lembaga Tingginya kebutuhan akan layanan yang cepat, transparan, dan responsif dari DPRD membuka peluang bagi Sekretariat untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara proaktif.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemajuan teknologi memberi peluang besar untuk melakukan modernisasi layanan seperti sistem e-legislasi, digitalisasi dokumen, pengelolaan informasi publik, serta layanan berbasis aplikasi internal.
4. Kerja Sama dan Jejaring Antar Pemerintah Daerah dan DPRD Lainnya Adanya forum-forum komunikasi antar sekretariat DPRD (misalnya melalui asosiasi sekretariat DPRD) dapat menjadi wadah pertukaran praktik terbaik dalam peningkatan mutu pelayanan.
5. Kesadaran Publik terhadap Transparansi Pemerintahan Tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, partisipasi, dan akuntabilitas memberikan motivasi bagi Sekretariat untuk terus berinovasi dalam mendukung keterbukaan lembaga legislatif.

II.2.5. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan kebutuhan strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD secara optimal. Berikut ini merupakan isu-isu penting serta catatan strategis yang menjadi perhatian utama dalam perumusan program dan kegiatan:

A. Isu-Isu Penting

1. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan DPRD sebagai lembaga legislatif memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, khususnya dalam aspek administrasi, dokumentasi, perundang-undangan, dan fasilitasi kegiatan. Hal ini menuntut adanya penguatan peran Sekretariat DPRD secara menyeluruh.
2. Perubahan Agenda dan Dinamika Politik Lokal, Agenda kegiatan DPRD bersifat dinamis dan erat kaitannya dengan perkembangan politik daerah. Fleksibilitas dan responsivitas program Sekretariat menjadi krusial agar mampu mengikuti ritme kerja legislatif.
3. Kebutuhan Digitalisasi Pelayanan dan Kearsipan. Dalam era transformasi digital, Sekretariat DPRD dituntut untuk beradaptasi melalui pengembangan layanan berbasis teknologi, seperti sistem dokumentasi rapat, e-arsip, dan manajemen informasi publik.

4. Peningkatan Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi publik dari DPRD semakin tinggi. Sekretariat harus mendukung penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan terbuka.
5. Kesenjangan Kompetensi SDM Internal. Masih adanya gap kapasitas SDM dalam menjalankan tugas-tugas teknis legislatif, terutama dalam bidang legislasi, protokoler, humas, serta pengelolaan media dan data.

B. Catatan Strategis

1. Sinkronisasi Program dengan Agenda DPRD dan Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD perlu disusun dengan mengacu pada agenda kerja DPRD dan mendukung sinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam RPJMD dan RKPD.
2. Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Output Berkualitas. Pemilihan kegiatan harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran dan menjamin bahwa setiap program memiliki output dan outcome yang jelas dan berdampak langsung terhadap kelancaran fungsi DPRD.
3. Penekanan pada Inovasi Pelayanan Publik dan Dukungan Legislasi. Kegiatan diarahkan pada pengembangan model pelayanan baru yang mendukung percepatan penyusunan produk hukum daerah, penyebarluasan informasi legislatif, serta layanan berbasis digital.
4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Pentingnya membangun sistem pelaporan dan evaluasi internal untuk mengukur capaian kinerja secara berkala dan sebagai dasar perbaikan kebijakan pelayanan ke depan.
5. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan. Diperlukan peningkatan jejaring kerja sama dengan OPD teknis, instansi vertikal, serta lembaga legislatif lainnya untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam mendukung DPRD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki Program Rutin dan Program Pendukung. Program Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan terbagi dalam 10 kegiatan, Program. Untuk Program diluar program rutin yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan /SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN	
			Lokasi	Targ et Capa ian Kiner ja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompo k Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelomp ok Penerim a Manfaa t
	SEKRETARIAT DPRD					31.156.274.000				Persen	31.156.274.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100	Persen	7.086.109.600			100	Persen	7.086.109.600	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya	Pangk ajene	100	Persen	234.998.500		Pangka jene	100	Dok	234.998.500	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pangk ajene	1	Dok	24.885.500		Pangka jene	1	Dok	24.885.500	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pangk ajene	1	Dok	59.900.500		Pangka jene	1	Dok	59.900.500	

4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Pangkajene	4	Dok	150.212.500		Pangkajene	4	Dok	150.212.500	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun	Pangkajene	1	Dok	0		Pangkajene	1	Dok	0	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana		100	Persen	133.725.500		Pangkajene	100	Persen	133.725.500	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pangkajene	1	Dok	15.588.500		Pangkajene	1	Dok	15.588.500	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Pangkajene	1	Dok	15.546.000		Pangkajene	1	Dok	15.546.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pangkajene	1	Dok	29.139.500		Pangkajene	1	Dok	29.139.500	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pangkajene	1	Dok	37.927.000		Pangkajene	1	Dok	37.927.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	Pangkajene	1	Dok	-		Pangkajene	1	Dok	-	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pangkajene	1	Dok	35.524.500		Pangkajene	1	Dok	35.524.500	

4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana		100	Persen	127.496.600		Pangkajene	100	Persen	127.496.600	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pangkajene	1	Laporan	58.825.100		Pangkajene	1	Laporan	58.825.100	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pangkajene	1	Laporan	8.700.000		Pangkajene	1	Laporan	8.700.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pangkajene	1	Laporan	11.492.500		Pangkajene	1	Laporan	11.492.500	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pangkajene	1	Laporan	-		Pangkajene	1	Laporan	-	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pangkajene	1	Laporan	-		Pangkajene	1	Laporan	-	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pangkajene	1	Laporan	7.935.000		Pangkajene	1	Laporan	7.935.000	

4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	1	Persen	13.936.000		Pangkajene	1	Persen	13.936.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	1	Dok	26.608.000		Pangkajene	1	Dok	26.608.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya		100	Persen	954.081.000		Pangkajene	100	Persen	954.081.000	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	Pangkajene	1	Dok	-		Pangkajene	6	Dok	-	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pangkajene	4	Dok	700.000.000		Pangkajene	6	Dok	700.000.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangkajene	4	Dok	114.073.000		Pangkajene	2	Dok	114.073.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	Pangkajene	7	orang	126.000.000		Pangkajene	7	orang	126.000.000	
4.02.02.2.04.04	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Pangkajene	1	Dok	14.008.000		Pangkajene	1	Dok	14.008.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100	Persen	1.861.026.000		Pangkajene	100	Persen	1.861.026.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Pangkajene	12	Laporan	96.050.000		Pangkajene	12	Laporan	96.050.000	

4.02.02.2.05.02	Penyusunan PokokPokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Pangkajene	105	Dok	-		Pangkajene	105	Dok	-	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	Pangkajene	3	Dok	-		Pangkajene	3	Dok	-	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana		100	Persen	-			100	Persen	-	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD	Pangkajene	1	Laporan	-		Pangkajene	1	Laporan	-	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana		100	Persen	5.539.758.000			100	Persen	5.539.758.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	12	Dok	5.539.758.000		Pangkajene	36	Dok	5.539.758.000	
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100	Persen	24.070.164.400			100	Perse n	24.070.164.400	
..01.2.01	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		100	Persen	13.928.000			100	Perse n	13.928.000	
..01.2.01.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	1	Dok	2.307.000		Pangkajene	1	Dok	2.307.000	

..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.827.000		Pangkajene	1	Dok	2.827.000	
..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.734.000		Pangkajene	1	Dok	2.734.000	
..01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	1.600.000		Pangkajene	1	Dok	1.600.000	
..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.268.000		Pangkajene	1	Dok	2.268.000	
..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	1	Laporan	2.192.000		Pangkajene	1	Laporan	2.192.000	
..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Persen	2.394.197.900		Pangkajene	100	Perse n	2.394.197.900	
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pangkajene	28	Orang	2.382.599.500		Pangkajene	28	Orang	2.382.599.500	

..01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	12	Dok	6.462.000		Pangkajene	12	Dok	6.462.000	
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Pangkajene	1	Laporan	1.600.000		Pangkajene	1	Laporan	1.600.000	
..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene	12	Laporan	3.576.000		Pangkajene	12	Laporan	3.576.000	
..01.2.05	XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persen	80.000.000		Pangkajene		Persen	80.000.000	
..01.2.05.11	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	30	orang	80.000.000		Pangkajene	30	orang	80.000.000	
..01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persen	338.288.000		Pangkajene		Persen	338.288.000	
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Pangkajene	12	Paket	20.978.000		Pangkajene	12	Paket	20.978.000	

		bangunan kantor yang disediakan										
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pangkajene	12		42.000.000		Pangkajene	12		42.000.000	
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Pangkajene	12	Paket	23.258.000		Pangkajene	12	Paket	23.258.000	
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pangkajene	12	Laporan	51.332.000		Pangkajene	12	Laporan	51.332.000	
..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	Pangkajene	12	Laporan	200.720.000		Pangkajene	12	Laporan	200.720.000	
..01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100	Persen	15.000.000		Pangkajene	100	Persen	15.000.000	
..01.2.07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	Pangkajene	35	Unit	-		Pangkajene	10	Unit	324.045.000	
..01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah			Persen	1.022.922.500		Pangkajene		Persen	1.022.922.500	
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Pangkajene	12	Laporan	10.005.000		Pangkajene	12	Laporan	10.005.000	
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	Pangkajene	36	Laporan	481.320.000		Pangkajene	36	Laporan	481.320.000	

		daya air dan listrik yang disediakan										
..01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pangkajene	12	Laporan	75.890.000		Pangkajene	12	Laporan	75.890.000	
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Pangkajene	12	Laporan	455.707.500		Pangkajene	12	Laporan	455.707.500	
..01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	1.193.376.000		Pangkajene	100	Persen	1.193.376.000	
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan pereorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pangkajene	26	Unit	8.844.000		Pangkajene	26	Unit	8.844.000	
..01.2.09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Pangkajene	26	Unit	274.676.000		Pangkajene	26	Unit	274.676.000	
	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pangkajene	4	Unit	909.856.000		Pangkajene	4	Unit	909.856.000	

..01.2.15	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100	Persen	18.036.254.000		Pangkajene	100	Person	18.036.254.000	
..01.2.15.01	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Pangkajene	35	Orang/Bulan	17.399.254.000		Pangkajene	35	Orang / Bulan	17.399.254.000	
..01.2.15.02	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Pangkajene	5	Paket	427.000.000		Pangkajene	5	Paket	427.000.000	
..01.2.15.03	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check Up DPRD	Pangkajene	35	Orang	210.000.000		Pangkajene	35	Orang	210.000.000	
..01.2.16	XXX Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD			Persen	991.198.000		Pangkajene		Person	991.198.000	
..01.2.16.03	XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Pangkajene	12	laporan	61.198.000		Pangkajene	12	laporan	61.198.000	
..01.2.16.04	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Pangkajene	36	paket	930.000.000		Pangkajene	36	paket	930.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan, serta kebutuhan yang berkembang di tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penyusunan Renja Perubahan ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap sumber daya yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Sekretariat DPRD dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara umum.

Rencana Kerja Perubahan ini menjadi wujud komitmen Sekretariat DPRD dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas kedinasan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik di tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang, Juli 2025

PIC SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



A. KAIMAL, SH
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19781217 200502 1 003



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Atas limpahan Rahmat dan karuanianya, sehingga dokumen rencana kerja perubahan bapperida tahun 2025 dapat kami susun.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan periode renstra 2024-2026 yang terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkajene Sideneng, 11 Agustus 2025

Plt.KEPALA BAPPERIDA

HERWIN, S.IP, M.Si

NIP. 19850706 200502 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis 2025 – 2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah .

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dilakukan sebagai upaya rasionalisasi anggaran. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk langkah konkrit diantaranya :

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.

7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Program dan kegiatan dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran dan adanya bergeseran belanja pada beberapa kegiatan dan renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

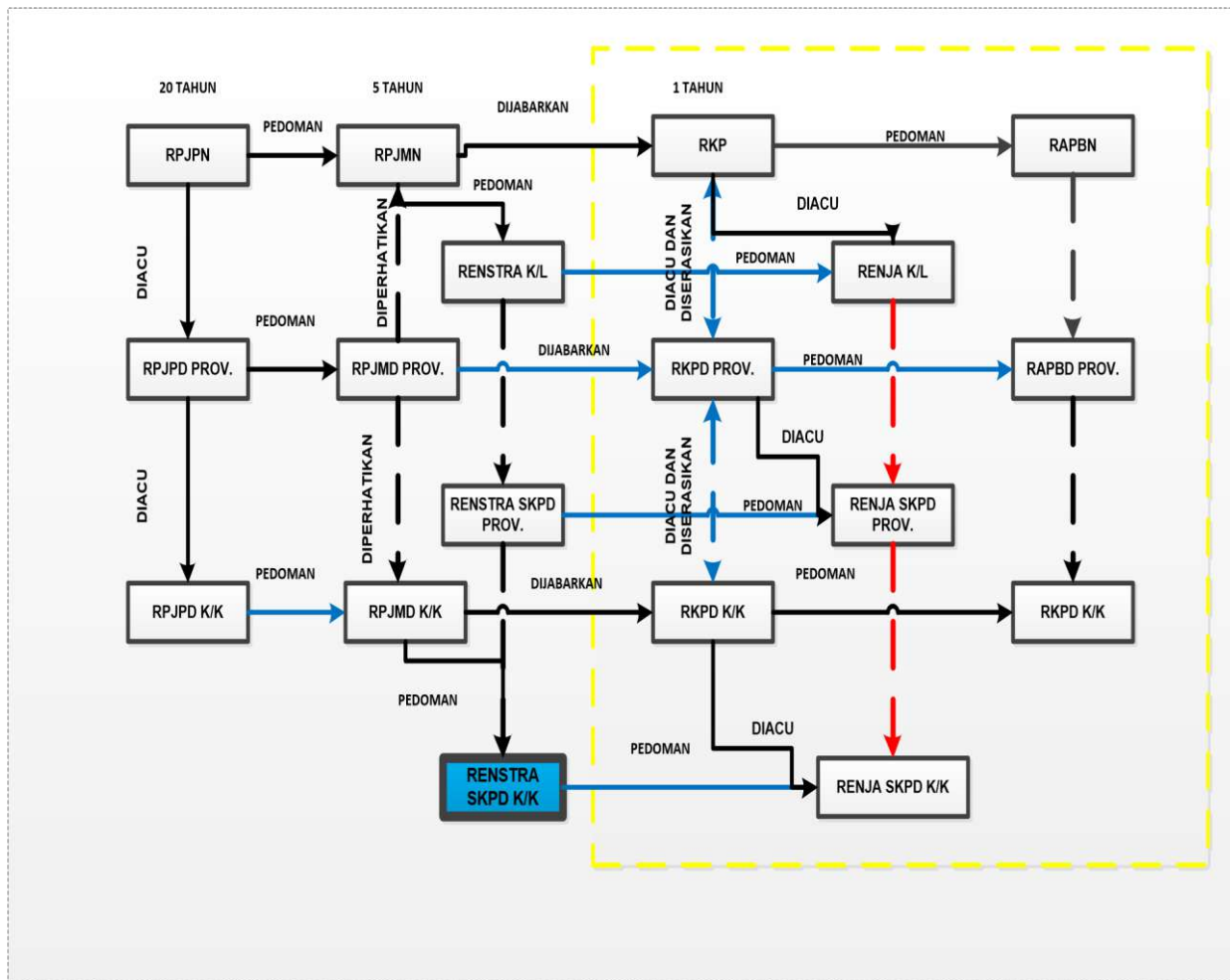
Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan renja OPD
- b. Tahap penyajian rancangan renja OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen RKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah:

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

Rencana Kerja Perubahan Bapperida Tahun 2025

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
- m. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 19);
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 86);

- p. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN

Maksud Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

- Menyesuaikan dengan kondisi terkini. Situasi di lapangan bisa berubah dengan cepat, baik itu dari sisi ekonomi, sosial, atau kebijakan pemerintah. Perubahan Renja dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan yang dijalankan selaras dengan kondisi terbaru.
- Optimalisasi penggunaan sumber daya. Terkadang, alokasi anggaran atau sumber daya lain yang direncanakan di awal tidak efisien atau tidak mencukupi. Perubahan Renja memungkinkan adanya penyesuaian agar sumber daya dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia.
- Mengakomodasi kebijakan baru. Jika ada peraturan atau kebijakan baru dari pemerintah pusat maupun daerah, Renja harus diubah agar sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
- Memperbaiki kesalahan atau kekurangan perencanaan. Selama pelaksanaan, mungkin ditemukan data awal yang kurang akurat, target yang terlalu ambisius, atau jadwal yang tidak realistis. Perubahan Renja berfungsi untuk memperbaiki hal-hal tersebut agar rencana menjadi lebih dapat dicapai.

Tujuan dari penyusunan

- Menyesuaikan dengan kondisi terkini: Situasi di lapangan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, seringkali berubah tak terduga. Perubahan Renja bertujuan untuk mengakomodasi kondisi baru ini agar

program yang dijalankan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang ada.

- Optimalisasi sumber daya: Perubahan Renja memungkinkan peninjauan kembali alokasi anggaran dan sumber daya lainnya. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif pada program-program yang menjadi prioritas, serta menghindari pemborosan.
- Mengintegrasikan kebijakan baru: Jika ada kebijakan atau arahan baru dari pimpinan atau pemerintah yang memiliki dampak pada rencana kerja, perubahan Renja menjadi sarana untuk mengintegrasikan kebijakan tersebut. Dengan demikian, program yang dijalankan akan selalu sejalan dengan arah strategis organisasi.
- Meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi: Dokumen perubahan Renja dapat menjadi acuan baru yang lebih akurat dalam mengukur kinerja. Ini membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih realistis terhadap pencapaian target dan penggunaan anggaran.
- Memperbaiki perencanaan yang kurang tepat: Selama pelaksanaan, sering ditemukan kelemahan dalam perencanaan awal, seperti target yang terlalu ambisius, data yang tidak akurat, atau jadwal yang tidak realistis. Perubahan Renja memungkinkan perbaikan terhadap hal-hal ini, sehingga rencana kerja menjadi lebih praktis dan dapat dicapai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bapperida. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2025.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2025 terdiri dari 4 Program, 15 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 7.371.666.000 dan anggaran setelah perubahan Rp. 6.945.270.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II realisasi belanja 3.145.420.431 (45.29%) dan

Realiasi Fisik (55.00%) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pencapaian Renstra Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra OPD Tahun 2025 - 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2025-2029	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s. d triwulan II Tahun 2025			Perkiraan Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Realisasi Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1) Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9(5=7)	10(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	53	53	53.00	53.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	50	50	50.00	50.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	32	8	4	50	4.00	12.50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	20	20	5	3	60	3.00	15.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	18	4	2	50	2.00	11.11

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100	100	100	50	50	50.00	50.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	492	492	100	50	50	50.00	10.16
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	36	36	100	25	25	25.00	69.44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54	54	100	25	25	25.00	46.30
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	100	100	100	50	50	50.00	50.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	42	12	6	50	6.00	14.29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	100	50	50	50.00	50.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	2	50	2.00	50.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47	4	4	2	50	2.00	4.26
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510	497	180	45	25	45.00	8.82

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	24	1		-	-	0.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	-	12		-	-	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	4	100		-	-	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	100	100	25	25	25.00	25.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1242	414	414	40	10	40.00	3.22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	25	3.00	8.33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	42	42	12	3	25	3.00	7.14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	100	15	15	15.00	15.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	15	100	3	3	3.00	6.67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	100		-	-	0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	12	100		-	-	0.00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	100	100	100	30	30	30.00	30.00
		Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100	100	100	25	25	25.00	25.00

		Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100	100	100	25	25	25.00	25.00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100	100	100	30	30	30.00	30.00
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	15	100	3	1	33	1.00	6.67
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	9	100	3	2	67	2.00	22.22
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6	100	1	1	100	1.00	16.67
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	100	1	1	100	1.00	33.33
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3	100	1	1	100	1.00	33.33
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4353	4,350	1,451	1,451	100	1,451.00	33.33
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	9	100	3	2	67	2.00	22.22
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	25	50	200	50.00	50.00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	12	100	4	2	50	2.00	16.67

	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	25	50	200	50.00	50.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12	100	4	2	50	2.00	16.67
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	25	50	200	50.00	50.00
		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	25	50	200	50.00	50.00
		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	25	50	200	50.00	50.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	50	50	50.00	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	144	48				-	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	144	48				-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	144	48				-	0.00

Rencana Kerja Perubahan Bapperida Tahun 2025

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	144	48	40	20	50	20.00	13.89
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48	16	16	8	50	8.00	16.67
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48	16				-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48	16	16	8	50	8.00	16.67
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	48	16	8	4	50	4.00	8.33
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	25	50	200	50.00	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48	16	16	8	50	8.00	16.67
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48	16	16	-	-	-	0.00

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48	16	100	50	50	50.00	104.17
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	48	16	100	50	50	50.00	104.17
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24	8	100	50	50	50.00	208.33
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24	8				-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24	8	20	10	50	10.00	41.67
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	24	8				-	0.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	25	50	200	50.00	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60	20	20	10	50	10.00	16.67

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60	20				-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60	20	44	22	50	22.00	36.67
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	36	5	44	22	50	22.00	61.11
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156	52	44	22	50	22.00	14.10
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	156	52	44	22	50	22.00	14.10
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36	44	100	25	25	25.00	69.44
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	36	44	22	11	50	11.00	30.56
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	100	100	100	30	30	30.00	30.00
		Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100	100	100	40	40	40.00	40.00

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100	100	100	30	30	30.00	30.00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3	3	100	15	15	15.00	500.00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3	3	100	20	20	20.00	666.67
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3	2	100		-	-	0.00
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	3	3	100	10	10	10.00	333.33
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3	3	100	10	10	10.00	333.33
	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3	2	100	20	20	20.00	666.67
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100		100	25	25	25.00	25.00

	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0		100		-	-	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100		100	25	25	25.00	0.00
	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0		100		-	-	0.00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100	0	100	25	25	-	0.00
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	0	0	15	30	200	-	0.00
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	0	0	100	25	25	-	0.00

Rencana Kerja Perubahan Bapperida Tahun 2025

Pada tabel evaluasi hasil renja tahun 2025 s.d Triwulan I menggambarkan target kinerja renstra.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sidenreng Rappang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra OPD Tahun 2025 - 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s. d triwulan II Tahun 2025			Perkiraan Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Realisasi Tingkat Realisasi(%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1) Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9(5=7)	10(19/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100		100	56.00	56.00	56.00	56.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100		100	86.00	86.00	86.00	86.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32		8	4	50.00	4.00	12.50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15		5	3	60.00	3.00	20.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18		4	2	50.00	2.00	11.11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		100	50	50.00	50.00	50.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	492		492	246	50.00		0.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	42		12	6	50.00	6.00	14.29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42		12	6	50.00	6.00	14.29

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36		12	6	50.00	6.00	16.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100		100	50	50.00	50.00	50.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20		4	2	50.00	2.00	10.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20		4	2	50.00	2.00	10.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510		180	45	25.00	45.00	8.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4		10	0	-	-	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30		1	0	-	-	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100		100	50	50.00	50.00	50.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540		130	45	34.62	45.00	8.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	6.00	50.00	6.00	16.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	6.00	50.00	6.00	16.67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45		15	5.00	33.33	5.00	11.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4		1		-	-	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36		12	5	41.67	5.00	13.89
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	100		100	60.00	60.00	60.00	60.00
	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100		100	60	60.00	60.00	60.00
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	15		3	2	66.67	2.00	13.33
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	10		3	2.00	66.67	2.00	20.00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7		1	1.00	100.00	1.00	14.29
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4		1	1	100.00	1.00	25.00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4		1	1	100.00	1.00	25.00
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5,600		1,451	1,451	100.00	1,451.00	25.91
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	9		3	2	66.67	2.00	22.22
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100		50	50	100.00	50.00	50.00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	12		4	2	50.00	2.00	16.67

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100		50	50	100.00	50.00	50.00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12		4	2	50.00	2.00	16.67
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	120		-	-	-	-	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	120		-	-	-	-	0.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12				-	-	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	120		40	20	50.00	20.00	16.67
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132		16	8	50.00	8.00	6.06

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	132				-	-	0.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	132				-	-	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	132		16	8	50.00	8.00	6.06
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72		16	8	50.00	8.00	11.11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72		0		-	-	0.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72		0	-	-	-	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	72		0	0	-	-	0.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72		16	8	50.00	8.00	11.11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	72		0	0	-	-	0.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	72		0	0	-	-	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	72		0	0	-	-	0.00

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36		0	0	-	-	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	36		0	0	-	-	0.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	36		20	10	50.00	10.00	27.78
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	36		5	3.00	60.00	3.00	8.33
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36		0	-	-	-	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36		0		-	-	0.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36		44	22	50.00	22.00	61.11
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	36		44	22	50.00	22.00	61.11
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	100		100	45.00	45.00	45.00	45.00
	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100		100	40.00	40.00	40.00	40.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100		100	40	30.00	40.00	40.00

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3		1	15	30.00	15.00	500.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3		1	15	15.00	15.00	20.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3		1		-	-	0.00
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	3		1	60.00	10.00	60.00	10.00
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1		1	15.00	15.00	15.00	1500.00
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanna Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3		1	20	15.00	20.00	15.00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100		100	45	45.00	45.00	45.00
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1		1	20	20.00	20.00	2000.00
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1		1	30	30.00	10.00	10.00

2.2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPERIDA

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan
 - c. Subag Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Perencanaan Perekonomian , Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia
 - b. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan

- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
- d. Bidang Perencanaan Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar OPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bapperida.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bapperida dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang

telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa dan kelurahan.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangun

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengkomodasi kebijakankebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah.

Pada table berikut menyajikan Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Di Badan Perencanaan Pembangunanann Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappelitbangda	100%	4,839,539,533		Bappelitbangda	100%	5,280,342,700	ASN/Non ASN Lingkup Bappelitbangda
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	28,000,000			100%	20,012,200	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun		8 Dok	20,000,000			8 Dok	13,214,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun		5 Lap	4,000,000			5 Lap	3,480,700	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun		4 Lap	4,000,000			4 Lap	3,317,500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	4,046,806,900.			100%	4,237,952,200.	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		492/14	4,001,120,900			492/14	4,184,365,200	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	34,000,000			12 Dokumen	41,876,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 Laporan	11,686,000			12 Laporan	11,711,000	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang nilik daerah		100%	4,873,000			100%	3,836,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	4,873,000			12 Laporan	3,836,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100%	160,040,000			100%	103,018,300	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4,040,000			4 Paket	4,036,800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	6,000,000			4 Paket	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 Laporan	150,000,000			180 Laporan	98,981,500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan darah		100%	25,100,000			100%	351,634,500	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	10,100,000			1 Paket	17,152,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 Unit	15,000,000			14 Unit	334,482,500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	387,770,000			100%	411,669,500	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		414 Laporan	5,050,000			414 Laporan	5,040,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	72,720,000			12 Laporan	72,660,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	310,000,000			12 Laporan	333,969,500	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100%	151,649,633			100%	152,220,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	74,354,000			15 Unit	50,542,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50,500,000			1 Unit	26,678,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	26,530,330			30 Unit	75,000,000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD		100%	520,000,000			100%	643,942,800	Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait
	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD		100%	70,000,000			100%	40,532,100	
	Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah		100%	85,000,000			100%	39,644,500	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada		100%	520,000,000			100%	643,942,800	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		3 Dokumen	75,000,000			3 Dokumen	66,018,300	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		3 Dokumen	35,000,000			3 Dokumen	22,619,000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 B Acara	80,000,000			2 B Acara	63,035,000	

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah		1 B Acara	45,000,000			1 B Acara	32,523,500	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 B Acara	70,000,000			1 B Acara	83,500,500	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1451 Usulan	40,000,000			1451 Usulan	28,716,000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 Dokumen	175,000,000			2 Dokumen	347,530,500	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		100%	70,000,000			100%	40,532,100	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		4 Masukan	70,000,000			4 Masukan	40,532,100	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	85,000,000			100%	39,644,500	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	85,000,000			4 Laporan	39,644,500	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	184,500,000			100%	261,453,000	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait

	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		100%	155,000,000			100%	81,826,000	
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	210,500,000			100%	245,585,300	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	184,500,000			100%	261,453,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		48 Dokumen	1,500,000					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		48 Laporan	1,500,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		48 Laporan	1,500,000					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		48 Laporan	35,000,000			40 Laporan	18,873,500	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	50,000,000			16 Dokumen	120,109,500	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	5,000,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	5,000,000				3,682,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	85,000,000			16 Laporan	118,788,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		100%	155,000,000			100%	81,826,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	75,000,000			16 Dokumen	47,103,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		16 Laporan	5,000,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		16 Laporan	5,000,000				4,491,500	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		16 Laporan	5,000,000					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	50,000,000			8 Dokumen	24,533,500	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		8 Laporan	5,000,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		8 Laporan	5,000,000				5,698,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		8 Laporan	5,000,000					
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		100%	210,500,000			100%	245,585,300	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		20 Dokumen	1,500,000					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		20 Laporan	1,500,000					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		20 Laporan	35,000,000			16 Laporan	126,564,500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur		20 Laporan	80,000,000			5 Dokumen	36,993,300	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		52 Dokumen	1,500,000					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		52 Laporan	1,500,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		52 Laporan	25,000,000			44 Laporan	40,831,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan		52 Laporan	64,500,000			22 Dokumen	41,196,500	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah		100%	1,243,435,367			100%	206,455,000	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait
	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi		100%	200,000,000			100%	145,488,600	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah		100%	943,435,367			100%	206,455,000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	25,000,000			1Laporan	110,449,500	-
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 Laporan	250,000,000			1Laporan	67,575,000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan aset daerah,reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan aset daerah,reformasi birokrasi		1 Laporan	250,000,000					
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik		1 Laporan	343,435,367			1Laporan	12,778,000	
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		1 Laporan	50,000,000			1Laporan	15,652,500	
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan		1 Laporan	25,000,000					

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kelitbang bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan perangkat daerah		100%	150,000,000					
Penelitian dan pengembangan pembrdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup		1 Laporan	150,000,000					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbang an bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan perangkat daerah		100%	150,000,000					
Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		1 Laporan	150,000,000					
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah		100%	200,000,000			100%	145,488,600	
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		1 Laporan	35,000,000			1 Laporan	19,617,600	
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		1 Laporan	150,000,000			1 Laporan	125,871,000	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual		1 Laporan	15,000,000					
				7,222,974,900				6,945,270,000	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan

pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bapperida. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**



B K A D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -2027.

Melalui penyusunan Renja Perubahan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Pangkajene Sidenreng,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

SAMBUDDIN, SE

NIP : 197812212002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN LALU	6
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	41
1. Telaahaan terhadap Kebijakan nasional	41
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD	42
3. Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD SIDRAP	46
BAB V PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Renja Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja Perubahan OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perubahan OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, pengendalian, tata cara Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja Perubahan OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perubahan OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perubahan OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perubahan OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitif.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2027. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perubahan OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dan merupakan tahun transisi karena tahun 2024

adalah akhir dari periode Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah 2019–2024 . Renja Perubahan OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. LANDASAN HUKUM

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Keangan Negara
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tantangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 15);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PERUBAHAN ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja Perubahan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien.

Esensi dari sistem RENJA PERUBAHAN bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perwujudan dari Implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang diperoleh.

Penyusunan Renja Perubahan ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

- a. Rencana Kerja (RENJA) PERUBAHAN merupakan sarana bagi Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
- b. Rencana Kerja (RENJA) PERUBAHAN merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA PERUBAHAN tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PERUBAHAN oleh setiap instansi pemerintah.

4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan tentang usul program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- 3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KAB. SIDRAP

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perlu dilaksanakan oleh BKAD sebagai institusi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Evaluasi ini diawali dengan kegiatan pemantauan atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik melalui pengamatan lapangan maupun analisis terhadap laporan triwulan. Evaluasi ini dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berasal dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

Pada umumnya Pencapaian Realisasi keuangan maupun fisik belum mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh beberapa mekanisme dan proses administrasi. Dengan demikian kondisi tersebut berdampak pada pencapaian /realisasi fisik serta keuangan masing-masing kegiatan. Untuk kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah mengalami peningkatan dari tahun –tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan aset daerah.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BKAD yang tercantum dalam Tabel dibawah ini:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target Program / kegiatan Renja Perubahan SKPD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
				Target Renja SKPD tahun 2025	Realisasi Renja SKPD tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
KEUANGAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100%					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	

	RKA-SKPD (Dokumen)									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan		20 Dokumen	20 Laporan	100%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Dokumen	2 Laporan	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	100%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 exemplar	5 exemplar	5 exemplar	5 exemplar		5 exemplar	5 exemplar	100%	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket		30 Paket	30 Paket	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200 Kali	200 Kali	200 Kali	200 Kali		200 Kali	200 Kali	100%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah								100%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar		1000 Lembar	1000 Lembar	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah								100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	46 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit		46 Unit	46 Unit	100%	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit		15 Unit	30 Unit	100%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit		30 Unit	30 Unit	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan									
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah									
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	4 Dokumrn	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		4 Dokumrn	3 Dokumen	100%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100%	

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)								100%	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	

Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100%	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Bulan	2 Bulan	2 Bulan	2 Bulan		2 Bulan	2 Bulan	100%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi									
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	480 Dokumen	480 Dokumen	480 Dokumen	480 Dokumen		480 Dokumen	480 Dokumen	100%	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100%	

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	40%	40%	40%	40%		40%	40%	100%	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali	2 kali	100%	

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	68 Laporan	68 Laporan	68 Laporan	68 Laporan		68 Laporan	68 Laporan	100%	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)									
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	

Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang		12 orang	12 orang	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah									
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi									
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	100%	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)									
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai perangkat Daerah lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, dalam hal ini mengkoordinasi Perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah. Untuk perencanaan jangka panjang adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan tingkat menengah adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan dengan adanya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD disusun berdasarkan hasil Musrembang yang dilakukan secara berjenjang melalui rapat forum Perangkat Daerah dan Musrembang RKPD Kabupaten. Badan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan usulan program kegiatan hasil forum Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga memperlambat proses penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah.

Untuk mengatasinya dilaksanakan Peningkatan Profesionalisme aparatur pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah dan optimalisasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada pelaporan keuangan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil Review terdapat RKPD, untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah antara program dan kegiatan sudah sesuai namun besarnya berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Kode	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN					KEUANGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		23,990,185,713	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		24,191,545,981	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95,660,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95,660,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	16,160,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	16,160,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	15,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	15,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	11,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	11,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	15,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	15,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	11,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	11,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20 Laporan	15,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20 Laporan	15,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	11,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	11,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan		17,967,242,713	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan		18,168,602,981	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12 Bulan	17,901,742,713	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12 Bulan	18,103,102,981	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12 Bulan	10,400,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12 Bulan	10,400,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Dokumen	10,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Dokumen	10,100,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12 Bulan	10,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12 Bulan	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	15,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10,000,000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Orang	5,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Orang	5,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Kegiatan	5,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Kegiatan	5,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah)		677,582,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		677,582,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	7,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	7,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	395,355,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	395,355,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	6,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	6,000,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 exemplar	12,371,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 exemplar	12,371,000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30 Paket	10,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200 Kali	236,855,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200 Kali	236,855,500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)		4,115,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4,115,000,000	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Dokumen	4,100,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Dokumen	4,100,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	15,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		546,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		546,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	1000 Lembar	7,557,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	1000 Lembar	7,557,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	253,443,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	253,443,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	130 Dokumen	50,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	130 Dokumen	50,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	235,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	235,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah		578,201,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Administrasi Pemeliharaan Barang Milik		578,201,000	

								Daerah Daerah (%)			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	46 Unit	313,201,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	46 Unit	313,201,000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	25,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	25,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30 Unit	124,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30 Unit	124,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Dokumen	116,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Dokumen	116,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan		146,082,252,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan		146,082,252,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah		600,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah		600,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	100,637,400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	100,637,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	69,672,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	69,672,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	4 Dokumrn	36,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	4 Dokumrn	36,000,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	45,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	45,000,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	32,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	32,000,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	27,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3 Dokumen	27,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	102,360,600	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	102,360,600	

								APBD (Dokumen)			
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	78,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	78,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2 Dokumen	21,989,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2 Dokumen	21,989,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2 Dokumen	18,536,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2 Dokumen	18,536,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	21,317,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	21,317,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2 Dokumen	21,988,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2 Dokumen	21,988,000	

	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Dokumen	25,500,000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Dokumen	25,500,000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)		195,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)		195,000,000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12 Bulan	50,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12 Bulan	50,000,000	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12 Bulan	25,000,000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12 Bulan	25,000,000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	12 Bulan	25,000,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	12 Bulan	25,000,000	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	12 Bulan	15,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	36 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	36 Laporan	15,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	6 Dokumen	5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	6 Dokumen	5,000,000	

								Optimalisasi Kas (Dokumen)			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15,000,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15,000,000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	12 bulan	10,000,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	12 bulan	10,000,000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Bulan	5,000,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Bulan	5,000,000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi		214,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi		214,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12 bulan	10,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12 bulan	10,000,000	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	480 Dokumen	10,000,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	480 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18 Dokumen	15,000,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18 Dokumen	15,000,000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1 Dokumen	10,000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1 Dokumen	10,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dokumen	50,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dokumen	50,000,000	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1 Dokumen	50,000,000		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1 Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	25 Dokumen	12,000,000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	25 Dokumen	12,000,000	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1 Dokumen	5,000,000		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1 Dokumen	5,000,000	

	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 kali	12,000,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 kali	12,000,000	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	2 Dokumen	10,000,000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	2 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	10,000,000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		145,058,252,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		145,058,252,000	

	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12 Bulan	2,850,000,000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12 Bulan	2,850,000,000	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12 Bulan	128,278,118,000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12 Bulan	128,278,118,000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12 Bulan	5,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12 Bulan	5,000,000,000	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	100%	8,930,134,000	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	100%	8,930,134,000	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)		15,000,000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)		15,000,000	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	

	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	12 Bulan	5,000,000	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	12 Bulan	5,000,000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	12 Bulan	5,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah		460,160,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah		460,160,000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi		460,160,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi		460,160,000	
	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	25,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	25,000,000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	37,588,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	37,588,000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	15,000,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	15,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5 Dokumen	250,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5 Dokumen	250,000,000	
	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	30 Dokumen	10,000,000	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	30 Dokumen	10,000,000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)		75,000,000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Dokumen	75,000,000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	7,500,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	2 Dokumen	7,500,000	

								Daerah (Dokumen)			
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2 Dokumen	7,500,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2 Dokumen	7,500,000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2 Dokumen	7,572,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2 Dokumen	7,572,000	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengevaluasi dan mencermati Program dan Kegiatan dalam Penyusun Rencana Kerja Tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam pelaksanaan musrembang SKPD kami tidak mendapatkan usulan dari kecamatan.

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2025

Badan Keuangan dan aset daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional terkait Tupoksi Badan Keuangan dan aset Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 telah menggariskan bahwa Misi Pembangunan Nasional adalah TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus diemban yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan keperibadian bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi,bermartabat,dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih,efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk melaksanakan melaksanakan misi ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Proritas Nasional yang Meliputi :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikbertakan pada penumbukan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah

3. SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk

4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik,membangun etos kerja

5. Infrastruktur untuk dan Pelayanan Dasar

Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta trasformasi pelayanan publik.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidrap dan strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Darah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah
		Inventarisasi Barang Milik Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah
		Penilaian Barang Milik Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD SIDRAP

Rencana Kerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi yang akan mengarahkan instansinya kepada pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Rencana Kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana. Berikut disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2025 pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	KEUANGAN				142.928.450.270				142.928.610.270
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidrap	100	19.777.740.730	APBD		100	19.777.900.783
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	91.000.000	APBD		100	91.160.000
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidrap	5 Dokumen	21.424.200	APBD		5	21.424.200
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJabatan untuk	Sidrap	3 Dokumen	35.000.000	APBD		3	35.000.000

		Pelaksanaan Pengadaan ASN							
5.02.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	3 Dokumen	23.000.000	APBD		3	23.000.000
5.02.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidrap	3 Dokumen	35.000.000	APBD		3	35.000.000
5.02.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	3 Dokumen	27.500.00	APBD		3	27.500.000
5.02.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	20 Laporan	22.154.000	APBD		20	22.154.000
5.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidrap	2 Laporan	10.000.000	APBD		2	10.000.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan		100	16.313.611.783	APBD		100	16.313.611.783

5.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	812 Orang/Bulan	16.248.111.78 3	APBD		812	16.248.111.78 3
5.02.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	12 Dokumen	15.000.000	APBD		12	15.000.000
5.02.01.2.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sidrap	12 Dokumen	10.400.000	APBD		12	10.400.000
5.02.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	1 Laporan	10.100.000	APBD		1	10.100.000
5.02.01.2.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sidrap	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12	10.000.000
5.02.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	17 Laporan	15.000.000	APBD		17	15.000.000
5.02.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sidrap	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1	5.000.000

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	10.000.000.	APBD		100	10.000.000
5.02.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sidrap	1 Orang	5.000.000	APBD		1	5.000.000
5.02.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sidrap	1 Orang	5.000.000	APBD		1	5.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		94	103.871.000	APBD		94	103.871.000
5.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sidrap	12 Paket	7.000.000	APBD		12	7.000.000
5.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sidrap	12 Paket	8.500.000	APBD		12	8.500.000
5.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sidrap	12 Paket	6.000.000	APBD		12	6.000.000
5.02.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sdrap	5 Dokumen	12.371.000	APBD		5	12.371.000

5.02.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sdrap	30 Paket	10.000.000	APBD			10.000.000.
5.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	200 Laporan	50.000.000	Apbd		200	50.000.000
5.02.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sidrap	12 Dokumen	5.000.000	APBD		12	5.000.000
5.02.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sidrap	12 Dokumen	5.000.000	APBD		12	5.000.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	2.315.000.000	APBD		100	2.315.000.00
5.02.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sidrap	2 Unit	2.300.000.000	APBD		2	2.300.000.000
5.02.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sidrap	1 Unit	15.000.000	APBD		1	15.000.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		88	566.057.000	APBD		88	566.057.000

5.02.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	1000 Laporan	7.557.000	APBD			7.557.000
5.02.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	280.000.000	APBD			280.000.000
5.02.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sidrap	130 Laporan	50.000.000	APBD			50.000.000
5.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	288.000.000	APBD			288.000.000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sidrap	75	378.201.000	APBD		75	378.201.000
5.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sidrap	46 Unit	313.201.000	APBD		46	313.201.000
5.02.01.2.09.00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sidrap	15 Unit	25.000.000	APBD		15	25.000.000
5.02.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	30 Unit	24.000.000	APBD		30	24.000.000

5.02.01.2.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	1 Unit	16.000.000	APBD		1	16.000.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan		100	122.898.137.487	APBD		100	122.898.137.487
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Sidrap	100	600.000.000	APBD		100	600.000.00
5.02.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Sidrap	2 Dokumen	100.637.400	APBD		2	100.637.400
5.02.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Sidrap	2 Dokumen	69.672.00	APBD		2	69.672.00
5.02.02.2.01.00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Sidrap	3 Dokumen	36.000.000	APBD		3	36.000.000
5.02.02.2.01.00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Sidrap	3 Dokumen	45.000.000	APBD		3	45.000.000
5.02.02.2.01.00 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Sidrap	3 Dokumen	32.000.000	APBD		3	32.000.000
5.02.02.2.01.00 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Sidrap	3 Dokumen	27.000.000	APBD		3	27.000.000
5.02.02.2.01.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Sidrap	2 Dokumen	102.360.600	APBD		2	102.360.600

5.02.02.2.01.00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Sidrap	2 Dokumen	78.000.000	APBD		2	78.000.000
5.02.02.2.01.00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Sidrap	2 Dokumen	21.989.000	APBD		2	21.989.000
5.02.02.2.01.00 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Sidrap	2 Dokumen	18.536.000	APBD		2	18.536.000
5.02.02.2.01.00 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Sidrap	2 Dokumen	21.317.000	APBD		2	21.317.000
5.02.02.2.01.00 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Sidrap	2 Dokumen	21.988.000	APBD		2	21.988.000
5.02.02.2.01.00 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sidrap	2 Orang	25.500.000	APBD		2	25.500.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Keuangan		100	195.000.000	APBD		100	195.000.000
5.02.02.2.02.00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Sidrap	12 Dokumen	50.000.000	APBD		12	50.000.000

5.02.02.2.02.00 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sidrap	12 Laporan	25.000.000	APBD		12	25.000.000
5.02.02.2.02.00 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Sidrap	12 Dokumen	25.000.000	APBD		12	25.000.000
5.02.02.2.02.00 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Sidrap	12 Dokumen	15.000.000	APBD		12	15.000.000
5.02.02.2.02.00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Sidrap	12 Dokumen	15.000.000	APBD		12	15.000.000
5.02.02.2.02.00 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sidrap	12 Dokumen	15.000.000	APBD		12	15.000.000
5.02.02.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	umlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	Sidrap	36 Dokumen	15.000.000	APBD		36	15.000.000

		Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
5.02.02.2.02.00 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Sidrap	6 Dokumen	5.000.000	APBD		6	5.000.000
5.02.02.2.02.00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Sidrap	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2	15.000.000
5.02.02.2.02.00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sidrap	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12	10.000.000

5.02.02.2.02.00 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sidrap	2 Orang	5.000.000	APBD		2	5.000.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi		100	214.000.000	APBD		100	214.000.000
5.02.02.2.03.00 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Sidrap	12 Laporan	10.000.000	APBD		12	10.000.000
5.02.02.2.03.00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Sidrap	480 Dokumen	10.000.000	APBD		480	10.000.000
5.02.02.2.03.00 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Sidrap	18 Laporan	15.000.000	APBD		18	15.000.000

5.02.02.2.03.00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Sidrap	1 Laporan	10.000.000	APBD		1	10.000.000
5.02.02.2.03.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Sidrap	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2	50.000.000
5.02.02.2.03.00 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sidrap	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.02.02.2.03.00 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Sidrap	25 Dokumen	12.000.000	APBD		25	12.000.000
5.02.02.2.03.00 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sidrap	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1	5.000.000

5.02.02.2.03.00 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Sidrap	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1	10.000.000
5.02.02.2.03.00 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sidrap	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1	10.000.000
5.02.02.2.03.00 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Sidrap	2 Orang	12.000.000	APBD		2	12.000.000
5.02.02.2.03.00 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Sidrap	2 Laporan	10.000.000	APBD		2	10.000.000
5.02.02.2.03.00 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Sidrap	1 Laporan	10.000.000	APBD		1	10.000.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	121.874.137.487	APBD		100	121.874.137.487
5.02.02.2.04.00 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Sidrap	12 Laporan	2.100.000.000	APBD		12	2.100.000.000

		Pinjaman Pemerintah Daerah							
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sidrap	68 Laporan	108.740.813.000	APBD		68	108.740.813.000
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sidrap	1 Laporan	4.383.324.487	APBD		1	4.383.324.487
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Sidrap	12 Laporan	6.650.000.000	APBD		12	6.650.000.000
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan		100	15.000.000	APBD		100	15.000.000
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Sidrap	12 Dokumen	22.096.000	APBD		12	22.096.000
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sidrap	12 Dokumen	908.936.000	APBD		12	908.936.000
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sidrap	12 Orang	31.096.000	APBD		12	31.096.000

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah		100	252.572.000	APBD		100	252.572.000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi			252.572.000	APBD		100	252.572.000
5.02.03.2.01.00 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Sidrap	2 Dokumen	25.000.000	APBD		2	25.000.000
5.02.03.2.01.00 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sidrap	4 Dokumen	25.000.000	APBD		4	25.000.000
5.02.03.2.01.00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sidrap	12 Laporan	15.000.000	APBD		12	15.000.000
5.02.03.2.01.00 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Sidrap	12 Laporan	15.000.000	APBD		12	15.000.000
5.02.03.2.01.00 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Sidrap	5 Laporan	130.000.000	APBD		5	130.000.000
5.02.03.2.01.00 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Sidrap	30 Laporan	10.000.000	APBD		30	10.000.000
5.02.03.2.01.00 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalia	Sidrap	12 Laporan	10.000.000	APBD		12	10.000.000
5.02.03.2.01.00 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Sidrap	2 Dokumen	7.500.000	APBD		2	7.500.000

	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.00 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sidrap	2 Laporan	7.500.000	APBD		2	7.500.000
5.02.03.2.01.00 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Sidrap	2 Laporan	7.572.000	APBD		2	7.572.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 serta Rancangan Awal Renstra BKAD tahun 2025-2027. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.

Semoga Penyusunan Renja Perubahan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Pangkajene Sidenreng,
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah



SAHABUDDIN, SE

NIP. 19781221 200212 1 005



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Demikian Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	5
II.1 Evaluasi Renja Bapenda sampai dengan triwulan I tahun 2025	5
II.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA	31
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Perubahan renja Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan perubahan renja yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 dan perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Perubahan Renja tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, perubahan renja didasarkan pada hasil evaluasi renja Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA perubahan Badan pendapatan Daerah Kab.Sidrap Tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14)

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan rencana awal dengan kondisi, kebutuhan atau kebijakan terbaru yang mungkin tidak terantisipasi saat renja awal.

b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada keuangan daerah, kebutuhan SKPD serta perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan.
3. Mewujudkan pengelolaan pendapatan yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Renja Sampai Triwulan I Tahun Berkenan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota
 - a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - h. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2. Program pengelolaan pendapatan daerah
 - a. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pencapaian Renstra s/d Triwulan I tahun 2025 dapat di lihat pada tabel II.1

TABEL II.1.a
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPENDA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN								
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah	100 %		100				
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	26.32	100	26.32	0.263	26.32	26.32

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dok	1	4	1	25	1	16.67
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6 Lap.	4	15	4	27	4	66.67
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	27.56	100	27.56	27.56%	28	27.56
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3,204 Org/Bulan	263	952	263	28	263	8.21
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3 Dok	6	24	6	25	6	200.00
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.27	100	1.27	1	1.27	1.27

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	900 Buah	0	196	0	-	-	0.00
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1110 Buah	0	0	0	-	-	0.00
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	39391 Blok	0	1	0	-	-	0.00
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Kali	3	40	3	8	3	1.00
..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100 %	0	100	0	0.00	0.00	0.00
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	95 Unit	0	0	0	-	-	0.00
..01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	0	4	0	-	-	0.00

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	25.00	100	25.00	25.00	50	50.00
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 Bulan	3	12	3	25	3	8.33
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Bulan	3	12	3	25	3	8.33
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1.56	100	1.56	1.56	1.56	1.56
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78 Unit	1	12	1	8	1	1.28

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6 Unit	0	50	0	-	-	0.00
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150 Unit	0	2	0	-	-	0.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah	100 %	19.89	100	19.89	20	20	19.89
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100 %	19.89	100	19.89	20	20	19.89
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	6 Dok	1	1	1	100	1	16.67
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	15 Dok	4	10	4	40	4	26.67

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	3 Laporan	0	2	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	3 Unit	0	2	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12 Laporan	1	4	1	25	1	8.33
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	3 Laporan	0	1	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	102,000 Objek pajak	1193	50,000	1193	2	1,193	1.17

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	25,101 Dok	10418	10,000	10418	104	10,418	41.50
5.02.04.2.01.09	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	78,000 Dok	10418	300,000	10418	3	10,418	13.36
5.02.04.2.01.10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12 Dok	1	4	1	25	1	8.33
5.02.04.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12 Laporan	1	4	1	25	1	8.33
5.02.04.2.01.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	36 Laporan	3	12	3	25	3	8.33

II.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, yang juga tidak terlepas dari masalah gender yang merujuk kepada kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan **akses** dan **kontrol** terhadap sumber daya pembangunan, **partisipasi** dalam kegiatan pembangunan dan dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan **manfaat** dari hasil pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan pendapatan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah mencapai target sebesar 97.76% dan retribusi daerah khususnya yang dikelola Bapenda sebesar 75.15%, dan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 mencapai 100% .Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah menghadapi masalah yaitu belum tercapainya taget penerimaan pajak & retribusi daerah disebabkan karena:

1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
2. Lemahnya perencanaan, implementasi dan pengawasan dalam otoritas penagihan pajak daerah
3. Potensi-potensi pajak yang bisa menjadi sumber pajak belum diidentifikasi dengan baik

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga memiliki faktor penghambat dan faktor pendorong, yaitu :

1. Faktor Penghambat

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
2. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
3. Kurangnya SDM

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya inovasi untuk pengembangan dan peningkatan PAD serta pengelolaan pendapatan daerah
- b. Penyuluhan kepada masyarakat atas kebijakan tentang pajak daerah
- c. Semakin intensnya penagihan pajak daerah
- d. Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia pengelola pajak

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah yang didasarkan pada perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan Visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”

Penyusunan dokumen Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029.

Sesuai hasil evaluasi, perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai. Pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Badan Pendapatan Daerah sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rumusan program dan kegiatan perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terdiri dari dua program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program pengelolaan pendapatan daerah, 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut :

TABEL III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
3	4	5		6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN				14,720,137,000				13,950,690,000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretariat Badan	100%	11,148,740,000		Sekretariat Badan	100%	10,865,617,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Badan	100%	14,442,000		Sekretariat Badan	100%	8,247,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	4 Dok	6,366,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	4 Dok	6,366,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	15 Lap.	8,076,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	15 Lap	1,881,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Sekretariat Badan	100%	9,473,048,100		Sekretariat Badan	100%	9,293,447,100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji & tunjangan	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1068 org/bulan	9,454,091,100		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	952 org/bulan	9,274,742,100	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	12 dokumen	18,957,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	24 dokumen	18,705,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Sekretariat Badan	100%	322,622,000		Sekretariat Badan	100%	195,279,500	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	196Paket	6,452,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	196Paket	6,452,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1 Paket	61,050,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1 Paket	61,340,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	40 Laporan	255,120,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	40 Laporan	127,487,500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Badan	100%	53,433,000		Sekretariat Badan	100%	55,775,000	-
Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	15 unit	53,433,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	4 unit	55,775,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Badan	100%	1,092,200,900		Sekretariat Badan	100%	1,074,874,400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	191,500,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	191,500,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	900,700,900		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	883,374,400	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Sekretariat Badan	100%	192,994,000		Sekretariat Badan	100%	237,994,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	10 unit	114,324,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 unit	119,324,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	28,670,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	50 unit	28,670,000	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	50,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	2 unit	90,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,571,397,000		Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,085,073,000	-
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,571,397,000		Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,085,073,000	-
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub. Bid. Perencanaan	2 dokumen	10,868,000		Sub. Bid. Perencanaan	1 Dokumen	43,225,000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub. Bid. Perencanaan	12 dokumen	43,600,000		Sub. Bid. Perencanaan	10 Dokumen	41,066,500	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	4 laporan	290,585,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	2 Laporan	74,734,000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	2 unit	88,600,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	2 Aplikasi	121,900,000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD II	4 laporan	115,767,000		Sub. Bid. PAD II	129186 Objek Pajak	58,571,000	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD II	1 laporan	115,541,000		Sub. Bid. PAD II	2 Aplikasi	128,946,500	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP-nya	Sub. Bid. PAD II	34000 objek pajak	2,413,991,500		Sub. Bid. PAD II	50000 Obyek Pajak	2,370,856,500	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
Penetapan Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	8367 dokumen	7,519,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	10000 dokumen	7,519,000	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD II	26000 dokumen	257,121,000		Sub. Bid. PAD II	300000 dokumen	138,833,000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan pajak daerah	Sub. Bid. Pengendalian	4 dokumen	97,601,000		Sub. Bid. Pengendalian	4 dokumen	51,543,000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi daerah	Sub. Bid. Evaluasi	4 laporan	90,862,500		Sub. Bid. Evaluasi	4 laporan	47,878,500	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	4 laporan	39,341,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	12 laporan	20,205,000	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan Visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera” yang didukung oleh 7 (tujuh) Misi dan 14 (empat belas) Program Unggulan. memberi dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : “terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional”.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program & kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat bermanfaat bagi kemakmuran segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19710318 199101 1 003



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan Ridho-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis BKPSDM Kab. Sidrap, dan RPD 2024-2026 Kab. Sidenreng Rappang.

Melalui penyusunan Renja Perubahan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng,

**Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,**



A. BUSTANIL, S. AP., M. AP.
NIP. 19841021 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum2

1.3. Maksud dan Tujuan.....4

1.4. Sistematika Penulisan.....5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN6

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai Dengan Triwulan II Tahun 20256

2.1.1.Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2025.11

2.1.2.Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah.13

2.1.3.Program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah.13

2.1.4.Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.13

2.1.5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.15

2.1.6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.15

2.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....24

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH28

BAB IV PENUTUP42

4.1. Catatan Penting.....42

4.2. Kaidah Pelaksanaan.....42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah tersebut berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Tema dan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia”**, dengan Prioritas Pembangunan:

1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas;
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan;
5. Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius;

6. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan; dan
7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan tersebut, yang sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ada pada poin 6 yaitu Reformasi birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan Program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan rancangan perubahan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);⁵
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah dan pengembangan SDM.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
- c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengPada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai :

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KAB. SIDRAP

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan menyelenggarakan 3 Program 12 Kegiatan dan 43 Sub kegiatan. Setiap Program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan serta sub kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap Program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel II.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 87 (Nilai), sedangkan capaian kinerja yaitu 35,95 (Nilai).

Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Bulan Juni 2025 sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 36 dokumen, dengan realisasi kinerja 14 dokumen (30,67%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, target kinerja 10 dokumen, dengan realisasi 3 dokumen (30%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, target kinerja 10 dokumen, dengan realisasi 3 dokumen (30%)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, target kinerja 10 dokumen, dengan realisasi 3 dokumen (30%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, target kinerja 10 dokumen, dengan realisasi 3 dokumen (30%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target kinerja 6 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (33,33%)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 1.114 dokumen, dengan realisasi kinerja 324 dokumen (29,08%)
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 1.064 dokumen, dengan realisasi 304 dokumen (28,57%)
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, target kinerja 20 dokumen, dengan realisasi 11 dokumen (55%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target kinerja 10 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (20%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDtarget kinerja 20 dokumen, dengan realisasi 7 dokumen (30%)
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 10 Laporan, dengan realisasi kinerja 6 Laporan (60%)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 10 Laporan, dengan realisasi kinerja 6 Laporan (60%)
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 7 dokumen, dengan realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, target kinerja 7 dokumen, dengan realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 524 dokumen, dengan realisasi kinerja 312 dokumen (59,54%)
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 500 dokumen, dengan realisasi kinerja 300 dokumen (60,00%)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 12 Dokumen, dengan realisasi kinerja 6 dokumen (50,00%)
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 12 dokumen, dengan realisasi kinerja 6 dokumen (50,00%)
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 31 dokumen, dengan realisasi kinerja 4 dokumen (12,90%)
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 15 Unit, dengan realisasi kinerja 2 Unit (13,33%)
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, target kinerja 15 Unit, dengan realisasi kinerja 1 Unit (6,67%)
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, target kinerja 1 Unit, dengan realisasi kinerja 1 Unit (100%)
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan indikator Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Sidenreng Rappang, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 67%. Sedangkan untuk capaian kinerja masih dalam proses karena dokumen yang dijadikan sebagai dasar perhitungannya masih dalam proses penyusunan.
- Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, target kinerja 11.945 ASN, realisasi kinerja 3.774 (31,59%).
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN, target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja 3 dokumen (100,00%)
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja 1.448 dokumen, realisasi kinerja 48 dokumen (3,31%)
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 239 dokumen, realisasi kinerja 19 dokumen (7,95%)

- Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN, target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja 2 dokumen (66,67%)
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, target kinerja 239 dokumen, realisasi kinerja 145 dokumen (60,67%)
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, target kinerja 3 Lembaga, realisasi kinerja 1 Lembaga (33,33%)
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN, target kinerja 10 dokumen, realisasi kinerja 35 dokumen (350,00%)
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 5000 dokumen, realisasi kinerja 2.333 dokumen (46,66%)
 - Pengelolaan Data Kepegawaian, target kinerja 5.000 dokumen, realisasi kinerja 1.188 dokumen (23,76%).
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, target kinerja 1.600 Dokumen, realisasi kinerja 1.009 Dokumen (61,41%).
- Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 400 dokumen, realisasi kinerja 495 dokumen (123,75%)
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, target kinerja 850 dokumen, realisasi kinerja 514 dokumen (60,47%)
 - Pengelolaan Promosi ASN, target kinerja 350 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN target kinerja 345 dokumen, realisasi kinerja 88 dokumen (25,51%).
- Pengelolaan Assessment Center, target kinerja 5 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen 2(0,00%)
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, target kinerja 40 dokumen, realisasi kinerja 84 dokumen (210%).
 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional target kinerja 300 dokumen, realisasi kinerja 3 dokumen (1%).
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur target kinerja 5.693 dokumen, realisasi kinerja 395 dokumen (6,94%).
- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 10 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen (10%).
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 5100 dokumen, realisasi kinerja 249 dokumen (4,88%).

- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 4 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen (25%).
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, target kinerja 50 dokumen, realisasi kinerja 131 dokumen (262%).
 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, target kinerja 40 0 dokumen, realisasi kinerja 9 dokumen (2,25%).
 - Pembinaan Disiplin ASN, target kinerja 70 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0%).
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, target kinerja 25 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0%).
 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, target kinerja 30 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0%).
 - Evaluasi Disiplin ASN, target kinerja 4 dokumen, realisasi kinerja 4 dokumen (100%).
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 18,97%, sedangkan capaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 0 %. Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, target kinerja 300 orang, realisasi kinerja 0 orang (0%)
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatana, target kinerja 10 Laporan, realisasi kinerja 0 orang (0,00%).
 - c. Rendahnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain:
 - Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan lembaga diklat terkait sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kab. Sidenreng Rappang;

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara unit kerja yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan;
- Kurangnya kompetensi SDM aparatur pada BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang

2.1.1. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Program yang mungkin tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2025 adalah Program Kepegawaian Daerah, yang disebabkan belum selesainya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada tahun berjalan sehingga dasar perhitungan masih menggunakan dokumen yang ditetapkan pada tahun 2023.

Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 antara lain :

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- b. Mutasi dan Promosi ASN
- c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 antara lain:

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.
- b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.
- c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- e. Pengelolaan Data Kepegawaian.
- f. Pengelolaan Mutasi ASN.
- g. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
- h. Pengelolaan Promosi ASN.
- i. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.
- j. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- k. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai.
- l. Pembinaan Disiplin ASN.
- m. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- n. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- o. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai.
- p. Pembinaan Disiplin ASN.

- q. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.
- r. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Program yang mungkin tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2025 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang disebabkan beberapa kegiatan pada program dan subkegiatan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang hingga Triwulan I Tahun 2025 belum menunjukkan realisasi fisik maupun keuangan. Hal ini bukan disebabkan oleh hambatan teknis atau kelemahan pelaksanaan, melainkan karena faktor ketersediaan anggaran kas serta penjadwalan kegiatan yang secara teknis baru akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 antara lain:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- f. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- m. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2.1.2. Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah.

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Program Kepegawaian Daerah
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN.
- b. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.
- c. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN.
- d. Pengelolaan Assessment Center.
- e. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- f. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- g. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- h. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai.
- i. Evaluasi Disiplin ASN.
- j. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi.
- k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD.
- l. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

2.1.3. Program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antarlain adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN.
- b. Evaluasi Disiplin ASN.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
- b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun;
- b. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;

- c. Penerapan ASN DIGITAL BKN secara tepat guna dan tepat waktu;
- d. Proses layanan berbasis online dan paperless;
- e. Penggunaan aplikasi layanan kepegawaian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN dan aplikasi SIMPEG yang sudah terintegrasi dengan ASN DIGITAL BKN, yang berimplikasi pada beberapa layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- f. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- a. Penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (SIPD-RI, E-Walidata);
- b. Tersedianya aplikasi penatausahaan keuangan yang memudahkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- c. Penggunaan aplikasi Simda BMD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI.
- e. Penggunaan aplikasi SIMPEG yang sudah terintegrasi dengan ASN DIGITAL BKN.

Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan antara lain:

- a. Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Lemahnya koordinasi antar bidang;
- c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual;
- d. Belum ditetapkannya Anjab dan ABK Tahun berjalan;
- e. Dokumen Anjab dan ABK Tahun 2023 yang dijadikan dasar perhitungan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan OPD dan regulasi terbaru;
- f. Aplikasi pemberhentian belum tersedia secara online;
- g. SDM pengelola kasus kurang memahami proses pemberian hukuman disiplin;
- h. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS masih rendah
- i. Kurangnya kesadaran ASN dalam meremajakan data di aplikasi SIMPEG yang sudah terintegrasi dengan ASN DIGITAL BKN sehingga banyak ASN (PNS dan PPPK) yang belum dapat membuat data Kinerja di aplikasi e-Kinerja BKN;

- j. Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BKN Pusat;
- k. SOP belum sesuai dengan aplikasi;
- l. SDM Pengelola layanan kurang memahami prosedur layanan;
- m. Penyusunan Data awal Calon Penerima Beasiswa tidak berbasis data riil sehingga tidak sesuai dengan jumlah pendaftar/penerima Beasiswa;
- n. Belum adanya Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang disusun dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN
- o. Aplikasi yang tersedia belum mengakomodir indikator kedisiplinan kepegawaian secara keseluruhan tetapi hanya terkait absensi /rekaman kehadiran pegawai namun untuk daerah terpencil aplikasi tidak dapat diakses karena tidak tersedianya jaringan internet;
- p. Ketegasan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan/peraturan penegakan atas pelanggaran disiplin kepegawaian masih belum maksimal.
- q. Kekeliruan penetapan target kinerja dalam penyusunan rencana kerja tahun i. 2025 (penetapan target kinerja yang terlalu rendah/kecil).
- r. Belum tersedianya aplikasi pelayanan proses ijin perceraian yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian;

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target kinerja khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah maka seluruh bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dengan cara melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi secara rutin dan berkala serta melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disepakati.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perlu dilakukan perencanaan secara sistematis dalam penyusunan rencana kerja, rencana kerja perubahan, penganggaran, dan pelaksanaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan serta melakukan evaluasi secara rutin dan berkala sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
5.03	KEPEGAWAIAN								
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Nilai SKP ASN	88,70%	98,31%	88,60%	31,36%	35,40%	129,67%	146,19%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	70%	95,52%	67%	46,50%	69,40%	142,02%	202,89%
5.03.02.2,01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN, ASN yang pensiun/berhenti dan updating Informasi kepegawaian	98%	95%	97,5%	31,59%	32,40%	142,02%	202,89%
5.03.02.2,01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	10	3	3	3	100	6	60
5.03.02.2,01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4.339	1.163	1448	48	3,31	1211	27,91
5.03.02.2,01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250	467	239	19	7,95	486	194,40
5.03.02.2,01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	3	7	3	2	66,67	9	300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
5.03.02.2,01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250	223	239	145	60,67	368	147,20
5.03.02.2,01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	4	3	1	33,33	5	166,67
5.03.02.2,01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10	10	10	35	350,00	45	450,00
5.03.02.2,01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000	4.531	5000	2333	46,66	6864	137,28
5.03.02.2,01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000	4881	5000	1188	23,76	6069	121,38
5.03.02.2,02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	100%	100%	100%	61,41%	61,41%	161,41%	161,41%
5.03.02.2,02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400	434	400	495	123,75	929	232,25
5.03.02.2,02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	860	687	850	514	60,47	1.201	139,65
5.03.02.2,02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	450	146	350	0	0,00	146	32,44
5.03.02.2,03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	20%	109,13%	10%	25,51%	255%	134,64%	673,20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
5.03.02.2,03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	7	6	5	1	20	7	100,00
5.03.02.2,03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45	143	40	84	210	227	504,44
5.03.02.2,03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	500	114	300	3	1	117	23,40
5.03.02.2,04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	113,63%	94%	6,94%	7,38%	120,57%	126,92%
5.03.02.2,04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7	15	10	1	10,00	16	228,57
5.03.02.2,04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5,300	5,945	5.100	249	4,88	6194	123880,00
5.03.02.2,04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	4	4	1	25,00	5	125,00
5.03.02.2,04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50	320	50	131	262,00	451	902,00
5.03.02.2,04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	320	400	9	2,25	329	82,25
5.03.02.2,04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50	6	70	0	0,00	6	12,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
5.03.02.2,04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	3	25	0	0,00	3	15,00
5.03.02.2,04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30	15	30	0	0,00	15	50,00
5.03.02.2,04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	50	0	4	0	100,00	4	8,00
X.XX	NON URUSAN								
X.XX.1	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	119,60%	90%	31,99%	35,55%	151,59%	159,57%
X.XX.1,201	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	30,43%	30,43%	130,43%	130,43%
X.XX.1.201.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	10	10	3	0,30	13	130,00
X.XX.1.201.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	10	10	3	0,30	13	130,00
X.XX.1.201.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	10	10	3	0,30	13	130,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
X.XX.1.201.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	10	10	3	0,30	13	130,00
X.XX.1.201.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	5	6	2	0,33	7	140
X.XX.1.202	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	87,32%	95%	29,08%	30,61	116,40%	122,53
X.XX.1.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456	37	1064	304	28,57	113	24,78
X.XX.1.202.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	12	20	11	55,00	23	115
X.XX.1.202.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	1	10	2	20,00	3	30
X.XX.1.202.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	12	20	7	35,00	19	95

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
X.XX.1.206	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	100%	100	60%	60,00%	160%	168,42%
X.XX.1.206.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	180	10	6	0,6	186	186
X.XX.1.207	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	0	0	100%	100,00%
X.XX.1.207.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	1	7	0	0	1	20
X.XX.1.208	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	142,47%	97%	59,54%	61,38%	202,01%	202,01%
X.XX.1.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	600	500	300	0,6	900	180
X.XX.1.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	6	0,5	18	150
X.XX.1.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	6	0,5	18	150
X.XX.1.209	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	12,90%	12,90%	112,90%	112,90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
X.XX.1.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	15	2	0,13	17	113,33
X.XX.1.209.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	30	15	1	0,07	31	206,67
X.XX.1.209.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	1	2	200
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,57%	120%	18,97%	0,00%	0,00%	120,00%	613,18%
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	20%	120%	10	0	0	120%	600%
5.04.02.2,01.0004	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5	6	300	0	0	6	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) S.D Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan S.D Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian PROGRAM Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	18%	120%	10	0	0	120%	667%
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10	6	10	0	0	6	60

Sumber: BKPSDM Kab. Sidrap Tahun 2025

2.1. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

a. **Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	108.55%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	110 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	103,67%	Sangat Baik
HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)		107,41%	Sangat Baik

Sumber: LKJ-IP BKPSDM Tahun 2024

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan tercapai 107,41%, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Sangat Baik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2024.

b. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2024 sebanyak 367 orang.
2. Masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA kebawah, berdasarkan data terakhir per 31 Desember jumlah ASN yang berpendidikan SMA kebawah sebanyak 355 orang data ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya karna

adanya PROGRAM penyesuaian ijazah yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Masih adanya pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat, data per 31 Desember 2024 jumlah ASN yang bersertifikat sebanyak 117 orang dari 367 orang, jadi jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan rasionya sebesar 31,88%, angka ini menunjukkan jumlah jabatan fungsional belum bersertifikat masih banyak dan diharapkan tahun berikutnya bisa lebih banyak.
4. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, yang dimaksud disini adalah pendidikan SMA ke S1, S1 ke S2, mekanisme keikutsertaan pendidikan dan pelatihan formal melalui Tugas Belajar diharapkan mampu menjadi wadah bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Tahun 2024 jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar sebanyak 121 orang.
5. Pelaksanaan diklat struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan ini merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan banyaknya pejabat belum mengikuti diklat struktural. Data sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu 8,94%, hal yang menyebabkan kurangnya persentase ini adalah pejabat sudah pensiun dan pengangkatan pejabat baru serta naiknya eselon pejabat.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian Program

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPD 2024-2026 satu diantaranya yaitu keterlambatan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Disamping itu, pengembangan kompetensi SDM Aparatur BKPSDM yang belum optimal, perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target NSPK.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

- Tantangan

1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
2. Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan ketentuan. Diindikasikan dengan terbatasnya kuantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis/

Fungsional;

3. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;
4. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat;
5. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;
6. Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;
7. Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM).

- **Peluang**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS: Mengatur tentang pengelolaan dan penataan PNS, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, dan sistem merit;
2. Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
3. Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
4. Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
5. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
6. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);
7. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
8. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.

e. Formulasi Isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain yaitu:

1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) agar terintegrasi dengan aplikasi lain
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian yang cepat dan tepat waktu.
3. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur dengan Kegiatan Program Peningkatan disiplin Aparatur dengan Melalui SIDAK yang lebih rutin.

4. Pemenuhan saran dan prasarana aparatur dalam rangka membantu peningkatan kinerja Instansi.
5. Mengkoordinasikan dengan Tim TAPD terkait pengembangan kompetensi ASN baik itu diklat teknis/fungsional dan diklat struktural agar dipersiapkan penganggarannya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang**.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menjadi kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Sementara itu, **indikator kinerja** adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan dan menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome, maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun **Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025** adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.5.04.0.00.01.00 00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.812.442.000				4.326.940.00 0	
5.3	KEPEGAWAIAN				3.812.442.000				4.099.166.00 0	
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai PendidikanTinggid an Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		327,7%	1.149.769.000			88,50%	927.235.500	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		15,7%				65,00%		
5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN, ASN yang Pensiun/ berhenti dan		97%	78.428.500			97%	56.191.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		updating Informasi Kepegawaian								
5.3.2.201.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	3 Dokumen	2.083.000		Sidrap	2 Dokumen	1.665.800	
5.3.2.201.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	1448 Dokumen	3.500.000		Sidrap	1377 Dokumen	2.966.800	
5.3.2.201.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar, Sidrap	239 Dokumen	32.175.500		Jakarta, Makassar, Sidrap	200 Dokumen	21.106.000	
5.3.2.201.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jakarta, Makassar, Sidrap	3 Dokumen	1.515.000		Jakarta, Makassar, Sidrap	2 Dokumen	1.212.000	
5.3.2.201.0006	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	Sidrap, Makassar	239 Dokumen	11.369.000		Sidrap, Makassar	100 Dokumen	6.872.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Pemberhentian	Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								
5.3.2.201.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Sidrap, Makassar	3 Lembaga	3.515.000		Sidrap, Makassar	2 Lembaga	2.811.000	
5.3.2.201.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	10 Dokumen	2.075.000		Sidrap, Makassar	5 Dokumen	1.659.800	
5.3.2.201.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	5000 Dokumen	17.681.000		Sidrap, Makassar	4000 Dokumen	13.759.100	
5.3.2.201.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	5000 Dokumen	4.515.000		Sidrap	4000 Dokumen	4.139.000	
5.3.2.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN		100%	25.467.000			100%	18.758.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.2.202.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Makassar, Jakarta, Sidrap	400 Dokumen	7.525.000		Makassar, Jakarta, Sidrap	400 Dokumen	7.370.000	
5.3.2.202.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	850 Dokumen	13.932.000		Sidrap, Makassar	800 Dokumen	8.183.000	
5.3.2.202.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	350 Dokumen	4.010.000		Makassar, Jakarta, Sidrap	200 Dokumen	3.205.800	
5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		10%	983.648.500			7,5 %	803.097.000	
5.3.2.203.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	4 Dokumen	940.668.000		Sidrap	3 Dokumen	771.879.000	
5.3.2.203.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Sidrap, Makassar	40 Orang	2.010.000		Sidrap, Makassar	35 Orang	.1607.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.2.203.0014	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	300 Orang	40.970.500		Sidrap	200 Orang	29.611.000	
5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		94%	62.225.000			92%	49.188.200	
5.3.2.204.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	10 Dokumen	3.010.000		Sidrap, Makassar	5 Dokumen	2.405.500	
5.3.2.204.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	5100 Dokumen	8.030.000		Sidrap	4.180 Orang	4.394.800	
5.3.2.204.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	4 Laporan	4.472.000		Sidrap	4 Laporan	4.188.000	
5.3.2.204.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Sidrap	50 Orang	4.701.000		Sidrap	40 Orang	3.928.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.2.204.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Sidrap, Makassar	400 Orang	2.020.000		Sidrap, Makassar	350 Orang	1.614.000	
5.3.2.204.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Sidrap, Makassar	70 Orang	3.020.000		Sidrap, Makassar	50 Orang	2.416.000	
5.3.2.204.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap	25 Laporan	29.868.000		Sidrap	20 Laporan	24.559.300	
5.3.2.204.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Sidrap	30 Dokumen	4.505.000		Sidrap	25 Dokumen	3.603.000	
5.3.2.204.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	4 Laporan	2.599.000		Sidrap, Makassar	3 Laporan	2.079.600	
X.XX.1	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	3.812.442.000			85%	3.879.515.50 0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.1.201	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	8.100.000			100%	6.713.700	
X.XX.1.201.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	2.000.000		Sidrap	8 Dokumen	1.599.900	
X.XX.1.201.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	2.000.000		Sidrap	8 Dokumen	1.598.800	
X.XX.1.201.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.200.000		Sidrap	8 Dokumen	1.071.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.1.201.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.300.000		Sidrap	8 Dokumen	1.040.000	
X.XX.1.201.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	6 Laporan	1.600.000		Sidrap	4 Laporan	1.403.500	
X.XX.1.202	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	3.322.704.000				3.103.317.000	
X.XX.1.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	38 Orang/bulan	3.309.328.000		Sidrap	38 Orang/bulan	3.309.328.700	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.1.202.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	20 Dokumen	7.976.000		Sidrap	15 Dokumen	6.380.400	
X.XX.1.202.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	10 Laporan	3.200.000		Sidrap	1 Laporan	2.655.300	
X.XX.1.202.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	20 Laporan	2.200.000		Sidrap	5 Laporan	1.758.000	
X.XX.1.206	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95%	116.400.000			95%	58.206.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.1.206.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	100 Laporan	116.400.000		Sidrap, Makassar, Jakarta	65 Laporan	58.206.500	
X.XX.1.207	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	18.572.000			100%	18.572.000	
X.XX.1.207.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidrap	7 Unit	18.572.000		Sidrap	3 Unit	18.572.000	
X.XX.1.208	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97%	220.928.000			95%	211.450.900	
X.XX.1.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	500 Laporan	6.000.000		Sidrap	600 Laporan	6.000.000	
X.XX.1.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	80.000.000		Sidrap	12 Laporan	80.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.1.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	134.928.000		Sidrap	12 Laporan	125.450.900	
X.XX.1.209	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	125.738.000			100%	264.450.000	
X.XX.1.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sidrap	15 Unit	93.978.000		Sidrap	15 Unit	207.690.000	
X.XX.1.209.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sidrap	15 Unit	11.760.000		Sidrap	15 Unit	11.760.000	
X.XX.1.209.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	1 Unit	20.000.000		Sidrap	1 Unit	45.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				833.830.000				227.774.000	
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		18,97%	680.273.000			18,57%	227.774.000	
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional		10,00%	83.830.000			5,00%	21.296.000	
5.4.2.201.0004	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Sidrap Makassar Jakarta	300 Orang	83.830.000		Sidrap	200 Orang	21.296.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural		18,00%	596.443.000			18,00%	206.478.000	
5.4.2.202.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sidrap	10 Laporan	596.443.000		SIDRAP	6 Laporan	206.478.000	

Sumber: Data diolah, 2025

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daya (RPD) yang berjangka 5 (lima) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai PROGRAM, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas PROGRAM kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun Anggaran 2024 dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.

4.1. Catatan Penting

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu:

- a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap pegawai berhak mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun, terkait dengan hal tersebut perlu penambahan alokasi kompetensi aparatur anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur.
- b. Terdapat beberapa kegiatan BKPSDM yang sangat tergantung oleh kebijakan dari pusat seperti Pengadaan Pegawai, penetapan NIP sehingga dimungkinkan ada perubahan kebijakan di luar masa perencanaan.
- c. Untuk menerapkan sistem merit di Kabupaten Sidenreng Rappang, banyak hal yang perlu dilakukan yaitu optimalisasi pengembangan karier pegawai yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi serta perlunya penerapan manajemen kinerja.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024

- b. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- c. Tujuan yang dikehendaki
- d. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- e. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- f. Dokumen Renja Perubahan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran yang ada

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng,

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,**



A. BUSTANIL, S. AP., M. AP
NIP. 19841021 200412 1 001

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar belakang	1
I.2. Landasan hukum	2
I.3. Maksud dan tujuan	3
I.4. Sistematika penulisan	3
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	5
II.1. Evaluasi RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	5
II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	11
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	16
 BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025.....	6
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Inspektorat Daerah ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Rencana Kerja perubahan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Inspektorat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi e-planning RKPD perubahan dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan tahun 2025.
- c. Perubahan Renja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

I. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuan perubahan Renja Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025.
- b. Sebagai bahan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang mungkin timbul sekaligus strategi pemecahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
- c. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2025.

I.4.Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Perubahan Renja ini memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sistematika penyajian Perubahan Renja Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah Triwulan II.

II.2 Review terhadap Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

Bab III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Bab IV : PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Evaluasi RENJA sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian kegiatan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaannya serta mengidentifikasi masalah yang timbul pada pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat diambil tindakan pemecah masalah, koreksi dan perbaikan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra Inspektorat Daerah.

Diharapkan melalui perubahan Renja Inspektorat Daerah tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan dan anggaran. Terkait dengan hal tersebut perubahan Renja Inspektorat Daerah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama triwulan I Tahun 2025 dan perkiraan target sampai dengan akhir tahun 2025 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja s/d triwulan I tahun 2025 Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								
6	01	01	2.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	80,00	100,00	25,00	25,00	35,00	35,00
6	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)</i>	36	12	12	3	25,00	15	41,67
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1908	636	636	159	25,00	795	41,67
6	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)</i>	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	41,67	41,67
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105	8	35	6	17,14	14	13,33
6	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)</i>	36	12	12	3	25,00	15	41,67
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	0	4	0	0,00	-	0,00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	3	3	1	33,33	4	44,44
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	5	6	2	33,33	7	38,89
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210	70	70	14	20,00	84	40,00
6	01	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (Unit)</i>	14	0	14	0	0,00	-	0
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	0	10	0	0,00	-	0,00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	1	20	0	0,00	1	3,33
6	01	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)</i>	36	12	12	3	25,00	15	41,67

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	12	12	3	25,00	15	41,67
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	25,00	15	41,67
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	3	25,00	15	41,67
6	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)	75	35	55	12	21,82	47	62,67
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75	23	23	6	26,09	29	38,67
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147	5	30	12	40,00	17	11,56
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	1	0	0,00	-	0,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	95,00	94,00	93,00	91,00	97,85	64,56	67,96
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK	78,00	76,00	78,00	0,00	0,00	76,00	97,44
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45	14	15	2	13,33	16	35,56
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45	16	15	5	33,33	21	46,67
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24	6	8	1	12,50	7	29,17
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	69	20	23	2	8,70	22	31,88
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24	4	8	0	0,00	4	16,67
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3	1	1	1	100,00	2	66,67
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15	5	5	1	20,00	6	40,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	33,33	33,33

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60	16	20	2	10,00	18	30,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIIP Perangkat Daerah level 2 keatas	95,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	84,21
6	01	3	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Persentase pelaksanaan PKPT</i>	<i>90,00</i>	<i>82,00</i>	<i>90,00</i>	<i>23,00</i>	<i>25,56</i>	<i>38,89</i>	<i>43,21</i>
6	01	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	1	2	1	50,00	2	33,33
6	01	3	2.02		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Persentase wajib LHKPN yang melapor tepat waktu</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
6	01	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	120	40	40	0	0,00	40	33,33
6	01	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120	40	40	0	0,00	40	33,33
6	01	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	2	2	0	0,00	2	33,33
6	01	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	120	40	40	40	100,00	80	66,67

II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perubahan sistem manajemen pemerintahan daerah dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku APIP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya sistem pengawasan intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip good governance.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis ditetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Inspektorat Kabupaten merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat.
2. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP.
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi dilingkungan kerja.
4. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP.

5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang serta Visi dan Misi Inspektorat Daerah khususnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilakukan. Penyusunan tersebut perlu mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas. Capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan dimungkinkan berubah baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Rencana Kerja dan Pendanaan perubahan Renja Inspektorat Daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025								
							Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6					URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.935.916.220					12.760.415.000	
6	1				INSPEKTORAT DAERAH				10.935.916.220					12.760.415.000	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase adminstrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		90 Persen	7.912.086.220					8.618.535.750	
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Pembayaran gaji dan tunjangan	Kab. Sidrap	12 Bulan	6.568.131.220	Inspektorat	Kab. Sidrap	12 Bulan	6.389.308.250	Inspektorat	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	55	6.568.131.220	Inspektorat	Kab. Sidrap	55	6.389.308.250	Inspektorat	
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang naik pangkat tepat waktu	Kab. Sidrap	100 Persen	432.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	100 Persen	799.058.750	Inspektorat	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	K/L/D	35	432.000.000	Inspektorat	K/L/D	35	799.058.750	Inspektorat	
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sidrap	85 Persen	492.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	85 Persen	388.057.750	Inspektorat	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	3 paket	34.800.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	3 paket	64.676.000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sidrap	3 Paket	9.200.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	3 Paket	6.424.000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Makanan dan minuman tamu	Kab. Sidrap	6 laporan	23.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	6 laporan	92.356.000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	K/L/D	70 laporan	425.000.000	Inspektorat	K/L/D	70 laporan	224.601.750	Inspektorat	
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang	Kab. Sidrap	85 Persen	120.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	85 Persen	578.671.000	Inspektorat	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sidrap	40 Buah	50.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	40 Buah	199.955.000	Inspektorat	
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidrap	3	70.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	3	378.716.000	Inspektorat	
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sidrap	16	160.955.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	16	182.828.000	Inspektorat	
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidrap	4	1.500.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	4	1.650.000	Inspektorat	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	52.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	12	86.704.000	Inspektorat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
							Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	107.455.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	12	94.474.000	Inspektorat
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	Kab. Sidrap	87 Persen	139.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	87 Persen	280.612.000	Inspektorat
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidrap	22	95.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	22	115.912.000	Inspektorat
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidrap	24	14.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	24	14.700.000	Inspektorat
	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidrap	1	30.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	1	150.000.000	Inspektorat
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan		96 Persen	2.435.000.000			96 Persen	2.616.604.250	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK	Kab. Sidrap	69 Persen	1.940.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	69 Persen	1.837.604.250	Inspektorat
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sidrap	10	370.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	10	366.700.000	Inspektorat
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sidrap	16	435.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	16	319.240.000	Inspektorat
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sidrap	2	131.500.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	2	247.000.000	Inspektorat
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sidrap	8	347.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	8	408.340.000	Inspektorat
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Sidrap	4	250.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	4	127.800.000	Inspektorat
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Sidrap	1	275.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	1	209.154.250	Inspektorat
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sidrap	5	131.500.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	5	159.370.000	Inspektorat
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan	Kab. Sidrap	100 Persen	495.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	100 Persen	779.000.000	Inspektorat
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sidrap	30	495.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	30	779.000.000	Inspektorat
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPI Perangkat Daerah level 2 keatas		35 Persen	588.830.000			35 Persen	1.525.275.000	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase pelaksanaan PKPT	Kab. Sidrap	90 Persen	328.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	90 Persen	705.213.000	Inspektorat
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Sidrap	1	328.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	1	705.213.000	Inspektorat
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase wajib LHKPN yang melapor tepat waktu	Kab. Sidrap	100 Persen	260.830.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	100 Persen	820.062.000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
							Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	40	125.830.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	40	530.112.000	Inspektorat
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sidrap	20	25.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	20	42.600.000	Inspektorat
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sidrap	2	23.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	2	21.300.000	Inspektorat
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sidrap	40	87.000.000	Inspektorat	Kab. Sidrap	40	226.050.000	Inspektorat

BAB IV

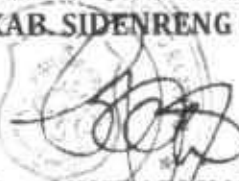
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja s/d triwulan II yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2024 -2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Semoga Perubahan Renja Inspektorat Daerah dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah sehingga Visi dapat diwujudkan dengan baik.

Pangkajene Sidenreng, 21 Juli 2025


INSPEKTUR DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Drs. MUSTARI KADIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199112 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA LAUTANG**



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN KE II TAHUN 2025**

**KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

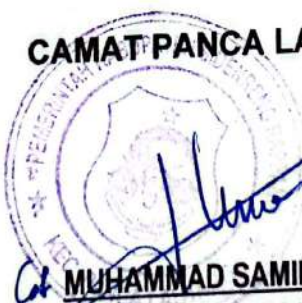
Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah, kehadiran Allah SWT kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, Rencana kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Amanat Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun

Menyadari akan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini yang masih jauh dai sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari semua pihak utamanya dari SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk kesempurnaan laporan pelaksanaannya, dan kami akan berupaya terus untuk menyempurnakannya laporan berikut pelaksanaannya.

Demikian laporan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025 dan Mudah-mudahan bermanfaat.

Bilokka,

CAMAT PANCA LAUTANG



MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes.

NIP. 19701231 199401 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistimatika Penulisan	3
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Lautang Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Lautang Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	5
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	15
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB 1V. PENUTUP	25
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.....	9
Tabel III.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mengsinergi, mengsinkronkan dan mengintegrasikan program Pembangunan nasional dengan pembangunan.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Panca Lautang Kab.Sidenreng Rappang merupakan *dokumen* perencanaan yang berisi rencana program/kegiatan yang tetap searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan daerah terakumulasi dan berpedoman pada tema RKPD perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu **“ Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan **Prioritas Pembangunan Daerah** antara lain :

1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan

3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan
5. Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religious
6. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan
7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

- a. Mewujudkan sinergitas dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan kecamatan Panca Lautang dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisieb sehingga mewujudkan visi dan misi Kecamatan Panca lautang yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur di Kecamatan Panca Lautang dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran dan target program dan kegiatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder tentang rencana kerja kecamatan Panca Lautang;
- d. Mempermudah pengendaliann, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;

Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bagian dilingkungan Kecamatan Panca Lautang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2025. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena Perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.4 Sistimatika Penulisan

Secara sistematis Renjra Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappangtahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) ;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan,

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCA LAUTANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Panca Lautang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Kecamatan Panca Lautang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 Program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp.3.343.820.000,- dan setelah perubahan anggaran belanja berkurang sebesar Rp.61.716.000,- dengan total keseluruhan Rp. 3.281.104.000,- dan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 454.283.385,- atau (13,59%).

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025 terdiri :

1. Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan :

1) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Kegiatan :

➤ Administrasi Umum Perangkat dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor dengan target 72 Paket dengan anggaran Rp.20.088.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 72 Paket dengan anggaran Rp.79.936.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.

- Penyediaan peralatan Rumah Tangga dengan target 72 Paket dengan anggaran Rp.28.518.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan target 21.562 lbr/pkt dengan anggaran Rp.18.755.500.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 32 Lap. dengan anggaran 124.767.000 yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel dengan target 10 Unit dengan anggaran Rp.12.084.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan :
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan dengan target 8 Lap. dengan anggaran Rp.1.212.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan dengan target 8 Lap. dengan anggaran Rp.1.010.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%
- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Kegiatan :
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan dengan target 8 Lap dengan anggaran Rp.1.050.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan :
- Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dengan target 36 Unit dengan anggaran Rp.260.034..000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target 60 pokmas/ ormas dengan anggaran Rp.212.040.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I belum ada.
 3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I belum ada.
 4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - Ada beberapa kegiatan yang target pencapaiannya ditetapkan terlalu tinggi di awal tahun.
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Kecamatan Panca Lautang tahun 2025 yaitu :
 - a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Panca Lautang berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.

- c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
- d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1

TABEL II.1. REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KECAMATAN PANCA LAUTANG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) S.D TAHUN 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA OPD	REALISASI RENJA OPD	TINGKAT REALISASI (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	=9 =5+7	10=(9/4*100)
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	300 %	- %	- %	- %	-	- %	-
7	.01	.02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	300 %	- %	- %	- %	-	- %	-
7	.01	.02	2.04	.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	27 Lap	- Lap	- Lap	- Lap	-	- Lap	-
7	.01	.02	2.04	.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	27 Lap	- Lap	- Lap	- Lap	-	- Lap	-

1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	=9 =5+7	10=(9/4*100)
7	.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	300 %	100 %	100 %	- %		100	33,33
7	.01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan pmerintahan umum sesua penugasan kepala daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai kepala daerah	300 %	100 %	100 %	- %		100	33,33
7	.01	05	2.01	.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	12 Lap	12 Lap	- Lap	- Lap	-	12 Lap	100
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	246 %	50 %	- %	- %	-	50 %	20,33
7	.01	.03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	246 %	- %	- %	- %	-	- %	-
7	.01	.03	2.01	.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	27 lap	- lap	- lap	- lap	-	- lap	-
7	.01	.03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	246 %	50 %	50 %	- %	-	50 %	20,33
7	.01	.03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di kelurahan	21 lembga kemasy.	- lembga kemasy.	- lembga kemasy.	- lembga kemasy.	-	- lembga kemasy.	-
7	.01	.03	2.02	.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	25 Unit/ bln	36 Unit/ bln	- Unit/ bln	- Unit/ bln	-	36 Unit/ bln	144
7	.01	.03	2.02	.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	54 pokmas/ ormas	60 pokmas/ ormas	- pokmas/ ormas	- pokmas/ ormas	-	60 pokmas/ ormas	111
7	.01	.03	2.02	.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	27 bln	- bln	- bln	- bln	-	- bln	-

1					2	3	4	5	6	7	8= 7 :6	9 =5+7	10=(9/4*100
7	.01	.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	300 %	- %	- %	- %	-	100 %	33,33
7	.01	.06	.2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	300 %	- %	- %	- %	-	100 %	33,33
7	.01	.06	.2. 01	.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
7	.01	.06	.2. 01	.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	27 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
7	.01	.06	.2. 01	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	300 %	75 %	75 %	75 %	-	150 %	50,00
XX	XX	01	2.01		XXX Perencanaan ,penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	300 %	- %	- %	- %	-	- %	-
X	XX	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	331 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
X	XX	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	22 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7 :6	9 =5+7	10=(9/4*100
X	XX	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyesunan dokumen RKA-SKPD	12 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
X	XX	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyesunan dokumen DPA-SKPD	13 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
X	XX	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	21 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
X	XX	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 doc	- doc	- doc	- doc	-	- doc	-
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300 %	100 %	100 %	50 %	-	150 %	50,00
X	XX	01	2.02	.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 BLN	14 BLN	14 BLN	3 BLN	-	17 BLN	40
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata usahaan dari pengujian /verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penata usahaan dari pengujian /verifikasi keuangan SKPD	36 bln	0 bln	0 bln	0 bln	-	- bln	-
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300 %	71,43 -	- -	- -	-	71,43 %	23,81
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yanh disediakan	147 bln/pkt	220 bln/pkt	- bln/pkt	- bln/pkt	-	220 bln/pkt	150

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9 = 5+7	10=(9/4*100
X	XX	01	2.06	.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	183 UNIT	14 UNIT	- UNIT	- UNIT	-	14 Unit	8
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24 bln/pkt	91 bln/pkt	- bln/pkt	- bln/pkt	-	91 bln/ pkt	379
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3901,92 bln	- bln	- bln	- bln	-	- bln	-
X	XX	01	2.06	.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kantor yang disediakan	276,018 bln/pkt	105.363 bln/pkt	- bln/pkt	- bln/pkt	-	105.363 bln/ pkt	38.173
X	XX	01	2.06	.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	326496 bln/lap	- bln/lap	- bln/lap	- bln/lap	-	- bln/ lap	-
X	XX	01	2.06	.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520 kali	246 kali	- kali	- kali	-	246 kali	47
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	-	50 %	16,67
X	XX	xx	2.07	5	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	268 unit	10 unit	0 unit	0 unit	-	12 unit	4
X	XX	xx	2.07	10	XXX Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	-	- unit	-
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	-	300 %	100,00
X	XX	01	2.08	.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	173.587 LBR	70 LBR	- LBR	- LBR	-	336 LBR	0

1					2	3	4	5	6	7	8= 7 :6	9 =5+7	10=(9/4*100
X	XX	01	2.08	.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	122.424 lap	46 lap	- lap	- lap	-	62 bln	0
X	XX	01	2.08	.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 bln	50 bln	- bln	- bln	-	77 bln	214
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	-	200 %	66,67
X	XX	01	2.09	.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	63 BLN	827 unit/ltr	- unit/ltr	- unit/ltr	-	29 BLN	46
X	XX	01	2.09	.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit	- Unit	- Unit	-	4 Unit	100
X	XX	01	2.09	.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan di rehabilitasi	36 unit	4 unit	- unit	- unit	-	7 unit	19

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panca Lautang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Panca Lautang dapat dilihat pada Tabel III.I :

Tabel. III. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KANTOR KECAMATAN Panca Lautang lembar : 1 dari 3

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Unsur Kewilayahan									
7	1				Kecamatan				3.281.104.000				3.280.731.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Panca Lautang	100 %	1.887.500	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	1.887.500	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panca Lautang	100 %	1.887.500	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	1.887.500	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	969.500	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	969.500	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	918.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	918.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Panca Lautang	100 %	49.600.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	49.600.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Panca Lautang	100 %	49.600.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	Target Capaian Kinerja	49.600.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Panca Lautang	4 Dokumen	49.600.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	4 Dokumen	49.600.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Panca Lautang	100 %	326.616.600	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	326.616.600	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Panca Lautang	100 %	880.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	880.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	880.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	880.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Panca Lautang	100 %	325.736.600	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	325.736.600	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Panca Lautang	100%	987.600	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100%	789.600	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Panca Lautang	36 unit	324.527.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	36 unit	324.527.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	3	2	3	Evaluasi Kelurahan		Kec. Panca Lautang	100%	420.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100%	420.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Panca Lautang	100 %	375.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	375.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	4	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panca Lautang	100 %	375.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	375.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	4	2	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Panca Lautang	8 Laporan	255.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	255.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang
7	1	4	2	2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	120.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	8 Laporan	120.000	Masyarakat Kec. Panca Lautang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Panca Lautang	100 %	2.902.624.900	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	2.902.624.900	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panca Lautang	100 %	2.309.748.200	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	2.309.748.200	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panca Lautang	14	2.309.748.200	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	14	2.309.748.200	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panca Lautang	100 %	225.496.500	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	235.380.500	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Panca Lautang	250 pkt	24.538.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	250 pkt	25.388.000	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Panca Lautang	72 pkt	101.450.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	14 Pkt	101.450.000	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Panca Lautang	91 pkt	45.160.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	91 pkt	52.287.000	ASN Kec. Panca Lautang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	2	5	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Panca Lautang	21562 lbr/pkt	16.735.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	21562 lbr/pkt	18.640.000	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	9	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panca Lautang	353 Lap	37.613.500	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	353 Lap	37.615.500	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Panca Lautang	100 %	12.084.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	0	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	5	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Panca Lautang	10 pkt	12.084.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	10 pkt	0	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panca Lautang	100 %	308.368.200	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	308.368.200	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Panca Lautang	70 buah/lap	1.650.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	70 buah/lap	1.650.000	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Panca Lautang	56 lap	35.520.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	56 lap	30.495.000	ASN Kec. Panca Lautang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	2	4	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Panca Lautang	50 lap	271.198.200	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	50 lap	278.425.200	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panca Lautang	100 %	46.928.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	100 %	46.928.000	ASN Kec. Panca Lautang
X	XX	1	2	1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Panca Lautang	475 unit	46.928.000	ASN Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	475 unit	46.928.000	ASN Kec. Panca Lautang

BAB IV

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Perubahan rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Kecamatan Panca Lautang dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Panca Lautang. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang. Adapun rencana kerja ini apabila masih ada kekurangan maka saran dan masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan.



**KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

P-RENJA

TAHUN

2025



Jalan Bau Massepe No. 74 Amparita

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amparita, 25 Juli 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
II.1. Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	8
II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	19
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV. PENUTUP	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2025.....	11
Tabel III.1. Rencana kerja dan pendanaan daerah perubahan tahun anggaran 2025	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti

dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Tellu Limpoe mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan,

bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe 2025 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di

lingkup Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757)
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
8. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
13. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;
- Menjabarkan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2025 - 2029.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe;
- Penuntun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2025, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan kondisi perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan rencana Kerja triwulan selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 6,25 %.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdiri atas kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

Daerah dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan mencapai tingkat realisasi 25%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 27,02%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 12,50%.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target Renja 55,50% dari target sebesar 100%.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel II.1. (RENSTRA 2025-2029)
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan)
 Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7					Unsur Kewilayahan								
7	1				Kecamatan								
7	.1	.2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100	100	6,25	6,25	6,25	1,56
7	.1	.2	204	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100	100	6,25	6,25	6,25	1,56
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	26 Laporan	8	8	1	12,50	1,00	3,85
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26 Laporan	8	8	-	-	-	-

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	.1	.5			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100	100	25	25	25,00	25,00
7	.1	.5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100	100	25,00	25,00	25,00	25,00
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Doku men	4	4	1	25,00	1,00	8,33
7	.1	.3	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	73,49	100	27,02	27,02	27,02	27,02
7	.1	.3	201	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	62,50	100	12,50	12,50	12,50	3,13
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Lapor an	5	8	1	12,50	1,00	3,85
7	.1	.3	.202	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	84,48	100	41,54	41,54	41,54	41,54

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21 Lemb aga Kema syara katan	7	23	20	86,96	20,00	95,24
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	24	17	3	17,65	3,00	9,09
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54 Pokm as/Or mas	18	17	4	23,53	4,00	7,41
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	26 Lapor an	-	8	-	-	-	-
7	.1	.6	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	45,83	100	12,50	12,50	12,50	12,50
7	.1	.6	.201	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	45,83	100	12,50	12,50	12,50	12,50
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Doku men	2	8	1	12,50	1,00	3,85

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	26 Doku men	5	8	1	12,50	1,00	3,85
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26 Doku men	4	8	1	12,50	1,00	3,85
X	XX	.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	95,32	100	55,50	55,50	55,50	55,50
X	XX	.1	201.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	81,82	100,00	78,03	78,03	78,03	78,03
X	.XX	.1	.201	.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	495 Doku men	106,00	106	103	97,17	103,00	20,81
X	.XX	.1	.201	.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	16 Doku men	2,00	3,00	0	0,00	0	0,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	.XX	.1	.201	.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	11 Doku men	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	.XX	.1	.201	.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	13 Doku men	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	.XX	.1	.201	.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	20 Doku men	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	.XX	.1	.201	.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Lapor an	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	.1	.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100	60,00	60,00	60,00	60,00
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1485 Org/Bl n	490	495	297	60,00	297,00	20,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	.1	.202	.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	-	0	-	-	-	-
X	XX	.1	.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	90,12	100	32,22	32,22	32,22	32,22
X	XX	.1	.206	.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	136 Paket	62	10	10	100,00	10,00	7,35
X	XX	.1	.206	.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	51 Paket	10	-	-	-	-	-
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4.459 Paket	1.637	-	-	-	-	-
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	267.407 Paket	64.907	89.995	29.048	32,28	29.048,00	10,86
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	100 Laporan	22	36	8	22,22	8,00	8,00
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	557 Laporan	156	203	8	3,94	8,00	1,44

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100	100	40,74	40,74	40,74	40,74
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	326 Paket	59	88	28	31,82	28,00	8,59
X	XX	1	.207	.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	8	19	16	84,21	16,00	33,33
X	XX	1	.207	.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainny yang disediakan	3 Unit		1	-	-	-	-
X	XX	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	67,82	67,82	67,82	67,82
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	543 Lapo ran	182	178	125	70,22	125,00	23,02
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	36 Lapo ran	12	12	6	50,00	6,00	16,67
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Lapo ran	12	12	6	50,00	6,00	16,67

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100 %	100	100	54,17	54,17	54,17	54,17
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	63 Unit	21	21	11	52,38	11,00	17,46
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	2	-		-	-	-
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	13 Unit	4	3	2	66,67	2,00	15,38

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai Tujuan kinerja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dimana pada tahun 2025 menargetkan **“Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan”** dengan indikator kinerja yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan* dengan nilai 76,65 (B) peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik yang dibina dengan nilai 100% .

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Kantor Camat Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2025									
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
7					Unsur Kewilayahan											
7	1				Kecamatan											
7	.1	.2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.Tellu Limpoe	100	%	1.909.000	Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100	%	1.108.000	Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.2	204	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Tellu Limpoe	100	%	1.909.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100	%	1.108.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Tellu Limpoe	8	Laporan	1.109.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8	Laporan	708.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Tellu Limpoe	8	Laporan	800.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8	Laporan	400.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.5			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Tellu Limpoe	100	%	50.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100	%	50.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	.1	.5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Tellu Limpoe	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec.Tellu Limpoe	100 %	745.277.000	Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	653.117.200	Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	201	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec.Tellu Limpoe	100 %	1.109.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	708.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	1.109.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	708.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	.202	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec.Tellu Limpoe	100 %	744.168.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	652.409.200	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Tellu Limpoe	7 Laporan	16.200.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	23 Laporan	16.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec.Tellu Limpoe	10 Unit	545.395.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	17 Unit	580.687.200	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Tellu Limpoe	18 Pokmas/Ormas	181.773.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	17 Pokmas/Ormas	55.322.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	800.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	400.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.6	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tellu Limpoe	100 %	3.327.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	2.124.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.6	.201	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tellu Limpoe	100 %	3.327.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	2.124.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	1.109.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	708.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	1.109.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	708.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	1.109.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	708.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tellu Limpoe	100 %	4.172.877.150	Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	4.058.166.800	Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	201.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Tellu Limpoe	100 %	8.061.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	6.001.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Tellu Limpoe	106 Dokumen	5.461.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	106 Dokumen	4.701.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	300.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	200.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	300.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	100.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	400.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	200.000	ASN Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	.XX	.1	.201	.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	6 Dokumen	600.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	6 Dokumen	300.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tellu Limpoe	10 Laporan	1.000.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	10 Laporan	500.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Tellu Limpoe	100 %	3.241.318.150	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	3.050.327.150	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec.Tellu Limpoe	495 Org/Bln	3.241.318.150	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	495 Org/Bln	3.050.327.150	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.202	.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Tellu Limpoe	0 Dokumen	-	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	0 Dokumen	-	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Tellu Limpoe	100 %	125.681.900	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	86.927.750	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	- Paket	-	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	10 Paket	1.150.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	- Paket	-	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	0 Paket	-	ASN Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	- Paket	-	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	0 Paket	-	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	82.702 Paket	51.536.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	89.995 Paket	35.276.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kec.Tellu Limpoe	36 Laporan	23.756.400	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	36 Laporan	21.412.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Tellu Limpoe	231 Laporan	50.389.500	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	203 Laporan	29.089.750	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec.Tellu Limpoe	100 %	249.184.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	325.383.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Kec.Tellu Limpoe	96 Paket	108.885.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	88 Paket	79.921.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	1	.207	.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Tellu Limpoe	16 Unit	140.299.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	19 Unit	210.029.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	1	.207	.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	- Unit	-	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	1	35.433.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tellu Limpoe	100 %	468.163.100	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100 %	450.760.900	ASN Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2025									
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kec.Tellu Limpoe	243	Laporan	2.430.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	178	Laporan	2.460.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kec.Tellu Limpoe	12	Laporan	56.109.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	12	Laporan	63.743.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	12	Laporan	409.624.100	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	12	Laporan	384.557.900	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Kec.Tellu Limpoe	100	%	80.469.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	100	%	138.767.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec.Tellu Limpoe	21	Unit	58.029.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	21	Unit	58.757.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	2	Unit	700.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	0	Unit	-	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kec.Tellu Limpoe	5	Unit	21.740.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	3	Unit	80.010.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
J U M L A H										4.973.390.150					4.764.516.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025, dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Tellu Limpoe;
4. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Kantor Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

**DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN WATANG PULU**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	1
Kata Pengantar	2
BAB I Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan I	9
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	9
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
BAB IV Penutup.....	16

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Pulu Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Pulu Tahun 2025 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Watang Pulu dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada RKPD Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja kantor Camat Watang Pulu masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Uluale, 10 Juli 2025

CAMAT WATANG PULU



H. Hidayatullah Abbas, S/STP, M. Si
NIP. 198104092000121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Namun, karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Watang Pulu mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Watang Pulu dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang

berlaku selama 4 (empat) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Watang Pulu. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kantor Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Watang Pulu tahun 2025 antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5) Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
- 6) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Watang Pulu Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Watang Pulu adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai

penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Watang Pulu untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan I

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB IV. : P E N U T U P

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun
2025

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV. : P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025 antara lain :

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari RKPD.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan realisasi sebanyak 0%.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM terdiri atas Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi sebanyak 25%.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN terdiri atas Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi sebanyak 0% dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan realisasi sebanyak 0%.
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA terdiri atas kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi sebanyak 0%.
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri atas Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebanyak 25%, Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realiasi sebanyak 0%, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebanyak 2%, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebanyak 0%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berikut adalah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, dalam Perubahan RENJA Kecamatan Watang Pulu:

a) Perubahan Kebijakan atau Regulasi

Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat atau kabupaten yang mempengaruhi pelaksanaan program.

b) Keterlambatan Penyaluran Dana

Keterlambatan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Transfer ke Daerah menyebabkan kegiatan tertunda.

c) Kapasitas SDM yang Terbatas

Kurangnya tenaga teknis atau kemampuan pelaksana berdampak pada kualitas dan kuantitas pelaksanaan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Kegagalan dalam mencapai target kinerja program/kegiatan pada tahun berjalan memiliki beberapa dampak atau implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap capaian sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, antara lain:

1. Terhambatnya Pencapaian Sasaran Strategis

Kegiatan-kegiatan yang gagal mencapai target akan berdampak pada tertundanya atau bahkan tidak tercapainya indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga memengaruhi capaian keseluruhan misi pembangunan daerah.

2. Penurunan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Ketidakcapaian target program akan menurunkan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SAKIP), karena berkurangnya efektivitas dan efisiensi program yang direncanakan.

3. Bertambahnya Beban di Tahun Berikutnya

Target yang tidak tercapai berpotensi menjadi beban backlog yang harus dikejar pada tahun-tahun berikutnya, sehingga mengganggu keseimbangan alokasi anggaran dan beban kerja.

4. Revisi atau Penyesuaian Strategi dalam Renstra

Apabila ketidakcapaian terjadi secara berulang atau signifikan, maka perlu dilakukan review dan revisi terhadap strategi Renstra, termasuk perubahan target indikator kinerja, penyesuaian arah kebijakan, atau penajaman program prioritas.

5. Potensi Penurunan Dukungan Anggaran di Masa Depan

Perangkat daerah yang dianggap tidak mampu merealisasikan target program secara konsisten dapat mengalami penyesuaian atau pengurangan alokasi anggaran pada siklus perencanaan berikutnya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi berbagai faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, diperlukan langkah-langkah strategis dalam aspek perencanaan dan penganggaran, antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan yang Lebih Akurat dan Responsif

- a) Melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif berbasis data dan kondisi riil lapangan.
- b) Memperkuat sinkronisasi antara perencanaan tahunan (RENJA) dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA).
- c) Menyusun target kinerja secara realistis, terukur, dan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang tersedia.

2. Penguatan Koordinasi Antar-Perangkat Daerah dan Stakeholder

- a) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten, desa, serta instansi vertikal untuk sinkronisasi program dan pemanfaatan sumber daya bersama.
- b) Membentuk forum konsultasi rutin antara kecamatan, desa, dan masyarakat dalam tahapan perencanaan.

3. Perbaikan Mekanisme Penganggaran

- a) Menetapkan alokasi anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk menjamin keterkaitan antara pendanaan dan output yang diharapkan.
- b) Mengutamakan kegiatan yang memiliki nilai strategis tinggi dan berdampak langsung kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan mekanisme revisi anggaran yang efisien, bila terjadi dinamika kebijakan atau keadaan darurat.

4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- a) Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada aparatur kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
- b) Menyediakan dukungan teknis perencanaan melalui kerja sama dengan Bappelitbangda, Inspektorat, dan mitra teknis lainnya.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Ketat dan Berkala

- a) Mengintensifkan pelaksanaan monitoring triwulanan dan evaluasi kinerja berkala untuk mendeteksi dini potensi hambatan.
- b) Menyusun mekanisme pelaporan kinerja yang responsif dan berbasis digital untuk mempercepat umpan balik dan perbaikan.

6. Pengelolaan Risiko dalam Perencanaan

- a) Menyusun manajemen risiko program/kegiatan sejak tahap perencanaan untuk memitigasi potensi kegagalan.
- b) Menyediakan cadangan waktu dan anggaran (buffer) pada kegiatan-kegiatan rentan risiko.

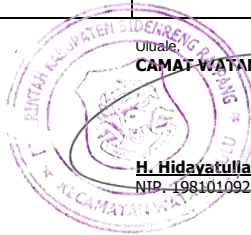
Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Watang Pulu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5 + 7	10 = (9/4*100)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100		100				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100		100				
7.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492	492	492	123	25	615	125
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100		100				
7.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	0	5	0	0	0	0
7.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	29	29	0	0	29	100
7.01.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	0	0	4	100
7.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	10	0	0	10	100
7.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340	340	340	0	0	340	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		100				
7.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	0	0	12	100
7.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	0	0	12	100
7.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	3	25	15	125

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		100				
7.01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	6	0	0	6	100
..01. 2.09. 06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	2	2	0	0	2	100
7.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	4	0	0	2	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100		100				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100		100				
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10	0	10	0	0	0	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	0	1	0	0	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		100				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	100		100				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	4	1	25	5	125
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100		100				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100		100				

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	0	5	0	0	0	0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100		100				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	5	5	0	0	5	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	0	0	5	100
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5	0	5	0	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100		100				
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100		100				
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	0	5	0	0	0	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	0	5	0	0	0	0
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	0	5	0	0	0	0



 Uluale
CAMAT WATANG PULU

H. Hidayatullah Abbas, S. STP, M. Si
 NIP. 198101092000121001

2.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Watang Pulu hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam beberapa indikator pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, pelayanan surat menyurat, dan fasilitasi musyawarah desa. Namun demikian, terdapat beberapa hal kritis yang menjadi perhatian serius, di antaranya adalah:

- a) Ketersediaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang belum optimal;
- b) Masih adanya ketimpangan kualitas layanan antar desa/kelurahan;
- c) Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi internal yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Permasalahan dan Hambatan dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Watang Pulu menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan antara lain:

- a) Kualitas SDM yang belum merata, khususnya dalam penguasaan digitalisasi pelayanan publik;
- b) Koordinasi antar lembaga dan desa yang belum sepenuhnya sinergis, terutama dalam penanganan isu-isu lintas sektor;
- c) Fasilitas dan infrastruktur penunjang pelayanan masyarakat yang masih terbatas di beberapa wilayah.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program Nasional/Internasional (NSPK, SPM, SDGs)

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Watang Pulu berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menekankan pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Secara spesifik:

- a) Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) di bidang pelayanan dasar masih belum optimal, terutama di layanan administrasi dasar dan fasilitasi kebutuhan sosial masyarakat;
- b) Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam SOP pelayanan;
- c) Keterlibatan dalam tujuan SDGs, seperti pengurangan kemiskinan (goal 1), pendidikan berkualitas (goal 4), dan institusi yang kuat (goal 16), masih membutuhkan penguatan perencanaan dan kolaborasi lintas sektor.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan:

- a) Percepatan transformasi digital di tengah keterbatasan infrastruktur dan SDM;
- b) Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik;
- c) Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat di tingkat kecamatan.

Peluang:

- a) Dukungan kebijakan nasional terhadap transformasi pelayanan berbasis elektronik;
- b) Peluang kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat;
- c) Potensi kolaborasi dengan desa-desa melalui forum musyawarah untuk perencanaan pelayanan yang lebih partisipatif dan responsif.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Watang Pulu maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Watang Pulu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Watang Pulu dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 85, peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah: Kecamatan Watang Pulu

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatab	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib									
	Kec. Watang Pulu				5,141,718,440				5,056,849,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Uluale	100%	1,719,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	1,375,200	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Uluale	100%	1,719,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	1,375,200	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Uluale	10 Urusan	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	10 Urusan	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Uluale	1 Urusan	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	1 Urusan	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Uluale	100%	450,885,740	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	380,808,960	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Uluale	100%	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Uluale	5 Laporan	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	5 Laporan	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Uluale	100%	450,026,240	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	380,121,360	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Uluale	5 Unit	308,166,740	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	5 Unit	267,833,760	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Uluale	5 Pokmas	141,000,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	5 Pokmas	111,600,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Uluale	5 Laporan	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	5 Laporan	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Uluale	100%	50,000,000	Pihak yang Ikut Serta dalam Kegiatan	Uluale	100%	50,000,000	Pihak yang Ikut Serta dalam Kegiatan
7.1.5.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Uluale	100%	50,000,000	Pihak yang Ikut Serta dalam Kegiatan	Uluale	100%	50,000,000	Pihak yang Ikut Serta dalam Kegiatan
7.1.5.201.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Uluale	4 Dokumen	50,000,000	Pihak yang Ikut Serta dalam Kegiatan	Uluale	4 Dokumen	50,000,000	Pihak yang Ikut Serta dalam Kegiatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Uluale	100%	2,578,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	2,062,800	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Uluale	100%	2,578,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	2,062,800	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Uluale	5 Dokumen	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	5 Dokumen	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Uluale	6 Dokumen	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	6 Dokumen	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu

7.01. 06.2. 01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Uluale	7 Dokumen	859,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	7 Dokumen	687,600	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Uluale	100%	4,636,535,200	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	4,622,602,040	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uluale	100%	3,639,646,440	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	3,650,070,700	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Uluale	41/12 Orang/Bulan	3,639,646,440	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	41/12 Orang/Bulan	3,650,070,700	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Uluale	100%	320,752,260	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	295,209,592	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Uluale	5 Paket	-	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	5 Paket	-	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Uluale	29 Paket	166,198,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	29 Paket	211,301,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Uluale	4 Paket	9,281,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	4 Paket	6,472,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Uluale	10 Paket	11,643,260	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	10 Paket	10,131,592	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Uluale	340 Laporan	133,630,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	340 Laporan	67,305,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Uluale	100%	434,717,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	405,661,748	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Uluale	12 Laporan	10,113,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	12 Laporan	10,890,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu

..01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Uluale	12 Laporan	60,000,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	12 Laporan	61,820,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Uluale	12 Laporan	364,604,500	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	12 Laporan	332,951,748	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Uluale	100%	241,419,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	100%	271,660,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Uluale	6 Unit	38,875,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	6 Unit	38,858,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Uluale	2 Unit	12,344,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	2 Unit	7,788,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Uluale	4 Unit	190,200,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu	Uluale	4 Unit	225,014,000	ASN Lingkup Kec. Watang Pulu

Uluale, 20 April 2025
CAMAT WATANG PULU
Hidayatullah Abbas, S/STP, M. Si
NIP. 198101092000121001

BAB IV

P E N U T U P

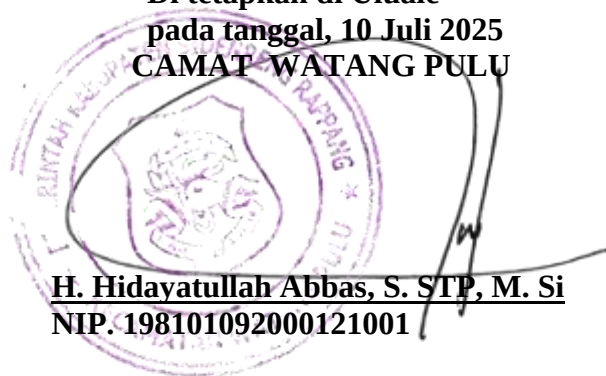
Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025, dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Pulu Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Pulu dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Watang Pulu sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Pulu merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Watang Pulu;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Pulu merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Watang Pulu;
4. Kantor Kecamatan Watang Pulu berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Pulu Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Pulu ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Di tetapkan di Uluale
pada tanggal, 10 Juli 2025
CAMAT WATANG PULU**



H. Hidayatullah Abbas, S. STP, M. Si
NIP. 198101092000121001

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)**

**KECAMATAN
MARITENGNGAE**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae masih memerlukan kesempurnaan dibmasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Pangkajene, 05 Agustus 2025
CAMAT MARITENGNGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH. M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19850419 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
II.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	6
II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	13
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
III.1. Program dan Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2024	8
Tabel III.1.Rencana kerja dan pendanaan daerah perubahan tahun anggaran 2024	15
Tabel III.2.Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	21
Tabel III.3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Namun, karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Maritengngae mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan

strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Maritengngae dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 4 (empat) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan

komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kantor Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Maritengngae dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

- Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
 21. Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12

- Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Maritengngae Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Maritengngae adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Maritengngae untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistimatika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

- BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan
- BAB IV. PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan kelurahan dengan sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 33,86%.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 47,49%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencakup kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri atas sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan telah mencapai tingkat realisasi target 28,50%.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel II.1**.

TABEL II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KANTOR KECAMATAN MARITENGNGAE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5+7	10=(9/4* 100)
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100			0%		25%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100			0%		25%

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	laporan	3	4	0	0%	3	25%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	laporan	3	4	0	0%	3	25%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum	100	%	100			0%		33%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	100			0%		33%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	dokumen	2	2	0	0%	2	33%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%				0%		33%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%				0%		33%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	15	laporan	5	5	0	0%	5	33%

						Kecamatan								
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%				0%		33%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	63	unit	21	21	0	0%	21	33%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	630	pokmas / ormas	210	210	0	0%	210	33%
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	21	laporan	7	7	0	0%	7	33%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100			0%		25%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100			0%		25%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokumen	3	4	0	0%	3	25%

7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	dokumen	3	4	0	0%	3	25%
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	dokumen	3	4	0	0%	3	25%
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%				7,10%		31,36%
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%				25%		40%
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2562	orang / bulan	812	854	213	25%	1.025	40%
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%				0%		33%
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24	paket	8	8	0	0%	8	33%
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	paket	8	8	0	0%	8	33%
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	laporan	8	8	0	0%	8	33%

X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	laporan	8	8	0	0%	8	33%
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%				0%		16,5%
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48	unit		16	0	0%	0	0%
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	48	Bulan	16	16	0	0%	16	33%
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%				8,67%		36,33%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	24	laporan	8	8	0	0%	8	33%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	laporan	8	8	1	13%	9	38%
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24	laporan	8	8	1	13%	9	38%
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%				2%		31%
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48	unit	16	16	1	6%	17	35%

X	XX	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48	unit	16	16	0	0%	16	33%
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	3	4	0	0%	3	25%

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Maritengngae maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah

di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Maritengngae dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 77 peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KECAMATAN MARITENGNGAE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025									
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
7					Unsur Kewilayahan											
7	01				Kecamatan					6.925.705.560					7.002.654.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Maritengngae	100	%	4.400.000	Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	2.000.000	Kecamatan Maritengngae
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritengngae	100	%	4.400.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	2.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	1.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	2.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	1.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Maritengngae	100	%	50.000.000	Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	50.000.000	Kecamatan Maritengngae
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	50.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	50.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	2	Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	2	Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae	100	%	511.332.200	Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	546.023.000	Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae	100	%	2.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	1.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	5	Laporan	2.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	5	Laporan	1.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae	100	%	509.132.200	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	545.023.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Maritengngae	21	Unit	378.532.200	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	21	Unit	490.923.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	210	Pokmas/Ormas	128.400.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	210	Pokmas/Ormas	53.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	7	Laporan	2.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	7	Laporan	1.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.600.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	3.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.600.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	3.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.200.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	1.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.200.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	1.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.200.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	1.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.353.373.360	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.401.631.000	ASN Kecamatan Maritengngae

X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	4.913.705.560	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	4.959.470.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	812	Bulan	4.913.705.560	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	812	Bulan	4.959.470.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	182.596.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	103.404.000	ASN Kecamatan Maritengngae
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	10.000.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	2.913.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	2.500.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	-	-	-	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	30.271.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	31.056.500	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	29.000.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	19.904.500	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	110.825.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	49.530.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	143.637.800	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	225.441.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	39.920.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	23.965.000	ASN Kecamatan Maritengngae

X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kecamatan Maritengngae	24	Unit	103.717.800	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	24	Unit	201.476.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	648.476.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	588.514.500	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	9.660.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	10.590.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	92.441.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	99.165.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	546.375.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	478.759.500	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	464.957.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	524.801.500	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	54.575.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	51.009.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	20.035.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	16.906.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	390.346.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	456.886.500	ASN Kecamatan Maritengngae

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025, dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Maritengngae;
4. Kantor Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.



Pangkajene, 05 Agustus 2025
CAMAT MARITENGNGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19850419 200312 1 006

2025



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN
WATANG SIDENRENG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.

Watang Sidenreng, Juli 2025
Camat Watang Sidenreng

H.ARNOL BARAMULI, ST.M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19730208 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	9
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I	13
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Rencana Kerja Program dan kegiatan	26
BAB V PENUTUP	37

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun

secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

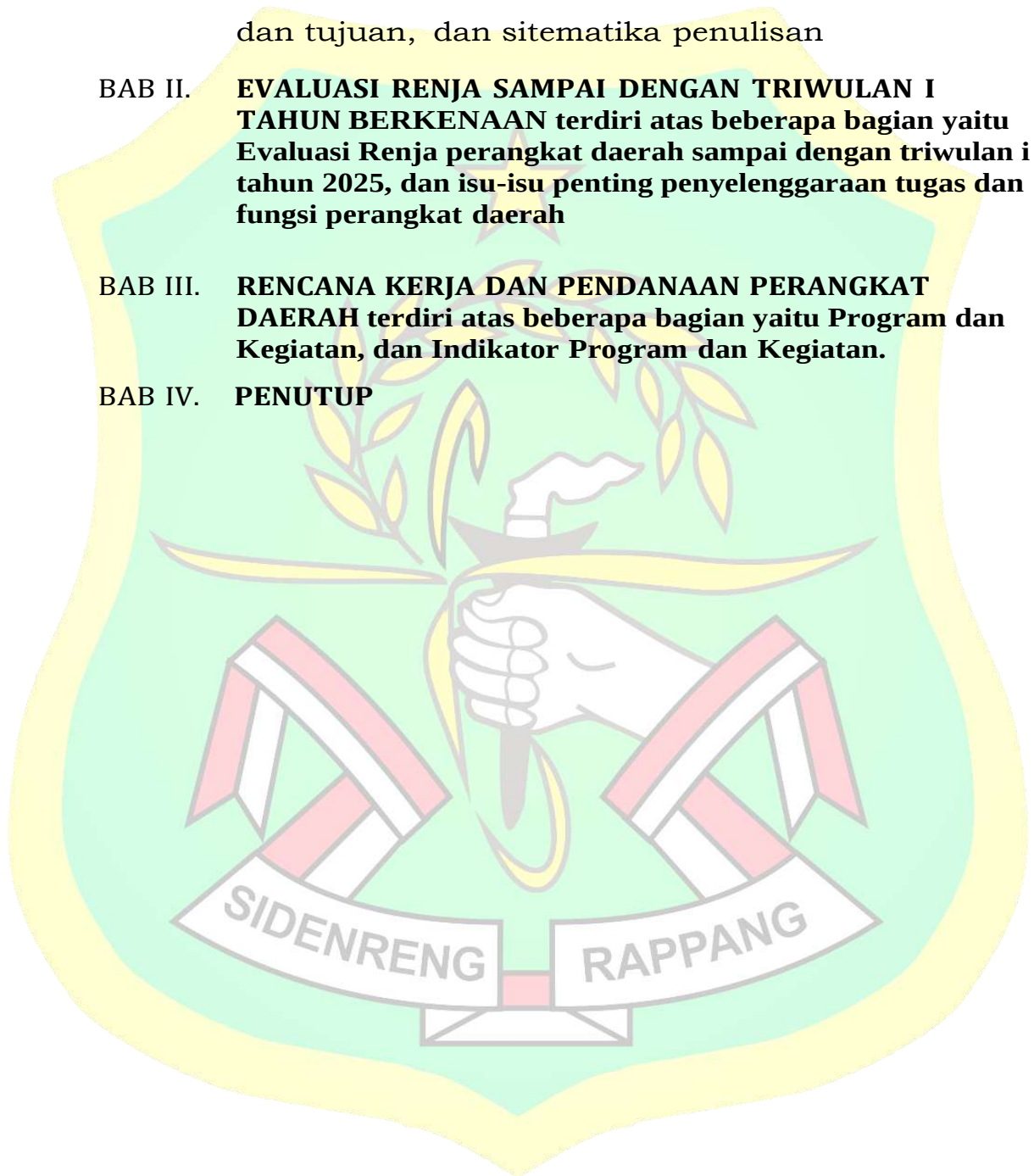
Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan i tahun 2025, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.
- BAB IV. **PENUTUP**



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

2.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.

2.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 20%.

2.1.3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan

pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

2.1.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 9,21%.

2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum terdiri atas Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi sebanyak 25%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;
3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Watang Sidenreng berhasil di observasi dan dihipunkan fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang

menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.
4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.1.a. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KANTOR KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISASI 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1		0	0	1	1
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1		0	0	1	1

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	8	Urs	0	0	0	0	0	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	8	Urs	0	0	0	0	0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	6.8		20	0	20	20
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0		0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan	0	0	0	0	0	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	13.5		25	0	25	25
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	2	Lembaga masyarakat	0	0	100	0	0	0

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit	4	0	0	0	4	67
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100	Org	50	0	0	0	50	50
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Laporan	0	0	0	0	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	-	0	0	0	25	0	25	25
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	0	0	0	25	0	25	25
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	0	0	0	25	0	25	25
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	0	0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	0	0

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	0	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	0	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	0	0
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	18	0	0	9,21	9,21	9,21
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	13	0	0	25	25	25
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bln	14	0	0	25	25	20
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	26	0	0	10	10	10

X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	10	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	2	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	97 Unit	20	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	0 Kali	0	0	0	25	25	25
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 Kali	150	0	0	25	25	25
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6			8	8	8
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	12 Unit	12	0	0	0	12	20

X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	41	0	0	10	10	10
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	700	lbr	100	0	0	0	30	30
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bln	12	0	0	0	12	33
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	36	Bln	12	0	0	0	12	33
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	4				4	4
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	11	Unit	11	0	0	0	11	60
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	15	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	2	0	0	0	2	30

II.1.b. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KANTOR KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TABEL PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2024/REALISASI 2025-2029	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2029	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025		
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10	
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%		12	1	8	12	12

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		12	1	8	12	12
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	12	Urs		12	1	8	1	8
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		5.1	2.9	56	5	5
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		4	3	75	4	4
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5	Laporan		4	3	75	3	60
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		6.3	2.8	100	6	6
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	4	Lembaga masyarakat		4	4	100	4	100
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit		3	0	0	0	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15	Lembaga masyarakat		15	5	33	5	33
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	3	Laporan		3	2	67	2	67

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		100.0	50.0	50	100	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%		4	2	50	4	4
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Laporan		4	2	50	2	50
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%		8	4	50	8	8
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%		8	4	50	8	8
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Dokumen		8	4	50	4	50
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Dokumen		8	4	50	4	50
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%		27	11	43	27	27
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%		43	29	43	43	43

X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	350	org/Bln		350	150	43	150	43
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		33	16	50	33	33
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln		12	6	50	6	30
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	8	Unit		8	4	50	4	50
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	48	Unit		48	24	50	24	50
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	48	Kali		48	24	50	24	50
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	Kali		48	24	50	24	50
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%		35	1	3	35	35
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	54	Unit		54	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	Unit		16	2	13	2	3
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		12	6	50	12	12
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	lbr		12	6	50	6	50
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bln		12	6	50	6	50

X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Bln		12	6	50	6	50
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		12	5	44	12	12
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	13	Unit		13	3	23	3	14
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	18	Unit		18	10	56	10	56
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5	Unit		5	3	60	3	36

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD KANTOR KECAMATAN WATANG
SIDENRENG

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024									
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHA N DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPO K PENERIM A MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHA N DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPO K PENERIM A MANFAAT		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7					Unsur Kewilayahan											
7	01				Kecamatan											
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Watang Sidenreng	100	%	700000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	10 0	%	300000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Watang Sidenreng	100	%	700000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	100	%	300000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	700000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	10	Laporan	300000	Kec. Watang Sidenreng
7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	33306200 0	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	100	%	33158700 0	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	500000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	200000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Watang Sidenreng	4	Laporan	500000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	2	Laporan	200000	Masyarakat at Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	332562000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	331387000	Masyarakat at Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.02	05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Watang Sidenreng	4	Lembaga masyarakat	7000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	4	Lembaga masyarakat	6125000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.02	08	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Watang Sidenreng	3	unit	303962000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	3	unit	303962000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng

7	01	03	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	21000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	36	Lembaga masyrak at	21000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	05	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	600000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	3	unit	300000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	0	0	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng

7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Watang Sidenreng	12	Dokumen	50000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Dokumen	50000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Sidenreng	100	%	1200000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Sidenreng	100	%	1200000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	300000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng

7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	300000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng
X					X											
X	xx				XX											
X	xx	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Watang Sidenreng	100	%	3105330000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	3031488000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	xx	01	2.02	0	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	2465892300	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	2465892400	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Watang Sidenreng	350	Org	2465892300	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	350	Org	2465892400	ASN Kec. Watang Sidenreng

X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	196598000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	132441000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Watang Sidenreng	12	Paket	11983000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Paket	11983000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Watang Sidenreng	8	Paket	13594000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	8	Paket	13383000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Watang Sidenreng	48	paket	10015500	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	48	paket	9057500	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Watang Sidenreng	48	bulan	46611000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	48	bulan	42306000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Watang Sidenreng	48	Laporan	114394500	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	48	Laporan	55711500	ASN Kec. Watang Sidenreng

X	XX	01	2.07	0	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	103390000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	86178000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Watang Sidenreng	54	unit	22924000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	54	unit	22924000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Watang Sidenreng	16	unit	80466000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	16	Unit	63254000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.08	0	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	264131700	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	254266600	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	2925000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	2925000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	47100000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	47100000	ASN Kec. Watang Sidenreng

						dan listrik										
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	214106700	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	204241600	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.09	0	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	75318000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	92530000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Watang Sidenreng	13	unit	37462000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	13	unit	37462000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Watang Sidenreng	18	unit	12478000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	18	unit	12478000	ASN Kec. Watang Sidenreng

X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Watang Sidenreng	5	unit	25378000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	5	unit	42590000	ASN Kec. Watang Sidenreng
JUMLAH										3,490,292,000					3,413,795,000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Setelah document ini ditetapkan akan dilakukan penyusunan RKA dan penyesuaian penginputan dalam SIPD sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan watang sidenreng sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Watang Sidenreng;

3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan watang sidenreng;
4. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Watang Widenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Watang Sidenreng, Juli 2025
CAMAT WATANG SIDENRENG

H.ARNOL BARAMULI, ST, M. Adm. KP

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19730208 200802 1 001

**PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN DUA PITUE**



**KECAMATAN DUA PITUE
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Dua Pitue memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanrutedong, 17 Juli 2025



ANDESAMMANG, SH. MH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19711030 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	8
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Program dan Kegiatan	23
BAB IV. PENUTUP	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Namun, karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kabupaten Sidenreng Rappang atau disingkat Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap terkenal dengan kombinasi potensi pertanian, energi terbarukan, peternakan, hingga pariwisata yang menjadikannya salah satu daerah strategis dalam pembangunan regional Sulawesi Selatan. Sidrap dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, bahkan termasuk salah satu daerah dengan produksi beras tertinggi di Indonesia. Sistem irigasi yang memadai dan lahan pertanian yang subur menjadikan daerah ini sebagai pusat pertanian yang sangat potensial. Selain padi, komoditas jagung, kacang hijau, dan hortikultura juga berkembang pesat. Di sektor peternakan, Sidrap merupakan sentra pengembangan sapi potong dan ayam petelur. Ribuan peternak mandiri dan perusahaan besar di bidang peternakan telah menjadikan Sidrap sebagai pemasok utama daging dan telur ke berbagai wilayah di Sulawesi. Di sektor energi terbarukan, Sidrap memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), yaitu pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia. PLTB tidak hanya menjadi sumber energi ramah lingkungan, tetapi juga simbol kemajuan dan investasi hijau di daerah. Walaupun belum sepenuhnya tergarap maksimal, sektor pariwisata Sidrap menyimpan keindahan alam dan budaya yang patut dikembangkan.

Wisata Danau Sidenreng, Puncak Bila, dan potensi agrowisata di dataran tinggi dapat menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, nilai-nilai budaya dari masyarakat Bugis yang kuat juga menjadikan Sidrap kaya akan warisan kearifan lokal. Kualitas sumber daya manusia terus berkembang dengan adanya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk menunjang sektor pertanian, peternakan, dan energi. Di bidang infrastruktur dan investasi, pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha melakukan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan konektivitas digital dan diharapkan semakin terbuka terhadap investasi. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi iklim investasi yang kondusif, terutama di bidang agribisnis, energi, dan industri pengolahan hasil pertanian. Jika dikembangkan secara terintegrasi, pertanian, energi terbarukan, peternakan, dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang dapat mendorong kemajuan Kabupaten Sidrap, memperkuat perekonomian Sulawesi Selatan, dan ikut menopang agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pangan, energi bersih, dan industri berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan

program kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan Swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Upaya strategis dan sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah menjadi pedoman dalam melihat arah pembangunan dengan mempertimbangkan pada potensi dan sumber daya suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses tahapan kegiatan persiapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan daerah/kawasan. Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah. Ketika rencana itu diimplementasikan, hal tersebut akan memberikan arah dan fokus untuk pembangunan yang akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta dapat mencapai tujuan dalam pembangunan daerah. Sebagaimana hal tersebut, rencana pembangunan menjadi dasar atau acuan pelaksanaan pembangunan di kemudian hari.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yaitu ***“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”***. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, proses Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dilakukan dengan mendasarkan pada:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 meliputi: (1) penyusunan rancangan Perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman

perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi POKIR DPRD.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I). Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I) berdasarkan data capaian tahun 2024 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,05 persen; Tingkat Kemiskinan 5,02 persen; Gini Rasio 0,319; PDRB Perkapita 59,31 Juta Rupiah; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,02 persen; Indeks Pembangunan Manusia 74,81; dan Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 3,04 persen (Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2025).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
9. Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2025;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.
- BAB IV. **PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2025, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0% target 100 %.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdiri atas kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah mencapai tingkat realisasi 0% dari target 100 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 0% dari target 100 % .

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0 % dari target 100 %.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 39 % dari target 100 %.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;

3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Dua Pitue berhasil di observasi dan dihipunkan fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana

penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel II.1a**.

**Tabel II.1a. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor
Kecamatan Dua Pitue s/d Triwulan II tahun 2025**

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISASI 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRAS OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRAS (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10
7					Unsur Wilayah								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1	6	0	1	1	50
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1	6	0	1	1	50
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Laporan	0	10	0	1	0	0

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Laporan	1	1	0	0	1	100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	2	Lembaga masyarakat	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit	0	6	0	0	0	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Laporan	0	2	0	0	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	12	12	0	0	12	12
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	12	12	0	0	12	12
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	12	12	0	0	12	100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	5	8	0	0	13	13

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	5	8	0	0	13	13
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Dokumren	8	8	0	0	8	100
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Dokumren	8	8	0	0	8	100
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Dokumren	0	8	0	0	0	0
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	105	44	6	0	105	103
X	XX	01	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	1	1	1	1	0	0
X	XX	01	2.02	03	XXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	1	1	1		0
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	392	399	80	0	392	98
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	399	org/ Bln	392	399	80	0	392	98
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	369	139	0	0	369	369

X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	12	12	0	0	12	100
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	Paket	7	17	0	0	7	41
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Paket	0	6	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	700	Paket	2.000	700	0	0	2.000	286
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1	Paket	12	1	0	0	12	1.200
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	180	100	0	0	180	180
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	-	Paket	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	-	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	146	73	29	0	146	138
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	194	Laporan	414	194	80	0	414	213
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	12	12	3	0	12	100
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Laporan	12	12	3	0	12	100
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	8	8	0	0	8	8

X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	10	unit	15	10	0	0	15	90
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	unit	8	10	0	0	8	80
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	unit	2	4	0	0	2	30

**TABEL II.1b. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISASI 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10
7					Unsur Wilayah								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1	6	0	0	6	6
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1	6	0	0	6	6
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Laporan	0	10	0	0	0	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Laporan	1	1	0	0	0	0

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	2,0	2,7	0,0	0,5	0,0	0,0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	4,0	3,3	0,0	1,0	0,0	0,0
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	2	Lembag a masyrak at	0	2	0	1	0	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit	0	6	0	1	0	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Laporan	12	2	0	1	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	12	12	0	0	0	0
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	12	12	0	0	0	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	8	8	0	0	0	0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	8	8	0	0	0	0

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Dokumen	8	8	0	0	0	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Dokumen	8	8	0	0	0	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Dokumen	8	8	0	0	0	0
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	105	44	0	5	0	5
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	1	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.02	03	XXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	392	399	198	50	198	50
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	399	org/Bln	392	399	198	50	198	50
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	369	139	1	19	1	19
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	12	12	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	Paket	7	17	2	12	2	12
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Paket	0	6	6	100	6	100

X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	700	Paket	2.000	700	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1	Paket	12	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	180	100	0	0	0	0
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	146	73	1	8	1	8
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	194	Laporan	414	194	0	0	0	0
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	12	12	0	0	0	0
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Laporan	12	12	3	25	3	25
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	8	8	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	15	10	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	8	10	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	2	4	0	0	0	0

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan

dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Pemerintah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Watang Pulu mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Kegiatan

Penyusunan program dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Dua Pitue dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan nilai 58,80 (CC), persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE
Lembar : 1 dari 3

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Dua Pitue	100 %	900.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	100 %	300.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua Pitue	100 %	900.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	100 %	300.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Dua Pitue	10 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	10 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Dua PituE

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	238.244.800	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	224.887.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	360.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	360.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	237.794.800	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	152 %	224.527.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Dua Pitue	3 Lembaga masyarakat	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	2 Lembaga masyarakat	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Dua Pitue	7 unit	237.344.800	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	7 Unit	224.377.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Dua Pitue	0 Org	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 Pokmas/ormas	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue

7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	100 %	1.350.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	870.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	100 %	1.350.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	870.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	360.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	360.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	150.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
X					X									
X	XX				XX									

X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dua Pitue	100 %	2.553.425.330	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	2.539.330.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	494.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	348.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	03	XXXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	494.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	348.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	0	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	2.067.848.130	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	2.087.354.200	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	399 Org	2.067.848.130	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	399 Org	2.087.354.200	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	172.832.700	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	126.280.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua Pitue	12 Paket	421.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 Paket	406.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	17 Paket	72.348.200	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	17 Paket	56.743.000	ASN Kec. Dua Pitue

X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Dua Pitue	6 Paket	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	6 Paket	9.421.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	700 paket	5.660.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	700 bln	3.007.500	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	12 kali	20.000.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 kali	18.750.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	100 Laporan	74.403.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 Laporan	37.952.500	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	270.092.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	234.293.800	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Dua Pitue	194 Laporan	4.744.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	194 Laporan	4.950.000	ASN Kec. Dua Pitue

X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Dua Pitue	36 Laporan	59.232.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	36 Laporan	60.192.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	206.116.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	169.151.800	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	42.158.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	91.054.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua Pitue	10 unit	34.492.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	10 unit	36.342.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua Pitue	10 unit	4.054.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	10 unit	4.054.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Dua Pitue	4 unit	3.612.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	4 unit	50.658.000	ASN Kec. Dua Pitue
J U M L A H									2.843.920.130				2.815.387.000	

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dua Pitue dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Dua Pitue.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Dua Pitue. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Dua Pitue ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan memperbaiki kejanggalan pada renja di awal tahun maka dilaksanakan Perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 2025 pada triwulan II tahun berjalan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komintmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KECAMATAN PITU RIASE
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Pitu Riase memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Pitu Riase masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Barukku, 14 Juli 2025

CAMAT PITU RIASE



A. MUKTI ALI, SE. Mdm. Pemb.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19741231 200112 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	8
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Program dan Kegiatan	23
BAB IV. PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Namun, karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kabupaten Sidenreng Rappang atau disingkat Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap terkenal dengan kombinasi potensi pertanian, energi terbarukan, peternakan, hingga pariwisata yang menjadikannya salah satu daerah strategis dalam pembangunan regional Sulawesi Selatan. Sidrap dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, bahkan termasuk salah satu daerah dengan produksi beras tertinggi di Indonesia. Sistem irigasi yang memadai dan lahan pertanian yang subur menjadikan daerah ini sebagai pusat pertanian yang sangat potensial. Selain padi, komoditas jagung, kacang hijau, dan hortikultura juga berkembang pesat. Di sektor peternakan, Sidrap merupakan sentra pengembangan sapi potong dan ayam petelur. Ribuan peternak mandiri dan perusahaan besar di bidang peternakan telah menjadikan Sidrap sebagai pemasok utama daging dan telur ke berbagai wilayah di Sulawesi. Di sektor energi terbarukan, Sidrap memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), yaitu pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia. PLTB tidak hanya menjadi sumber energi ramah lingkungan, tetapi juga simbol kemajuan dan investasi hijau di daerah. Walaupun belum sepenuhnya tergarap maksimal, sektor pariwisata Sidrap menyimpan keindahan alam dan budaya yang patut dikembangkan.

Wisata Danau Sidenreng, Puncak Bila, dan potensi agrowisata di dataran tinggi dapat menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, nilai-nilai budaya dari masyarakat Bugis yang kuat juga menjadikan Sidrap kaya akan warisan kearifan lokal. Kualitas sumber daya manusia terus berkembang dengan adanya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk menunjang sektor pertanian, peternakan, dan energi. Di bidang infrastruktur dan investasi, pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha melakukan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan konektivitas digital dan diharapkan semakin terbuka terhadap investasi. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi iklim investasi yang kondusif, terutama di bidang agribisnis, energi, dan industri pengolahan hasil pertanian. Jika dikembangkan secara terintegrasi, pertanian, energi terbarukan, peternakan, dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang dapat mendorong kemajuan Kabupaten Sidrap, memperkuat perekonomian Sulawesi Selatan, dan ikut menopang agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pangan, energi bersih, dan industri berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan

program kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan Swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Upaya strategis dan sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah menjadi pedoman dalam melihat arah pembangunan dengan mempertimbangkan pada potensi dan sumber daya suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses tahapan kegiatan persiapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan daerah/kawasan. Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah. Ketika rencana itu diimplementasikan, hal tersebut akan memberikan arah dan fokus untuk pembangunan yang akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta dapat mencapai tujuan dalam pembangunan daerah. Sebagaimana hal tersebut, rencana pembangunan menjadi dasar atau acuan pelaksanaan pembangunan di kemudian hari.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yaitu ***“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”***. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, proses Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dilakukan dengan mendasarkan pada:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 meliputi: (1) penyusunan rancangan Perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman

perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi POKIR DPRD.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I). Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I) berdasarkan data capaian tahun 2024 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,05 persen; Tingkat Kemiskinan 5,02 persen; Gini Rasio 0,319; PDRB Perkapita 59,31 Juta Rupiah; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,02 persen; Indeks Pembangunan Manusia 74,81; dan Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 3,04 persen (Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2025).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
9. Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2025;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.
- BAB IV. **PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2025, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0% target 100 %.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdiri atas kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah mencapai tingkat realisasi 0% dari target 100 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 0% dari target 100 % .

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0 % dari target 100 %.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan mebel, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 0 % dari target 100 %.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;
3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;

4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pitu Riase, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Pitu Riase berhasil di observasi dan dihipunkan fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan

secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel II.1a**.

**Tabel II.1a. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor
Kecamatan Pitu Riase s/d Triwulan II tahun 2025**

: KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISASI 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRAS OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRAS (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	12	6	0	0	18	18
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	12	6	0	0	18	18

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	12	Laporan	12	10	0	0	0	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	12	Laporan	12	1	0	0	0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	21,2	13,7	0,0	0,5	0,0	0,0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	12	2	0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	12	Laporan	12	2	0	0	0	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	30,3	25,3	0,0	1,0	0,0	0,0
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	1	Lembaga masyarakat	7	2	0	1	0	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	72	unit	72	72	0	1	0	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	12	Laporan	12	2	0	1	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	12	12	0	0	0	0
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	12	12	0	0	0	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100	%	10	11	0	0	0	0

					PEMERINTAHAN DESA	Desa								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	10	11	0	0	0	0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	11	Dokumen	11	11	0	0	0	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	11	Dokumen	11	11	0	0	0	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	11	Dokumen	8	11	0	0	0	0
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	12	44	0	5	0	5
X	XX	01	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	12	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.02	03	XXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	12	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	294	399	198	50	198	67
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	294	org/Bln	294	399	198	50	198	67

X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	28	139	1	19	1	19
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	12	12	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	Paket	7	17	2	12	2	12
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Paket	7	6	6	100	6	100
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	700	Paket	12	700	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1	Paket	0	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	130	100	0	0	0	0
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	-	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	12	73	1	8	1	8
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	194	Laporan	12	194	0	0	0	0
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	12	12	0	0	0	0
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Laporan	12	12	3	25	3	25

X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	8	8	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	15	10	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	8	10	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	2	4	0	0	0	0

**TABEL II.1b. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KANTOR KECAMATAN PITU RIASE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISA SI 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTR A OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTR A (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	12	6	0	1	12	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	12	6	0	1	12	100

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	10	0	1	12	100
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	1	0	0	12	100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	19,2	13,7	0,0	0,0	19,2	139,3
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	12	2	0	0	12	12
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	12 Laporan	12	2	0	0	12	100
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	26,3	25,3	0,0	0,0	26,3	266,7
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	1 Lembaga masyarakat	7	2	0	0	7	700
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	72 unit	72	72	0	0	72	100
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	12 Laporan	0	2	0	0	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	12	12	0	0	12	12
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	12	12	0	0	12	12
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Urusan	12	12	0	0	12	100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	11	11	0	0	22	22

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	11	11	0	0	22	22
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	11	Dokumen	11	11	0	0	11	100
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	11	Dokumen	11	11	0	0	11	100
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	11	Dokumen	11	11	0	0	11	100
X					X									
X	X				XX									
X	X	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	13	44	6	0	10	22
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	12	1	1	1	0	0
X	XX	01	2.02	03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	12	1	1	1		0
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	294	399	80	0	294	100
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	294	org/ Bln	294	399	80	0	294	100
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	28	139	0	0	28	28
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	12	12	0	0	12	100

X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Paket	7	17	0	0	7	41
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	7	6	0	0	7	117
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	700 Paket	12	700	0	0	12	2
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1 Paket	0	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	130	100	0	0	130	130
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4	0	0	0	4	4
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	- Paket	3	0	0	0	3	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	- Unit	4	0	0	0	4	0
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12	73	29	0	12	69
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	194 Laporan	12	194	80	0	12	6
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12	12	3	0	12	100
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Laporan	12	12	3	0	12	100
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8	8	0	0	8	8
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	10 unit	15	10	0	0	15	90

X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	unit	8	10	0	0	8	80
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	unit	2	4	0	0	2	30

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pitu Riase maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Pitu Riase sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan

dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Pemerintah Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Watang Pulu mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Kegiatan

Penyusunan program dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riase dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan nilai 58,80 (CC), persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025

OPD : KANTOR KECAMATAN PITU RIASE

Lembar : 1 dari 3

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pitu Riase	100 %	11.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	6.046.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pitu Riase	100 %	11.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	6.046.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Pitu Riase	12 Lapo ran	5.500.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24 Lapor an	3.023.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Pitu Riase	12 Lapo ran	5.500.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24 Lapo ran	3.023.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Pitu Riase	100 %	38.378.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	35.301.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	03	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Pitu Riase	100 %	5.500.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	3.023.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Pitu Riase	12 Lapo ran	5.500.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24 Lapo ran	3.023.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	03	2.02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Pitu Riase	100 %	32.878.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	32.278.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Pitu Riase	0	Lembaga masyarakat	2.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	0	Lembaga masyarakat	1.600.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Pitu Riase	7	unit	-	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	0	unit	-	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Pitu Riase	72	pokmas/or mas	29.878.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	72	pokmas/or mas	29.878.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	1.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24	Laporan	800.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	03	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Pitu Riase	100	%	50.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100	%	50.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pitu Riase	100	%	50.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100	%	50.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase

7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	50.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24	Laporan	50.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riase
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pitu Riase	100	%	16.500.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100	%	9.069.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pitu Riase	100	%	16.500.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100	%	9.069.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	5.500.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	8	Dokumen	3.023.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	5.500.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	8	Dokumen	3.023.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	5.500.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	8	Dokumen	3.023.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riase
X					X											
X	XX				XX											

X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pitu Riase	100 %	1.992.854.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	1.939.800.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.02	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pitu Riase	0 %	-	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	-	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.02	03	XXXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pitu Riase	0 Laporan	-	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	0 Laporan	-	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.02	0	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pitu Riase	100 %	1.560.160.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	1.552.660.700	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pitu Riase	588 Org	1.552.660.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	588 Org	1.552.660.700	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.06			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pitu Riase	100 %	89.809.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	57.065.500	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pitu Riase	24 Paket	3.630.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24 Paket	3.630.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riase	14 Paket	2.500.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	14 Paket	2.500.000	ASN Kec. Pitu Riase

X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Pitu Riase	0 Paket	-	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	0 Paket	-	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riase	0 unit	-	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	0 unit	-	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riase	24 paket	4.964.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24 paket	4.413.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Pitu Riase	0 kali	-	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	0 kali	-	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Pitu Riase	135 Laporan	78.715.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	115 Laporan	46.522.500	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pitu Riase	100 %	90.115.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	80.827.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Pitu Riase	3 unit	5.022.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	3 unit	5.022.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	Kec. Pitu Riase	5 unit	56.597.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	5 unit	47.309.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riase	100 %	175.752.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100 %	162.228.800	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Pitu Riase	24 Laporan	600.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24 Laporan	540.000	ASN Kec. Pitu Riase

X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Pitu Riase	24	Laporan	34.460.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	24	Laporan	24.460.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Pitu Riase	24	Laporan	140.692.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	137.228.800	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riase	100	%	77.018.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	100	%	87.018.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Pitu Riase	11	unit	24.018.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	11	unit	24.018.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Pitu Riase	3	unit	3.000.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	3	unit	3.000.000	ASN Kec. Pitu Riase
X	XX	01	2.09	10	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Pitu Riase	3	unit	50.000.000	ASN Kec. Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	3	unit	60.000.000	ASN Kec. Pitu Riase
J U M L A H										2.108.732.000					2.040.216.000	

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pitu Riase dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Pitu Riase.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Pitu Riase. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Pitu Riase ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan memperbaiki kejanggalan pada renja di awal tahun maka dilaksanakan Perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 2025 pada triwulan II tahun berjalan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riase ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.



RENCANA KERJA PERUBAHAN

Kecamatan Baranti Tahun 2025



Jl. Veteran No. 68
Kelurahan Duampanua
Kecamatan Baranti
Kab. Sidenreng Rappang
Prov. Sulawesi Selatan
Kode Pos 91652

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah berhasil menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi pedoman arah pembangunan Kecamatan Baranti dalam satu tahun ke depan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2027.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya, hal ini dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baranti, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan terukur.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, mungkin masih ditemui data, informasi, dan cara penyajian yang belum optimal. Oleh karena itu, dokumen Perubahan RENJA Kantor Camat Baranti masih memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk memperkaya kualitas dokumen ini.

Dengan adanya saran dan masukan tersebut, diharapkan dapat tercipta kebijakan, strategi, dan program yang lebih strategis dan efektif. Hal ini akan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Baranti, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh warga.

Baranti, April 2025

CAMAT BARANTI



Bustaman, S.Sos

NIP. 197205231992031005

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan khususnya sebagai umpan balik dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada periode rencana kerja awal.

Demikianlah dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Baranti ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas serta menjadi dasar yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kecamatan Baranti.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan lebih lanjut. Semoga dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, kita dapat mewujudkan tujuan bersama dalam membangun Kecamatan Baranti yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Baranti, 2025

CAMAT BARANTI



Bustaman, S.Sos

NIP. 197205231992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan.....	5
1.4. Sistematika penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	7
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	7
2.1. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.....	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB IV PENUTUP	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Baranti mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Baranti dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil dari rumusan – rumusan Rencana Strategis periode 2025-2029 karena kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun awal 2025 sehingga Rencana Strategis 2025-2029 yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Baranti.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja P) tahun 2025 ini dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Baranti. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran

1.2. Landasan hukum

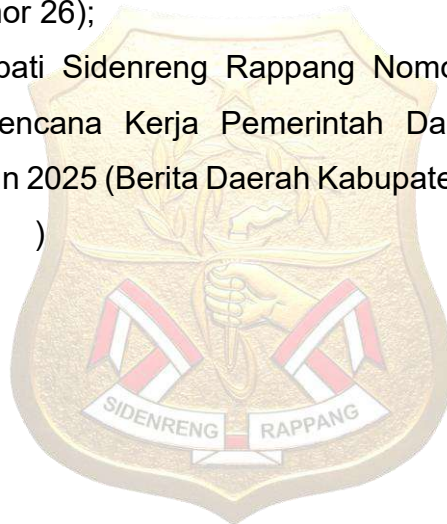
Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baranti tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, Nomor)



1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Baranti adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP-PD dan RAPBDP 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Baranti untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) mengikuti sistematika penyusunan sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Samapai Dengan Triwulan Tahun 2025

Menguraikan realisasi program dan kegiatan serta faktor – faktor pendukung yang mempengaruhi hasil realisasi program dan kegiatan tersebut.

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan sejauh mana Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagai tantangan dan juga peluang yang diformulasikan dalam bentuk rumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan.

3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan urusan,program dan kegiatan serta indicator dan pagu pendanaan dan hal-hal yang berkaitan baik yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan.

4. BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada triwulan I tahun 2025 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sampai pada triwulan I tahun 2025 Program ini telah berjalan dan terlaksana sebesar 50% sesuai dengan jumlah laporan yang ditargetkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri atas 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini mempunyai 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan dengan rincian :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - d. Evaluasi Kelurahan

Program telah terlaksana sebanyak 22, 45 % dari target masing – masing dari 5 (Lima) Sub Kegiatan tersebut di atas.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini yang terdiri atas kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencapai realisasi sebesar 8,33 % atas target Rencana Kerja tahun 2025.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang merupakan pendukung urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan I ini telah mencapai sebesar 26,66% dengan capaian tertinggi pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sebagai Gambaran realisasi rencana kerja tahun 2025 dijabarkan pada table berikut :



Tabel II.1.a

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra sampai dengan triwulan I tahun berjalan (Tahun 2025)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Kecamatan								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100	100			100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100	100			100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3 Urusan	3	3			3	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	3 Urusan	3	3			3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MAMBANGUN KELURAHAN	74 Persen		100			-	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen		100			-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	200 Orang		10			-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	73 Persen		100			-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan	250 Orang					-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	250 Orang		12			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	250 Orang		18			-	-
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	5 Kelurahan		9			-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen		100			-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen		100			-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	4 Desa		9			-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	4 Desa		9			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4 Desa		9			-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen		100			-	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100 Persen		100			-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja OPD yang disusun	60 Laporan		5			-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	100 Persen		100			-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan		143			-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen		100			-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan		4			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit		4			-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan		15			-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		18			-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu	1095 Dos		10			-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	313 Kali		180			-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen		100			-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis mebel yang diadakan	5 Unit		10			-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen		100			-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	303 Lembar		414			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		12			-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		12			-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen		100			-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit		15			-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		30			-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Gedung		1			-	-

Tabel II.1.b

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2025)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2025-2029 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00		100,00	26,66	0	26,66	26,66
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00		100,00	391,30	391,30	391,30	391,30
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.367		46	180	391	180,00	13,17
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		100	3,49	3,49	3,49	3,49
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	38		4	2	50	2,00	5,26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2025-2029 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	118		4	2	50	2,00	1,69
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45		14	2	14	2,00	4,44
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	54		17	1	6	1,00	1,85
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	104		10	1	10	1,00	0,96
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166		180	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah (%)	100,00		100,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18		10	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang pemerintahan daerah (%)	100,00		100,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2025-2029 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	363		414	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	5	42	5,00	13,89
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	4	33	4,00	11,11
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100,00		100,00	17,39	17,39	17,39	17,39
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33		15	5	33	5,00	15,15
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18		30	2	7	2,00	11,11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2025-2029 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12		1	1	100	1,00	8,33
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100,00		100,00	50,00	0	50,00	50,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9		2	1	50	1,00	11,11
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9		2	1	50	1,00	11,11
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100,00		100,00	22,45	0	22,45	22,45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2025-2029 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%)	100,00		100,00	0	0	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30		9	0	0	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%)	100,00		100,00	27,50	27,50	27,50	27,50
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21		7	6	86	6,00	28,57
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36		11	3	27	3,00	8,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2025-2029 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50		14	0	0	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	27		8	2	25	2,00	7,41
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100,00		100,00	8,33	0	8,33	8,33
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan dan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100,00		100,00	8,33	8,33	8,33	8,33
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27		8	2	25	2,00	7,41
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	27		8	0	0	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2025-2029 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27		8	0	0	0,00	0,00

2.2. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baranti, pada Renstra 2025-2029 telah dirumuskan 2 (Dua) Isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Prima

Kecamatan sebagai salah satu SKPD dipemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaran pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

2. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang

Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Pemerintah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Baranti mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial.

- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 - ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 - ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	KECAMATAN BARANTI				4.889.748.000				4.829.787.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	4.425.392.000			100	4.297.042.500	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)		100	500.000			100	400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	500.000			5	400.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		100	3.437.590.000			100	3.437.590.800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		143	3.437.590.000			143	3.437.590.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	327.581.500			100	278.184.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	8.006.000			4	8.006.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	137.893.000			4	167.548.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		15	13.215.000			15	17.248.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		18	13.899.500			18	11.199.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10	15.195.000			10	15.195.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180	139.373.000			180	58.988.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah (%)		100	44.118.000			100	30.857.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10	44.118.000			10	30.857.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang pemerintahan daerah (%)		100	464.225.500			100	453.914.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		414	9.210.000			414	9.345.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		12	71.103.000			12	71.382.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	383.912.500			12	373.187.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah (%)		100	147.377.000			100	92.906.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15	29.555.000			15	29.555.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30	18.986.000			30	18.306.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	98.836.000			1	45.045.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		100	4.000.000			100	3.190.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)		100	4.000.000			100	3.190.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		3	2.000.000			3	1.595.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3	2.000.000			3	1.595.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)		100	50.000.000			100	50.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)		100	50.000.000			100	50.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4	50.000.000			4	50.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)		100	408.856.000			100	478.354.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%)		100	262.500			100	210.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10	262.500			10	210.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%)		100	408.593.500			100	478.144.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	-			-	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12	338.318.500			12	407.974.500	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		18	70.012.500			18	69.960.000	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		9	262.500			9	210.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)		100	1.500.000			100	1.200.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025							
			Sebelum Perubahan				Setelah Pergeseran			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan dan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)		100	1.500.000			100	1.200.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		9	500.000			9	400.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		9	500.000			9	400.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		9	500.000			9	400.000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan khususnya sebagai umpan balik dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada periode rencana kerja awal.

Demikianlah dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Baranti ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas serta menjadi dasar yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kecamatan Baranti.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan lebih lanjut. Semoga dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, kita dapat mewujudkan tujuan bersama dalam membangun Kecamatan Baranti yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Baranti,

2025

CAMAT BARANTI



Bustaman, S.Sos

NIP. 197205231992031005



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2025

**KECAMATAN
PANCA RIJANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Perubahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2025 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Panca Rijang dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2018-2023

Rencana Kerja(RENJA) Perubahan Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari visi,misi,tujuan, saran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini mungkin ditemui data,inform ai dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Panca Rijang masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengnan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.Oleh Karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan,strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rappang, 2025
Plt.CAMAT PANCA RIJANG



Dr.H.SYAMSUDDIN.S.Ag.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19761008 200801 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum.....	3
I.3. Maksud dan Tujuan.....	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCA RIJANG TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Panca Rijang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	8
II.2. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panca Rijang	18
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
III.1 Program dan Kegiatan	21
BAB IV. PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panca Rijang.....	13
Tabel III.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panca Rijang	22

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Namun, karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Panca Rijang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Panca Rijang

dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 4 (empat) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Panca Rijang. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kantor Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Kecamatan Panca Rijang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panca Rijang untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB : Pendahuluan

I

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan I

II

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

III Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB : P E N U T U P

IV. Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

- 2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV. : P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.2 Evaluasi Renja Kecamatan Panca Rijang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025 antara lain :

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari RKPD.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan realisasi sebanyak 0%.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM terdiri atas Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi sebanyak 25%.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN terdiri atas Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi sebanyak 0% dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan realisasi sebanyak 0%.
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA terdiri atas kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi sebanyak 0%.
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri atas Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebanyak 25%, Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realiasi sebanyak 0%, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebanyak 0%, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebanyak 0%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berikut adalah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, dalam Perubahan RENJA Kecamatan Panca Rijang:

a) Perubahan Kebijakan atau Regulasi

Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat atau kabupaten yang mempengaruhi pelaksanaan program.

b) Keterlambatan Penyaluran Dana

Keterlambatan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Transfer ke Daerah menyebabkan kegiatan tertunda.

c) Kapasitas SDM yang Terbatas

Kurangnya tenaga teknis atau kemampuan pelaksana berdampak pada kualitas dan kuantitas pelaksanaan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Kegagalan dalam mencapai target kinerja program/kegiatan pada tahun berjalan memiliki beberapa dampak atau implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap capaian sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, antara lain:

1. Terhambatnya Pencapaian Sasaran Strategis

Kegiatan-kegiatan yang gagal mencapai target akan berdampak pada tertundanya atau bahkan tidak tercapainya indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga memengaruhi capaian keseluruhan misi pembangunan daerah.

2. Penurunan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Ketidakcapaian target program akan menurunkan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SAKIP), karena berkurangnya efektivitas dan efisiensi program yang direncanakan.

3. Bertambahnya Beban di Tahun Berikutnya

Target yang tidak tercapai berpotensi menjadi beban backlog yang harus dikejar pada tahun-tahun berikutnya, sehingga mengganggu keseimbangan alokasi anggaran dan beban kerja.

4. Revisi atau Penyesuaian Strategi dalam Renstra

Apabila ketidakcapaian terjadi secara berulang atau signifikan, maka perlu dilakukan review dan revisi terhadap strategi Renstra, termasuk perubahan target indikator kinerja, penyesuaian arah kebijakan, atau penajaman program prioritas.

5. Potensi Penurunan Dukungan Anggaran di Masa Depan

Perangkat daerah yang dianggap tidak mampu merealisasikan target program secara konsisten dapat mengalami penyesuaian atau pengurangan alokasi anggaran pada siklus perencanaan berikutnya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi berbagai faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, diperlukan langkah-langkah strategis dalam aspek perencanaan dan penganggaran, antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan yang Lebih Akurat dan Responsif

- Melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif berbasis data dan kondisi riil lapangan.
- Memperkuat sinkronisasi antara perencanaan tahunan (RENJA) dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA).
- Menyusun target kinerja secara realistis, terukur, dan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang tersedia.

2. Penguatan Koordinasi Antar-Perangkat Daerah dan Stakeholder

- Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten, desa, serta instansi vertikal untuk sinkronisasi program dan pemanfaatan sumber daya bersama.
- Membentuk forum konsultasi rutin antara kecamatan, desa, dan masyarakat dalam tahapan perencanaan.

3. Perbaikan Mekanisme Penganggaran

- Menetapkan alokasi anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk menjamin keterkaitan antara pendanaan dan output yang diharapkan.
- Mengutamakan kegiatan yang memiliki nilai strategis tinggi dan berdampak langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan mekanisme revisi anggaran yang efisien, bila terjadi dinamika kebijakan atau keadaan darurat.

4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada aparatur kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
- Menyediakan dukungan teknis perencanaan melalui kerja sama dengan Bappelitbangda, Inspektorat, dan mitra teknis lainnya.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Ketat dan Berkala

- Mengintensifkan pelaksanaan monitoring triwulanan dan evaluasi kinerja berkala untuk mendeteksi dini potensi hambatan.
- Menyusun mekanisme pelaporan kinerja yang responsif dan berbasis digital untuk mempercepat umpan balik dan perbaikan.

6. Pengelolaan Risiko dalam Perencanaan

- Menyusun manajemen risiko program/kegiatan sejak tahap perencanaan untuk memitigasi potensi kegagalan.

Menyediakan cadangan waktu dan anggaran (buffer) pada kegiatan-kegiatan rentan risiko

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Kecamatan Panca Rijang
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panca Rijang Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
-1					-2	-3	-4		-5	-6		-7	(8)=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERHA KABUPATEN/KOTA		100	%		0	%	0	0%	0	0%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%		500,00	%	500,00	0%	500,00	500%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	856	Orang/Bulan	250	546	Orang/Bulan	500	0%	750	88%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%		33,33	%	0,00	0%	0,00	0%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	30	12	Paket	6	0%	36	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30	Paket	15	10	Paket	6	0%	21	70%
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjung Tamu	36	Laporan	24	12	Laporan	6	0%	30	83%

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	180	Laporan	55	60	Laporan	54	0%	109	61%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%		0	%	0,00	0%	0,00	0%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	0	Unit	0	0	Unit	-	0%	0	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%		33,33	%	45,00	0%	45,00	45%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	180	Laporan	46	60	Laporan	45	0%	91	51%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180	Laporan	56	60	Laporan	60	0%	116	64%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180	Laporan	55	60	Laporan	58	0%	113	63%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%		33,33	%	31,82	0%	31,82	32%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54	Unit	15	18	Unit	15	0%	30	56%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	21	Unit	19	7	Unit	7	0%	26	124%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	4	4	Unit	3	0%	7	58%

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	%		0	%	0	0%	0	0%
7	01	02	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	%		0	%	0	0%	0	0%
7	01	02	02.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan Jenis Urusan Pemerintah an yang terkait Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	36	Laporan	0	12	Laporan	0	0%	0	0%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	%		0	%	0	0%	0	0%
7	01	03	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	%		33	%	0,00	0%	0,00	0%
7	01	03	02.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	Laporan	0	12	Laporan	0	0%	0	0%
7	01	03	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	%		33	%	0,00	0%	0,00	0%
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terlaksana	30	Unit	0	10	Unit	8	0%	8	27%
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	84	Pokmas/Or mas	0	28	Pokmas/Or mas	24	0%	24	29%
7	01	06			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	%		0	%	0	0%	0	0%

7	01	06	02.01		Penyeenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	%		33	%	0,00	0%	0,00	0%
7	01	06	02.01	03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36	Dokumen	0	12	Dokumen	12	0%	12	33%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	%		0	%	0	0%	0	0%
7	01	06	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	%		33	%	0,00	0%	0,00	0%
7	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	Dokumen	0	12	Dokumen	0	0%	0	0%
7	01	06	02.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	36	Dokumen	0	12	Dokumen	0	0%	0	0%
7	01	06	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	36	Dokumen	0	12	Dokumen	0	0%	0	0%

2.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Watang Pulu hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam beberapa indikator pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, pelayanan surat menyurat, dan fasilitasi musyawarah desa. Namun demikian, terdapat beberapa hal kritis yang menjadi perhatian serius, di antaranya adalah:

- a) Ketersediaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang belum optimal;
- b) Masih adanya ketimpangan kualitas layanan antar desa/kelurahan;
- c) Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi internal yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Permasalahan dan Hambatan dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Watang Pulu menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan antara lain:

- a) Kualitas SDM yang belum merata, khususnya dalam penguasaan digitalisasi pelayanan publik;
- b) Koordinasi antar lembaga dan desa yang belum sepenuhnya sinergis, terutama dalam penanganan isu-isu lintas sektor;
- c) Fasilitas dan infrastruktur penunjang pelayanan masyarakat yang masih terbatas di beberapa wilayah.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program Nasional/Internasional (NSPK, SPM, SDGs)

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Watang Pulu berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menekankan pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Secara spesifik:

- a) Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) di bidang pelayanan dasar masih belum optimal, terutama di layanan administrasi dasar dan fasilitasi kebutuhan sosial masyarakat;
- b) Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam SOP pelayanan;
- c) Keterlibatan dalam tujuan SDGs, seperti pengurangan kemiskinan (goal 1), pendidikan berkualitas (goal 4), dan institusi yang kuat (goal 16), masih membutuhkan penguatan perencanaan dan kolaborasi lintas sektor.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan:

- a) Percepatan transformasi digital di tengah keterbatasan infrastruktur dan SDM;
- b) Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik;
- c) Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat di tingkat kecamatan.

Peluang:

- a) Dukungan kebijakan nasional terhadap transformasi pelayanan berbasis elektronik;
- b) Peluang kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat;
- c) Potensi kolaborasi dengan desa-desa melalui forum musyawarah untuk perencanaan pelayanan yang lebih partisipatif dan responsif.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia

usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluangtersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c. Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Panca Rijang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakatyaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dantentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku.Dalam penyelenggaraann pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Panca Rijang dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 85, peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis

1. Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN PANCA RIJANG

KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025									
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	KELO MPOK PENER IMA MANF AAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KELOMP OK PENERI MA MANFAA T
1	2	3	4	5		6	7		7	9	10	
	KECAMATAN PANCA RIJANG					4.712.548.600					4.692.478.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Panca Rijang			200.000		Kec. Panca Rijang			200.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat		Kec. Panca Rijang	100	%	200.000		Kec. Panca Rijang	100	%	200.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan Jenis Urusan Pemerintah an yang terkait Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	Kec. Panca Rijang	12	Urusan	200.000		Kec. Panca Rijang	12	Urusan	200.000	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERHA KABUPATEN/KOTA		Kec. Panca Rijang			4.480.868.000					4.460.798.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Panca Rijang	100	%	3.534.350.600		Kec. Panca Rijang	100	%	3.534.350.600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	Kec. Panca Rijang	14,00	Bulan	3.534.350.600		Kec. Panca Rijang	14	Bulan	3.534.350.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Panca Rijang	100	%	119.374.500		Kec. Panca Rijang	100	%	74.580.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Panca Rijang	4	Unit	23.106.000		Kec. Panca Rijang	4	Unit	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	9.264.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	8.685.500	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjung Tamu	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	2.663.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	2.663.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Panca Rijang	278	Kali	84.341.500		Kec. Panca Rijang	278	Kali	63.231.500	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Panca Rijang	100	%	112.073.000		Kec. Panca Rijang	100	%	148.981.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	Kec. Panca Rijang	5	Unit	36.953.000		Kec. Panca Rijang	5	Unit	36.953.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kec. Panca Rijang	0	Unit	75.120.000		Kec. Panca Rijang	12	Unit	112.028.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Panca Rijang	100	%	411.210.800		Kec. Panca Rijang	100	%	398.149.300	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	Kec. Panca Rijang	300	Lembar	3.225.000		Kec. Panca Rijang	300	Lembar	3.225.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	85.785.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	85.907.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	322.200.800		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	309.016.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Panca Rijang	100	%	303.859.100		Kec. Panca Rijang	100	%	304.737.100	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	19	Unit	21.978.000		Kec. Panca Rijang	19	Unit	23.518.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Panca Rijang	19	Unit	5.122.000		Kec. Panca Rijang	19	Unit	4.460.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Panca Rijang	2	Unit	276.759.100		Kec. Panca Rijang	2	Unit	276.759.100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					180.880.600					180.880.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Panca Rijang			200.000		Kec. Panca Rijang			200.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	200.000		Kec. Panca Rijang	12	Kel	200.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kec. Panca Rijang			180.680.600		Kec. Panca Rijang			180.680.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terlaksana	Kec. Panca Rijang	4	Bulan	180.680.600		Kec. Panca Rijang	4	Bulan	180.680.000	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	0		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Panca Rijang			50.000.000					50.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Panca Rijang	100	%	50.000.000		Kec. Panca Rijang	100	%	50.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Panca Rijang	14,00	Bulan	50.000.000		Kec. Panca Rijang	14	Bulan	50.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Panca Rijang			600.000		Kec. Panca Rijang			600.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Panca Rijang			600.000		Kec. Panca Rijang			600.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	200.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	200.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	200.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	200.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	200.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	200.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025, dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Panca Rijang dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Panca Rijang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Rijang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Panca Rijang;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Rijang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Panca Rijang;
4. Kantor Kecamatan Panca Rijang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Panca Rijang, 2025
Plt.CAMAT PANCA RIJANG



Dr.H.SYAMSUDDIN,S.Ag.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19761008 200801 1 009



RENCANA KERJA KECAMATAN KULO TAHUN 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran RPJMDP yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kulo Tahun 2025 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Sesuai amanat undang undang, maka pemerintah kecamatan kulo menyusun rencana kerja perubahan tahun 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang di tujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dengan seluruh pemangku kepentingan berbasis E-planning.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Kulo Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
6. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan tahun 2025; dan
7. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kulo, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab. II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Riview terhadap awal OPD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab.III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat urusan/bidang, urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok

sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

Bab. IV Penutup

Pada bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Kulo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Renstra PD. OPD Kecamatan Kulo telah mengevaluasi Kinerja tahun 2025, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2025, Kecamatan Kulo telah mengevaluasi 5 program dan 9 kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan realisasi renstra OPD Kecamatan Kulo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah pada kegiatan berikut :

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sampai dengan Triwulan I
 - a.1 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
 - a.2 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - a.3 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- b. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b.1 Pengadaan Mebel
- c. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
 - c.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan Triwulan I
 - a.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - c.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.
 - d.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah tersendatnya pengelolaan keuangan yang diakibatkan oleh tidak lancarnya Penyediaan dana dari BKAD. Sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target karena tidak adanya dana.

Selain itu sub kegiatan yang telah mencapai target, karena penyediaan dana untuk kegiatan tersebut telah terakomodir sampai dengan triwulan II

Kegiatan yang telah melebihi target kinerja, tidak ada sub kegiatan yang melebihi target.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.

Target capaian program Renstra tahun 2018 – 2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan pada tabel II.1

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s.d Tahun berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= 7	10= (9/4*100)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100	100	-	-		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100 Persen	238	100	27	0.27	27	27
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	196 Org/Bulan	238	196	27	0.14	27	14
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum	100 Persen	100	100			-	-
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	40 Paket	40	40	0	-	-	-
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	5179 Paket	8342	5179	0			
7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	1,300 laporan	984	1,300	0	-	-	-
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	513 laporan	509	513	0	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	- Persen	-	100	-		-	
7.01.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	- 0	-	100	0	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	-	100	-		-	-

7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	140	Laporan	570	140	0	-	-	-
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12	laporan	24	12	0	-	-	-
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	24	12	0	-	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Persen		100	-		-	-
7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	9	3	0	-	-	-
7.01.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	38	24	0	-	-	-
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	-	0	0	-	-
7.01.02.2	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Persen	100	100	-	-	-	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100	Persen	100	100	-	-	-	-
7.01.02.2.04.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksnakan	1	laporan	1	1	0	-	-	-
7.01.02.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemetintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Laporan	1	1	0	-	-	-

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN	Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	100	100	-	-	-	-
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Tingkat Parsitipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan	100 Persen	100	100	-	-	-	-
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2	2	0	-	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100	100	0	-		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100	100	0	-		
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4	4	0	-		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 Persen	100	100	0	-		
7.01.06.2.01	Fasilitas rekomdasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 Persen	100	100	0	-	-	-
7.01.06.2.01.3	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	6 Dokumen	6	6	0	-	-	-
7.01.06.2.01.7	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah desa yang melakukan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang akan difasilitasi	6 Dokumen	6	6	0	-	-	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6 Dokumen	6	6	0	-	-	-

CAMAT KULO


M.FASRAH NUR, S.STP, M.Si
NIP. 19811209 200012 1 001

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kulo sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Kecamatan Kulo telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kulo
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kulo antara lain :
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - b. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kulo hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kulo sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kulo terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Kulo beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo diantaranya :
 - a. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran

- b. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu ;
- d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
- e. Pemohon KK, KTP dan AKTA KELAHIRAN di wilayah Kecamatan Kulo cukup banyak, sedangkan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di kecamatan belum ada sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tersebut harus ke Kantor panca Rijang;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 000.7.2/2/Bapperida tanggal 15 April 2025 terkait penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka kantor Kecamatan Kulo melakukan penyusunan perubahan Renja 2025 yang memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan ,dengan format Tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KANTOR KECAMATAN KULO

KODE							URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
									SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-							Unsur Kewilayahan									
7	1						Kecamatan			1,448,046,000					1,418,518,000	
7	1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kulo	100 %	1,384,556,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	1,357,080,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kulo	100 %	1,144,846,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	1,144,846,400	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	2		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kulo	196 Org/bulan	1,144,846,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	168 Org/bulan	1,144,846,400	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kulo	100 %	75,763,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	55,173,000	ASN Kec. Kulo

7	1	1	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kulo	40 Paket	3,050,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	40 Paket	3,050,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Kulo	5179 Paket	8,190,500	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	11000 Paket	6,573,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Kulo	1300 Laporan	26,710,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	1300 Laporan	26,710,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Kulo	513 Laporan	37,812,500	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	513 Laporan	18,840,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	CakupanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kulo	100 %	33,165,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	33,165,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Kulo	100 Unit	33,165,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 Unit	33,165,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kulo	100 %	95,432,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	88,545,600	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Kulo	140Laporan	1,125,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	140Laporan	1,125,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kulo	12 Laporan	18,420,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	12 Laporan	18,420,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Kulo	12 Laporan	75,887,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	12 Laporan	69,000,600	ASN Kec. Kulo

7	1	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kulo	100 %	35,350,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	35,350,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Kulo	3 Unit	23,026,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	3 Unit	23,026,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Kulo	11 Unit	5,124,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	11 Unit	5,124,000	ASN Kec. Kulo
7	1	1	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kulo	2 Unit	7,200,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	2 Unit	7,200,000	ASN Kec. Kulo
7	1	2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kulo	100 %	1,710,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	1,596,000	Masyarakat Kec. Kulo
7	1	2	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kulo	100 %	1,710,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	1,596,000	Masyarakat Kec. Kulo
7	1	2	2	04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Kulo	1 Laporan	570,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	1 Laporan	456,000	Masyarakat Kec. Kulo
7	1	2	2	04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan	Kec. Kulo	1 Laporan	1,140,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	1 Laporan	1,140,000	Masyarakat Kec. Kulo

						Dilimpahkan	lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan								
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Kulo	100 %	7,410,000	Masyaraka t Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	6,118,000	Masyaraka t Kec. Kulo
7	1	3	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Kulo	100 %	7,410,000	Masyaraka t Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	6,118,000	Masyaraka t Kec. Kulo
7	1	3	2	01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Kulo	2 Laporan	7,410,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	2 Laporan	6,118,000	Masyaraka t Kec. Kulo
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kulo	100 %	50,000,000	Masyaraka t Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	50,000,000	Masyaraka t Kec. Kulo
7	1	5	2	01	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kulo	100 %	50,000,000	Masyaraka t Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	50,000,000	Masyaraka t Kec. Kulo
7	1	5	2	01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kulo	4 Dokumen	50,000,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	4 Dokumen	50,000,000	Masyaraka t Kec. Kulo
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kulo	100 %	4,370,000	Aparatur Desa Kec. Kulo	Kec. Kulo	100 %	3,724,000	Aparatur Desa Kec. Kulo
7	1	6	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan	Kec. Kulo	100 %	4,370,000	Aparatur Desa Kec.	Kec. Kulo	100 %	3,724,000	Aparatur Desa Kec.

						Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Kulo				Kulo
7	1	6	2	01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,330,000	Aparatur Desa Kec. Kulo	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,064,000	Aparatur Desa Kec. Kulo
7	1	6	2	01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,900,000	Aparatur Desa Kec. Kulo	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,520,000	Aparatur Desa Kec. Kulo
7	1	6	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,140,000	Aparatur Desa Kec. Kulo	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,140,000	Aparatur Desa Kec. Kulo

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Kulo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Kulo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

1. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Kulo dan mengacu pada DPPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

2. Rencana Tindak Lanjut.

Kulo, 14 Juli 2025

CAMAT KULO

M. FASRAH NUR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19811209 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kulo Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

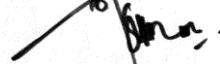
Perubahan RENJA ini adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan kami lakukan pada Tahun 2025 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.

Kulo, 14 Juli 2025

Camat Kulo



M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si.

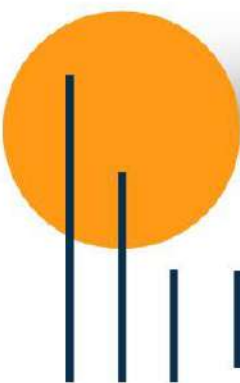
Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19811209 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Kulo sampai dengan Triwulan I.....	6
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Rencana Kerja	14
BAB IV PENUTUP	20

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,



M. ARSUL, S.P., Msi.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19731123 199302 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025.....	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
BAB IV PENUTUP	24

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	(RENSTRA 2024-2026) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwuln I Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang.....	10
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis. perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026.

Renja Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026

Rencana kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Menguraikan Target kinerja yang hendak dicapai selama setahun tersebut. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran strategik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian.

Telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 yang kemudian akan dijabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2025 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- t) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- u) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);

- w) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- x) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
- y) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD Tahun 2025 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RAPBD Tahun 2025,
- b) Menjadi penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini terdiri atas

- ❖ Latar Belakang
Mengemukakan tentang Latar Belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- ❖ Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- ❖ Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- ❖ Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri atas:

- ❖ Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Samapi dengan Triwulan I Tahun 2025
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
 - 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- ❖ Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:
 - 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

RENCANA KERJA DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH, terdiri atas:

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2024 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2025.

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

- (1) Realisasi Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- (2) Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
 - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (3) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/ Keluaran yang direncanakan
 - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- (4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - ✓ Anggaran Kurang Memadai
- (5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - ✓ Pemborosan Anggaran
- (6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - ✓ Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya
 - ✓ Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran)

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja renja pada tahun 2025 dikarenakan realisasi kinerja pada beberapa kegiatan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan pada tahun berjalan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan target-target yang tidak tercapai merupakan program kegiatan rutin.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan besaran kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024+2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = (9/4*100)
8					URUSAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100				
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	%		100				
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	1	1	0	0	1	33,33
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	2	2	0	0	2	33,33

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	1	1	0	0	1	33,33
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	6	Dokumen	2	2	0	0	2	33,33
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	4	4	0	0	4	33,33
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%		100				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756	Orang/Bulan	185	252	42	16,67	227	30,02
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	0	1	0	0	0	0
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	4	4	0	0	4	33,33
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		100				
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	70	Paket	15	25	0	0	15	21,42
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373	Laporan	61	125	2	1,6	63	16,89

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100				
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Surat Menyurat	390	Laporan	110	130	0	0	110	28,20
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	12	12	3	25	15	41,67
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	12	12	0	0	12	33,33
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%		100				
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33	Unit	11	11	0	0	11	33,33
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit	7	11	0	0	7	21,21
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	Unit	11	15	0	0	11	24,44
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2	Unit	0	1	0	0	0	0
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	90	%		50		0	0	0
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	90	%		50		0	0	0

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180	Orang	50	50	0	27	50	27,78
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	240	Orang	70	70	0	16	70	29,17
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik	100	%	100	90				0
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pwmilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula	100	%	100	90				0
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	35	Dokumen	13	11	0	0	13	37,14285714
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI PENGAWASAN	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan	%	80	0	80				
					KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	%	80	0	80				

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	275	Orang	0	130	0	0	0	0
					Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	24	Laporan	0	12	0	0	0	0
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90	%	100	85		0	0	0
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90	%	100	85		0	0	0
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beraagama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1890	Orang	250	630	0	0	250	13,23
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beraagama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9	Laporan	3	3	0	0	3	33,33

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENAGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100	%	100	100		0	0	0
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial	100	%	100	100		0	0	0
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	720	Orang	240	240	0	0	240	33,33
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	36	Dokumen	12	12	1	8,33	13	36,11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu-isu penting yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

A. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marginal,
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang ormas,
4. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap ormas.

B. Bidang Kesatuan Bangsa

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
3. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik
4. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Dengan menganalisis target capaian di tahun triwulan I tahun 2025 maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan rencana kegiatan di tahun anggaran 2025 agar target realisasi kinerja program/kegiatan dapat tercapai.

Perubahan/Penambahan, Pergeseran Program dan Kegiatan renja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4.871.029.000				4.662.940.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2.226.029.000				2.139.957.200	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100 %	12.120.000		Kab. Sidrap	100 %	9.696.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dok	2.000.000		Kab. Sidrap	1 Dok	1.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidrap	2 Dok	3.000.000		Kab. Sidrap	2 Dok	2.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dok	2.000.000		Kab. Sidrap	1 Dok	1.600.000	

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANCSA DAN POLITIK

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	Kab. Sidrap	2 Dok	3.000.000		Kab. Sidrap	2 Dok	2.400.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidrap	2 Lap	2.120.000		Kab. Sidrap	2 Lap	1.696.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100 %	1.700.922.000		Kab. Sidrap	100 %	1.698.934.500	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	252 Orang/Bl	1.690.979.000		Kab. Sidrap	252 Orang/Bl	1.690.979.700	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidrap	1 Lap	800.000		Kab. Sidrap	1 Lap	640.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sidrap	4 Lap	9.143.500		Kab. Sidrap	4 Lap	7.314.800	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100 %	169.212.500		Kab. Sidrap	100 %	87.686.500	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kab. Sidrap	20 Paket	5.000.000		Kab. Sidrap	20 Paket	5.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	122 Lap	164.212.500		Kab. Sidrap	122 Lap	82.686.500	
					Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Sidrap		59.269.000		Kab. Sidrap		59.269.000	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Kab. Sidrap	8 Paket	7.370.000		Kab. Sidrap	8 Paket	7.370.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Sidrap	5 Paket	51.899.000		Kab. Sidrap	5 Paket	51.899.000	

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANQSA DAN POLITIK

						Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	100 %	169.489.000		Kab. Sidrap	100 %	169.355.200	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidrap	120 Lap	4.290.000		Kab. Sidrap	120 Lap	4.290.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidrap	12 Lap	30.000.000		Kab. Sidrap	12 Lap	30.000.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12 Lap	135.199.000		Kab. Sidrap	12 Lap	135.065.200	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Sidrap	100 %	115.016.000		Kab. Sidrap	100 %	115.016.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidrap	11 Unit	73.200.000		Kab. Sidrap	11 Unit	73.200.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidrap	11 Unit	6.264.000		Kab. Sidrap	11 Unit	6.264.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidrap	15 Unit	15.552.000		Kab. Sidrap	15 Unit	15.552.000	
						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kab. Sidrap	1 Unit	20.000.000		Kab. Sidrap	1 Unit	20.000.000	
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Kab. Sidrap	50 Persen	595.000.000		Kab. Sidrap	50 Persen	519.996.200	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kab. Sidrap	50 Persen	595.000.000		Kab. Sidrap	50 Persen	519.996.200	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidrap	50 Orang	30.000.000		Kab. Sidrap	50 Orang	21.403.700	

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANCSA DAN POLITIK

						Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Sidrap	70 Orang	565.000.000		Kab. Sidrap	200 Orang	498.592.500	
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik	Kab. Sidrap	90 Persen	913.700.000		Kab. Sidrap	90 Persen	913.700.000	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pwmilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula	Kab. Sidrap	90 Persen	913.700.000		Kab. Sidrap	90 Persen	913.700.000	
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sidrap	11 Dok	913.700.000		Kab. Sidrap	11 Dok	913.700.000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI PENGAWASAN	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan	Kab. Sidrap	80 Persen	211.300.000		Kab. Sidrap	80 Persen	190.878.600	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	Kab. Sidrap		211.300.000		Kab. Sidrap		190.878.600	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Kab. Sidrap	130 Orang	175.000.000		Kab. Sidrap	130 Orang	175.000.000	

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANQSA DAN POLITIK

						Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Kab. Sidrap	12 Laporan	36.300.000		Kab. Sidrap	12 Laporan	15.878.600	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kab. Sidrap	90 Persen	185.000.000		Kab. Sidrap	90 Persen	165.424.000	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kab. Sidrap	90 Persen	185.000.000		Kab. Sidrap	90 Persen	165.424.000	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fassilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fassilitasi Kerukunan Umat Beraagama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidrap	630 Orang	150.000.000		Kab. Sidrap	250 Orang	140.227.700	
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fassilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fassilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidrap	3 Laporan	35.000.000		Kab. Sidrap	3 Lap	25.196.300	
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENAGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	740.000.000		Kab. Sidrap	100 Persen	732.984.000	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial	Kab. Sidrap	100 Persen	740.000.000		Kab. Sidrap	100 Persen	732.984.000	

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanana Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan	Kab. Sidrap	240 Orang	90.000.000		Kab. Sidrap	240 Orang	86.584.000	
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	12 Laporan	650.000.000		Kab. Sidrap	12 Lap	646.400.000	

BAB IV **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2024 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis".

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 yaitu: meningkatkan peran konflik dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025.

Semoga penyusunan renja Perubahan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,



J.M. ARSULA S.I.P., M.Si.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19731123 199302 1 002